

ISBN: 978-623-90353-2-7

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

DAN

CALL PAPER

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH

Ciamis, 17 Januari 2020



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK
&
CALL FOR PAPER

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH

Auditorium Universitas Galuh

Ciamis, 17 Januari 2020

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS GALUH
2020

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK
DAN CALL FOR PAPER

“KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH”

*Auditorium Universitas Galuh
Ciamis, 17 Januari 2020*

Organizing Committee :

Ketua Penyelenggara	: Wawan Risnawan, SE., S.IP.,M.Si.
Sekretaris	: Ratna Komalasari.
Bendahara	: Ahmad Juliarso., M.Si.
IT dan Website	: Rifki Agung, S.Kom.,M.Si. : Pelik Supratman

Publikasi	: Etih Henriyani.,M.Si : Eet Saeful Hidayat, S.IP., M.Si.
-----------	--

Divisi Kesekretariatan	: Lina Marliani, S.Sos.,M.Si. Sahadi, S.IP.,M.M. Imam Maulana Yusuf, S.IP.,M.Si. Ari Kusumah Wardani, M.PA.
------------------------	--

Steering Committee :

H. Aan Anwar Sihabudin, S.IP.,M.Si.
Endah Vestikowati,S.IP.,M.Si.
R. Didi Djadjuli, S.E.,M.M.,M.Si.
Agus Nurulsyam, S.IP.,M.Si.
Dr. H.Tatang Parjaman, M.Si.

Reviewer :

Prof. Jusman Iskandar, M.S.
Dr. H. Yat Rospia Brata
Dr. H. Agus Dedi, M.Si.
Dr. Erlan Suwarlan

Editor :

R.Rindu Garvera, M.Si.
Regi Refian Garis, M.Si.
Irfan Nursetiawan, M.Pd.,M.Si.
Dini Alamanda, M.Si.
Gerry Katon Mahendra, M.Si.

Penerbit:

Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh
Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis
Telp. 0265 776790

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Galuh dapat menerbitkan prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema : “Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Daerah”. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang taat atas ajarannya dan akan mendapatkan sapaat darinya di yaumul akhir nanti.

Seiring dengan berkembangnya situasi dan kondisi globalisasi Ekonomi, Sosial dan Budaya maka Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dengan keadaan tersebut. Upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas nasional terus dikembangkan terutama dalam menciptakan stabilitas Anggaran Nasional maupun anggaran Daerah. Berdasarkan data di Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia dan salah satu alasannya karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri. Selain sumber daya manusia (SDM), sumber daya yang dimaksud antara lain luas wilayah serta keragaman yang ada di tanah air. Sumber daya inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Terlebih saat ini, di Indonesia tersedia beragam destinasi eksotis dan memukau. Tidak hanya wisata alam yang kaya, wisata budaya serta sejarah di Indonesia juga tidak kalah menarik. Ini karena Indonesia memiliki ratusan suku yang tersebar dari Aceh (Sabang) hingga Papua (Merauke).

Kondisi seperti ini tentunya harus ditopang dengan responsivitas Pemerintah Daerah melalui kebijakannya, yang melibatkan Sektor Swasta dan Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar pariwisata yang kompetitif. Kondisi ini merupakan peluang bagi daerah dalam upaya menggali potensi PAD daerah sebagai pemilik wilayah dari destinasi tersebut. Melalui penerapan *Good Governance* diharapkan tercipta kebijakan pengembangan pariwisata yang responsif, inovatif dan kompetitif sehingga harapan pencapaian target daerah dan nasional dalam sektor pariwisata dapat tercapai dengan maksimal sekaligus mendorong perekonomian nasional mulai dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka kita sebagai kaum intelektual dan akademisi hendaknya juga memberikan dorongan dan dukungan kepada semua pihak melalui konsep dan pemikirannya agar tercipta Pariwisata Indonesia yang Produktif dan Inovatif. Dengan adanya kegiatan *Seminar Nasional dan Call For Papers* ini, kami harapkan dapat menjadikan salah satu upaya aktif perguruan tinggi untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi perkembangan Pariwisata ASEAN serta Globalisasi Pariwisata Dunia di Era 4.0. Selain dapat meningkatkan *awareness* tentang Pariwisata ASEAN serta Globalisasi Pariwisata Dunia di Era 4.0 di lingkungan perguruan tinggi, kegiatan Seminar ini semoga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan di Indonesia baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Ciamis, 24 Januari 2020
Dekan FISIP Univesitas Galuh,

H.Aan Anwar Sihabudin, S.H.,S.IP.,M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halam Judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi	iii
ANALISIS PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PANGANDARAN Asep Nurdin Rosihan Anwar ¹ , R.Rindu Garvera ² , Regi Refian Garis ³	1-5
STRATEGI PEMASARAN MUSEUM DENGAN PENDEKATAN <i>VALUE INNOVATION</i>: STUDI KASUS PADA MUSEUM ANGKUT KOTA BATU Andik Pradana	6-12
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN DAYA TARIK WISATA KHUSUS (KDTWK) AGROWISATA DAN EKOWISATA DI KABUPATEN CIAMIS Asep Nurwanda ¹ , Elis Badriah ²	13-20
ANALISIS DAYA DUKUNG WISATA ALAM GUNUNG PANCAR, DESA KARANG TENGAH, KECAMATAN BABAKAN MADANG, KABUPATEN BOGOR Kemala Saras Rianty ¹ , Oot Hotimah ² , Aris Munandar ²	21-31
ANALISIS PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS BERBASIS WEBSITE TERINTEGRASI DI TENGAH PUSARAN PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL <i>MOBILE FRIENDLY</i> Ari Kusumah Wardani ¹ , Irfan Nursetiawan ²	32-36
STRATEGI PEMKOT BANDUNG DALAM MENINGKATKAN ODTW DAGO POJOK MENJADI KAWASAN EKOWISATA ALAM Muchsin al-Fikri ¹ , Witri Cahyati ² , Sandra Irawati ³	37-47
DAYA TARIK WISATA ZIARAH DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS PADA MAKAM GODOG) Pasciana Rostiena ¹ , Lia Juliasih ²	48-58
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN GARUT Erna Rustiana ¹ , Hedi Cupiadi ²	59-70
PERAN DINAS PARIWISATA SEBAGAI THE OPERATING CORE DALAM KOMUNIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN CIAMIS Tatang Sudrajat ¹ , Pupi Indriati Zailani ² , Yuyun Yuniarsih ³	71-79
PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN Tatang Sudrajat ¹ , Hersesutyati ² , Nurhaeni Sikki ³	80-91
MOTIVASI KOMUNITAS PENGGERAK PARIWISATA (KOMPEPAR) DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KABUPATEN GARUT Ema Rismayanti ¹ , Mila Karmila ²	97-100

PENGEMBANGAN POTENSI WISATA HUTAN PINUS OLEH KARANG TARUNA DI DESA DARMACAANG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS	
Neti Sunarti ¹ , Eet Saeful Hidayat ² , Regi Refian Garis ³	101-109
FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA DAYA TARIK WISATAWAN GUNUNG GUNTUR DI KABUPATEN GARUT	
Ikeu Kania ¹ Muchtar ²	110-117
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM PANTAI SANTOLO KABUPATEN GARUT	
Mila Karmila ¹ , Ema Rismayanti ²	118-126
ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN OBJEKWISATA CANDI CANGKUANG DI KABUPATEN GARUT	
Nurbudiwati ¹ , Rd. Ade Purnawan ²	127-137
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUBANG	
Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP ¹ , Diah Andani, S.AN., M.AP ²	138-143
POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SITU LENGKONG PANJALU JAWA BARAT BERBASIS MASYARAKAT (<i>COMMUNITY BASED TOURISM</i>)	
Ai Siti Munawaroh ¹ , Ahmad Juliarso ²	144-150
PENGGUNAAN AKUN INSTAGRAM @JAJANANGARUT SEBAGAI MEDIA REFERENSI INFORMASI WISATA KULINER KABUPATEN GARUT	
Mutiana Nurmalasari ¹ , Ikeu Kania ²	151-157
PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ALAM DATARAN KONDANG DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS)	
Ii Sujai ¹ , Irfan Nursetiawan ² , Aan Anwar Sihabudin ³	158-163
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KAWASAN SITU BAGENDIT KABUPATEN GARUT)	
Lia Juliasih, S.IP., M.Si ¹ , Pasciana Rostiena ²	164-172
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN TELUK BERDIRI SEBAGAI OBJEK EKOWISATA DI KABUPATEN KUBURAYA KALIMANTAN BARAT	
Heriyanto	173-182
ANALISIS KINERJADINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYALOKAL DI KABUPATEN MAJALENGKA	
Dewi Maharani ¹ , Asep Suhada ²	183-188
PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS	
Wawan Risnawan	189-197
SINERGITAS PROGRAM DESA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM	198-204

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ASTANA GEDE KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Alfi Sauqi Juhriati¹, Fuji Ulya Fadhilah²

KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA SITU LENGKONG DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS

Ranny Agustriani¹, Hikmah Fitri²

205-213

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SAYANG KAAK OLEH BUMDES HANJUANG DI DESA HANDAPHERANG KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Irfan Adhitiya R¹, Agung Gumilar²

214-219

KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PROMOSI PARIWISATA CAGAR BUDAYA KARANGKAMULYAN KABUPATEN CIAMIS

Ilham Ahmad Gustiana¹, Ade Kusmayadi²

220-227

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS

Shela Novianti Gumilang¹, Dinda Ardiawatie², Dhea Nadilla³

228-236

PENGELOLAAN POTENSI WISATA CADAS NGAMPAR OLEH PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Heru Rahmat Hidayat¹, Tika Ermayanti², Siti Sopiiah³

237-242

PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMANFAATAN POTENSI WISATA GUNUNG SUSURU DESA KERTABUMI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Siti Nurjanah¹, Oki Reza Kurnia²

243-251

ANALISIS PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh :

Asep Nurdin Rosihan Anwar¹, R.Rindu Garvera², Regi Refian Garis³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Galuh¹²³

Jln. RE.Martadinata No. 150 Ciamis

E-mail : asepnurdinrosihananwar1@gmail.com

ABSTRAK

Industri pariwisata sudah menjadi icon penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten baru terus berusaha mengembangkan diri dengan menggali potensi wisata daerahnya. Wisata Cagar Budaya merupakan salah satu destinasi wisata yang kurang mendapatkan penanganan serius dalam pengelolaannya. Dengan masih banyaknya situs-situs budaya yang tidak diperhatikan secara maksimal pemeliharaannya misalnya situs-situs cagar budaya yang hanya dipagari kayu yang sudah usang, banyaknya aksi pengunjung yang melakukan vandalisme, sehingga membuat cagar budaya tersebut menjadi kotor dan tidak terpelihara. Dampaknya pengunjung enggan untuk sekedar mengunjungi apalagi mempelajari situs-situs bersejarah yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan cagar budaya di objek wisata cagar alam oleh pemerintah daerah Pangandaran, Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana seluruh proses dan hasil penelitian diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya di objek wisata cagar alamnya, hambatan yang ditemui diantaranya minimnya tenaga ahli dalam cagar budaya, minimnya sumber daya manusia yang memiliki wawasan tentang cagar budaya yang harus bisa dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang berkompeten, tidak adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang turut melindungi pelestarian cagar budaya tersebut. Kesimpulannya pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan berupa perda tentang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya yang bisa melindungi, menjaga dan melestarikan Cagar budaya di Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan, Cagar Budaya, Pangandaran

A. PENDAHULUAN

Kabupaten pangandaran adalah Daerah Otonomi Baru yang berdiri mulai tahun 2012. Sumber Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten pangandaran salah satunya didapatkan melalui penerimaan sektor pariwisata. Selain terkenal karena pantainya adapula Cagar Budaya di Pangandaran yang terkenal dan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran.

Banyaknya potensi wisata di Kabupaten Pangandaran menjadi nilai tambah keragaman destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran, dimulai dari destinasi wisata pantai, destinasi wisata alam, dan destinasi atraksi wisata, dan destinasi wisata budaya, akan tetapi potensi destinasi wisata budaya belum mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Berikutv adalah lokasi Kabupaten Pangandaran :



Gambar 1. Peta Kabupaten Pangandaran

Dari data base Cagar Budaya di Kabupaten Pangandaran menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten, di Kabupaten Pangandaran memiliki 30 Cagar budaya yang sudah tercatat, diantaranya situs Goa Sutra Reregan, Situs Goa Panggung, Situs Batu Kalde, Situs Mangunjaya, Situs Prayanagara, Lingga kencana naga wijaya, Batu meja, Bekas Station kereta Api Pangandaran, Bekas stasiun kereta api cijulang, terowongan kereta api wilhelmina, Hendrik, Juliana, Jembatan Kereta api Cikacepit, Gedong Uyeng, Rumah jalan Cijulang No 776, Rumah Jalan Raya Parigi No 469, Goa Jepang Putrapinggian, Bunker Bukit Cagar Alam I, II, III, IV, Bunker bukit Badeto ratu I, II, III, IV, Bunker bukit Pasir putih I, II, III, IV, V

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, definisi Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan data dari Tim Khusus Retribusi wisata Kabupaten Pangandaran menjelaskan bahwa tingkat kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke Pangandaran di tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018, pada tahun 2019 jumlah kunjungan mencapai 3,7 Juta, sementara pada tahun 2018 tingkat kunjungan wisatawan mencapai 4,2 juta wisatawan yang datang ke Pangandaran, sehingga berdampak terhadap capaian target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran dari target Rp 27,5 Miliar yang tercapai hanya 67,17 Persen atau sebesar Rp 18,4 Miliar dari sector Pariwisata dan sisa target yang tercapai tahun 2019 sebesar Rp 9 Miliar, sementara untuk tahun 2018 perolehan PAD mencapai Rp 19,814 Miliar.

Dengan potensi destinasi wisata yang dimiliki, Kabupaten Pangandaran masih memiliki peluang untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan dengan cara mengoptimalkan destinasi wisata yang belum dikelola dengan baik seperti wisata budaya karena cagar budaya di Kabupaten Pangandaran belum dimanfaatkan dengan baik menjadi salah satu destinasi wisata alternative yang mampu menjadi pilihan wisatawan pada saat berkunjung.

Dalam perjalanannya untuk menarik wisatawan ternyata ada beberapa permasalahan yang penulis ingin uraikan, pertama minimnya pemeliharaan, kedua kurangnya sumberdaya pengelola yang ahli dalam cagar budaya, belum adanya regulasi terkait pelestarian dan perlindungan cagar budaya

yang berada di kawasan tersebut. Pengelolaan tersebut sebetulnya tidak harus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, melainkan harus ada peran masyarakat yang terlibat dalam pelestariannya.

Menurut penelitian terdahulu oleh Agus Budi Wibowo (2014) bahwa Benda cagar budaya merupakan benda tinggalan dari kelompok komunitas tertentu yang memiliki nilai penting karena dapat menunjukkan tingkat peradaban. Oleh karena itu, perlu dilestarikan agar keberadaannya dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang

Sejalan dengan itu, penelitian terdahulu Menurut Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo (2012) bahwa Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan sejarah yang berada di Kabupten Pangandaran juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dengan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Pangandaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskriptifkan ataupun menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa. Hal ini seseuai dengan pendapat Nana S. Sukmadinata (2010:330), bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar dan ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara studi lapangan, studi kepustakaan melalui observasi dan wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Dalam Undang Undang tersebut juga dijelaskan bahwa Cagar budaya merupakan peninggalan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

Di wilayah Kabupaten pangandaran terdapat situs cagar budaya yang memiliki nilai nilai peninggalan peradaban sejarah manusia di Pangandaran, seperti Situs cagar budaya batu kalde yang merupakan salah satu bukti adanya kehidupan peradaban manusia pada jaman kerajaan, kawasan situs bunker jepang yang merupakan peninggalan sejarah pada saat penjajahan jaman Jepang, goa sutra reregan ditemukannya fosil manusia purba sebagai bukti bahwa peradaban manusia purba pernah ada di Kabupaten Pangandaran dan cagar budaya lainnya yang tersebar di wiayah Kabupaten Pangandaran memiliki nilai sejarah tersendiri yang mampu menjadi daya tarik wisata.

Pengelolaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di wilyah Kabupaten Pangandaran masih dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten (BPCB) dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan mengangkat Jupel (Juru Pelihara) untuk menjaga dan melestarikan keberadaan situs cagar budaya dan melakukan kajian kajian sebagai salah satu upaya untuk mengangkat kembali sejarah yang terkandung didalamnya sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.

Sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran belum maksimal dalam memanfaatkan dan mengelola keberadaan situs cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran seperti cagar budaya yang berada di kawasan cagar alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, masih dibiarkan dan mengandalkan Juru Pelihara dari BPCB Banten dalam Perlindungan dan Pelestarian.

Situs cagar budaya yang berada di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata, yaitu menjadi tujuan wisata budaya, wisata edukasi, dan wisata petualangan sejarah yang akan mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Pangandaran, banyaknya wisatawan yang datang akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD Kabupaten Pangandaran.

Keseriusan pemerintah daerah dalam memanfaatkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran menjadikan salah satu potensi wisata baru masih sebatas wacana, belum ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola cagar budaya, pemerintah daerah masih terfokus dalam pengembangan wisata yang sudah ada dan bersifat konvensional.

Dalam pengelolaan yang baik maka harus dilakukan persiapan dan langkah langkah yang sistematis supaya pengelolaan yang dilakukan hasilnya bisa maksimal, formulasi dan strategi yang harus disiapkan mengacu kepada fungsi fungsi manajemen, George R Terry mengatakan fungsi fungsi manajemen yang sistematis terdiri dari 4 fungsi, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerak (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*). Dari empat fungsi manajemen tersebut maka dihasilkan analisis sebagai berikut :

Perencanaan (*Planning*), berupa penentuan langkah langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan, dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sudah memiliki rencana dalam pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran hal tersebut tercantum dalam Perda Kabupaten Pangandaran No 3 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran) akan tetapi langkah langkah secara teknis dan spesifik yang akan dilakukan belum jelas, sehingga pengelolaan, perlindungan dan pelestarian belum bisa dilakukan, saat ini pengelolaan, perlindungan dan pelestarian masih dilakukan oleh Juru Pelihara dari BPCB Banten dan kewenangannya sangat terbatas dalam pengelolaan, karena tugas Juru Pelihara yaitu menjaga dan melestarikan cagar budaya supaya keberadaannya dalam keadaan aman, belum mengarah kepada pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata.

Pengorganisasian (*Organizing*), beerhubungan dengan pengorganisasian sumber daya manusia guna melaksanakan rencana, sementara untuk pengorganisasian pegawai dari pemda Kabupaten Pangandaran belum memiliki rencana kearah pemanfaatan cagar budaya menjadi salah satu destinasi wisata, saat ini hanya melakukan pendataan cagar budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran belum memiliki pegawai yang khusus dalam menangani cagar budaya menjadi salah satu bagian dari potensi wisata, karena dengan jumlah yang banyak dan tersebar sehingga di butuhkan sumber daya manusia untuk mengurus dan mengelola secara khusus supaya cagar budaya bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sementara untuk perlindungan dan pelestarian masih dilakukan oleh Juru Pelihara yang merupakan tenaga kontrak dari BPCB Banten dan kewenangannya sangat terbatas,

Penggerak (*Actuating*) dimana fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan, motivasi dan disiplin. Dalam hal ini kondisi pengelolaan Cagar budaya membutuhkan penggerak dari seorang pemimpin yang mampu menggerakkan sumber daya yang ada, untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai salah satu tujuan wisata selain destinasi alam, dengan kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan kekuatan hukum untuk melakukan tindakan dalam pengelolaan cagar budaya menjadi salah satu destinasi wisata budaya berbasis perlindungan dan pelestarian.

Pengendalian (*Controlling*), dengan memantau rencana untuk membuktikan apakah rencana itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dibutuhkan pengendalian supaya pemanfaatan cagar budaya pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berbasis perlindungan dan pelestarian cagar budaya, dan pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi khusus tentang pengelolaan dan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya sehingga pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pangandaran bisa maksimal dilakukan untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pangandaran belum maksimal sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran supaya potensi cagar budaya bisa dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal dengan cara, membuat Regulasi tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, membuat museum untuk menyimpan peninggalan sejarah dan cagar budaya selain bertujuan supaya lebih terkontrol, dan terjaga pelestariannya, dan sebagai tambahan destinasi wisata edukasi untuk museum sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- BKSDA Jawa Barat. 2006. *Flora dan Fauna*. <http://home.bbksdajabar.com/flora-dan-fauna.html>.
Diakses pada 9 April 2016.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. 2018. *Data Base Cagar Budaya di Kabupaten Pangandaran*.
- George R Terry. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Cetakan Ke 11, Jakarta Bumi Aksara.
- Nana S. Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo. 2012. *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*.
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 No 3 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran 2018-2038.
- Dokumen Tim Khusus Retribusi Wisata Kabupaten Pangandaran.

STRATEGI PEMASARAN MUSEUM DENGAN PENDEKATAN VALUE INNOVATION: STUDI KASUS PADA MUSEUM ANGKUT KOTA BATU

Oleh :

Andik Pradana

¹Magister Manajemen Universitas Surabaya, Jl. Raya Kali Rungkut, Kali Rungkut, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293,

email: andi.pradana19@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini perkembangan museum di Indonesia terkendala oleh tidak adanya antusias masyarakat untuk berkunjung. Oleh karena itu, museum perlu memiliki dan menjalankan strategi pemasaran yang menawarkan nilai-nilai superior kepada masyarakat sehingga masyarakat berminat mengunjungi museum. Penelitian ini dilakukan di Museum Angkut, Kota Batu, Jawa Timur. Untuk menjamin terciptanya nilai superior, maka perancangan strategi menggunakan pendekatan value innovation yang diusung dalam Blue Ocean Strategy (Kim dan Mauborgne, 2016). Value curve museum di Indonesia dan Museum Angkut dipetakan berdasarkan observasi, sedangkan value curve pengunjung Museum Angkut dipetakan berdasarkan studi pengunjung melalui pencatatan data statistika, focus group discussion, dan survey berdasarkan kuisisioner. Dengan membandingkan ketiga value curve dan menganalisisnya dengan pendekatan value innovation, maka value curve baru dapat direkonstruksi sebagai dasar dari strategi pemasaran Museum Angkut. Dua prinsip dalam value curve baru ini adalah peningkatan program pelayanan serta penciptaan keaktifan Museum Angkut menjangkau pengunjung. Tujuan dari strategi pemasaran ini adalah terciptanya value innovation, yakni Museum Angkut dapat menawarkan nilai superior kepada pengunjung dan menekan biaya operasional karena tingkat kunjungan yang meningkat.

Kata kunci: museum, strategi pemasaran, Blue Ocean Strategy

A. PENDAHULUAN

Setiap orang pasti memiliki rasa bosan yang ditimbulkan rutinitas dan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka membutuhkan rekreasi untuk menghilangkan rasa bosan tersebut. Rekreasi yang dilakukan bersama keluarga dipandang memiliki banyak manfaat, baik bagi pribadi maupun bagi keluarga. Bagi pribadi, rekreasi berguna untuk menghabiskan waktu dari tuntutan pekerjaan (Schanzel et al., 2012), sedangkan bagi keluarga, rekreasi keluarga menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk memperkuat ikatan keluarga dan sebagai sarana pendidikan anak.

Ada begitu banyak jenis tempat wisata yang menjadi pilihan untuk berekreasi, salah satunya adalah museum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, "*Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat*". Koleksi museum meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata (Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum pasal 1 ayat 1 dan 3). Museum tidak hanya dapat menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi tempat untuk lebih mengenal sejarah dan menambah pengetahuan.

Hingga tahun 2016, terdapat 428 museum di Indonesia. Jumlah ini naik sekitar 59,1% dari tahun 2011 yang berjumlah 269 museum (<http://asosiasimuseumindonesia.org>). Sayangnya dari begitu banyak pilihan museum di Indonesia, tidak semuanya cukup menarik untuk dapat membuat masyarakat memilih museum sebagai tempat wisata. Bahkan, minat masyarakat Indonesia untuk

berkunjung ke museum masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan oleh survey yang dilakukan *Kompas* mengenai keputusan masyarakat berkunjung ke museum pada musim liburan. Dari 706 responden, 67,6% menyatakan tidak berminat untuk berkunjung ke museum sedangkan responden yang berminat hanya 27,9% dan 4,5% tidak tahu/tidak menjawab (*Kompas*, 13 Juli 2016). Realita ini cukup untuk menjelaskan bahwa tidak adanya antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke museum.

Penyebab utama tidak adanya minat berkunjung ke museum adalah citra buruk yang melekat pada lembaga ini. Masyarakat Indonesia memandang museum sebagai tempat yang kuno, membosankan, menyeramkan, dan dianggap sebagai gudang benda tua. Citra buruk ini timbul dan tetap melekat karena pengelola museum sendiri terjebak dalam konsep museum yang parsial, yakni memandang fungsi lembaganya hanya untuk merawat dan menyimpan koleksi. Padahal sejatinya, museum hadir sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Namun, pelayanan yang berikan museum kepada publik hanya sebatas pameran koleksi dimana pengunjung diarahkan untuk tur secara mandiri. Pengunjung dipersilahkan untuk melihat koleksi dan membaca *caption* yang menjelaskan koleksi. Konsep museum yang seperti ini jelas menciptakan pengalaman berkunjung yang membosankan dan tanpa makna sehingga peneliti rasa menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berkunjung ke museum.

Untuk itu dibutuhkan upaya dari pihak museum agar dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk berkunjung. Pengelola museum sebaiknya menerapkan strategi pemasaran yang mengarahkan museum untuk mengidentifikasi pengunjung dan kebutuhannya serta memenuhi kebutuhan tersebut (Kotler dan Keller, 2012: 5). Konsep dasar pemasaran adalah suatu pertukaran (*exchange*), yakni ketika seseorang mengorbankan miliknya (waktu, uang, energi) untuk ditukar dengan nilai (ekonomi, sosial, psikologi) dari produk/jasa yang ditawarkan institusi. Dalam hal ini, pengunjung mengorbankan uang dan waktu mereka dan ditukar dengan kesempatan mengakses koleksi atau mengikuti program museum. Apabila museum mampu memberikan nilai melebihi apa yang telah dikorbankan (*the benefits exceeds the cost*), maka pengunjung akan merespon museum secara positif (Kotler *et al*, 2008: 22). Oleh karenanya, agar masyarakat Indonesia berminat pada museum, maka museum harus mampu mewujudkan kondisi “*the benefits exceeds the cost*” tersebut.

Salah satu strategi pemasaran yang bisa diterapkan di museum adalah pendekatan *value innovation* yang diusung dalam *Blue Ocean Strategy* (Kim dan Mauborgne, 2016). *Blue Ocean Strategy* merupakan strategi bisnis kontemporer yang dirancang agar perusahaan mampu menciptakan pasarnya sendiri melalui penciptaan *value innovation*, yakni kondisi dimana perusahaan berhasil menekan biaya dan menawarkan nilai maksimal bagi konsumen secara bersamaan. *Value innovation* ini membuat perusahaan tidak dapat disaingi lagi sehingga perusahaan “berenang pada samudra biru yang damai.”

Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pemasaran dengan pendekatan *value innovation* di Museum Angkut. Museum ini terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Museum Angkut dibangun di lereng Gunung Panderman di atas areal seluas 3,8 hektar. Museum ini berada di bawah naungan Jawa Timur Park Group, yaitu sebuah perusahaan pengembang yang juga mendirikan Jatim Park I, Jatim Park II, Batu Secret Zoo, Eco Green Park, dan beberapa tempat wisata populer di Batu. Museum Angkut merupakan museum pertama di Indonesia yang mengoleksi berbagai macam alat transportasi, mulai dari yang bersifat tradisional sampai dengan alat transportasi yang bersifat modern. Pengunjung dapat menikmati lebih dari 300 jenis koleksi angkutan di dunia, baik dari angkutan darat, air, maupun udara. Bahkan museum ini juga memiliki koleksi berupa replika pesawat kepresidenan Boeing 736 seri 200 yang digunakan oleh Presiden Ir. Soekarno (Lestari, 2017). Dengan beragam koleksi tersebut, Museum Angkut telah menjadi salah satu tempat rekreasi yang cukup diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan Museum Angkut yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 kunjungan ke museum ini mencapai 230.467 orang (BPS Kota Batu, 2016). Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 339.002 orang pada tahun 2017 (BPS Kota Batu, 2017).

Walau Museum Angkut memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi, bukan berarti museum ini tidak membutuhkan strategi pemasaran. Hal ini diperlukan agar pihak pengelola museum dapat mengenali pengunjungnya dan mengetahui keinginan pengunjung, sehingga bisa terus meningkatkan kunjungan masyarakat. Sejak diresmikan pada tanggal 9 Maret 2014 hingga saat ini, belum ada peneliti yang berusaha merancang strategi pemasaran Museum Angkut dengan pendekatan *value innovation* yang diusung dalam *Blue Ocean Strategy*.

Sebelumnya, memang sudah ada peneliti yang mencoba mengupas aspek pemasaran di Museum Angkut. Salah satunya adalah Jovani Shaloom dan Yohannes Don Bosco Doho yang meneliti tentang *Analisis Kegiatan Marketing Public Relations pada Museum Angkut, Batu Jawa Timur*. Tujuan penelitian ini adalah kegiatan *Marketing Public Relations* yang dijalankan oleh Museum Angkut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Museum Angkut melakukan ke-tujuh alat *Marketing Public Relations* yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller. Hambatan yang ditemui adalah promo tidak sampai ke semua target publik karena *customer* yang bervariasi, *complaining* dan kunjungan pengunjung yang terkadang tidak sesuai dengan agenda yang sudah disiapkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan promo yang lebih gencar, inovasi dalam kegiatan *Marketing Public Relations* yang dijalankan, memberikan pelayanan yang semakin baik serta melakukan survey dan pemetaan sebelum melakukan suatu kegiatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, karya ini memfokuskan pada bagaimana penerapan strategi pemasaran Museum Angkut melalui pendekatan *value innovation*. Pendekatan ini sangat penting dalam menggali nilai-nilai baru yang belum pernah dimiliki dan ditawarkan oleh kompetitor kepada pasar. Melalui *value innovation* diharapkan Museum Angkut bisa terbebas dari zona “Samudra Merah” yang identik tingkat persaingan yang ketat dalam merebut ruang pasar. Selanjutnya, Museum Angkut bisa masuk ke zona “Samudra Biru” dengan peluang pasar baru dan tingkat persaingan yang lebih kecil. Dengan demikian, Museum Angkut akan bisa lebih melayani masyarakat dengan maksimal dan mendapatkan tingkat kunjungan yang semakin tinggi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *value innovation* yang diusung dalam *Blue Ocean Strategy*. Penciptaan *value innovation* dengan *Blue Ocean Strategy* bersifat sistematis karena dilengkapi dengan banyak alat. Namun tiga alat utama untuk merancang *Blue Ocean Strategy* adalah *The Strategy Canvas* yang berfungsi untuk memetakan nilai (*value curve*) dan *The Four Action Framework* serta *The ERRC Grid* untuk menganalisa dan menciptakan *value innovation*.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan dokumen, observasi, wawancara, *focus group discussion*, dan survey dengan kuisioner berdasarkan model *The Empathy Map* (Osterwalder dan Pigneur, 2010: 130-131). Analisa data dilakukan berdasarkan tahapan dalam *The Four Steps of Visualizing*, yakni: *visual awakening*, *visual exploration*, *visual strategy fair*, dan *visual communication*.

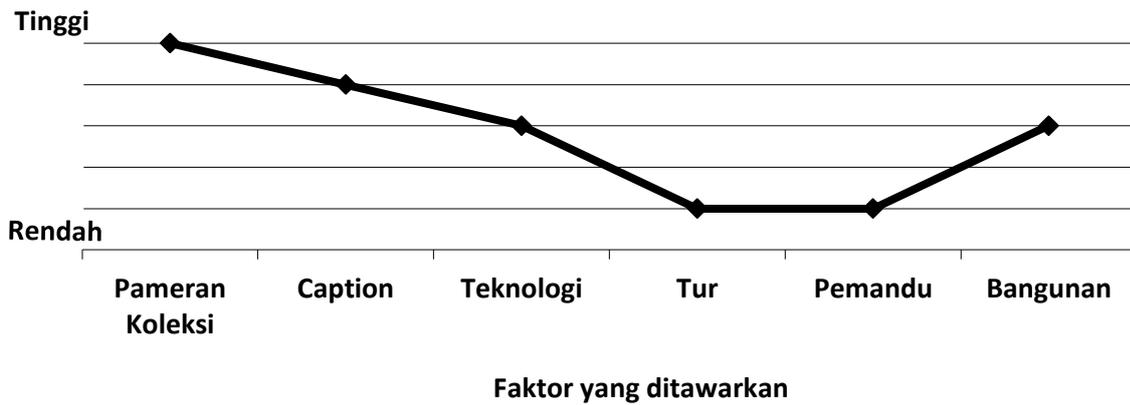
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam merancang strategi pemasaran Museum Angkut dengan pendekatan *value innovation*, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Value Curve Museum Indonesia

Berdasarkan observasi peneliti terhadap beberapa museum Indonesia, *value curve* museum Indonesia terdiri dari enam faktor, yakni: pameran koleksi, *caption*, teknologi, tur, pemandu, dan bangunan. Berikut adalah *strategy canvas* yang memetakan *value curve* museum Indonesia:

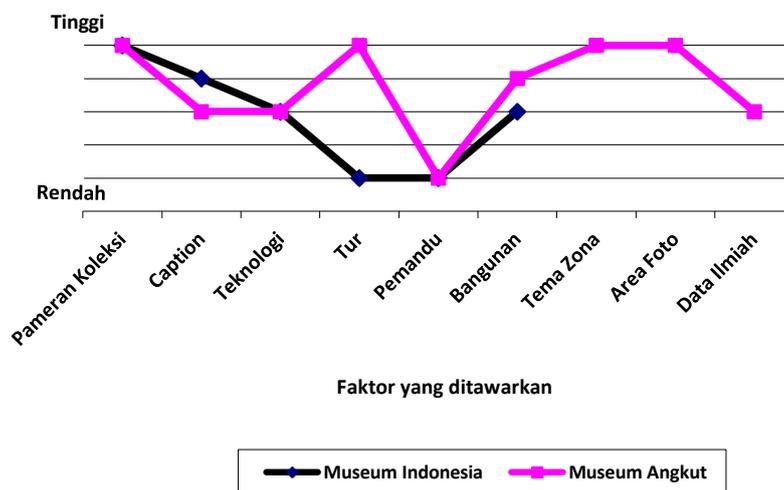
Diagram 1. Value Curve Museum Indonesia



2. Value Curve Museum Angkut

Mengacu pada *value curve* dari museum Indonesia dan berdasarkan observasi peneliti terhadap Museum Angkut, maka didapati bahwa *value curve* Museum Angkut berbeda dari *value curve* museum Indonesia. Selain perbedaan nilai dari faktor yang ditawarkan Museum Angkut, terdapat tiga faktor baru yang tidak ditawarkan oleh museum Indonesia, yakni: tema zona yang unik, area foto yang menarik, dan data ilmiah. Perbedaan *value curve* Museum Angkut dapat peneliti simpulkan sebagai alasan Museum Angkut memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi dan cukup diminati oleh masyarakat. Berikut adalah *strategy canvas* yang memetakan *value curve* Museum Angkut dan *value curve* museum Indonesia:

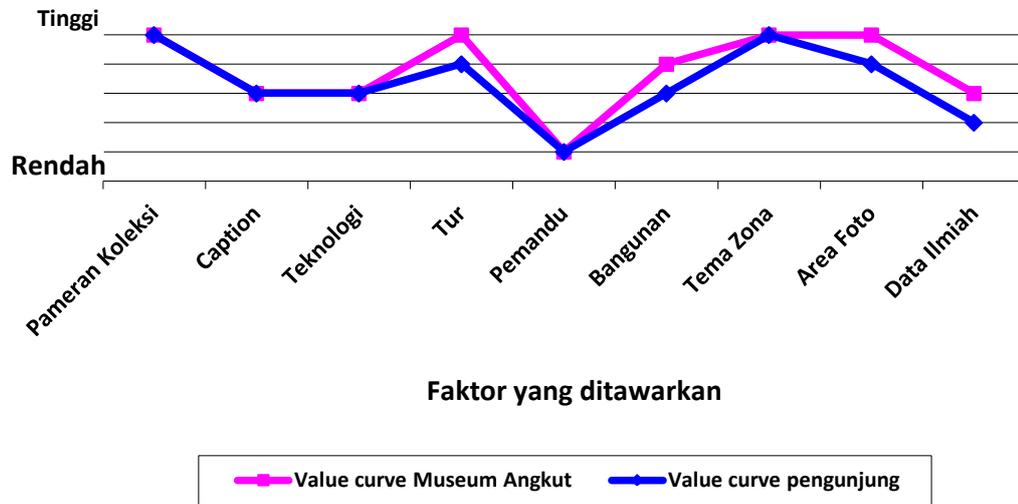
Diagram 2. Value Curve Museum Angkut dan Museum Indonesia



3. Value Curve Pengunjung Museum Angkut

Walau Museum Angkut telah menawarkan faktor-faktor dengan nilai tertentu kepada pengunjungnya, data penelitian menunjukkan nilai faktor yang diterima oleh pengunjung berbeda. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang diinginkan oleh pengunjung. Berikut adalah *strategy canvas* yang memetakan *value curve* pengunjung dan *value curve* Museum Angkut:

Diagram 5.3. Value Curve Museum Angkut dan Pengunjung



4. Penciptaan *value innovation* Museum Angkut

Setelah memetakan *value curve* dari museum di Indonesia secara umum dan *value curve* Museum Angkut, maka tahap selanjutnya adalah menciptakan *value curve* baru dengan menggunakan *The Four Action Framework* dan dilanjutkan dengan rencana aksi yang dirangkum dalam *The ERRC Grid*. Terdapat empat langkah agar Museum Angkut mampu menciptakan *value curve* baru, yakni: mengeliminasi (*eliminate*) faktor yang sudah jenuh ditawarkan dalam museum, mengurangi (*reduce*) dan meningkatkan (*raise*) faktor yang ditawarkan, dan menciptakan (*create*) faktor yang belum ada di pada museum. Berikut adalah *The ERRC Grid* yang dimaksud:

Tabel 1. The ERRC Grid Museum Angkut

Eliminate	Raise
Toilet yang terbatas Pemandu kurang interaktif	Citra meseum transportasi Pelayanan pemandu Ragam materi tour Acara Teknologi Promosi Cosplayer
Reduce	Create
Jumlah orang dalam kelompok Materi dalam tour yang terlalu panjang	Suasana kenyamanan dan keamanan Presentasi data dalam wujud grafis Paket kunjungan keluarga Kerjasama dengan agen perjalanan dan <i>Event Organizer</i> Kerja sama dengan lembaga pendidikan Membership Caffe & Resto yang nyaman Souvernir

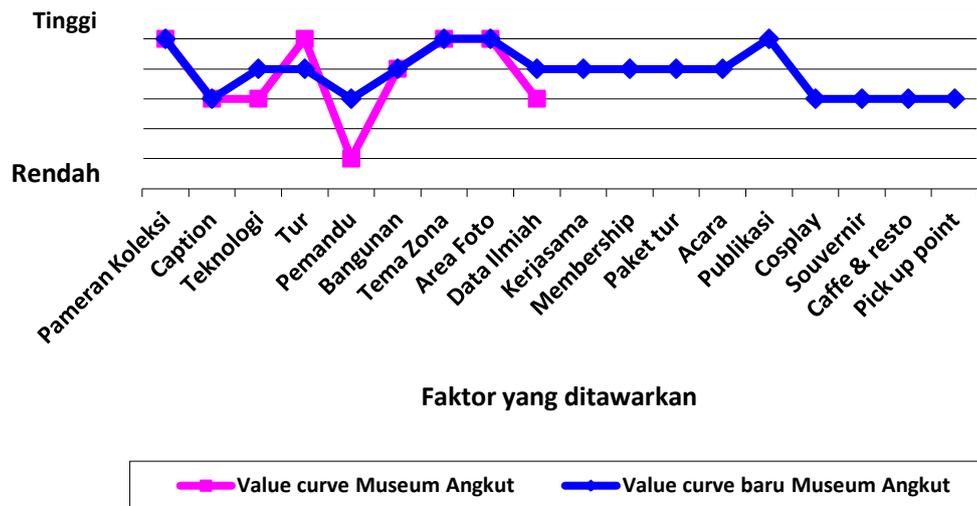
Buku katalog/panduan
Publikasi ilmiah
Pick up point

Keempat aksi tersebut digunakan untuk menciptakan *value innovation*, sehingga dapat menekan biaya dengan mengeliminasi dan mengurangi faktor yang jenuh ditawarkan museum serta menawarkan nilai superior dengan menciptakan dan meningkatkan faktor yang belum ada di museum.

5. Strategi Pemasaran Museum Angkut dengan Pendekatan *Value Innovation*

Melalui data penelitian dan prosedur perancangan *Blue Ocean Strategy*, yakni *The Four Steps of Visualizing Strategy* serta alat untuk merekonstruksi pasar *The Six Paths Framework* dan alat untuk menciptakan *value curve* baru *The Four Actions Framework*, maka *value curve* baru Museum Angkut dapat dirancang. *Value curve* baru ini merupakan usulan strategi pemasaran Museum Angkut dengan pendekatan *value innovation*. Untuk memenuhi kriteria *Blue Ocean Strategy* yang baik, maka prinsip **peningkatan program dan keaktifan menjangkau pengunjung** dapat digunakan untuk menyimpulkan *value curve* baru ini. Berikut adalah *strategy canvas* yang memetakan *value curve* baru dan lama Museum Angkut:

Diagram 4. Value Curve Baru dan Lama Museum Angkut



D. KESIMPULAN

Dalam merancang strategi pemasaran Museum Angkut dengan menggunakan pendekatan *value innovation*, diperlukan pemetaan terhadap *value curve* museum di Indonesia secara umum, *value curve* yang dimiliki Museum Angkut, serta *value curve* pengunjung Museum Angkut. *Value curve* pengunjung perlu dipetakan agar pengelola museum dapat mengetahui faktor dan nilai yang didapat pengunjung ketika berada di museum serta nilai yang diinginkan pengunjung pada sebuah museum. Dengan membandingkan ketiga *value curve* tersebut, pengelola Museum Angkut dapat menganalisis dan menciptakan *value curve* baru yang berorientasi pada nilai yang diinginkan pengunjung. Adapun *value curve* baru dari Museum Angkut antara lain kerjasama, membership, paket tour, acara, publikasi, cosplayer, souvenir, cafe & resto, pick-up point.

Penciptaan *value curve* baru ini akan membuat Museum Angkut mampu menciptakan pasarnya sendiri sehingga sukar disaingi. Hal ini sangat penting karena keberadaan museum dalam menarik minat pengunjung dapat dikategorikan dalam *leisure-time industry*. *Leisure-time industry* merupakan

industri bagi setiap bisnis yang didasari pada aktivitas yang dapat dilakukan seseorang ketika memiliki waktu luang. Oleh karena itu, museum akan bersaing dengan beragam pilihan aktivitas, seperti: beristirahat, membaca buku, mendengarkan musik, dan melakukan. Museum juga bersaing dengan beragam tempat publik yang dituju ketika seseorang memiliki waktu luang, seperti: *mall*, bioskop, *café*, rumah makan, dan tempat wisata. Dengan menggunakan pendekatan *value innovation*, maka Museum Angkut dapat menciptakan pasar sendiri dan menghindari persaingan dalam *lesisure-time industry* yang kompleks dan abstrak.

Agar Museum Angkut dapat mewujudkan strategi pemasaran berupa penciptaan *value curve* baru tersebut, maka peneliti menyarankan agar pihak Museum Angkut segera mengerjakan rencana aksi yang tercantum pada *The ERRC Grid* di tabel 1. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar Museum Angkut melakukan evaluasi dan perancangan strategi pemasaran secara berkala untuk tetap dapat menciptakan *value innovation* sehingga dapat memberikan nilai superior kepada pengunjungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2016). Jumlah Pengunjung Objek Wisata Dirinci Menurut Bulan dan Tempat Wisata di Kota Batu, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2017). Jumlah Pengunjung Objek Wisata Dirinci Menurut Bulan dan Tempat Wisata di Kota Batu, 2017.
- Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2016). *Blue Ocean Strategy: Menciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Menjadikan Persaingan Tidak Lagi Relevan*. Jakarta: Noura Books.
- Kotler dan Keller. (2012). *Manajemen Pemasaran* (Edisi 12). Jakarta: Erlangga
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Edisi 12, Jilid1). Jakarta: Erlangga.
- Lestari, Mustiani. (2017). Menengok Pesawat dan Helikopter R1 di Museum Angkut. *traveldetik.com*. Diakses 8 Januari 2020, dari <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3766415/menengok-pesawat-dan-helikopter-r1-di-museum-angkut>
- Osterwalder, A. dan Pigneur, Y.(2010). *Business Model Generation*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum.
- Schanzel, H., Yeoman I & Backer E. (Eds). (2012). *Family Tourism: Multidisciplinary Perspective.*, Bristol: Channel View Publication.
- Shaloom, Jovani dan Yohannes Don Bosco Doho. (2017). Analisis Kegiatan Marketing Public Relations pada Museum Angkut, Batu Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Volume 3-Nomor 1*.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN DAYA TARIK WISATA KHUSUS (KDTWK) AGROWISATA DAN EKOWISATA DI KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Asep Nurwanda¹, Elis Badriah²

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Studi Manajemen²

Universitas Galuh

Jln. RE.Martadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Ciamis akan menetapkan desa menjadi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) berupa kawasan agrowisata dan ekowisata berbasis pelestarian lingkungan, pariwisata kerakyatan, dan kearifan lokal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata, pemerintah daerah mempunyai tambahan pemasukan kas daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang banyak menyimpan SDA (Sumber Daya Alam) yang mempunyai kelebihan untuk dijadikan suatu obyek pariwisata untuk dikembangkan, seperti terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang cukup besar dimasa mendatang maka sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih di sektor ini.

Kata kunci : Agrowisata, efektifitas, kebijakan

A. PENDAHULUAN

Sejak Tahun 1960-an, pemerintahan di sejumlah negara berkembang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan ekonomi yang bersumber dari pangsa pasar wisatawan internasional. Laporan Scheyvens (2011) menyatakan bahwa perdagangan ekspor barang primer dan sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang semakin penting pada pembentukan pendapatan dan perluasan penyerapan lapangan kerja. Sharpley (2000) mengatakan banyak negara berkembang yang mempromosikan pariwisata, karena menawarkan potensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan pemerintah.

Booth (1990) dan Picard (1996) telah melaporkan trend pertumbuhan perjalanan wisata ke Indonesia, berkat bantuan lembaga internasional World Bank dan institusi lainnya. Sektor pariwisata dijadikan sebagai sektor andalan untuk mendulang devisa di tengah turunnya ekspor Indonesia akibat lesunya perdagangan dunia.

Menurut Evita dkk. (2012), manfaat ekonomi sektor pariwisata pada kenyataannya menimbulkan masalah pada berkurangnya sumber daya alam, masalah sosial budaya dan lingkungan, akibat daripada konsep pariwisata yang mengarah kepada pariwisata massal (*mass tourism*). Semakin parahnya kerusakan lingkungan, menuai banyak kritikan, sehingga pembangunan pariwisata sekarang ini, diarahkan pada pariwisata alternatif yang lebih peduli dengan kelestarian lingkungan, dengan menerapkan pariwisata berkelanjutan seperti pengembangan agrowisata. Utama (2011) mengatakan agrowisata merupakan pariwisata alternatif yang merupakan solusi masif dalam mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis akan menetapkan desa menjadi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) berupa kawasan agrowisata dan ekowisata berbasis pelestarian lingkungan, pariwisata kerakyatan, dan kearifan lokal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata, pemerintah daerah mempunyai tambahan pemasukan kas daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan riil.

Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengEketifitas kebijakan dan program pembangunan yang sesuai yang kebutuhan masyarakat (Leo Agustino, 2008:1). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka provinsi, kabupaten atau kotamadya berperan sentral dalam perumusan kebijakan daerah, maka sumber-sumber yang ada di daerah perlu di optimalkan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah.

Daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang banyak menyimpan SDA (Sumber Daya Alam) yang mempunyai kelebihan untuk dijadikan suatu obyek pariwisata untuk dikembangkan, seperti terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang cukup besar dimasa mendatang maka sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih di sektor ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pengembangan Agrowisata

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam dan hayati yang sangat beragam yang jika dikelola dengan tepat, kekayaan tersebut mampu diandalkan menjadi andalan perekonomian nasional. Kondisi agroklimat di wilayah Indonesia sangat sesuai untuk pengembangan komoditas tropis dan sebagian sub tropis pada ketinggian antara nol sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Komoditas pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai daya tarik kuat sebagai Wisata Agro. Keseluruhannya sangat berpeluang besar menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia.

Dengan demikian melalui agrowisata bukan semata merupakan usaha/bisnis dibidang jasa yang menjual jasa bagi pemenuhan konsumen akan pemandangan yang indah dan udara yang segar, namun juga dapat berperan sebagai media promosi produk pertanian, menjadi media pendidikan masyarakat, memberikan signal bagi peluang pengembangan diversifikasi produk agribisnis dan berarti pula dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru wilayah. Dengan demikian maka Agrowisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru daerah, sektor pertanian dan ekonomi nasional.

Potensi Wisata Agro yang sangat tinggi ini belum sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah kebijakan yang konkrit dan operasional guna tercapainya kemantapan pengelolaan Obyek Wisata Agro di era globalisasi dan otonomi daerah. Sesuai dengan keunikan kekayaan spesifik lokasi yang dimiliki, setiap daerah dan setiap obyek Wisata Agro dibutuhkan kerjasama sinergis diantara pelaku yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Agro, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pada hakikatnya kehidupan masyarakat pedesaan masih memiliki sifat gotong royong yang mendalam, yang membuktikan bahwa kehidupan selalu dibarengi dengan berbagai upaya yang dapat menghasilkan bekal, bagikelangsungan hidup. Pertanian adalah salah satu usaha yang seajaklaman dan turun temurun, menjadi bagian mata pencaharian masyarakat di pedesaan, usaha pertanian telah membentuk pola hidup masyarakat tidak hanya sekedar mengolah ladang, kebun, persawahan, dan hutan, tetapi apa yang mereka kerjakan dengan tanpa disadari telah membentuk satu daya tarik bagi orang lain yang melihatnya. Unsur pengembangan agro wisata dalam hal ini adalah mengemas berbagai aktivitas pertanian sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan daya tarik yang unik (*Unique Selling Point*) untuk disajikan sebagai agro wisata.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu, keputusan-keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan tindakan-tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

C. Kebijakan Publik

1) Definisi dan Makna Kebijakan Publik

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pariwisata, transportasi, pertanian, dan sebagainya. Kebijakan dapat bersifat nasional, regional ataupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota (Subarsono, 2010: 3-5).

Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu (Subarsono, 2010: 2). Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008: 6-7) dalam prespektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi. Kebijakan publik menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2010: 2) adalah (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*) apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, pengertian kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung beberapa makna yaitu:

- a) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan pihak swasta;
- b) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah, sosial teknis dan untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik.

2. Efektivitas Kebijakan Dalam pengembangan Agrowisata di Kabupaten Ciamis

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu yang mengatur tentang suatu hal. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, yang berkewajiban untuk mengelola, mengatur dan mengembangkan potensi daerah yang berada di wilayah pemerintahannya. Kebijakan pemerintah daerah yaitu keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah

yang mengatur tentang berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Dari hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah membuat dan menetapkan suatu regulasi kebijakan terutama tentang pariwisata yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Ciamis tahun 2009-2014 yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan obyek wisata, Kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap entrepreneurship dan infrastruktur, tetapi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengembangan agrowisata dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya juga terlihat bahwa infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan agrowisata, tapi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan agrowisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap pengembangan agrowisata melalui infrastruktur.

Kebijakan pemerintah juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agrowisata. Selanjutnya entrepreneurship berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agrowisata. Terakhir adalah bahwa infrastruktur juga berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agrowisata. Jadi, secara langsung kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *entrepreneurship*. Hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah dkk. (2014), Samiadji et al. (2014) dan Wulandari (2014). Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar masyarakat yang bekerja di agrowisata adalah tamatan SMTA dan tamatan SD. Rotinsolu dkk. (2014) mengatakan masih kurangnya tenaga kerja terdidik yang terserap sebagai tenaga kerja berdampak pada lambatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, karena pendidikan sangat berpengaruh pada produktifitas, pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat dan lebih siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara, pemerintah perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatnya kualitas pendidikan akan menghasilkan lulusan siap kerja yang mempunyai jiwa kewirausahaan.

Kebijakan pemerintah dalam regulasi dengan pengurusan ijin usaha yang tidak rumit dengan membentuk Badan Perijinan Terpadu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendirikan dan mengembangkan usaha. Semakin banyak usaha yang tumbuh akan membuat kewirausahaan semakin berkembang yang mendukung kegiatan pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan –peraturan hendaknya mengarah pada kebijakan yang pro bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMK) seperti fasilitasi dalam kemudahan akses pembiayaan/permodalan, memperbanyak pelatihan –pelatihan teknis dan manajerial, mempermudah pengurusan perijinan, penyediaan sentra/lokasi usaha dan jaringan informasi usaha (Munizu, 2010).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pengertian bahwa metode kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptual dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. (Ulber Silalahi, 2009:27)

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2019.

3. Subjek Penelitian

Dinas PMD dan Dinas Pariwisata Kabuapten Ciamis Kabupaten Ciamis,. Dalam penentuan informan, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang memiliki otoritas dan pengetahuan dibidangnya sehingga informan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini didapat dari hasil wawancara dan bersifat subyektif sebab data tersebut dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda (Riduwan, 2015 : 5). Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen di Dinas Pariwisata Kabuapten Ciamis, Kantor Desa panawangan dan buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data kualitatif yaitu data hasil deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, memperoleh penjelasan yang luas dan bermanfaat. Data kualitatif dapat membimbing kita memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya, dan untuk membentuk kerangka teoritis yang baru, data tersebut membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal. (Ulber Silalahi, 2009:284-285)

Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen di Dinas Pariwisata Kabuapten Ciamis, Kantor Desa Bangunharja dan buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017:218)

Dalam penelitian ini menggunakan dua buah teknik pengumpulan data, yaitu :

- 1) Studi Pustaka; dilakukan dengan mempelajari buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Melalui teknik ini diperoleh data berupa teori dan memberikan kejelasan kepada peneliti sehubungan dengan masalah yang diteliti dan bagaimana pemecahannya.
- 2) Studi lapangan; data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tiga metode yaitu :
 - a. Wawancara
Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam/semi-terstruktur, yaitu pewawancara yang lebih mengarahkan pembicaraan, tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, topik atau isu-isulah yang menentukan arah pembicaraan. (Anggito, Albi dan Johan, 2018-88)
 - b. Observasi
Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dalam kata lain peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya (Yusuf, 2017 : 385).
 - c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian (Riduwan, 2015-30).

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan/analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2015-339) menjelaskan bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Mayer dan Greenwood dalam Silalahi (2012:27) mengungkapkan "Deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa".

D. LANDASAN TEORI

1. Konsep Kebijakan Agrowisata

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2008: 16). Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:139) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2008: 146-147).

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Srimulyadi (2007: 1) mendefinisikan secara sederhana pengertian agrowisata atau wisata agro yaitu kegiatan wisata. Pengembangan agrowisata pada konsep universal dapat ditempuh melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas sesuai dengan persyaratan yang diminta konsumen dan pasar global. Sedangkan pada konsep uniqueness, konsumen ditawarkan kepada produk spesifik yang bersifat unik. Agrowisata merupakan salah satu macam diversifikasi produk wisata yang dapat dimanfaatkan untuk penyajian beberapa paket wisata terhadap wisatawan yang akhir-akhir ini cenderung tertarik untuk menyaksikan dan menikmati obyek dan daya tarik wisata yang baru dan memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu agrowisata sebagai sebuah tindakan mengunjungi ladang pertanian, hortikultura atau bentuk agribisnis lainnya untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, atau keterlibatan dengan aktivitas-aktivitas didalamnya.

Agrowisata telah diberi batasan sebagai wisata yang memanfaatkan obyek-obyek pertanian. Secara umum, ruang lingkup dan potensi agrowisata yang dapat dikembangkan sebagai berikut (Tirtawinata dan Fachruddin, 2002).

2. Eketifitas Kebijakan Publik

1) Definisi Eketifitas Kebijakan Publik

Eketifitas adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Eketifitas baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu (Subarsono, 2010: 119).

Secara umum Eketifitas kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2008: 226). Menurut Lester dan Stewart Eketifitas ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat

menghasilkan dampak yang diinginkan (Agustino, 2008: 185). Menurut William Dunn (1999), Eketifitas kebijakan berkenaan dengan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan (Agustino, 2008: 187). Eketifitas kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan itu atau sebaliknya.

2) Fungsi-fungsi Eketifitas Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah diharapkan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam perumusan (*formulation*) kebijakan dan perlu mendapatkan Eketifitas (*Evaluation*). Eketifitas tersebut sebagai proses penilaian apakah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya atau bahkan kebijakan tersebut belum sama sekali dilaksanakan. Menurut Suharno (2010: 241-242), fungsi dari Eketifitas kebijakan yaitu:

- a) memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritis atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Eketifitas kebijakan berfungsi untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan;
- b) Evaluasi;
- c) Eketifitas menunjang (*back up*) pelaksanaan prosedur-prosedur-prosedur lainnya dalam dalam analisis keijakan dan sebagainya. Hal senada juga datang dari Subarsono (2010: 120-121), yang menekankan bahwa fungsi dari Eketifitas kebijakan publik adalah:
 - a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui Eketifitas maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
 - b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan Eketifitas juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
 - c) Eketifitas berfungsi untuk mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan;
 - d) Mengukur dampak suatu kebijakan;
 - e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan-penyimpangan;
 - f) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Melihat dari beberapa fungsi di atas bisa disimpulkan bahwa Eketifitas kebijakan memang begitu penting. Eketifitas dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik sebagai standar penilaian dan standar alat ukur terhadap keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Indikatornya tentu di lihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, bila tanggapan masyarakat positif berarti kebijakan publik sudah baik, dan bila tanggapan masyarakat negatif berarti kebijakan publik masih dianggap kurang memenuhi kebutuhan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap *pengembangan agrowisata* yang berarti meningkatnya kebijakan pemerintah akan dapat meningkatkan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Kebijakan pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap infrastruktur yang berarti meningkatnya kebijakan pemerintah akan dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai seperti jalan, listrik, air bersih dan telekomunikasi, serta penunjuk arah, papan informasi wisata, rambu lalu lintas wisata. Pemerintah dapat membuat terobosan baru dengan melakukan promosi secara digital yang tidak hanya fokus pada informasi produk pariwisata, tetapi juga terjalin hubungan baik antar pelaku pariwisata dengan wisatawan. Entrepreneurship secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan agrowisata berarti meningkatnya kewirausahaan akan meningkatkan pengembangan agrowisata dikarenakan mampu meningkatkan produktivitas kerja

dalam mengembangkan agrowisata. Infrastruktur secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan agrowisata yang berarti meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai meliputi jalan, listrik, air bersih dan telekomunikasi, serta penunjuk arah, papan informasi wisata, rambu lalu lintas wisata akan meningkatkan pengembangan agrowisata, karena mampu memberikan kemudahan dan pelayanan lebih baik bagi wisatawan.

a. Saran

Pemerintah dapat melakukan terobosan dalam bidang promosi dengan membuat *Tourist Information Center* dalam bentuk digital yang terhubung dengan media sosial. Pelaku pariwisata dan para pengguna media sosial dapat saling memberi informasi, sehingga wisatawan mendapatkan informasi pariwisata yang cepat dan akurat, serta terjalin hubungan yang baik antara pelaku pariwisata dan wisatawan. Pemerintah harus berusaha keras membangkitkan usaha –usaha agrowisata dengan membangun desa wisata yang bercirikan agrowisata dan kearifan lokal, juga dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan Agrowisata di kabuapten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Evita,R.,Sirtha, I N., Sunartha, I N. 2012. *Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali*. Jurnal Ilmiah Pariwisata, 2(1):109-222.
- Firmasyah,R.,Pratiwi,R.N.,Riyanto.2014. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Badung). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2 (1):154 -160.
- Scheyvens, Regina, 2002. *Tourism for Development (Empowering Communities)*, England: Pearson Education Asia Pte Ltd.
- Sharpley, R. 2000. *Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide*. Journal of Sustainable Development.
- Suharno,. (2005). *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. (Tidak diterbitkan).
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2011. *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif di Indonesia*.
- Winarno, Budi. 2004. *Implementasi Konsep “Reinventing Government” dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Ruang Seminar Penida Noor Fia UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 14-18 Juli 2003).

Sumber Undang-undang :

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah.
- Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

ANALISIS DAYA DUKUNG WISATA ALAM GUNUNG PANCAR DESA KARANG TENGAH KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

Oleh :

Kemala Saras Rianty¹, Oot Hotimah², Aris Munandar³,

Pendidikan Geografi FIS Universitas Negeri Jakarta¹²³

E-mail : Rianty.ksr@gmail.com, arisbrebes77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah wisatawan maksimal yang dapat ditampung di area wisata TWA Gunung Pancar. Lokasi penelitian berada di area wisata Taman Wisata Alam Gunung Pancar yang terbagi menjadi delapan area yakni dua area swafoto (area swafoto A dan area swafoto B) dan enam area perkemahan (Bukit Batu Hijau, Bukit Batu Gede, Lembah Pakis, Lembah Hijau, Bukit Batu Pandan dan Bukit Batu Gajah) pada hari kerja dan hari libur dari bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil pengamatan potensi lanskap dan pengukuran luas area wisata. Serta data sekunder berupa data jenis burung, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, data curah hujan tahunan dan jumlah pengelola. Teknik analisis data terbagi menjadi tiga indikator yakni daya dukung fisik, daya dukung riil, dan daya dukung efektif. Jumlah rata-rata wisatawan pada tiga tahun terakhir adalah 293 orang per hari. Angka ini jika dibandingkan dengan nilai daya dukung fisik yang ideal, area swafoto B telah melampaui batas maksimal. Sementara berdasarkan nilai daya dukung riil dengan dibatasi faktor biofisik (keanekaragaman burung, potensi lanskap, kemiringan lereng, erosititas tanah, dan curah hujan), disimpulkan bahwa area swafoto A dan B telah melampaui batas maksimal. Sementara ketika dibatasi dengan jumlah pengelola, nilai daya dukung efektif area swafoto A dan B berada dibawah jumlah rata-rata wisatawan harian. Dalam hal ini, area swafoto A dan B telah melampaui batas maksimal jika dibandingkan dengan data sekunder jumlah wisatawan.

Kata kunci : Daya Dukung, Wisata, Taman Wisata Alam.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berperan penting bagi ekosistem yaitu sebagai tempat penyimpanan air, sebagai habitat bagi flora dan fauna, mengurangi polusi pencemaran udara, sebagai penyubur tanah, sebagai agen penyuplai oksigen untuk kehidupan, sebagai penahan erosi dan lain sebagainya. Kawasan hutan di Indonesia kini memiliki luas sekitar 120,6 juta hektar dari total luas datarannya (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan:2018). Sayangnya, luas kawasan hutan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat alih fungsi lahan hutan yang diakibatkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya populasi dan kebutuhan industri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dan berbagai pihak berusaha agar kawasan hutan tetap terjaga kelestariannya. Kawasan hutan mulai berkembang nilainya menjadi suatu destinasi pariwisata. Hal ini didasari oleh meningkatnya kesadaran manusia dalam upaya pelestarian kawasan hutan. Oleh karena itu, kini hutan menempatkan diri sebagai wisata berbasis pelestarian atau disebut dengan ekowisata. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat (Fandeli:2002). Ekowisata di Indonesia biasanya dijumpai di kawasan konservasi yang dapat berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru.

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar merupakan destinasi wisata alam yang berada di daerah Kabupaten Bogor. Secara geografis kawasan ini terletak di antara $106^{\circ} 52' - 106^{\circ} 54'$ BT dan $6^{\circ} 34' - 6^{\circ} 36'$ LS. Sedangkan secara administrasi, TWA Gunung Pancar terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor (BBKSDA Jabar, 2016). Status awal kawasan ini adalah hutan produksi lalu beralih fungsi menjadi taman wisata alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1988 pada tanggal 21 Maret 1988 dengan total luas 447,5 Ha. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di areal TWA Gunung Pancar ini diberikan kepada PT. Wana Wisata Indah (PT WWI) melalui Keputusan Menteri Kehutanan berdasarkan No. 54/Kpts-II/93 sejak tanggal 8 Februari 1993 hingga sekarang.

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar merupakan destinasi wisata alam yang memiliki daya tarik utama berupa kerindangan hutan pinus yang tenang dan sejuk. Selain hutan pinus, objek wisata yang menarik adalah sumber mata air panas yang dikembangkan menjadi kolam-kolam air panas umum dan kolam air panas di ruangan tertutup. Selain itu, PT. Wana Wisata Indah juga menawarkan wisata alam bebas berupa areal perkemahan dengan 6 titik yang berbeda, lokasi *outbound*, kegiatan *gathering*, dan juga areal untuk kegiatan *tracking downhill*. Lokasi ini juga dapat disewakan untuk lokasi foto *pre wedding*, *venue wedding*, serta dapat dipergunakan sebagai lokasi syuting pembuatan film.

Beberapa tahun terakhir, TWA Gunung pancar mengalami perkembangan agar lebih menarik wisatawan dengan memanfaatkan keindahan hutan pinus yang ada. Pengembangan ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki usaha wisata di TWA Gunung Pancar dengan membangun beberapa properti pelengkap untuk kegiatan wisata swafoto seperti rumah pohon, *hammock*, tenda mini, meja gantung, ayunan dan beberapa properti lainnya. Pembangunan dan pengelola properti ini diberikan kepada warga setempat yang ingin melakukan wirausaha di lokasi TWA Gunung Pancar dengan sistem bagi hasil dengan pihak resort Gunung Pancar. Perkembangan ini ternyata menunjukkan kemajuan dalam menarik wisatawan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah wisatawan yang datang pada tiga tahun terakhir seperti pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

TWA Gunung Pancar Tahun 2016-		
1.	2016	110.499
2.	2017	111.870
3.	2018	96.252

Sumber: Data diolah dari PNBPTWA Gunung Pancar (2016-2018)

Berdasarkan tabel 1, jumlah kunjungan wisatawan ke TWA Gunung Pancar pada tahun 2016 - 2018 mengalami fluktuatif dan mengalami penurunan di tahun 2018. Lokasi wisata yang strategis dan mudah dijangkau dengan kendaraan sehingga menjadikan TWA Gunung Pancar salah satu wisata alternatif selain destinasi wisata di daerah puncak untuk berekreasi di akhir pekan dan liburan. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi pengelola dan masyarakat setempat dari segi ekonomi, namun hal ini belum tentu berdampak baik dari segi lingkungan. Jumlah pengunjung yang tinggi dapat memberikan dampak negatif seperti sampah yang berserakan, arena bermain yang tidak layak pakai, rusaknya beberapa properti untuk wisata swafoto serta pemanfaatan batang-batang pohon pinus untuk pemasangan properti swafoto. Padahal area TWA Gunung Pancar merupakan area hutan konservasi yang perlu diperhatikan kelestarian ekosistem di dalamnya.

Tidak jarang pengembangan wisata di zona pemanfaatan wisata cenderung lebih mengutamakan mutu atraksi wisata serta pelayanan agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

Sebaliknya, upaya perlindungan dan pelestarian area wisata dari aspek biofisik lingkungan masih seringkali diabaikan. Padahal, TWA Gunung Pancar merupakan kawasan konservasi yang menawarkan daya tarik alam. Oleh karena itu, agar dapat tetap dapat dikunjungi oleh wisatawan tentu harus memperhatikan kelestarian ekosistem yang ada di dalamnya. Salah satu pertimbangan agar lingkungan kawasan wisata tidak mengalami kerusakan adalah dengan mengetahui daya dukung wisatanya. Daya dukung wisata berkaitan dengan jumlah wisatawan yang datang ke lokasi wisata karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan dan kenyamanan wisatawan itu sendiri.

Maka dari itu, perlu diketahui seberapa banyak wisatawan yang dapat ditampung oleh TWA Gunung Pancar agar kegiatan wisatawan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan aspek fisik (luas kawasan), aspek ekologi (lingkungan mencakup biotik dan abiotik), serta aspek manajemen pengelolanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti serta menganalisis seberapa besar daya dukung wisata di TWA Gunung Pancar yang ideal agar meminimalisir rusaknya kondisi fisik dan lingkungan. Hal ini agar TWA Gunung Pancar tetap mempertahankan prinsip ekowisata atau wisata berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan.

B. METODOLOGI

a. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada ruang aktivitas pariwisata alam di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ruang pengelolaan wisata yang dimaksud antara lain dua area wisata swafoto yakni area swafoto A dan area swafoto B serta enam area perkemahan yang terdiri atas Bukit Batu Hijau, Bukit Batu Gede, Lembah Pakis, Lembah Pakis, Bukit Batu Pandan dan Bukit Batu Gajah. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2019.

b. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil observasi penilaian potensi lanskap dan pengukuran lapangan serta rotasi kunjungan wisatawan. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi literature dan pengumpulan informasi pustaka terkait dengan penilaian daya dukung di lingkungan wisata alam Gunung Pancar yaitu antara lain dari BKSDA Jawa Barat, Stasiun Klimatologi Bogor, serta PT. Wana Wisata Indah selaku mitra usaha wisata di area perkemahan TWA Gunung Pancar.

c. Analisis Data

Penilaian daya dukung di TWA Gunung Pancar mengacu pada rumus perhitungan daya dukung yang dikembangkan oleh Cifuentes (1992) yang telah dimodifikasi. Hasil dari perhitungan daya dukung wisata adalah jumlah kunjungan maksimum yang diperbolehkan dalam satu area per hari dengan mempertimbangkan luas area, kebutuhan area wisata, kondisi biofisik dan kapasitas manajemen. Adapun terdapat tiga indikator dalam perhitungan ini ialah: daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity/PCC*), daya dukung riil (*Real Carrying Capacity/RCC*), dan daya dukung efektif (*Effective Carrying Capacity/ECC*). Adapun rumus perhitungan daya dukung adalah sebagai berikut:

1. Daya Dukung Fisik

Physical Carrying Capacity (PCC) adalah jumlah maksimum wisatawan yang secara fisik dapat diterima di areal wisata pada waktu tertentu. Rumus *Physical Carrying Capacity* (PCC) menurut Fandeli (2002) yaitu sebagai berikut:

$$PCC = A \times \frac{1}{B} \times Rf$$

A adalah luas area wisata; B adalah luas area yang dibutuhkan wisatawan untuk berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan (rekreasi seluas $65m^2$ dan berkemah dengan luas $90m^2$). Sedangkan Rf adalah faktor rotasi atau rata-rata waktu kunjungan harian yang diperkenankan ke satu lokasi

2. Daya Dukung Riil

Daya Dukung Riil adalah jumlah maksimum wisatawan yang diperbolehkan berkunjung mempertimbangkan faktor biofisik setempat. rumus untuk menghitung daya dukung riil atau *Real Carrying Capacity* (RCC) adalah sebagai berikut:

$$RCC = PCC \times \frac{100 - Cf_1}{100} \times \frac{100 - Cf_2}{100} \times \dots \times \frac{100 - Cf_n}{100}$$

PCC adalah daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity*); $Cf_1 \dots Cf_n$ adalah faktor koreksi dari parameter biofisik pada suatu area wisata. Adapun rumus untuk menghitung Cf adalah sebagai berikut:

$$Cfn = 1 - (Mn/Mt)$$

Correction Factor (Cf) diperoleh dengan mempertimbangkan variabel biofisik lingkungan berkaitan erat dengan kondisi spesifik dan karakteristik lapangan. Adapun *Correction Factor* yang digunakan dalam penelitian daya dukung wisata di TWA Gunung Pancar ini terdiri dari 4 antara lain: ($Cf1$) Diversitas Burung, ($Cf2$) Kelerengan, ($Cf3$) Erosivitas tanah, ($Cf4$) Curah hujan.

3. Daya Dukung Efektif

Effective Carrying Capacity (ECC) adalah jumlah optimum wisatawan agar areal wisata dapat menampung berdasarkan pertimbangan kapasitas manajemennya (*Management Capacity/MC*). Daya dukung efektif ini akan menunjukkan jumlah wisatawan yang dapat dilayani dengan optimal oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola dan meminimalisir kerusakan ekosistem yang ada di kawasan wisata. Adapun rumus perhitungan daya dukung efektif adalah sebagai berikut :

$$ECC = RCC \times MC$$

ECC adalah daya dukung efektif (*Effective Carrying Capacity*); PCC adalah daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity*); *Management Capacity* (MC) adalah ketersediaan petugas pengelola wisata. Adapun untuk menilai kapasitas manajemen diketahui dengan rumus Cifuentes (1992) yang dimodifikasi oleh Siswantoro (2012) sebagai berikut :

$$MC = \frac{R_n}{R_t} \times 100\%$$

R_n adalah jumlah petugas pengelola yang ada; R_t adalah jumlah petugas pengelola yang dibutuhkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis daya dukung wisata dilihat dari jumlah rata-rata wisatawan per hari yang berkunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar yang kemudian dibandingkan dengan nilai perhitungan daya dukung wisata baik daya dukung fisik, daya dukung riil maupun daya dukung efektif. Jika jumlah wisatawan yang berkunjung tidak melebihi batas maksimal dari nilai daya dukung maka kerusakan lingkungan dapat dicegah dan terminimalisir. Namun, jika jumlah wisatawan yang berkunjung melebihi dari batas maksimal daya dukung wisata, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem di areal TWA Gunung

Pancar. Oleh karena itu, data jumlah kunjungan wisatawan perlu diperhatikan sebagai tolak ukur perbandingan dalam menilai daya dukung wisata di area wisata.

Berdasarkan tabel 2, jumlah wisatawan yang berwisata di TWA Gunung Pancar cenderung mengalami fluktuatif pada tiga tahun terakhir. Berikut adalah tabel jumlah pengunjung TWA Gunung Pancar dari tahun 2016 – 2018:

Tabel 2.
Jumlah Pengunjung TWA Gunung Pancar Tahun 2016–2018

Bulan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	2.121	10.093	2.749	6.828	3.003	6.219
2	1.668	5.878	1.941	5.958	3.834	5.701
3	2.465	6.674	2.535	6.540	2.952	6.867
4	3.366	6.296	2.902	5.829	1.725	4.683
5	3.758	9.128	2.843	5.871	2.649	7.427
6	2.265	1.757	1.179	7.819	1.277	11.446
7	3.589	9.819	3.291	7.852	2.704	6.271
8	4.950	6.483	3.362	4.639	1.188	4.524
9	3.656	6.590	3.185	8.686	1.113	5.302
10	4.710	6.155	2.701	5.327	1.783	3.932
11	3.195	5.884	1.632	6.621	1.072	3.292
12	217	388	2.311	11.269	1.019	6.269
Jumlah	35.960	75.145	30.631	83.239	24.319	71.933
Total	111.105		113.870		96.252	
Rata-rata	304		312		264	
Rata-rata	293					

Sumber: Data BKSDA Jawa Barat diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 juga dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung atau wisatawan lebih banyak yang berkunjung ke TWA Gunung Pancar pada bulan Januari dan bulan Juli pada tahun 2016, bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Desember pada tahun 2017, serta bulan Januari dan Juni pada tahun 2018. Jika dianalisa pada hari libur pada tiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Desember - Januari merupakan masa liburan akhir semester ganjil anak-anak sekolah. Sedangkan pada bulan Juni - Juli merupakan masa liburan semester genap atau kenaikan kelas anak sekolah. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi tinggi rendahnya wisatawan yang datang ke suatu lokasi wisata khususnya di TWA Gunung Pancar. Peningkatan jumlah wisatawan pada bulan-bulan tersebut dapat saja berubah pada tahun-tahun berikutnya karena adanya perbedaan pada bulan musim liburan.

Bila dilakukan perhitungan rata-rata harian dilihat dari tabel 15 bahwa jumlah pengunjung per hari TWA Gunung Pancar pada tahun 2016 sebesar 304 orang per hari, tahun 2017 sebesar 312 orang per hari, dan ditahun 2018 sebesar 264 orang per hari. Jumlah rata-rata ini mengalami peningkatan 2,63% dari tahun 2016 ke tahun 2017 lalu mengalami penurunan 15% pada tahun 2018. Jika dihitung dari rata-rata jumlah wisatawan per hari selama tiga tahun terakhir didapat angka 293 orang per hari yang berkunjung ke TWA Gunung Pancar. Jumlah ini tidak mempertimbangkan waktu puncak (*peaseason*) maupun hari-hari sepi pengunjung (*off season*).

Nilai daya dukung juga diterapkan pada enam area perkemahan di TWA Gunung Pancar yaitu Bukit Batu Hijau, Bukit Batu Gede, Lembah Hijau, Lembah Pakis, Bukit Batu Pandan dan Bukit Batu Gajah. Nilai daya dukung ini sebagai pembatas agar area lingkungan dan ekosistem

melewati batas maksimal nilai daya dukung fisik pada masing-masing wilayah. Adapun nilai daya dukung fisik pada delapan area wisata ialah sebagai berikut:

Tabel 4.
Nilai Daya Dukung Fisik TWA Gunung Pancar

Ruang Pengelolaan	A	B	Rf	Daya dukung fisik (Kunjungan/hari)
	(m ²)	(m ²)		
Wisata rekreasi swafoto A	19.785	65	3,3	1.004
Wisata rekreasi swafoto B	4.095	65	3,3	208
Bukit Batu Hijau	19.486	90	1	217
Bukit Batu Gede	12.178	90	1	135
Lembah Hijau	7.602	90	1	84
Bukit Batu Pandan	7.504	90	1	83
Lembah Pakis	6.391	90	1	71
Bukit Batu Gajah	4.901	90	1	54

Sumber: Data Olahan Peneliti (2019)

2. Daya Dukung Riil

Nilai daya dukung riil didapat setelah dibatasi dengan kondisi biofisik lingkungan area wisata setempat (diversitas burung, potensi lanskap, kemiringan lereng, erosititas tanah, dan curah hujan). Adapun nilai daya dukung riil pada kawasan swafoto A secara maksimal dapat menampung 233 orang per hari dan pada kawasan swafoto B dapat menampung 48 orang per hari. Angka ini berada dibawah jumlah rata-rata wisatawan harian di TWA Gunung Pancar yakni 293 orang per hari. Hal ini menunjukkan bahwa kedua area wisata swafoto sudah melewati batas nilai daya dukung riil. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dalam membatasi jumlah pengunjung harian dan pemulihan di kawasan swafoto A dan B terlebih ketika menghadapi musim liburan (*peak season*).

Sedangkan nilai daya dukung riil pada enam area perkemahan masih berada diatas dari jumlah wisatawan berkemah harian. Hal ini diartikan bahwa area perkemahan di TWA Gunung Pancar dalam kondisi baik atau tidak melewati batas maksimal nilai daya dukung riil meski telah dibatasi kondisi biofisik pada masing-masing wilayah. Adapun nilai daya dukung riil pada delapan area wisata ialah sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Daya Dukung Riil TWA Gunung Pancar

Ruang Pengelolaan	Faktor Koreksi						
	Cf1	Cf2	Cf3	Cf4	Cf5	Daya Dukung Fisik	Daya Dukung Riil

Wisata swafoto	0,774	0,825	0,6	0,7	0,865	1.004	233
A Wisata	0,774	0,825	0,6	0,7	0,865	208	48
swafoto B Bukit	0,774	0,725	0,6	0,7	0,865	217	44
Batu Hijau	0,774	0,725	0,6	0,7	0,865	135	28
Bukit Batu	0,774	0,825	0,6	0,7	0,865	84	19
Gede Lembah	0,774	0,875	0,6	0,7	0,865	83	20
Hijau	0,774	0,875	0,6	0,7	0,865	75	18
Bukit Batu	0,774	0,875	0,6	0,7	0,865	54	13

Sumber: Data Olahan Peneliti (2019)

3. Daya Dukung Efektif

Nilai daya dukung efektif dikaitkan dengan kapasitas manajemen pengelola yang ada di area swafoto dan area perkemahan. Pengelola di area swafoto dibebankan oleh masyarakat yang memiliki usaha properti. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung efektif, area swafoto A dapat menampung 113 orang per hari dan area swafoto B dapat menampung 34 orang per hari. Jika dilihat jumlah wisatawan harian yaitu sebanyak 293 orang per hari, maka area swafoto A dan area swafoto B telah melampaui batas maksimal nilai daya dukung efektif. Jadwal pengelola yang tidak tetap dalam membuka kawasan properti swafoto mempengaruhi nilai manajemen pengelola dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan.

Sementara nilai daya dukung efektif pada enam area perkemahan belum terlampaui dibandingkan dengan rata-rata jumlah wisatawan berkemah. Dengan demikian, kawasan perkemahan di TWA Gunung Pancar dikatakan baik atau dibawah batas maksimal daya dukung efektif. Oleh karena itu perlu pengembangan kembali agar dapat menarik minat wisatawan berkemah. Adapun nilai daya dukung efektif pada delapan area wisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.
Nilai Daya Dukung Efektif Area Wisata TWA Gunung Pancar

Ruang Pengelolaan	Manajemen pengelola	Daya dukung riil	Daya dukung efektif
Wisata rekreasi swafoto A	0,483870968	233	113
Wisata rekreasi swafoto B	0,714285714	48	34
Bukit Batu Hijau	0,785714286	44	35
Bukit Batu Gede	0,785714286	28	22
Lembah Hijau	0,785714286	19	15
Bukit Batu Pandan	0,785714286	20	16
Lembah Pakis	0,785714286	18	14
Bukit Batu Gajah	0,785714286	13	10

Sumber: Data Olahan Peneliti (2019)

Berdasarkan ketiga hasil analisis daya dukung wisata di TWA Gunung Pancar, dapat disimpulkan bahwa area wisata swafoto baik A maupun B dalam kondisi tidak sesuai karena sudah melewati batas tampung maksimal daya dukung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi biofisik lingkungan area wisata dan kenyamanan wisatawan. Jika tidak ada pembatasan jumlah wisatawan harian, maka dapat menimbulkan kerusakan baik dari fasilitas umum maupun berpengaruh terhadap ekosistem area wisata. Sedangkan keenam area perkemahan dalam kondisi sangat baik atau berada dibawah batas tampung maksimal daya dukung.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai daya dukung wisata di delapan area lokasi penelitian TWA Gunung Pancar yakni dua area swafoto (area swafoto A dan area swafoto B) dan enam area perkemahan (Bukit Batu Hijau, Bukit Batu Gede, Lembah Pakis, Lembah Hijau, Bukit Batu Pandan dan Bukit Batu Gajah), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah wisatawan harian di area swafoto B telah melampaui batas maksimal nilai daya dukung fisik. Idealnya area swafoto B hanya dapat menampung 208 orang per hari. Nilai ini berada dibawah jumlah wisatawan sebesar 293 orang per hari. Luas area swafoto B yang lebih kecil dibandingkan area swafoto A mempengaruhi jumlah wisatawan yang dapat ditampung dalam suatu kawasan.
2. Berdasarkan nilai daya dukung riil dimana faktor biofisik area wisata (diversitas burung, potensi lanskap, kemiringan lereng, erosivitas tanah, dan curah hujan) menjadi faktor pembatas nilai daya dukung, disimpulkan bahwa area swafoto A dan B telah melampaui batas maksimal nilai daya dukung riil.
3. Area swafoto A dan B juga telah melampaui batas maksimal daya dukung efektif setelah dibatasi dengan jumlah pengelola. Adanya perbedaan jadwal pengelola dalam membuka kawasan properti swafoto mempengaruhi nilai kapasitas manajemen dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan.
4. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata wisatawan berkemah pada keenam area perkemahan di TWA Gunung Pancar, dapat disimpulkan bahwa tidak ada area yang melewati batas maksimal nilai daya dukung wisata baik secara fisik, riil maupun efektif. Dari enam area perkemahan, Bukit Batu Hijau merupakan area perkemahan yang paling sering disewa oleh wisatawan karena memiliki area yang lebih luas dengan fasilitas kamar mandi yang lebih banyak. Sedangkan pada area Bukit Batu Gajah merupakan area perkemahan dengan jumlah pengunjung yang sangat rendah yakni hanya 1 orang per hari atau 21 orang per bulan. Rendahnya angka pengunjung di Bukit Batu Gajah ini diakibatkan karena luas area yang lebih kecil dibandingkan area perkemahan lainnya dan baru dioperasikan pada tahun 2017 lalu sehingga wisatawan masih minim yang menyewa.

b. Saran

1. Bagi pengelola, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat dalam menerapkan kebijakan dalam hal membatasi jumlah pengunjung yang ingin berwisata ke area wisata swafoto TWA Gunung Pancar agar tetap asri, lestari, ekosistemnya terjaga dan meminimalisir kerusakan di areal wisata TWA Gunung Pancar terlebih pada hari liburan (*peak season*). Pihak pengelola juga diharapkan agar bisa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di dalam kawasan wisata agar kepengelolaan wisata alam tidak hanya mengedepankan segi perekonomian tetapi lebih mengedepankan segi ekologisnya. Sedangkan pada area wisata berkemah perlu ditingkatkan promosi serta peningkatan kualitas fasilitas yang mendukung area perkemahan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kerangka pemikiran dan khasanah keilmuan bagi para peneliti yang lainnya yang hendak ingin mengkaji tentang daya dukung lingkungan objek wisata agar semua objek wisata memiliki konsep daya dukung lingkungan dan konsep pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arjana, I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Chalik. 1996. *Dasar-dasar Pengetahuan Pariwisata*. Jakarta: Yayasan Bhakti Membangun
- Darsoprajitno, Soewarno. 2013. *Ekologi Pariwisata*. Bandung: CV. Angkasa
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata dan WWF-Indonesia: Jakarta
- Fandeli, Chafid. 2002. *Perencanaan Kepariwisata*. Yogyakarta: UGM
- Fandeli, Chafid dan Muhammad. 2009. *Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap*. [E-book]. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press
- Indriyanto. 2006. *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2014. *Prinsip-prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Grasindo
- Damanik, Janianton dan Weber Helmut F. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Lundberg, Donald, Mink H. Stavenga, M. Krishnamoorthy. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. Terj. Sofjan Jusuf. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pitana, I Gde dan Diarta I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan Suwanto, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Syafiie, H. Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Mandar Maji
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2016. *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas

Jurnal dan Artikel Online

- BBKSDA Jawa Barat Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan. 2016. *Informasi Kawasan Konservasi lingkup BBKSDA Jabar*. Bogor. [http:// bbksda-jabar.ksdae.menlhk.go. id/ kawasan- konservasi/taman-wisata-alam/](http://bbksda-jabar.ksdae.menlhk.go.id/kawasan-konservasi/taman-wisata-alam/) (Diakses pada 9 Januari 2018)\
- Herlambang, Moch. Faisal Rafif, Agus Dwi Wicaksono, AR Rohman Taufiq Hidayat. 2016. "Kemampuan Daya Dukung Lingkungan Wisata Tirta Nirwana Songgorit". *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, Vol 8 No 2. Universitas Brawijaya. <https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/download/245/201> (Diakses 22 Juli 2019)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *The state of Indonesia's Forest 2018*. Jakarta. [http://www.menlhk.go. id/download.php?file the_state_Indonesia_forest_2018_book.pdf](http://www.menlhk.go.id/download.php?file_the_state_Indonesia_forest_2018_book.pdf) (Diakses pada 17 Juni 2018)
- Sasmita, Egi, Darsiharjo dan Fitri Rahmafritia. 2014. "Analisis Daya Dukung Wisata Sebagai Upaya

Mendukung Fungsi Konservasi dan Wisata di Kebun Raya Cibodas Kabupaten Cianjur”. *Jurnal Manajemen Resort & Leisure*, Vol. 11:2. Universitas Pendidikan Indonesia. <http://ejournal.upi.edu/index.php/jure/article/view/2960> (Diakses pada 12 mei 2018)

Siswantoro, Hariadi, Sutrisno Anggoro, Dwi P. Sasongko. 2012. “Strategi Optimasi Wisata Massal di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 10 Issue 2: 100-110. Universitas Diponegoro. <https://ejournal.un-dip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/4533> (Diakses pada 12 mei 2018)

Skripsi dan Tesis

Keswara, Rangga. 2016. *Analisis Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Curug Cibereum, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Jawa Barat*. [Skripsi]. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta

Siswantoro, Hariadi. 2012. *Kajian Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar*. [Tesis]. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/UM/11/1980

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ANALISIS PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS BERBASIS WEBSITE TERINTEGRASI DI TENGAH PUSARAN PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL *MOBILE FRIENDLY*

Oleh :

Ari Kusumah Wardani¹, Irfan Nursetiawan²

¹)Program Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

²)Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Galuh

^{1,2})Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: ari.kusumah@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Otonomi daerah dan era industri 4.0 telah menjadikan platform digital menjadi alat yang dapat membantu peningkatan pelayanan. Informasi dan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Industri pariwisata di Kabupaten Ciamis mengalami pasang surut dalam jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten CIAMIS melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis lebih adaptif. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini, yakni efektivitas promosi wisata berbasis website yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan teknik dan strategi promosi pariwisata berbasis website kurang efektif dibandingkan dengan menggunakan media sosial. Alternative yang dapat digunakan untuk promosi pariwisata dengan menggunakan platform sosial media sebagai media pendukung untuk menunjang promosi pariwisata. Jangkauan sosial media lebih luas dibandingkan dengan website, serta penggunaan sosial lebih banyak dibandingkan dengan pengguna atau pengunjung website. Tampilan website pariwisata seharusnya dilakukan perbaikan, agar lebih menarik bagi pengunjung website dan lebih mobile friendly untuk menjangkau pengguna gadget berbasis smartphone.

Kata Kunci : Promosi; Pariwisata; Website; Sosial Media

A. PENDAHULUAN

Era otonomi saat ini, pemerintah dituntut agar memberikan kesejahteraan pada masyarakat daerah dengan penyediaan media pemberdayaan bagi masyarakat. Sektor pariwisata tetap menjadi salah satu primadona bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pariwisata di Kabupaten Ciamis, khususnya untuk jumlah kunjungan mengalami fluktuasi, baik untuk kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal ini berdampak terhadap penurunan jumlah PAD setiap tahunnya.

Langkah strategis telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan pengelolaan website pariwisata yang terintegrasi dengan informasi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Website tersebut berfungsi untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pariwisata. Hal ini tentunya merupakan langkah adaptif dari Pemerintah Daerah untuk menarik minat para wisatawan.

Menurut Nurfalah, F., & Wihayati, W. (2016) menyatakan, sektor pariwisata adalah satu sektor yang sangat berperan dalam penerimaan devisa negara kita. Informasi akan pariwisata Indonesia merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam promosi pariwisata negara kita. Informasi pariwisata merupakan aspek yang penting untuk menunjang keberlangsungan industri pariwisata. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan industri pariwisata harus adaptif dan pengelolaan harus sudah terkomputerisasi.

Strategi promosi pariwisata yang bermula hanya berupa promosi dengan media

Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana penampilan website yang ditampilkan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis?; (2) Bagaimana kelengkapan informasi yang disajikan website Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis?; dan (3). Bagaimana konsep promosi yang efektif dalam promosi pariwisata? Penelitian ini fokus pada efektivitas media promosi berbasis website. Urgensi dalam penelitian ini berkaitan dengan peran website sebagai media promosi pariwisata dan trend media sosial yang tentunya dapat membantu promosi pariwisata secara daring, serta gratis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif bersifat tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya, penekanannya pada deskriptif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Penelitian deskripsi kualitatif menurut Mayer dan Greenwood (dalam Uber Silalahi, 2009:27) semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Penelitian deskripsi kualitatif ini menjelaskan tentang fenomena website sebagai media promosi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

Hal tersebut sejalan dengan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) menyatakan, metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, metode ini menitikberatkan pada observasi, maka peneliti hanya mengamati dan mencatat gejala langsung sebagai observasi, dan penulis melakukan wawancara ke lapangan. Selain itu, untuk validasi data dilakukan dengan cara triangulasi, baik itu triangulasi wawancara, triangulasi dokumen, maupun triangulasi hasil catatan lapangan. Hal ini untuk memudahkan dalam klusterisasi data dan analisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan berkaitan dengan sistem informasi. Begitupula dalam industri pariwisata, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan khususnya dalam upaya promosi pariwisata. Pariwisata telah menjadi bagian industri yang berkembang dalam upaya peningkatan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan Salah, Wahab (dalam Triyono, J., 2018) menyatakan, Pariwisata adalah salah satu industri model baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain.

Berdasarkan hal tersebut, pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dari segi promosi pariwisata terkendala oleh sumber daya modal untuk kegiatan promosi. Promosi melalui media *website* menjadi salah satu alternatif. Salah satu yang menggunakan media tersebut, yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

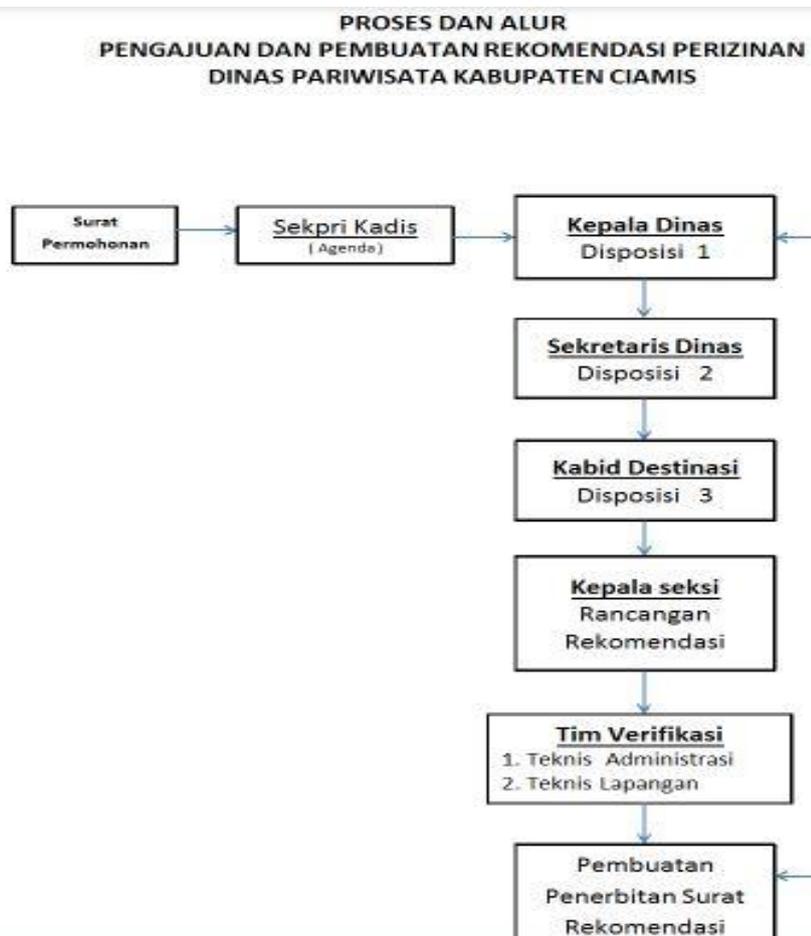
Menurut Azwanti, N. (2018), menyatakan *website* pariwisata dapat memberikan layanan informasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah. Keberadaan website tentunya dapat membantu untuk kegiatan promosi secara daring. *Website* Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mempunyai peta situs, sebagai berikut:

- a. Home;
- b. Profil;
- c. Berita;
- d. Artikel;

- e. Info Publik;
- f. Peraturan;
- g. Galeri; dan
- h. *Database*.

Bedasarkan hal tersebut, *website* pariwisata yang dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis cukup lengkap dalam menyajikan informasi. Salah satu menu yang tentunya mendukung dalam industri pariwisata di Kabupaten Ciamis, yakni menu pelayanan. Karena fungsi dari instansi dan lembaga publik, yakni pelayanan. Menurut Sinambela, L. P. (2006) menyatakan, pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Artinya dalam industri pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis juga mengharuskan memberikan bentuk pelayanan kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.

Bentuk pelayanan yang ditampilkan dalam *website* tersebut, yakni berupa bagan alir tentang Proses dan Alur Pengajuan dan Pembuatan Rekomendasi Perizinan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Alur tersebut disajikan pada gambar berikut:



Gambar. 1
Proses dan Alur Pengajuan dan Pembuatan Rekomendasi Perizinan Dinas Pariwisata
Kabupaten Ciamis

(Sumber: <https://dispar.ciamiskab.go.id/>, 2019)

Alur pelayanan tersebut merupakan salah bentuk implementasi dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam bentuk *website*. Menurut Kuliah, M. (2005), menyatakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bidang kajian yang saat ini sedang berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan kemajuan teknologi informasi sebagai pendukung dari aktivitas bisnis. Namun, untuk sektor publik lebih mengarah kepada kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, yakni dengan menampilkan beberapa informasi tentang objek wisata di Kabupaten Ciamis. Adapun objek wisata yang ditampilkan di *website* tersebut masih belum semua objek wisata ditampilkan. Dengan demikian tidak semua *author* layanan *website* tersebut mengetahui tentang informasi pariwisata. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi para pengguna untuk mencari informasi tentang pariwisata di Kabupaten Ciamis.

Promosi pariwisata merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Promosi berbasis digital memang menjadi salah satu yang dapat menjadi sarana untuk penyelesaian hambatan promosi yang dilakukan secara konvensional. Menurut Betari CA, et al. (dalam Adhanisa, C., & Fatchiya, A., 2017) menyatakan, bahwa kegiatan promosi merupakan salah satu tahapan dari kegiatan pemasaran yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di suatu kawasan wisata. Oleh karena itu, perbaikan untuk segala informasi berkaitan dengan informasi pariwisata harus mengalami pembaharuan.

Format dan bentuk *website* Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Hanya untuk *update* informasi belum maksimal berkaitan dengan informasi objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk strategi dalam promosi yang telah dikembangkan, diperlukan pembaharuan dan pengembangan, karena yang menjadi dominasi saat ini berkaitan dengan pengguna sosial media. Sosial media telah berkembang menjadi salah satu *platform* digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Adapun alternatif yang dapat diperbaharui untuk tampilan *website* pariwisata tersebut, yakni berkaitan dengan tampilan visual untuk informasi objek wisata di kawasan Kabupaten Ciamis. Identitas visual tidak dapat terpisahkan dalam strategi promosi, khususnya di sektor pariwisata. Menurut Haiqal, M. K., & Hidayat, S. (2017), menyatakan penerapan identitas visual pada media promosi *website* bertujuan untuk menghasilkan media promosi yang dapat menjangkau target pasar secara luas dan efektif sekaligus memperkenalkan dan meningkatkan kesadaran akan brand wisata.

Begitu pula, jika hal tersebut diimplementasikan pada *website* yang telah dibangun akan berdampak pada kunjungan wisatawan, Informasi menjadi salah satu yang penting bagi wisatawan untuk mengetahui tentang informasi, baik untuk lokasi tempat wisata, atraksi wisata, dan harga tiket masuk. Tetapi di *website* Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum mencantumkan berkaitan dengan harga tiket masuk, serta fasilitas maupun sarana prasarana yang ada di lokasi wisata.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tampilan *website* Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis cukup lengkap dalam menampilkan informasi pariwisata.
2. Penggunaan sosial media dapat dijadikan media alternatif untuk promosi wisata.
3. Penggunaan *website* terintegrasi belum sepenuhnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhanisa, C., & Fatchiya, A. (2017). Efektivitas website dan instagram sebagai sarana promosi kawasan wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.[Internet]*, 1(4), 451-466.
- Azwanti, N. (2018). Perancangan Website Promosi Wisata dan Rental Mobil pada Bintang Internal Rental. *Klik-Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 5(1), 15-26.
- Haiqal, M. K., & Hidayat, S. (2017). Penerapan Identitas Visual pada Media Promosi Website Wisata Kerajinan Rajapolah. *Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain dan Periklanan (Demandia)*, 182-199.
- Kuliah, M. (2005). Sistem Informasi Manajemen. *Bina Nusantara. Jakarta*.
- Moleong (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Nurfalah, F., & Wihayati, W. (2016). Peranan Media Promosi melalui Website yang Dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dalam Menumbuhkan Minat Berwisata di Cirebon. *Jurnal Signal*, 3(2).
- Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi.
- Triyono, J. (2018). Pengaruh Daya Tarik dan Promosi Wisata terhadap Kepuasan Pengunjung Kampoeng Wisata di Desa Melikan Kabupatean Klaten. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 12(1).
- Uber, Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

STRATEGI PEMKOT BANDUNG DALAM MENINGKATKAN ODTW DAGO POJOK MENJADI KAWASAN EKOWISATA ALAM

Oleh :

Muchsin al-Fikri¹, Witri Cahyati², Sandra Irawati³

Universitras Sangga Buana (USB) Bandung

enginekeren@yahoo.co.id– witri.cahyati@gmail.com –nengsanira@gmail.com

ABSTRAK

Urusan kepariwisataan berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 merupakan urusan pilihan. Hal tersebut mengandung makna bahwa potensi kepariwisataan daerah harus lebih dikembangkan sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Bahkan dalam Undang-undang no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan keleluasaan untuk menggali segala sumber daya daerah berdasarkan potensi, karakteristik, dan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka merupakan suatu tuntutan, tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah untuk memanfaatkan segala sumber daya daerah termasuk potensi kepariwisataan daerah. Kota Bandung merupakan daerah tujuan wisata yang sangat digandrungi para wisatawan baik domestik maupun asing, karena memiliki banyak ODTW yang sangat potensial untuk terus dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner maupun wisata minat khusus. Salah satu objek daya tarik wisata (ODTW) yang penting untuk dikembangkan adalah Kampung Wisata, Edukasi, dan Industri Dago Pojok yang terletak di RW 03 Kelurahan Dago. Kampung wisata tersebut menyajikan seluruh potensi wisata dari warga Dago Pojok, meliputi wilayah Curug Dago, Sawah Cikalapa, Tanggulan, dan Dago Pojok yang dimulai dengan akses sepanjang 2 kilometer dari depan Hotel Sheraton hingga Curug Dago. Kawasan tersebut berpotensi dijadikan sebagai ekowisata alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengeksplorasi data-data primer maupun sekunder. Selain mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan kepariwisataan, penulis juga melakukan dept-interview kepada beberapa informan diantaranya kepala dinas pariwisata Kota Bandung, Camat dan Lurah Dago, pengelola kawasan wisata dan pengunjung. Kesimpulannya adalah Pemerintah Kota Bandung harus berperan untuk mewujudkan pariwisata yang bernuansa wiraswasta melalui pendekatan "Public Private and Community Partnership" (PPCP) sehingga terjadi proses transformasi birokrasi yang berjiwa kewirausahaan dalam memfasilitasi dan memberdayakan UKM bidang jasa pariwisata di obyek wisata Dago Pojok.

Kata Kunci : Strategi, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), Investasi

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya daerah mengembangkan dan memanfaatkan urusan kepariwisataan di daerah harus ditunjang oleh segala sumber daya daerah, dimulai dari ketersediaan aspek kelembagaan, pembiayaan, prasarana/sarana dan termasuk di dalamnya dukungan sistem operasionalnya. Disamping itu, dukungan dari aspek-aspek lainnya harus terus dikembangkan, diantaranya sinergisme hubungan antar tingkatan pemerintahan, kestabilan politik dan keamanan, ketertiban, dan perilaku masyarakat daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu sektor yang berperan dalam pembangunan di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal perolehan devisa adalah industri Pariwisata. Bagi Pemerintah Kota Bandung, pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu langkah dalam mendorong Kota Bandung sebagai Daerah Tujuan Wisata di Indonesia.

Upaya untuk menarik para investor sehingga berminat untuk menanamkan modalnya dibidang kepariwisataan tersebut, sangat dibutuhkan aspek-aspek pendukungnya diantara kebijakan/regulasi

ditingkat Nasional, regional Jawa Barat maupun di Kota Bandung secara sinergi. Diantaranya yang menyangkut pelayanan perijinan berdasarkan prinsip pelayanan prima yaitu kecepatan, kemudahan dan biaya yang terjangkau, disamping kestabilan politik dan keamanan juga sangat dibutuhkan untuk tetap dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, objek dan daya tarik wisata yang sudah ada di Kota Bandung harus tetap dikelola secara profesional sehingga disamping akan lebih menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi objek dan daya tarik wisata tersebut, juga akan menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya pada objek-objek wisata tersebut.

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan pariwisata, Pemerintah Kota Bandung selalu berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang pengembangan industri pariwisata yang tetap dilandasi oleh kearifan lokal dan budaya daerah. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di bidang kepariwisataan, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan kerjasama dengan para investor di daerah melalui langkah pembenahan objek wisata sehingga memberikan daya tarik kepada investor untuk menanamkan modalnya sehingga objek wisata tersebut menjadi lebih berdaya tarik bagi para wisatawan.

Salah satu objek daya tarik wisata yang potensial untuk dikembangkan adalah Kampung Wisata, Edukasi, dan Industri Dago Pojok yang berlokasi di RW 03 Kelurahan Dago. Kampung wisata tersebut menyajikan seluruh potensi wisata dari warga Dago Pojok, meliputi wilayah Curug Dago, Sawah Cikalapa, Tanggulan, dan Dago Pojok yang dimulai dengan akses sepanjang 2 kilometer dari depan Hotel Sheraton hingga Curug Dago.

Mengingat keberadaan Dago Pojok terletak di kawasan Bandung Utara maka Pemerintah Kota perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pengembangan kawasan wisata sehingga perlu diarahkan kepada ekowisata alam yang lebih ramah terhadap lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan tingkatan telaaahnya, merupakan penelitian eksploratif, dan berdasarkan jenis dan sifat analisis datanya berupa penelitian kualitatif. Jenis data yang terkumpul yang sebagian besar berupa data kualitatif serta sifat analisis yang digunakan, maka pendekatan penelitian kualitatif lebih tepat digunakan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Selain mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan kepariwisataan, penulis juga melakukan *dept-interview* kepada beberapa informan diantaranya kepala dinas pariwisata Kota Bandung, Camat dan Lurah Dago, pengelola kawasan wisata dan pengunjung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kebijakan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025, pada Bab II tentang pembangunan Kepariwisata Nasional, Pasal 3 ayat (2) nyamenyebutkan bahwa RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Provinsidan Kabupaten/Kota.

Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Bab IV pasal 8, menyebutkan bahwa : Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Provinsi, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Kabupaten/Kota. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integrasi dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) dari seluruh Indonesia telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan di Jawa Barat telah ditetapkan 3 Destinasi

Pariwisata Nasional (DPN) yaitu : Destinasi Bogor – Halimun, Destinasi Bandung – Ciwidey dan Destinasi Pangandaran – Nusakambangan.

2. Tinjauan Kebijakan Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata di Indonesia harus memiliki produk wisata yang berkualitas, berdaya saing tinggi sehingga mampu berpacu pada kompetisi di tingkat pasar internasional. Peningkatan produk wisata tersebut harus pula diarahkan dengan merancang bangun kekuatan melalui pendekatan sosial budaya dan lingkungan yang mengakar di masyarakat sebagai kekuatan yang fundamental. Dalam melakukan pengembangan suatu Destinasi Pariwisata yang berdaya saing tinggi diperlukan adanya suatu arah kebijakan pengembangan kepariwisataan yang komprehensif-integral.

3. Tinjauan Kebijakan Pariwisata Kota Bandung

Visi

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata internasional 2018.

Misi

Misi Pembangunan Kepariwisata Kota Bandung adalah:

Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan yang Profesional, berkarakteristik Sunda dan berwawasan Global.

Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian.;

Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona.;

Meningkatkan destinasi pariwisata Kota yang berdaya saing pada tingkat regional, nasional maupun internasional;

Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau kabupaten/kota/negara lain.

4. Konsep dan Kebijakan

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kota Bandung merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif. Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan pariwisata perkotaan kreatif mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus memperhatikan:

- a. memulihkan dan mengonservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata kreatif;
- b. memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
- c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
- d. mengurangi jejak ekologis dengan mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.

Adapun Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Bandung Utara, serta pengendalian perkembangan pariwisata; pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;

- c. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- d. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- e. pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah; dan
- f. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan.
- g. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut;
- h. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- i. pembangunan lanskap alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
- j. penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
- k. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif; pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri.

5. Strategi Pembangunan ODTW Kepariwisata

Strategi Pembangunan Kepariwisata ada banyak ragamnya yaitu:

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan Ekowisata Alam Dago Utara, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha–Gedung Sate, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, kawasan pariwisata Warisan Budaya Alun-alun-Braga, kawasan pariwisata budaya tradisional Ujung Berung, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage sebagai kawasan strategis pariwisata Daerah;
- b. mengembangkan kawasan pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi, kawasan pariwisata Seni Rupa Setrasari, kawasan pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas–Sukajadi, kawasan pariwisata Seni Kreatif Jalan Surapati–Padasuka, kawasan pariwisata Aeronautika Bandung, kawasan pariwisata Kesehatan Pasteur, kawasan pariwisata Taman Kota Jalan Aceh– Jalan L.L.R.E Martadinata, kawasan pariwisata belanja Otto Iskandardinata–Kepatihan, kawasan pariwisata alam perkotaan Tegallega, kawasan pariwisata industri kreatif Cibaduyut–Cigondewah, kawasan pariwisata rekreasi Edukatif Gatot Subroto, kawasan pariwisata industri Kiaracandong, kawasan pariwisata belanja Metro Soekarno-Hatta, kawasan pariwisata Lembaga Pemasaryakatan Sukamiskin, kawasan pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu sebagai kawasan pengembangan pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya: warisan budaya, kuliner, belanja, rohani, kesehatan, industri, seni budaya; dan geowisata cekungan Bandung;
 - a. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;
 - b. mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- d. mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;
- e. mengembangkan teknik interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata, target pasar wisatawan, serta segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, yaitu anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus;
- f. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, dan fasilitas rekreasi di wilayah timur Daerah;
- g. memfasilitasi tersedianya angkutan wisata dan lahan parkir terpadu, terutama di kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan tinggi serta kawasan pariwisata yang merupakan kawasan lindung alam dan budaya;
- h. mengembangkan pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan masih rendah;
- i. membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas pariwisata dan pendukungnya, daya tarik wisata, serta taman kota yang menunjukkan ciri kreativitas Daerah;
- j. membangun infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus; dan
- k. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata.
- l. Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
- b. meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- e. meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;
- f. memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;
- g. menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata perkotaan kreatif; dan
- h. mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah.

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan pasar pariwisata Dago Pojok diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- b. menetapkan pasar pariwisata berpendidikan tinggi, keluarga, dan segmen pasar pariwisata konvensional dari dalam dan luar negeri sebagai pasar utama serta segmen pelajar/mahasiswa dari dalam negeri khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pasar potensial pariwisata Daerah;
- c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun, target pertumbuhan wisatawan Nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Daerah;
- d. membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata kreatif berwawasan lingkungan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
- e. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi;
- f. mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas;
- g. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
- i. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran; dan mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah.

Kriteria Perencanaan Kawasan Pariwisata

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:

- a. memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni;
- b. melindungi kawasan Bandung Utara; dan
- c. mengendalikan perkembangan pariwisata.

Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:

- a. pariwisata kreatif;
- b. pariwisata berbudaya tradisional; dan
- c. pariwisata berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata primer;
- b. daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan rencana pembangunan kawasan.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah diantaranya Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara yang meliputi:

- a. daya tarik wisata primer adalah Taman Hutan Raya Djuanda, Dago Pakar, Curug Dago, dan Punclut; dan daya tarik wisata sekunder adalah Kawasan Taman Budaya dan Kampung Wisata Dago Pojok.
- b. Sasaran pembangunan Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara diarahkan untuk mengendalikan pembangunan di Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara.
- c. Rencana Pembangunan Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara meliputi:
 - ✓ penataan kawasan ekowisata alam pegunungan dengan mempertahankan fungsi kawasan;
 - ✓ pembuatan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya tarik wisata, sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki fungsi ekologis penting;
 - ✓ pengembangan program wisata edukatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

6. **Tinjauan Kebijakan Tata Ruang “Kawasan Bandung Utara (KBU)”**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 tahun 2008, Kawasan Dago Pojok termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (KBU). Secara keseluruhan, Kota Bandung, meliputi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kelurahan, terdiri dari : 1. Kecamatan Sukasari, meliputi :Kelurahan Sarijadi;Kelurahan Sukarasa;Kelurahan Gegerkalong;Kelurahan Isola. 2. Kecamatan Sukajadi, meliputi : Sebagian Kelurahan Pasteur; Sebagian Kelurahan Cipedes; Kelurahan Sukawarna; Sebagian Kelurahan Sukagalih; Sebagian Kelurahan Sukabungah. 3. Kecamatan Cicendo, meliputi : a) Sebagian Kelurahan Sukaraja; Sebagian Kelurahan Husein Sastranegara. 4. Kecamatan Cidadap, meliputi : Kelurahan Hegarmanah; Kelurahan Ciumbuleuit; Kelurahan Ledeng. 5.Kecamatan Coblong, meliputi : Kelurahan Dago; Sebagian Kelurahan Cipanganti; Sebagian Kelurahan Lebak Gede; Sebagian Kelurahan Sekeloa; Sebagian Kelurahan Lebak Siliwangi. 6.Kecamatan Cibeunying Kaler, yaitu Sebagian Kelurahan Cigadung. 7.Kecamatan Mandalajati, meliputi : Sebagian Kelurahan Jatihandap; Sebagian Kelurahan Sindangjaya; Sebagian Kelurahan Pasir Impun; 8.Kecamatan Cibeunying Kidul, yaitu Kelurahan Pasirlayung. 9.Kecamatan Ujungberung, meliputi : Sebagian Kelurahan Pasirwangi; Sebagian Kelurahan Pasirjati; Sebagian Kelurahan Pasanggrahan. Kecamatan Cibiru, meliputi : Sebagian Kelurahan Cisurupan; Sebagian Kelurahan Palasari; Sebagian Kelurahan Pasirbiru.

Kawasan Cekungan Bandung yang merupakan salah satu kawasan andalan dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat juga mempunyai arti penting bagi keutuhan ekosistem Jawa Barat dalam mendukung kehidupan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai kawasan konservasi air di Cekungan Bandung diharapkan dapat mendukung kualitas lingkungan Kawasan Cekungan Bandung.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, pertumbuhan dan perkembangan penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) masih belum terkendali sehingga menimbulkan gangguan fungsi lindung baik di kawasan itu sendiri maupun kawasan di bawahnya.

Profil ODTW Dago Pojok

Lokasi Kampung Wisata Dago Pojok

Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Kawasan wisata Dago Pojok termasuk kedalam pariwisata perkotaan kreatif, yaitu pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.

Secara administratif Kampung wisata Dago Pojok berlokasi di RW. 03, RT.1,2,3,4,7 dan 9. Kelurahan Dago Kecamatan Coblong dengan luas kawasan sekitar 8 Ha. Status lahan milik masyarakat.

Sejarah Kawasan

Kawasan ini dirintis sejak tahun 2003 dengan penggagas utama adalah Bapak Rahmat Jamaril dan didukung oleh warga setempat serta aparat RW dan RT setempat dengan tujuan utama adalah peningkatan berbagai kreativitas masyarakat yang positif untuk menghasilkan karya seni budaya dan sentra ekonomi kerakyatan dalam upaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat setempat khususnya di RW 03.

Awalnya bapak Rahmat Jamaril yang mempunyai back ground pendidikan senirupa ITB bersama beberapa rekannya begitu peduli terhadap keadaan sosial ekonomi di Bandung terutama terhadap anak jalanan sehingga kelompok kecil inilah yang mengawali membentuk rumah tinggal yang berbeda dengan organisasi lainnya yaitu berusaha memberikan pendidikan formal dan informal seni budaya terhadap anak jalanan agar mereka bisa mandiri, seiring berjalannya waktu upaya ini akhirnya bisa membantu beberapa anak jalanan baik secara pendidikan formal maupun informal sehingga mereka bisa mandiri, dengan adanya program BOS dari Pemerintah program terhadap anak jalanan ini akhirnya berhenti dengan sendirinya namun upaya kepedulian sosial masih terus dijalankan dalam bentuk upaya pengentasan kemiskinan

Bentuk nyata dari gagasannya bersama dengan beberapa tokoh seni budaya Bandung dan beberapa expatriate yang peduli terhadap keadaan social khususnya di Bandung akhirnya membuat organisasi Lembaga Social Masyarakat berupa "rumah tinggal Taboo". Organisasi inilah yang memotori kegiatan Kawasan pariwisata kreatif kampung seni budaya Dago Pojok.

Dilhami maraknya pendirian mall dimana-mana oleh para investor sebagai sentra kegiatan ekonomi para pengusaha dalam bentuk bangunan yang vertical dan terdiri dari berbagai bentuk usaha jaringan pengusahanya mulai yang berlabel dan mempunyai hak paten sampai pada kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga terjadi kegiatan ekonomi dimana ada kelengkapan barang dan ada kebutuhan masyarakat sehingga pertemuan antara keduanya menjadi pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak antara pengusaha dan masyarakat bisa didapatkan dalam satu tempat dan menjadi sentra ekonomi.

Dari pola pikir inilah akhirnya muncul ide kreatif dengan segala bentuk keterbatasan dana serta sarana dan prasarana yang minimal akhirnya terbayang bentuk mall yang kebanyakan vertical dengan berbagai potensi kalau dibedah dan dibuat secara horizontal maka sama saja dengan membuat kawasan Dago Pojok sebagai bentuk macro horizontal dari mall tersebut dengan menjual potensi kreativitas yang ada dari masyarakat setempat dengan diawali melalui potensi seni dan budaya yang diharapkan bisa mendongkrak potensi ekonomi kerakyatan lainnya yang ada dimasyarakat

Konsep yang dipakai adalah lebih memberdayakan potensi yang ada melalui pendekatan yang mendalam mengenai situasi dan kondisi pelaku seni budaya melalui pembinaan yang intensif dan berkelanjutan sehingga mempunyai nilai lebih serta Adapun pasar utama kawasan pariwisata kreatif kampung dago pojok diawali oleh wisatawan asing yang mengetahui melalui promosi yang intensif di internet, sebagian besar wisatawan asing sangat tertarik terhadap wisata kreatif Dago Pojok terutama terhadap diskusi kreatif seni budaya, pembelajaran secara langsung pada minat ketertarikan mereka akan seni budaya tertentu dalam bentuk latihan beberapa hari dan finishingnya mereka bisa berkarya langsung mengaplikasikan proses belajarnya, untuk yang seni lukis maka akan diadakan pameran lukisan mereka didepan rumah taboo dan sekitarnya sedangkan untuk seni lukis mural maka akan dicarikan tempat berupa tembok atau dinding rumah warga atau mengganti lukisan mural lainnya yang sudah kusam atau rusak untuk dihapus dan dibuat baru lagi sedangkan untuk seni gerak dan seni music akan dipentaskan serta semua aplikasi tadi akan dipublikasikan oleh media cetak dan visual maupun secara online via internet sehingga kegiatan ini selain menjadi kebanggaan turisnya secara pribadi sebagai pengalaman wisata yang tidak ada di daerah manapun dan terpublikasi juga sebagai

ajang promosi yang sangat efektif sehingga lebih dikenal dimanca Negara daripada di daerah Bandung sendiri.

Berbagai macam seni yang bisa dipelajari adalah sebagai berikut :Seni lukis, Seni lukis, Mural, Seni lukis batik, Seni kreatif daur ulang barang bekas, Seni kertas Saeh, Seni music tradisional bambu, Seni music gondang, Seni musik degung, Seni music kendang penca, Pencak silat dan Seni tari tradisional Sunda, serta Diskusi seni lainnya.

Kondisi Fisik Dasar Kawasan

a. Topografi (ketinggian, kelerengan, morfologi)

Kawasan Wisata Dago Pojok berada di ketinggian sekitar 775 dpl sehingga termasuk Kawasan Bandung Utara yang pembangunannya diatur tersendiri dalam Perda Kawasan Bandung Utara.

b. Iklim / Curah Hujan

Kawasan Dago Pojok memiliki udara yang cukup sejuk, meskipun berdekatan dengan Kota, namun karena berada di dataran yang relatif tinggi, maka udaranya sejuk. Daerah ini juga memiliki Curah hujan yang sedang karena berdekatan dengan Kota Bandung.

c. Potensi Bencana

Kawasan Dago Pojok termasuk daerah yang aman dan jauh dari potensi bencana, karena kawasan ini menyatu dengan kawasan penduduk sehingga aman untuk dijadikan kawasan wisata.

Kondisi Masyarakat Kawasan

Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Singkatnya, faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan *staff* akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan-an, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang dilakukannya.

- Jumlah dan Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk RW.03 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong berjumlah 1512 jiwa dengan 8589 Kepala Keluarga. Adapun luas wilayah yang dibina oleh Rumah Taboo seluas kurang lebih 8 Ha.

- Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk RW. 03 dominan sebagai pekerja buruh lepas. Secara keseluruhan proporsi mata pencaharian penduduk, sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil sebanyak kurang lebih 20 %, Pegawai Swasta 70 %. Dan Lain- lain 10 %.

- Penduduk Menurut Agama

Penduduk RW.03 dominan beragama Islam. Secara keseluruhan proporsi penganut agama di RW.03, yaitu: Islam sebanyak 91 %, Khatolik 5 %., Protestan 2 %, Lain-lain 2 %

- Penduduk Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan umumnya penduduk RW.03 menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SLTA. Tingkat pendidikan lainnya yang diselesaikan penduduk RW.03, yaitu: Sampai Tingkat SD 30 %, Sampai Tingkat SLTP 20 %., Sampai Tingkat SLTA 45 %. Dan sampai pendidikan tinggi sekitar 5 % .

Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Adapun yang menjadi daya tarik Kampung wisata Dago Pojok, yaitu:Adanya potensi wisata edukatif, yaitu kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan

pengetahuan. Berbagai macam seni yang bisa dipelajari adalah sebagai berikut: Seni lukis, Seni lukis Mural, Seni lukis batik, Seni kreatif daur ulang barang bekas, Seni kertas Saeh, Seni music tradisional bambu, Seni music gondang, Seni music degung, Seni music kendang penca, Pencak silat, Seni tari tradisional Sunda dan Diskusi seni lainnya.

Pengelolaan Objek Wisata

- Lembaga Pengelola
Bentuk nyata dari gagasan bersama dengan beberapa tokoh seni budaya Bandung dan beberapa expatriate yang peduli terhadap keadaan sosial khususnya di Bandung membuat organisasi Lembaga Sosial Masyarakat berupa: "Rumah Tinggal Taboo". Organisasi inilah yang memotori sekaligus yang dianggap sebagai pengelola kegiatan Kawasan pariwisata kreatif kampung seni budaya Dago Pojok.
- Kegiatan Promosi
Kegiatan promosi selain dilakukan melalui jaringan media sosial, pengelola juga membuat pamflet yang dibagikan kepada pengunjung dan masyarakat luas.
- Kualitas SDM Pengelola
Pengelola Kampung wisata Dago Pojok berasal dari para aktivis LSM serta Akademisi yang memiliki kepedulian terhadap seni dan pemberdayaan masyarakat.
- Komitmen pelaku wisata
Kawasan ini dirintis dengan tujuan utama adalah peningkatan berbagai kreativitas masyarakat yang positif untuk menghasilkan karya seni budaya dan sentra ekonomi kerakyatan dalam upaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat setempat khususnya di RW 03. Sehingga seluruh komponen masyarakat yang ada di RW 03 memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dan mengembangkan kawasan wisata Dago Pojok.

D. KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan ODTW Dago Pojok menjadi Ekowisata alam, Pemkot Bandung perlu melakukan beberapa hal berikut ini :

1. Mengembangkan " *Cluster Business*" dalam penguatan UMKM bidang pariwisata berdasarkan pengembangan dan penguatan sentra-sentra wisata yang potensial
2. Menciptakan kemudahan dalam perijinan, menghilangkan birokrasi Pemerintah Kota yang ketat, tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*High Economy Risk*)) serta pemberanlayanan terpadu dalam penguatan UKM bidang pariwisata sehingga dapat menimbulkan iklim investasi usaha yang kondusif dalam pengembangan pariwisata.
3. Mengembangkan usaha jasa pariwisata yang memiliki ciri khas atau tradisional sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang bersifat terpadu antara kegiatan ekonomi/pariwisata dengan sosial, budaya/seni.
4. Menjalin hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang kondusif dalam bidang kewenangan dan pengaturan investasi dan penjualan hasil produk wisata terutama dalam proses penetapan kebijakan umum, teknis operasional melibatkan Pemerintah Kabupaten dan pelaku pariwisata/Stake holder.
5. Mewujudkan peran Pemerintah Kota yang lebih bernuansa wiraswasta melalui pendekatan " *Public Private and Community Partnership*" (PPCP) sehingga terjadi proses transformasi birokrasi yang berjiwa kewirausahaan dalam memfasilitasi dan memberdayakan UKM bidang jasa pariwisata di obyek-obyek dan daya tarik wisata, sentra-sentra usaha jasa pariwisata atau di jalur-jalur wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G., 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- Wahab, Salah, 2003. *Manajemen Kepariwisata*, alih bahasa Fans Gromang. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wiranatha, Agung Suryawan., 21 Januari 2008. *Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Masyarakat* (Debat Publik), Bali Post.
- Yoeti, Oka A., 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Penerbit Aksara.
- KEPMEN Kehutanan No 446/kpts-II/1996 tentang tatacara izin pengusahaan hutan wisata, Taman nasional, hutan raya dan taman wisata laut.
- KEPMENBUDPAR No. Kep 21/MKP/XI/2000 tentang Masyarakat pariwisata Indonesia. Pelaksanaan Kegiatan Investasi, dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi,
- Tarigan, Robinson, 2006, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tashadi, Ed., 1994. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah,
- Peraturan pemerintah No 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata alam zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata, taman Hutan.
- PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah,
- PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
- Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang No 24 tahun 92 tentang Tata Ruang
- Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang no 25 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang No 32 thn 2004 tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi keaneka ragaman Hayati dan Ekosistem
- Undang-undang No 6 tahun 1968 tentang PMDN
- Undang-undang No 9 tahun 1990 dirubah No 10 tahun tahun 2009 tentang kepariwisataan

DAYA TARIK WISATA ZIARAH DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS PADA MAKAM GODOG)

Oleh :

Pasciana Rostiena¹, Lia Juliasih²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Garut

Jln. Cimanuk No. 285 A

e-mail: rostiena_pasciana@uniga.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Garut relatif terkenal dengan sektor pariwisatanya, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religi-nya. Hal yang menarik untuk diteliti di Kabupaten Garut adalah wisata ziarah yang termasuk pada kategori wisata religi. Dari beberapa lokasi wisata ziarah di Kabupaten Garut, yang paling banyak dikunjungi adalah makam Godog. Pada pemakaman ini terdapat makam Prabu Kiang Santang yang disebut juga Syeh Rohmat Suci; salah satu putra Prabu Siliwangi (Raja Padjadjaran) yang telah memeluk agama Islam. Lokasi wisata ziarah memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang memungkinkan berbeda bagi wisatawan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi daya tarik wisatawan pada wisata ziarah di Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik analisis data melalui analisis faktor yang bersifat eksploratori, populasi penelitian yaitu wisatawan Makam Godog dengan jumlah sample sebanyak 105 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari 12 indikator membentuk 5 (lima) faktor yaitu faktor latar belakang, faktor aktivitas, faktor aktor, faktor lingkungan dan faktor pendukung. Saran penelitian ini bagi pemerintah agar dapat mengoptimalkan faktor-faktor yang menjadi daya tarik wisata dengan melakukan pengelolaan yang baik agar aksesibilitas wisatawan semakin tinggi sehingga sektor pariwisata khususnya wisata ziarah di Kabupaten Garut akan mampu berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci : *pariwisata; daya tarik wisata; wisata ziarah*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata sehingga mampu meningkatkan daya saingnya di dunia. Hal ini dapat dilihat dari data *The Travel & Tourism Competitiveness Report* yang dirilis WEF (*World Economic Forum*) 2019 bahwa Indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia tahun 2019 berada pada peringkat ke 40 dari 140 negara. Sementara di kawasan Asia Tenggara, indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat ke 4 (empat) (Prodjo, 2019).

Pariwisata di Indonesia merupakan industri yang sangat potensial dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara serta dapat meningkatkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Berdasarkan data pada tahun 2018 pariwisata di Indonesia selama 3 tahun sebelumnya merupakan penyumbang devisa terbesar kedua (Febrian, 2018).

Ketertarikan pariwisata di Indonesia sangat tinggi bukan hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga bagi wisatawan asing. Keindahan alam, dan kekayaan akan budaya menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu destinasi wisata potensial di Jawa Barat, adalah di Kabupaten Garut; terkenal dengan berbagai sektor pariwisatanya, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religi-nya. Dari beberapa sektor pariwisata, yang menarik untuk diteliti di Kabupaten Garut adalah wisata ziarah yang termasuk pada kategori wisata religi.

Wisata religi adalah sebuah perjalanan atau kunjungan yang dilakukan baik individu maupun kelompok ke tempat dan institusi yang dianggap penting dalam penyebaran dakwah dan pendidikan Islam (Shihab, 2007). Dan Ziarah adalah suatu tradisi yang dilakukan masyarakat dengan mengunjungi makam, baik saudara, leluhur, ataupun makam yang dianggap keramat. Ziarah dilakukan dengan tujuan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dan biasanya diikuti kegiatan menyiram air serta menabur bunga di makam tersebut. Ziarah yang dilakukan tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan ajaran agama tetapi juga merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari para pendahulu. Pada era modern seperti sekarang inipun kegiatan ziarah ke tempat-tempat suci masih kerap dilakukan.

Wisata ziarah adalah wisata yang seringkali dikaitkan dengan ajaran agama, kepercayaan, adat istiadat, sejarah yang ada pada masyarakat. Wisata ini dapat dilakukan oleh perorangan ataupun secara berkelompok/ rombongan ke tempat-tempat yang dianggap suci atau dikeramatkan, ke makam orang-orang besar, pemimpin yang di agungkan ataupun para tokoh agama di zaman dahulu. Wisata ziarah dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah yang memiliki kelebihan. Kelebihan ini misalnya dilihat dari sisi sejarah, adanya mitos dan legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur bangunannya.

Beragam motivasi dimiliki oleh wisatawan yang melakukan wisata ziarah seperti motivasi ibadah, motivasi belajar; motivasi dakwah, motivasi syukur dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa (1) Pada dasarnya terdapat motivasi yang mulia dalam semua kegiatan ziarah yaitu motivasi syukur, (2) Tidak dijumpai motivasi belajar (sejarah) dan dakwah yang mestinya lebih dikembangkan, 3) Masyarakat memiliki kelekatan yang kuat dengan makam (*place attachment*). Makam memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Majasto. (Indrawati, Nurhasan, & Muthali'in, 2018)

Ada beberapa tempat wisata ziarah yang populer di Kabupaten Garut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Objek Wisata Ziarah di Kabupaten Garut

No	Nama Tempat	Lokasi
1	Makam Godog (Prabu Kinasantang)	Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan.
2	Makam Keramat Pangeran Papak di Cinunuk	Kecamatan Wanaraja
3	Makam Sunan Haruman (Syech Jafar Shidik)	Desa Cipareuan, Kecamatan Cibiuk
4	Makam Sunan Cipancar/ (Prabu Wijaya Kusumah)	Desa Pasirwaru, Kecamatan Limbangan
5	Makam Senopati Arif Muhamad	Desa Cangkuang, Kec. Leles

Sumber: Hasil penelitian 2019.

Selain lokasi yang tercantum pada tabel 1, masih ada beberapa lokasi ziarah lainnya namun kurang begitu populer di masyarakat. Adapun data pengunjung/ wisatawan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Kunjungan tahun 2018

No	Nama Tempat	Jumlah Wisatawan
1	Makam Godog	21.759 orang
2	Makam Jafar Shidiq	16.486 orang
3	Makam Pangeran Papak- Cinunuk	15.420 orang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2018.

Dari tiga lokasi wisata ziarah yang terkenal di Kabupaten Garut, lokasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah makam Godog. Pada pemakaman ini terdapat makam Prabu Kiang Santang yang disebut juga Syeh Rohmat Suci. Prabu Kiasantang adalah salah satu putra Prabu Siliwangi (Raja Padjadjaran) yang telah memeluk Islam. Lokasi pemakamannya berada di Kampung Godog, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpwitan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tentunya lokasi tersebut memiliki daya tarik wisata sehingga mampu mendatangkan banyak wisatawan.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 1
Makam Godog

Makam Prabu Kiasantang terletak di dalam sebuah bangunan seperti pada Gambar 1. Di dalamnya terdapat pula makam sahabat Prabu Kiasantang yang dipisahkan oleh ruangan serta ada pula makam para sahabat yang tersebar di lingkungan sekitarnya; total ada 9 (Sembilan) makam. Menurut salah satu Juru Kunci makam yaitu Dede Juhana bahwa Makam Godog dikelola oleh IKCI (Ikatan Keluarga Juru Kunci) Makam Godog. (Juhana, 2019)

Banyak hal yang dapat menarik wisatawan untuk datang/mengunjungi destinasi wisata, menurut Suharto dan Djafri (2017) salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan. Termasuk ke dalamnya perayaan hari keagamaan yang menjadi tradisi masyarakat setempat seperti pada hari Maulid Nabi; dimana pada hari ini di Makam Godog dilakukan kegiatan upacara adat “ngalungsur pusaka”. Pada Bulan Maulid khususnya pada saat “ngalungsur pusaka” Makam Godog ramai dikunjungi wisatawan tiap tahunnya. (Juhana, 2019)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Sharma (dalam Kemenpar.go.id, 2012) sebuah kota memiliki daya tarik wisata dalam bentuk:

1. *Primary Elements:*
 - a. *Activity Place: cultural facilities; entertainment facilities; events and festivities; exhibitions, craftworks;*
 - b. *Leisure Setting:*
 - 1) *Physical setting: historical pattern; monuments; art objects; parks, green spaces; waterfronts, canals, harbour;*
 - 2) *Social/cultural characteristics: liveliness of the place; language, local customs, folklore; way of life;*
2. *Secondary Elements: catering facilities; shopping facilities; markets;*
3. *Conditional Elements: accesibility; parking facilities; touristic infrastructure (information bureau, signposts, guides).*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan daya tarik sebuah kota dapat dikategorikan menjadi tiga elemen yaitu, 1) Elemen primer yang terdiri dari; tempat aktifitas dan pengaturan kenyamanan, 2) Elemen sekunder yaitu: fasilitas catering/ makanan, fasilitas belanja dan pertokoan/pasar, 3) Elemen kondisional seperti aksesibilitas, fasilitas parkir, dan infrastruktur.

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Tarik Wisatawan untuk Berkunjung ke Objek Wisata Budaya dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Wisatawan” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, ada 6 faktor yang dipertimbangkan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yaitu faktor budaya, keunikan, promosi, keramahmataman, biaya dan kualitas layanan. Dari hasil pembahasan faktor budaya yang terbukti sebagai penentu wisatawan berkunjung ke objek wisata budaya, hal ini terbukti dari *eigen value* dari faktor budaya yang paling tinggi. (Kirom, Sudarmiati, & Putra, 2016)

Lokasi wisata ziarah memiliki ketertarikan tersendiri bagi para wisatawan yang memungkinkan berbeda antara daya tarik bagi wisatawan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi daya tarik wisatawan pada wisata ziarah di Kabupaten Garut.

B. METODOLOGI

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang dilakukan melalui teknik analisis data yaitu analisis faktor; mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel yang awalnya saling independen, sehingga dapat diringkas menjadi satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit (www.sharingaddicted.com) Dalam hal ini analisis faktor digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan daya tarik wisatawan pada wisata ziarah di Kabupaten Garut. Data diolah menggunakan software *Statistical Package for the Social Science (SPSS) 23 version*.

Tahapan analisis faktor yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan variabel-variabel yang akan dianalisis
2. Menguji variabel yang telah ditentukan tersebut untuk kemudian dipilih yang dapat dianggap layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis faktor. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Bartlett test of sphericity* serta pengukuran *Measure of Sampling Adequacy (MSA)*.
3. Melakukan *factoring*, melalui proses mengekstrak satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos di uji.
4. Interpretasi faktor yang telah terbentuk

5. Validasi atas hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor tersebut telah valid atau belum. Salah satu teknik validasi adalah dengan metode *Confirmatory Factor Analysis*. (www.sharingaddicted.com).

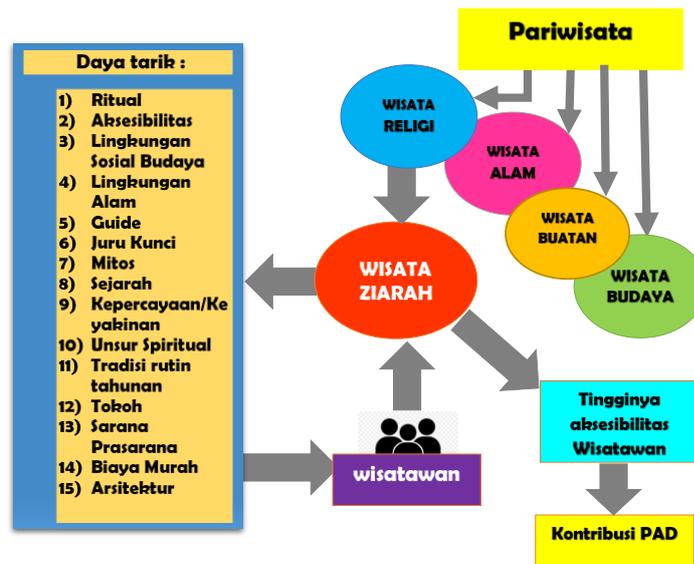
Populasi penelitian yaitu wisatawan Makam Godog dengan jumlah sample dalam penelitian sebanyak 105 responden yang memenuhi batas minimal responden pada masing-masing variabel.

Hipotesis penelitian ini bahwa diduga ada 15 variabel yang menjadi daya tarik wisata ziarah di Kabupaten Garut, yaitu: 1)Ritual, 2)Aksesibilitas, 3)Lingkungan Sosial Budaya, 4)Lingkungan Alam, 5) *Guide*, 6)Juru Kunci, 7)Mitos, 8)Sejarah, 9)Kepercayaan/Keyakinan, 10)Unsur Spiritual, 11)Tradisi rutin tahunan, 12)Tokoh, 13)Sarana Prasarana, 14)Biaya Murah, dan 15)Arsitektur.

Berikut uraian masing-masing variable yang dimaksud:

1. Ritual yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan simbolis yang biasanya dilakukan melalui tata cara yang sudah diatur berdasarkan tradisi tertentu. Misalnya mensucikan diri sebelum masuk ke dalam maqam, memanjatkan doa-doa khusus, dan lain sebagainya.
2. Aksesibilitas yaitu keterjangkauan/ kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya dengan melalui sistem transportasi.
3. Lingkungan Sosial Budaya yaitu hubungan timbal balik atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya.
4. Lingkungan Alam merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan, yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia.
5. Guide / pramuwisata adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau keterampilan dalam memandu wisata.
6. Juru Kunci adalah penjaga tempat-tempat keramat yang biasanya memimpin/ menuntun ritual pada wisata ziarah.
7. Mitos adalah kepercayaan masyarakat setempat yang terkadang tidak dapat didefinisikan sebab akibatnya.
8. Sejarah adalah serangkaian kejadian yang terjadi pada masa lampau dan diakui kebenarannya
9. Kepercayaan/Keyakinan merupakan anggapan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap sesuatu hal yang dinilai benar atau nyata adanya.
10. Unsur Spiritual merupakan hal yang bersifat kejiwaan/ batin. Misalnya hubungan manusia dengan sang pencipta.
11. Tradisi rutin tahunan merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya dan membudaya. Misalnya...
12. Tokoh merupakan seseorang yang dikenal dan memiliki pengaruh di mata masyarakat. Dalam hal ini misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat dll.
13. Sarana Prasarana merupakan keseluruhan alat yang tersedia, dapat menunjang terlaksananya suatu kegiatan.
14. Biaya Murah merupakan uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu baik jasa ataupun barang yang relatif terjangkau
15. Arsitektur merupakan bentuk bangunan yang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai seni yang khas.

Adapun gambar alur pikir sebagai berikut:



Gambar 1
Alur pikir

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

1) Memilih variabel

Analisis untuk memilih variabel dalam penelitian ini dilakukan dua kali. Dari hasil analisis pertama diperoleh nilai KMO sebesar 0,515 ($\geq 0,5$) dan tingkat signifikan $> 0,05$ yang berarti kombinasi variable belum layak untuk dianalisis faktor. Variabel dikatakan kuat berdasarkan KMO ($\geq 0,5$), tingkat signifikan (0,05) dan memiliki koefisien anti image di atas 0,5 (Field, 2000) Sedangkan pada penelitian ini untuk variable-variabel yang tidak layak untuk dianalisis faktor karena mempunyai koefisien korelasi anti image di atas 0,5 adalah sebanyak tiga variabel. Tiga variabel yang memiliki koefisien anti image di bawah 0,5, yaitu variabel Guide (0,332), Mitos (0,460) dan Arsitektur (0,404).

Tabel 3
KMO dan Bartlett's Test Tahap 1

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.515
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	122.614
	df	105
	Sig.	.115

Tabel 4
Anti Image Tahap 1

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis faktor, diperoleh lima faktor yang merupakan reduksi dari dua belas variabel (hasil pengelompokan pada tabel 8), uraian sebagai berikut:

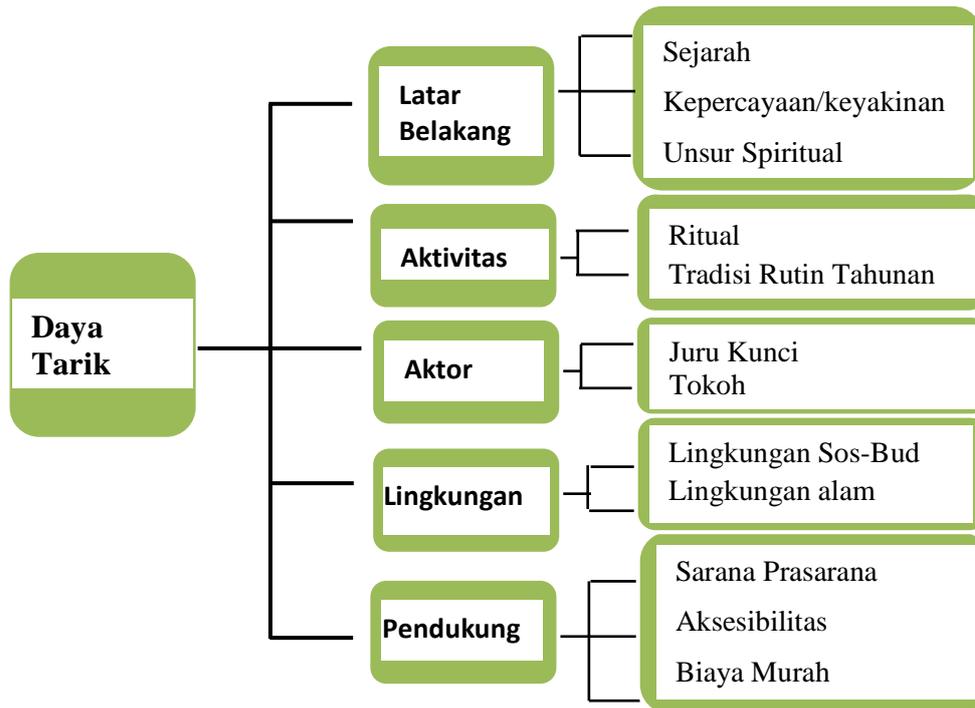
1. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor pertama berurutan sesuai dengan muatan faktor adalah Aksesibilitas (0,766), Sarana Prasarana (0,570), dan Biaya Murah (0,739). Berdasarkan variabel-variabel yang dijelaskan oleh faktor pertama terlihat bahwa faktor ini banyak ditentukan hal-hal yang mendukung individu atau wisatawan untuk berkunjung ke wisata religi, maka oleh peneliti faktor ini disebut Faktor *Pendukung*.
2. Faktor kedua terdiri atas tiga variabel dengan urutan sesuai muatan faktor adalah Sejarah (0,755), Kepercayaan/Keyakinan (0,440) dan Unsur Spiritual (0,765). Faktor yang kedua ini oleh peneliti dinamakan faktor *Latar Belakang*, berisi tentang bagaimana individu/wisatawan memiliki pola pikir atau pemahaman yang dipengaruhi oleh asal muasal suatu daerah/ tempat wisata religi, sehingga wisatawan memiliki ketertarikan untuk berkunjung ke tempat tersebut.
3. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor ketiga adalah Ritual (0,507) dan Tradisi Rutin (0,709) peneliti menamai faktor ini adalah *Aktivitas*. Faktor ini terdiri dari variabel-variabel yang biasanya dilakukan pada saat berkunjung ke tempat/wisata religi.
4. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor empat yaitu Lingkungan Sosial Budaya (0,559) dan Lingkungan Alam (0,490) faktor ini berisi tentang bagaimana ketertarikan wisatawan terhadap hal-hal yang berada disekitar wisata tersebut, peneliti menamai faktor keempat yaitu *Lingkungan*.
5. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor kelima Juru Kunci (0,732) dan Tokoh (0,595), pada faktor ini sangat erat kaitannya interaksi individu/wisatawan dengan pihak-pihak yang mengetahui secara detail terkait informasi tempat wisata religi yang dikunjungi, maka peneliti menamai faktor kelima ini dengan *Aktor*.

Tabel 8
Pengelompokan Variabel

Rotated Component Matrix ^a					
	Component				
	1	2	3	4	5
Ritual (P1)	.181	.280	.507	.186	.038
Aksesibilitas (P2)	.766	.138	.184	-.019	.030
Ling. Sosbud (P3)	-.137	-.035	.428	.559	.179
Ling. alam (P4)	.077	-.004	.015	.790	-.063
Juru Kunci (P6)	-.052	-.038	-.240	-.165	.732
Sejarah (P8)	.092	.755	-.147	.040	-.107
Kepercayaan/Keyakinan (P9)	-.002	.440	-.535	.320	.042
Unsur Spiritual (P10)	-.024	.765	.243	-.127	.075
Tradisi Rutin Tahunan (P11)	.023	-.018	.709	.097	-.185
Tokoh (P12)	.212	.000	.087	.341	.595
Sarana Prasarana (P13)	.570	-.194	-.182	.249	-.251
Biaya Murah (P14)	.739	.059	.035	-.055	.183

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

Kelima faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Model Daya Tarik Wisata

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisatawan pada wisata ziarah di Kabupaten Garut terdiri dari lima faktor yaitu 1) Latarbelakang; yang terdiri dari sejarah, kepercayaan/keyakinan, unsur spiritual, 2) Aktivitas yang terdiri dari ritual dan tradisi tahunan, 3) Aktor yang terdiri dari juru kunci dan tokoh, 4) Lingkungan yang terdiri dari lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam, 5) Pendukung yang terdiri dari aksesibilitas, sarana dan prasarana, dan biaya murah.

Adapun saran penelitian ini: *Pertama*, bagi pemerintah agar dapat mengoptimalkan faktor-faktor yang menjadi daya tarik wisata dengan melakukan pengelolaan yang baik agar aksesibilitas wisatawan semakin tinggi sehingga sektor pariwisata khususnya wisata ziarah di Kabupaten Garut akan mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, bagi peneliti hendaknya meneliti daya tarik wisata ziarah melalui metode kualitatif sehingga mampu menganalisa lebih mendalam atau dapat juga menganalisa mengenai peran pemerintah dalam mengoptimalkan daya tarik wisata ziarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, d. t. (2017, November 16). Analisis Faktor Eksploratori (Principal Component Analysis). *sharingaddicted*. Garut. Retrieved from www.sharingaddicted.com
- Febrian, J. (2018, oktober 26). *kompasiana beyond blogging*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/inijack/5bd2c73f43322f313b1857e4/peringkat-ketertarikan-internasional-terhadap-pariwisata-indonesia> 26 Oktober 2018
- Field, A. (2000). *Discovering Statistics Using SPSS for Window*. london: Sage Publication.

- Indrawati, Nurhasan, & Muthali'in, A. (2018). Motivasi Wisata Ziarah Dan Potensi Pengembangannya Menjadi Wisata Halal Di Desa Majasto Kabupaten Sukoharjo. *jurnal arsitektur*.
- Juhana, D. (2019, Desember 30). Observasi Penelitian Wisata Ziarah Makam Godog. (R. Pasciana, Interviewer)
- Kemenpar.go.id*. (2012, januari 2007). Retrieved from Kemenpar website: <http://www.kemenpar.go.id/post/penegakan-hukum-pariwisata-di-dki-jakarta-sebagai-destinasi-pariwisata-internasional>
- Kirom , N. R., Sudarmiadin, & Putra , I. J. A. (2016). Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 1 Nomor: 3*.
- Prodjo, W. A. (2019, September 05). *travel : kompas*. Retrieved from kompas: <https://travel.kompas.com/read/2019/09/05/173751627/indeks-daya-saing-pariwisata-indonesia-tahun-2019-naik?page=all>.
- Shihab, Q. (2007). *Membumikan Al Quran*. Bandung: Mizan.
- Sudana, I. (2013). Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis Di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *Analisis Pariwisata*, 11.
- Suharto, B., & Djafri, N. (2017). *Pemberdayaan Desa Wisata Religi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN GARUT

Oleh :

¹Erna Rustiana, Hedi Cupiadi²

¹Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

²Program Studi Manajemen, FEKON Universitas Garut

¹Jln. Cimanuk No. 285A Garut

²Jln. Raya Samarang No. 52A Garut

e-mail: hedi.cupiadi@uniga.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut belum optimal sesuai dengan upaya pemerintah daerah yang dituangkan pada kebijakan pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut serta menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya pengembangan pariwisata. Salah satu kebijakan pengembangan pariwisata yang telah diterapkan adalah program prioritas pengembangan 10 destinasi wisata di Kabupaten Garut sehingga pariwisata di Kabupaten Garut dapat lebih diketahui dan dikunjungi sebagai destinasi wisata bertaraf nasional dan internasional. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan studi literatur yang dianalisis secara interpretative berdasarkan teori-teori dari berbagai literatur untuk menarik suatu kesimpulan secara induktif dalam menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menggambarkan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut belum dilakukan secara optimal. Upaya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut diwujudkan melalui kebijakan yang tercantum dalam renstra, RPJMD, peraturan daerah, dan peraturan Bupati Garut, namun kebijakan belum menyentuh pengembangan terhadap atraksi (attraction), mudah dicapai (accessibility), dan fasilitas (amenities) objek wisata sehingga hasilnya belum signifikan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Garut. Untuk meningkatkan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut maka diperlukan komitmen dan keterlibatan stakeholder untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Garut secara berkelanjutan, serta melakukan penelitian secara komprehensif mengenai model atau strategi pengembangan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Garut.

Kata Kunci : Kebijakan; Pariwisata; Kabupaten Garut.

A. PENDAHULUAN

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak (Yoeti, 2016).

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia dan berdasarkan Proenas Bidang Pariwisata, diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain; menjadikan pariwisata sebagai hasil devisa utama melalui sektor pariwisata, menjadikan pariwisata nusantara sebagai pendorong pembangunan, meningkatkan ketangguhan pariwisata nasional, peningkatan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, peningkatan kemitraan masyarakat, swasta, dan media massa, serta peningkatan kerjasama lintas sektoral (Rustiana, Abdillah, & Cupiadi, 2019).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Secara luas pariwisata juga dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan, pembangunan pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Alasan pentingnya pengembangan pariwisata pada suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut, dalam hal keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat daerah setempat (Yoeti, 2016). Apabila usaha pariwisata dikembangkan dengan baik akan memberikan dampak positif berupa penerimaan pajak dan retribusi daerah, kesempatan kerja dan memperkecil angka pengangguran, serta peningkatan bagi perekonomian setempat selain hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan dan pertenunan, akibat pengeluaran (uang yang dibelanjakan wisatawan) di daerah tujuan wisata (Hendrita, 2017).

Alasan kedua, pengembangan pariwisata bersifat non ekonomis, yaitu motivasi wisatawan berkunjung objek wisata adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno, perkebunan, dan sawah ladang. Alasan ketiga, bidang pariwisata perlu dikembangkan dapat menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat dengan adanya interaksi antara wisatawan yang datang dengan penduduk setempat akan dapat membuka paradigma penduduk sekitarnya dalam banyak hal (Yoeti, 2016).

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat penting dalam pengembangan pariwisata dimana Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur terkait kebutuhan pariwisata (Hendrita, 2017).

Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan antara lain oleh Kristiana dan Nathalia (2019) dimana kesimpulan hasil penelitiannya bahwa menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diperlukan pemahaman tentang destinasi pariwisata, koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata, sinergitas program pengembangan pariwisata, dan bantuan berkelanjutan. Penelitian oleh Irawan (2015) yang menyimpulkan bahwa model ideal kebijakan pariwisata yang akan diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi kebijakan pelaksana, dan kurang partisipasi masyarakat. Sementara di sisi lain, komitmen tinggi dari para pemimpin politik lokal dan dukungan yang baik fasilitas sumber daya menjadi faktor pendukung kebijakan. Selanjutnya penelitian Indraningsih (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan memiliki kendala yang meliputi kurangnya komunikasi di antara pemangku kepentingan, kompetensi pelaksana kebijakan masih rendah, partisipasi masyarakat masih kurang,

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti lakukan yaitu lokus penelitian pada tataran Pemerintah Daerah Kabupaten dan kajian analisisnya berdasarkan dimensi teori kebijakan publik dan teori ilmu kepariwisataan. Sedangkan peneliti mengkaji melalui analisis kebijakan dengan pendekatan teori Yoeti (2016) berdasarkan 3A yaitu *Attraction*, *Accesibity*, dan *Amenities* untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pengembangan kepariwisataan.

Penelitian ini berpijak pada kerangka teori yang terdiri dari teori ilmu administrasi publik tentang kebijakan publik dan teori ilmu kepariwisataan yang menjadi topik penelitian.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai legislator dan regulator dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju dalam perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan stakeholders yang lain dalam memainkan peran masing-masing (Hendrita, 2017).

Kebijakan publik hadir dan berperan sentral dalam kehidupan masyarakat dan di sekitar kita. Wahab (2012) yang mengutip Ghani dan Lockhart (2008) menyatakan bahwa “Kebijakan publik (*public policy*) dirangkai dalam dua kata, yaitu “kebijakan” dan “publik”. Menurut Islamy (2009), terdapat sejumlah elemen dalam kebijakan publik, yaitu: (1) bentuk awal dari kebijakan publik adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus dilaksanakan dalam bentuk nyata, (3) kebijakan publik selalu dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan (4) objek kebijakan publik ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik selalu merepresentasikan tindakan pemerintah secara nyata dengan maksud untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik mestilah berkaitan dengan persoalan bersama (*collective problem*) yang karena alasan politis, teknis, administratif, dan finansial membutuhkan intervensi pemerintah dan tidak bias diselesaikan secara individual. Dalam konteks inilah, pariwisata termasuk “problem publik” yang membuat negara harus hadir untuk mengaturnya.

Dalam sejarah perkembangan kajian kebijakan publik, sejumlah pakar melakukan kategorisasi tipe kebijakan. Menurut Anderson (dalam Suharno, 2010), terdapat empat kategori kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan substantif dan prosedural; kebijakan distributif, pengaturan, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang kolektif dan barang privat. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan apa yang direncanakan atau telah dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan kategori ini mengalokasikan secara langsung keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut untuk masyarakat. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan yang dimaksud bisa dijalankan secara operasional, termasuk siapa yang diberi kewenangan untuk implementasinya.

Berkaitan dengan teori ilmu pariwisata maka menurut Krapt dan Hunziker (dalam Yoeti, 2016), pariwisata adalah keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan dalam sebuah perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. “Orang asing” dalam hal ini bukan hanya orang dari luar negeri, tapi juga orang dari luar daerah yang menjadi destinasi wisata.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan “wisata” adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka “waktu sementara”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang menyatakan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

Menurut pendapat Yoeti (2016), daya tarik atau atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti: atraksi alam (landscape, pemandangan laut, pantai, iklim dan fitur geografis lain dari tujuan), daya tarik budaya (sejarah dan cerita rakyat, agama, seni dan acara khusus, festival), atraksi sosial (cara hidup, populasi penduduk, bahasa, peluang untuk pertemuan sosial), dan daya tarik bangunan (bangunan, arsitektur bersejarah dan modern, monumen, taman, kebun, marina). Kemudian Yoeti (2016) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Mengacu pada kategorisasi versi Anderson tersebut, kebijakan pengembangan pariwisata bisa dimasukkan ke dalam sejumlah irisan kategori, yaitu kebijakan substantif dan prosedural, kebijakan distributif, dan kebijakan yang berkaitan dengan *public goods*. Sebagai kebijakan substantif dan

prosedural, kebijakan pengembangan pariwisata dalam konteks penelitian ini adalah prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus telah dimulai tahapan-tahapan implementasinya.

Sebagai kebijakan distributif, kebijakan pengembangan pariwisata telah mengalokasikan pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar destinasi dan wisatawan, seperti penyediaan infrastruktur, penguatan kelompok sadar wisata (darwis), dan bagi hasil pengelolaan wisata. Tentu saja dalam penyediaan infrastruktur tersebut menggunakan dan publik. Adapun sebagai kebijakan yang berkaitan dengan *public goods*, kebijakan pengembangan pariwisata telah mengalokasikan *public goods* untuk kepentingan semua kelompok sasaran. Misalnya pelayanan perizinan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kondisi perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut, dan bagaimana kebijakan dan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut, serta mengetahui hasil kebijakan dan upaya yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Garut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui survey ke beberapa objek wisata unggulan di Kabupaten Garut. Informasi dan data diperoleh melalui wawancara kepada informan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang ditindaklanjuti melalui observasi lapangan ke objek wisata dan studi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Informasi dan data tersebut dianalisis secara *interpretative* berdasarkan teori-teori dan berbagai literatur yang kemudian secara induktif ditarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ke beberapa objek wisata di Kabupaten Garut yang menjadi prioritas program pengembangan antara lain Situ Bagendit, Situ Cangkuang, Pantai Sayangheulang, Pantai Ranca Buaya, Kawah Talaga Bodas, dan Pemandian Air Panas Darajat yang dilihat melalui aspek-aspek destinasi wisata menurut (Yoeti, 2016) yaitu:

a. Atraksi wisata (*Attraction*)

Hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa atraksi wisata yang ada di objek wisata Situ Bagendit, Situ Cangkuang, Pantai Sayangheulang, Pantai Ranca Buaya, Kawah Talaga Bodas, dan Pemandian Air Panas Darajat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Objek Wisata di Kabupaten Garut

No	Objek Wisata	Syarat Objek Wisata (Yoeti, 2016)		
		Apa yang dapat dilihat (<i>something to see</i>)	Kegiatan di objek wisata (<i>something to do</i>)	Produk khas yang dapat dibeli (<i>something to buy</i>)
1.	Situ Bagendit	Pemandangan danau (situ) dengan atraksi rakit bambu dan arena bermain anak-anak.	Wisatawan dapat melihat dan berkeliling situ menggunakan rakit bambu atau perahu dan arena bermain anak.	Lokasinya relatif dekat dengan Kota Garut maka disini dapat membeli Dodol Garut, sambel Cibiuk dan ikan crispy.

No	Objek Wisata	Syarat Objek Wisata (Yoeti, 2016)		
		Apa yang dapat dilihat (<i>something to see</i>)	Kegiatan di objek wisata (<i>something to do</i>)	Produk khas yang dapat dibeli (<i>something to buy</i>)
2.	Situ Cangkuang	Pemandangan danau (situ) dengan atraksi rakit bambu dan arena bermain anak-anak serta pemandangan Candi Cangkuang dan Kampung Pulo	Wisatawan dapat menggunakan rakit bambu untuk mencapai lokasi Candi Cangkuang dan Kampung Pulo.	Lokasinya relatif dekat dengan Kota Garut maka disini dapat membeli Dodol Garut dan cinderamata yang dibuat oleh warga Kampung Pulo.
3.	Pantai Sayang Heulang	Pemandangan laut, pantai, dan karang dimana garis pantai dengan laut cukup jauh	Wisatawan dapat berenang di beberapa lokasi pantai dengan air lautnya yang jernih, menangkap ikan yang berada di karang sepanjang pantai, melihat <i>sunrise</i> , dan lokasinya <i>instagramable</i>	Karena garis pantai dengan launnya cukup jauh maka wisatawan lebih banyak aktivitasnya berenang dan bermain di karang, namun dapat memesan makanan berupa ikan laut bakar.
4.	Pantai Ranca Buaya	Pemandangan laut, pantai, dan pesona karang yang eksotis, kampung nelayan dan atraksi seni yang digelar pada waktu tertentu.	Wisatawan berenang di pantai,, menangkap ikan menggunakan perahu, melihat <i>sunset</i> , dan dijadikan <i>hunting</i> foto.	Berupa berbagai macam ikan hasil tangkapan nelayan yang dapat dibeli wisatawan, dapat makan ikan bakar, dan cinderamata yang terbuat dari kerang.
5.	Kawah Talaga Bodas	Pesona air kawah yang berwarna putih dengan udara segar, serta pemandangan yang <i>instagramable</i>	Wisatawan dapat berfoto pada spot yang indah, dan berendam di kolam buatan dengan air belerang	Cinderamata khas di lokasi ini tidak ada hanya ada kawah dan kolam buatan dengan air panas.
6.	Pemandian Air Panas Darajat	Terletak di dataran tinggi dengan pemandangan yang indah dan udaranya segar serta memiliki spot lokasi yang <i>instagramable</i>	Wisatawan dapat berenang dengan air panas dengan konsep taman air, dan dapat berswafoto.	Tidak ada produk khas di lokasi ini yang menjadi oleh-oleh, kecuali mampir ke Kota Garut untuk membeli Dodol Garut

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dan penelitian lapangan, 2019.

Salah satu unsur yang penting dalam pengembangan destinasi wisata adalah atraksi wisata (*attraction*) yang merupakan produk wisata untuk dapat menjadi daya tarik agar para wisatawan

berkunjung. Semakin unik atraksi wisata pada suatu objek wisata maka akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung karena selain menikmati pesona objek wisata juga melihat atraksi yang ada.

b. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Hasil penelitian lapangan dan pengamatan diperoleh informasi bahwa akses transportasi dan kemudahan menuju objek wisata di Kabupaten Garut cukup baik yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Aksesibilitas Objek Wisata di Kabupaten Garut.

No	Objek Wisata	Aksesibilitas		
		Transportasi	Jarak Tempuh	Kondisi Jalan
1.	Situ Bagendit	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor, bahkan bus pariwisata. • Transportasi umum tersedia berupa angkutan umum dan ojek 	<ul style="list-style-type: none"> • Berjarak sekitar 4 km dari pusat Kota Garut yang dapat ditempuh sekitar 20 menit dengan kendaraan pribadi. • Apabila dengan kendaraan umum sekitar 30-45 menit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan sudah baik bahkan ada jalan alternatif yang sedang dibangun • Karena lebar jalan relatif kecil maka dapat menyebabkan macet jika bus pariwisata masuk menuju lokasi
2.	Situ Cangkuang	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan kendaraan pribadi baik mobil, motor, bahkan bus pariwisata. • Tersedia angkutan umum dan ojek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak dari Kota Garut sekitar 16 km yang dapat ditempuh sekitar 45-60 menit dengan kendaraan pribadi. • Dengan kendaraan umum sekitar 60-90 menit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan sudah baik bahkan ada jalan alternatif yang sedang dibangun • Jalan cukup lebar karena merupakan jalan kabupaten
3.	Pantai Sayang Heulang	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan kendaraan pribadi baik mobil, motor, bahkan bus pariwisata. • Tersedia angkutan umum berupa Elf dengan tarif sebesar sekitar 40-50 ribu rupiah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak dari Kota Garut sekitar 90 km yang dapat ditempuh sekitar 3 jam dengan kendaraan pribadi karena track jalan berkelok. • Dengan kendaraan umum sekitar 3-3,5 jam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan sudah bagus dengan hotmix. • Jalan sudah lebar yang berupa jalan kabupaten karena sebagai prioritas program pengembangan destinasi wisata
4.	Pantai Ranca Buaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan kendaraan pribadi baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Kota Garut sekitar 110 km yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan sudah bagus

No	Objek Wisata	Aksesibilitas		
		Transportasi	Jarak Tempuh	Kondisi Jalan
		<p>mobil, motor, bahkan bus pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia angkutan umum berupa Elf dengan tarif sebesar sekitar 45-55 ribu rupiah. 	<p>dapat ditempuh sekitar 3-3,5 jam dengan kendaraan pribadi karena track jalan berkelok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan kendaraan umum sekitar 3,5-4 jam. 	<p>dengan hotmix.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan sudah lebar yang berupa jalan kabupaten karena dijadikan pula sebagai akses pantai selatan
5.	Kawah Bodas Talaga	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan kendaraan pribadi baik mobil dan motor, untuk bus pariwisata disediakan area parkir. • Dari Kota Garut menggunakan angkutan umum dan ojek, untuk menuju lokasi kawah ditempuh berjalan kaki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Kota Garut sekitar 21 km yang dapat ditempuh sekitar 1,5-2 jam dengan kendaraan pribadi dan motor karena melewati ramainya pasar. • Dengan kendaraan umum sekitar 2-2,5 jam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan sudah bagus dengan hotmix kecuali menuju lokasi jalan yang dilewati relatif kecil. • Jalan menuju kawah tidak dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat, hanya motor dan berjalan kaki
6.	Pemandian Panas Darajat Air	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan kendaraan pribadi baik mobil dan motor, untuk bus pariwisata disediakan area parkir. • Disediakan dua rute angkutan umum dan ojek, tidak bisa langsung kecuali disewa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Kota Garut sekitar 28 km yang dapat ditempuh sekitar 1-1,5 jam dengan kendaraan pribadi dan motor karena melewati ramainya pasar. • Dengan kendaraan umum sekitar 2-2,5 jam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan sudah bagus dengan hotmix namun lebar jalan relatif kecil sehingga pada hari libur dapat terjadi kemacetan • Jalan menuju lokasi turun naik sesuai kontur pegunungan

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut dan penelitian lapangan, 2019.

Aksesibilitas menuju lokasi objek-objek wisata tersebut dapat dikatakan sudah cukup bagus, baik sarana jalan dan sarana transportasi umum menuju lokasi wisata. Bahkan pada lokasi tertentu terdapat beberapa tempat dengan pemandangan eksotis ketika akan menuju ke lokasi wisata. Jalan merupakan salah satu unsur aksesilitas terpenting suatu objek wisata. Jalan merupakan sarana

penghubung maka dibutuhkan jalan yang layak sehingga dapat melancarkan arus transportasi sehingga berdampak pada kemudahan pengembangan destinasi wisata (Yoeti, 2016).

c. Fasilitas/layanan objek wisata (Amenities)

Melalui penelitian lapangan dan pengamatan pada objek wisata diperoleh informasi mengenai fasilitas dan layanan yang ada pada masing-masing objek wisata sebagai berikut:

Tabel 3.
Fasilitas dan Layanan Objek Wisata di Kabupaten Garut

No	Objek Wisata	Fasilitas / Sarana dan Prasarana						
		Kuliner	Penginapan	Komunikasi	Energi Listrik	Air Bersih	Sarana Ibadah	Sarana Penunjang
1.	Situ Bagendit	Tidak ada restoran, hanya warung kecil disekitar area parker	Tidak ada penginapan resmi, hanya rumah masyarakat yang disewa.	Sudah memadai dan terjangkau	Jaringan listrik sudah tersedia sampai lokasi wisata.	Sudah memadai dan cukup lancar	Terdapat mushola dan masjid besar yang dekat dengan lokasi wisata	Area parkir, toilet umum, tempat sampah, rakit dengan kondisi cukup baik
2.	Situ Cangkuang	Hanya ada restoran kecil dan warung kecil di area parkir dan kawasan Kampung Pulo	Tidak ada penginapan resmi, hanya rumah masyarakat yang disewa.	Sudah memadai dan terjangkau	Jaringan listrik sudah tersedia sampai lokasi wisata.	Sudah memadai dan cukup lancar	Terdapat mushola dan masjid besar terdekat dengan lokasi wisata	Area parkir, toilet umum, tempat sampah, dengan kondisi cukup baik
3.	Pantai Sayang Heulang	Terdapat warung makan yang dapat memesan menunya, serta warung-warung kecil	Tersedia penginapan namun cukup jauh dari lokasi wisata, dan terdapat penyewaan rumah warga	Hanya bisa dengan HP	Jaringan listrik hanya sebagian yang sampai ke lokasi wisata	Cukup memadai hanya kurang lancar	Hanya ada mushola kecil, dan rumah warga.	Area parkir, toilet umum sedikit sehingga menumpang di rumah warga, tempat sampah

No	Objek Wisata	Fasilitas / Sarana dan Prasarana						
		Kuliner	Penginapan	Komunikasi	Energi Listrik	Air Bersih	Sarana Ibadah	Sarana Penunjang
								masih kurang
4.	Pantai Ranca Buaya	Terdapat beberapa restoran dan warung makan yang dapat memesan menunya, serta warung-warung kecil	Tersedia penginapan dengan beragam tariff, namun cukup jauh dari lokasi wisata, dan terdapat penyewaan rumah warga	Sudah memadai dan relatif terjangkau	Listrik sudah sampai ke lokasi wisata	Cukup memadai dan cukup lancar	Terdapat beberapa mushola yang ada pada restoran, dan masjid besar yang dekat lokasi wisata	Area parkir, toilet umum, tempat sampah dan sarana lainnya dalam kondisi cukup baik
5.	Kawah Talaga Bodas	Hanya ada warung-warung kecil dan penjual makanan yang dijajakan	Tidak tersedia penginapan karena lokasinya berada di pegunungan	Hanya dengan HP	Listrik belum sampai ke lokasi wisata	Cukup memadai dan kurang lancar	Hanya terdapat mushola kecil	Toilet umum ada beberapa, tempat sampah kurang, dan area parkir berada di bawah
6.	Pemandian Air Panas Darajat	Terdapat beberapa restoran, warung makan, dan warung kecil	Tersedia penginapan dan villa dengan beragam tarif, baik yang dekat atau di sekitar lokasi wisata	Sudah memadai dan terjangkau	Listrik sudah sampai ke lokasi wisata	Sudah memadai dan cukup lancar	Terdapat beberapa mushola yang ada pada restoran dan di objek wisata, serta masjid besar yang dekat lokasi wisata	Area parkir, toilet umum, tempat sampah dan fasilitas lainnya dalam kondisi relatif lebih baik

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut dan penelitian lapangan, 2019.

Fasilitas (*Amenities*) atau sarana dan prasarana pendukung yang ada di objek wisata cukup memadai dengan kondisi cukup baik, namun di beberapa objek wisata lainnya belum memadai bahkan tidak ada sama sekali. Tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana turut berperan agar wisatawan tidak mengalami kesulitan ketika hendak melakukan aktivitas lainnya seperti beribadah, membuang sampah, dan buang air kecil maupun besar. Dengan tersedianya fasilitas penunjang tersebut dapat memberikan kontribusi dari sisi keindahan, kebersihan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Garut.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut diarahkan pada tiga aspek yang diharapkan dapat menjangkau seluruh sektor pembangunan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, serta menjaga pembangunan agar tetap berjalan secara berkesinambungan (*sustainable development*), yang diselaraskan dengan konsep pengembangan wilayah yaitu suatu proses perbaikan tatanan sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (*sustainable welfare*) (Rustiana, Abdillah, & Cupiadi, 2019).

Untuk optimalisasi hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Garut membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut berdasarkan RIPPDA 2014-2019 Kabupaten Garut Bidang Pariwisata melalui program-program sebagai berikut:

1. Pengembangan Daerah Wisata, melalui kegiatan :

1. Pemetaan dan Profil kepariwisataan,
2. Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan,
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sarana Prasarana Penunjang dan fasilitas Pariwisata,
4. Pengembangan dan Peningkatan kualitas pelayanan Jasa Usaha dan lembaga mitra kepariwisataan,
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.

2. Pengembangan Pemasaran Wisata, melalui kegiatan:

1. Pengadaan Material Promosi,
2. Bursa Pasar Wisata,
3. Pemilihan Mojang Jajaka,
4. Event Pariwisata,
5. Penataan sarana prasarana Gedung TIC,
6. Pengembangan sentra-sentra industri kerajinan, peternakan, pertanian, dan makanan khas Kabupaten Garut dengan kegiatan: Pengadaan Produk Unggulan Kabupaten Garut.

3. Pengembangan Nilai Budaya, melalui kegiatan:

1. Dokumentasi dan inventarisasi seni tradisional,
2. Seminar dan Lokakarya Sejarah Kabupaten Garut.

4. Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan:

1. Inventarisasi dan dokumentasi bangunan kuno (Heritage),
2. Dokumentasi dan Inventarisasi Benda- benda Pusaka,
3. Pameran Benda Cagar Budaya Bergerak.

5. Pengelolaan Keanekaragaman Budaya, melalui kegiatan:

1. Pagelaran Seni dan Budaya,
2. Pasanggiri, Festival, dan Helaran Seni Budaya,
3. Gelar Aneka Budaya Garut,
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan sebagai perwujudan kebijakan penembangan pariwisata di Kabupaten Garut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan program tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4. Perkembangan Kunjungan Objek Wisata dan Akomodasi.

Tahun	Akomodasi		Obyek Wisata	
	Wisman*	Wisnus**	Wisman*	Wisnus**
2014	1.941	182.196	5.261	776.796
2015	3.993	234.688	7.189	879.862
2016	2.648	235.136	8.280	797.316
2017	3.555	214.743	4.055	929.569

*Wisatawan Mancanegara

**Wisatawan Nusantara

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2019.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui program-program pengembangan bidang pariwisata apabila dianalisis berdasarkan kriteria yang dikemukakan Yoeti (2016) yaitu *attraction* (atraksi), *accessibility* (aksesibilitas), dan *amenities* (fasilitas) maka dibalik keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, disisi lain masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan antara lain:

1. Pihak ketiga yaitu investor selaku pemilik modal seringkali tidak melakukan konsultasi dalam melakukan pengembangan usaha pariwisata kepada BAPPEDA dan BPMPT sehingga tidak sesuai dengan RIPPDA dan RTRW. Sebagai contoh banyak investor yang sudah membangun objek wisata baru melapor ke Dinas Penanaman modal dan perizinan terpadu .pembangunan tersebut terkadang tidak sesuai dengan RIPPDA dan RTRW sehingga dianggap bermasalah.
2. Dana Alokasi Khusus sebesar 5 Milyar pada tahun 2018 hanya difokuskan untuk pembangunan objek wisata Situ Bagendit, Cangkuang, dan Sayang Heulang, sehingga objek wisata lainnya tidak mendapat alokasi dana pembangunan.
3. Aksestabilitas yang masih kurang mendukung menuju lokasi wisata dimana jalannya masih sempit sehingga menyebabkan kemacetan dan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan.
4. Sarana dan prasarana pada objekwisata belum dikelola dengan baik, karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Hal ini berdampak pada kenyamanan wisatawan ketika berkunjung ke obyek wisata.
5. Program budaya sadar wisata pun masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum sadar akan manfaat dari pariwisata dan kurangnya sosialisasi dan informasi tentang obyek-obyek wisata di Kabupaten Garut.

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut dan penelitian lapangan, 2019)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut sudah baik. Namun pengembnagan pariwisata di Kabupaten Garut secara keseluruhan belum optimal dimana masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada minat kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Garut.

Rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut antara lain:

- a. Berkaitan dengan kemudahan aksesibilitas bagi investor dalam memperoleh ijin untuk pengembangan infrastruktur atau fasilitas obyek wisata diperlukan peningkatan koordinasi dan konsultasi diantara pemangku kepentingan, agar terjadi pemahaman yang sama dalam proses melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut.
- b. Perencanaan prioritas alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata berdasarkan KSPK Kabupaten Garut dan melibatkan program CSR perusahaan-perusahaan di Kabupaten Garut,
- c. Meningkatkan sosialisasi budaya sadar wisata yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Peduli Wisata serta membentuk Kader-Kader Wisata yang peduli terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. (2018). *Kajian Prospektif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2018*. Garut: Disparbud Kabupaten Garut.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. (2019). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata 2014-2019*. Garut: Disparbud Kabupaten Garut.
- Hendrita, V. (2017). Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabuapten Tanah Datar. *Jurnal Agrifo*, 2(2), 73-82. Retrieved from <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/agrifo/article/view/379/309>
- Indraningsih, G. (2019, Juni). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA*, 1(1), 31-40. Retrieved from <http://jurnal.stahds.ac.id/jurnalPariwisataPaRAMA/article/view/257>
- Irawan, E. (2017, Juli-Desember). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jejaring Administrasi Publik*, 7(2), 757-770. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/ADMP@table_of_content_81_volume7_nomor2.html
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Kepariwisataan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kristiana, & Nathalia. (2019, Juni). Peran Pelaku Kepentingan Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 4(1), 60-66. Retrieved from <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpp/article/view/2716>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah - RIPPDA 2014-2019*. Garut: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
- Rustiana, E., Abdillah, U. W., & Cupiadi, H. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Garut. *Conference on Public Administration and Society.1 (1)*, pp. 387-409. Semarang: Universitas Diponegoro. Retrieved from <https://www.proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/viewFile/40/23>
- Rustiana, E., Abdillah, U. W., & Cupiadi, H. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Garut. *Confrence on Public Administration and Society.1*, pp. 387-409. Semarang: Universitas Diponegoro. Retrieved from www.undip.ac.id
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yoeti, H. O. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Cetakan Ketiga ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

**PERAN DINAS PARIWISATA SEBAGAI *THE OPERATING CORE*
DALAM KOMUNIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Tatang Sudrajat¹, Pupi Indriati Zailani², Yuyun Yuniarsih³

Universitas Sangga Buana Bandung

Email : id.tatangsudrajat@gmail.com, piekie26@gmail.com, yuyunyuniarsih79@gmail.com

ABSTRAK

Bagi banyak daerah otonom, termasuk Kabupaten Ciamis, sektor pariwisata dapat berpotensi menjadi salah satu andalan bagi pendapatan daerah. Sebagai salah satu area kebijakan publik, pariwisata sudah ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Untuk efektifnya pencapaian target kebijakan tersebut, peran dan kedudukan Dinas Pariwisata sebagai the operating core dalam implementasinya sangat strategis. Dalam kaitan ini, komunikasi organisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata akan menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis mengenai kepariwisataan berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2027. Sebagai landasan yuridis Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata. Sebagai the operating core urusan pemerintahan bidang pariwisata dan implementing agent/implementor kebijakan bidang pariwisata, Dinas Pariwisata berperan strategis sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah. Beberapa tantangan dihadapi Dinas Pariwisata dalam komunikasi implementasi kebijakan pariwisata ini, diantaranya berkaitan dengan landasan yuridis kepariwisataan, ketersediaan sumber daya organisasi, komitmen pegawai, komunikasi organisasi, pengaturan prosedur standar, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan.

Kata kunci: komunikasi, pariwisata, implementasi kebijakan.

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu fungsi pemerintah daerah sebagai bagian integral dari pemerintahan secara nasional adalah fungsi pembangunan. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara potensial akan dapat berkontribusi pada pendapatan daerah. Dalam konteks ini, terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai pengganti UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan merupakan bagian penting dalam upaya menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan nasional.

Berdasarkan substansinya, UU Nomor 10 Tahun 2009 ini merupakan kebijakan publik (*public policy*), karena merupakan keputusan yang ditetapkan oleh lembaga negara/pemerintah berkaitan dengan adanya permasalahan kepariwisataan sebagai kepentingan publik. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini, telah terbit PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sehingga menjadi kerangka acuan bagi semua pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholders*) kepariwisataan, termasuk pemerintah daerah. Tentu saja berbagai kebijakan publik tentang kepariwisataan yang tersusun secara hirarkis dalam bentuk peraturan perundang-undangan ini tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan (*policy target*) apabila tidak diimplementasikan dengan efektif.

Dalam konteks inilah keberadaan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berperan sebagai *the operating core* dalam mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan sangat penting dan deterministik. Salah satu aspek

penting dalam tahap implementasi kebijakan ini adalah *disseminating information*, yang merupakan proses komunikasi organisasi antara implementor kebijakan dengan seluruh pemangku kepentingan kebijakan kepariwisataan.

Di Kabupaten Ciamis, keberadaan Dinas Pariwisata menurut Pasal 1 angka 12 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata. Berkaitan dengan kedudukannya, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata. Sebagai pimpinan, Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

Sebagai landasan yuridis kebijakan kepariwisataan yang merupakan produk pemerintah Kabupaten Ciamis saat ini berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2027. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai *the operating core* dan juga implementor kebijakan, Dinas Pariwisata dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis hal-hal sebagai berikut :

- a. Pariwisata dan Dinas Pariwisata dalam konteks Sistem Kebijakan.
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dalam Implementasi Kebijakan Kepariwisata.
- c. Peran dan Tantangan Dinas Pariwisata dalam Komunikasi Implementasi Kebijakan Kepariwisata.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata merupakan salah satu area substantif atau area isu kebijakan publik. Kebijakan (*policy*) adalah “*a chosen course of action significantly affecting large numbers of people*” (MacRae, Jr. dan Wilde, 1989:3) atau “*authoritative statements made by legitimate public institutions about the way in which they purpose to deal with policy problems*” (Fox dan Meyer, dalam Roux, 2002:424). Dalam konteks kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah, kebijakan ini dalam terminologi mutakhir sering disebut sebagai kebijakan publik yaitu “*a process aimed to solving public problems, a public problem-solving process*” (Aguilar, 2008:4).

Dilihat dari ruang lingkupnya, kebijakan ini meliputi berbagai bidang kehidupan yang sangat luas, termasuk diantaranya pariwisata. Menurut Dunn, kebijakan publik ini merupakan “*long series of more or less related choices (including decisions not to act) made by governmental bodies and officials, are formulated in issue areas which range from defense, energy and health to education, welfare, and crime control*” (1981:47).

Kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan pada berbagai level pemerintahan tidak akan berdampak positif bagi sasaran kebijakan apabila tidak diimplementasikan. Merujuk pada pandangan Dunn, implementasi ini “*involves the execution and steering of a course of action over time. Here the primary concern is with choosing a course of action and seeing that it is properly followed over time and not with inquiring into the nature of problems*” (1981:56). Tidak jauh berbeda dengan itu, van Meter dan van Horn mengemukakan bahwa proses implementasi ini merupakan “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (Hill, 1997:127). Dengan kata lain, suatu kebijakan hanya berstatus dokumen formal yang tidak bernilai apabila tidak pernah diimplementasikan untuk memperoleh hasil yang

diharapkan. Atau sebagaimana dinyatakan oleh Harrison bahwa “*with effective implementation and constant evaluation in the administrative and operational areas of the organization, policy becomes a meaningless framework and strategy gives to a non purposive commitment of scarce resources*” (1997:18).

Terdistribusikannya informasi kepada khalayak kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, Edwards III mengemukakan pentingnya *disseminating information* sebagai salah satu aktivitas yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan publik (1982:2), dan hal tersebut pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Komunikasi menurut Toda *is an information transformation process which originates at a mind and ends at a mind* (Arifin, 2016:24).

Sebagai implementor kebijakan, organisasi dalam berbagai bentuknya sangat penting. Berkenaan dengan organisasi dan aktivitas manusia, Narayanan dan Nath mendefinisikannya sebagai *an arena where human beings come together to perform complex tasks so as fulfill common goal(s)* (1993:4). Dilihat dari tugas dan wewenangnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis beserta seluruh jajarannya, termasuk apa yang oleh Talcot Parsons diklasifikasikan sebagai *political organizations*, yang aktivitasnya *concerned with ensuring that society as a whole achieves its objectives* (Narayanan dan Nath, 1993:4)

Mengadaptasi pendapat Henry Mintzberg tentang lima elemen dasar organisasi (Robbins, 1990:278), kedudukan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis adalah sebagai *the operating core*. Dikatakan demikian, karena dirinya terdiri dari aparat yang fungsi dasarnya berkaitan dengan proses implementasi berbagai kebijakan organisasi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Menurut Marzuki (2015:47) tergolong penelitian hukum (*legal research*), atau penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2015:13). Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk peraturan sehingga biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*).

Sesuai dengan kepentingan penelitian, data sekunder dalam bentuk berbagai dokumen, undang-undang dan peraturan, berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, dokumen lain yang dicetak, termasuk surat kabar dan majalah dan sumber cetak lain yang relevan, digunakan teknik dokumentasi. Dokumen yang menjadi fokus penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2017 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, serta dokumen terkait lainnya, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2009, PP Nomor 50 Tahun 2011, Inpres Nomor 16 Tahun 2005, Perda Provinsi Jabar Nomor 8 Tahun 2008, Perda Provinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2015, serta Perda Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pariwisata dan Dinas Pariwisata Dalam Konteks Sistem Kebijakan

Keberadaan pariwisata sebagai salah satu urusan pemerintahan sekaligus sebagai satu jenis kebijakan publik, serta keberadaan dan peran Dinas Pariwisata sebagai implementor kebijakan kepariwisataan, dapat dilihat sebagai bagian integral dari apa yang Dunn (1981:46) kemukakan sebagai Sistem Kebijakan (*The Policy System*). Sistem Kebijakan ini terdiri dari tiga elemen yang antara satu elemen dengan yang lainnya saling pengaruh mempengaruhi atau terdapat relasi interdependensi. Ketiganya adalah *Public Policy*, *Policy Stakeholders* dan *Policy Environment*.

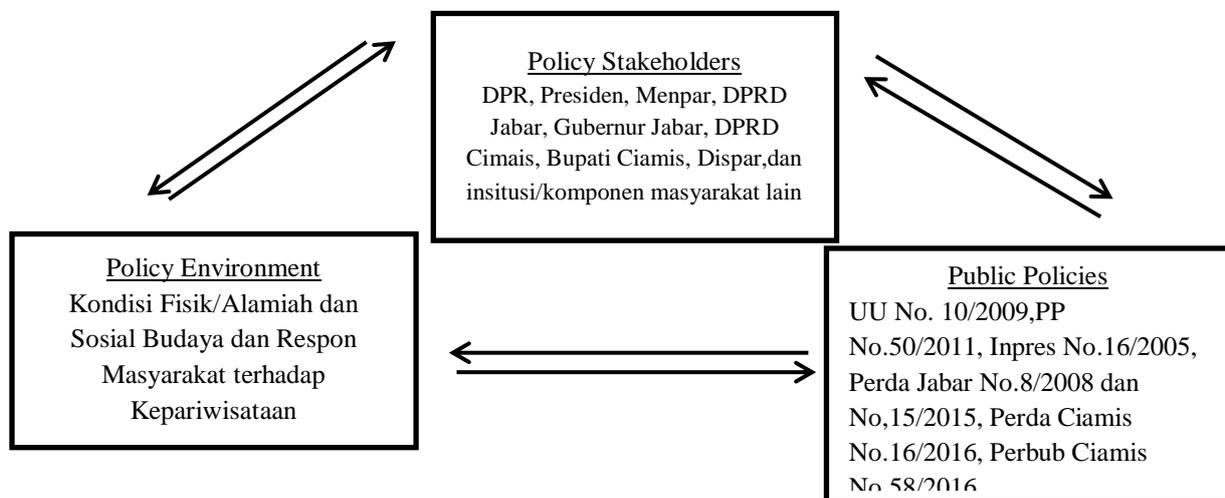
Terdapat beberapa acuan kebijakan sebagai dasar bagi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara nasional adalah UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk level Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa produk kebijakan publik yang mendasari berbagai aktivitas perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pariwisata, diantaranya Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025. Di Kabupaten Ciamis berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2027.

Berbagai kebijakan publik tersebut merupakan produk dari keterlibatan berbagai institusi pada level infrastruktur politik dan suprastruktur politik yang finalisasinya ditetapkan dengan otoritas lembaga negara/pemerintah sesuai dengan level pemerintahannya. Kesemuanya, termasuk Bupati Ciamis, DPRD Kabupaten Ciamis dan Dinas Pariwisata Dinas merupakan bagian integral dari Sistem Kebijakan yang oleh Dunn disebut sebagai *Policy Stakeholders*.

Hal ini merupakan wujud responsivitas institusi tersebut terhadap kondisi fisik/alam dan sosial budaya pendukung kegiatan pariwisata serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan kepariwisataan. Hal inilah yang oleh Dunn disebut sebagai lingkungan kebijakan (*Policy Environment*).

Secara skematis hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1
Pariwisata dan Dinas Pariwisata Dalam Konteks Sistem Kebijakan



Sumber: Adaptasi dari Dunn (1981: 46)

Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa antara tiga elemen dalam Sistem Kebijakan tersebut, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2009 dan peraturan lain yang terkait sebagai *Public Policy*, Dinas Pariwisata sebagai salah satu unsur dari *Policy Stakeholders* serta Kondisi Fisik Alamiah dan Sosial Pariwisata sebagai *Policy Environment*, terdapat relasi interdependensi. Sebagai contoh, secara konseptual maupun empirik, dapat dikemukakan bahwa dengan menempatkan berbagai kebijakan publik tentang kepariwisataan sebagai variabel independen, maka apabila diimplementasikan dengan efektif, akan berpengaruh positif pada *Policy Environment* dan *Policy Stakeholders*, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Sebaliknya, dengan menempatkan kebijakan publik

kepariwisataan ini sebagai variabel dependen, maka ia berada pada posisi dipengaruhi oleh dua elemen lain dalam Sistem Kebijakan, yaitu *Policy Stakeholders* yang di dalamnya terdapat Dinas Pariwisata serta *Policy Environment*.

Berdasarkan kerangka pemikiran itu, keefektifan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Cimahi sangat ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata. Dengan kata lain, perannya dalam komunikasi kebijakan, ketika kebijakan tersebut diimplementasikan akan menunjukkan berhasil tidaknya kebijakan tersebut.

b. Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata Dalam Implementasi Kebijakan Kepariwisata

Analisis tentang peran Dinas Pariwisata sebagai *the operating core* dalam komunikasi implementasi kebijakan kepariwisataan tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kedudukan Dinas Pariwisata serta tugas dan fungsi Kepala Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perbup Nomor 58 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, mengacu pada pandangan Henry Mintzberg tentang lima elemen organisasi, dari perspektif organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis secara keseluruhan, Dinas Pariwisata ini berperan sebagai *the operating core* dalam urusan pemerintahan bidang kepariwisataan. Mengacu pada pendapat Dunn tentang Sistem Kebijakan, maka kedudukan Dinas Pariwisata merupakan implementor kebijakan/*implementing agent* sebagai salah satu elemen dari *Policy Stakeholders*.

Sebagai pimpinan Dinas Pariwisata, Kepala Dinas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. Artinya dalam kedudukan sebagai implementor kebijakan bidang pariwisata dipertegas lagi tentang tugasnya membantu Bupati Ciamis sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari lima fungsi tersebut, yang secara spesifik berkaitan dengan tahap implementasi kebijakan adalah fungsi yang kedua, yaitu pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya. Hal ini bermakna bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 ini, tampak jelas bahwa dari perspektif kebijakan publik Dinas Pariwisata merupakan *implementing agent* kebijakan kepariwisataan, dan dari perspektif sistem organisasi merupakan *the operating core* urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Dari perspektif kebijakan publik, hal jelas itu menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam siklus kebijakan publik, diantaranya dalam tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*) bidang kepariwisataan. Substansi kebijakan yang harus diimplementasikan tertuang dalam Pasal 3, yang meliputi :

- a. Bidang Destinasi Pariwisata, yang meliputi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata; dan Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata.
- b. Bidang Pemasaran, yang meliputi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata; dan Data dan Informasi Pariwisata.
- c. Bidang Ekonomi Kreatif, yang meliputi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hal itu, jelas bahwa bidang tersebut merupakan area kebijakan yang harus diimplementasikan Dinas Pariwisata sebagai *the operating core* pemerintah daerah. Destinasi wisata akan menjadi *entry point* bagi kunjungan wisatawan bila obyek wisata dengan daya tariknya dikelola dengan efektif. Aspek pemasaran sangat strategis dilakukan untuk mempromosikan segala sumberdaya pariwisata yang dimiliki. Demikian pula tersedianya prasarana ekonomi kreatif serta pengelola industri pariwisata yang makin meningkat kapasitasnya merupakan faktor pendukung keefektifan implementasi kebijakan. Dengan demikian daya tarik wisata seperti Kawasan Astana Gede Kawali, Kawasan Situs Karang Kamulyan dan Kawasan Situ Lengkong dapat menjadi andalan bagi pendapatan daerah.

c. Peran dan Tantangan Dinas Pariwisata dalam Komunikasi Implementasi Kebijakan Kepariwisataaan

Pembahasan tentang peran Dinas Pariwisata dalam komunikasi implementasi kebijakan kepariwisataan antara lain dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (3). Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang dimaksud pada hakikatnya tidak lain merupakan fungsi komunikasi organisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan semua pemangku kepentingan kebijakan kepariwisataan, baik internal maupun eksternal.

Sebagai komunikator, segenap aparat Dinas Pariwisata, khususnya yang berada pada Bidang Destinasi Wisata, Bidang Pemasaran dan Bidang Ekonomi Kreatif berperan penting untuk memastikan bahwa semua informasi tentang pariwisata Kabupaten Ciamis dapat ditransmisikan secara efektif. Sebagai komunikan, yaitu warga masyarakat di dalam maupun luar Kabupaten Ciamis terutama yang belum memiliki informasi tentang potensi dan destinasi pariwisata tentu merupakan segmen pasar yang harus digarap dengan serius untuk meningkatkan angka kunjungan wisata. Sebagai pesan (*message*) komunikasi, berbagai informasi terkait kepariwisataan harus tersedia, termasuk semua peraturan dan keputusan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tentu saja dilakukan menggunakan berbagai media atau saluran (*channel*) komunikasi yang dianggap tepat sesuai dengan sasarannya.

Merujuk pada pendapat Edwards III tentang empat faktor atau variabel yang harus diperhatikan untuk efektifnya implementasi kebijakan, yaitu *communication, resources, disposition/attitude* dan *bureaucratic structure* (1981:9), maka terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata sebagai *the operating core* atau *the implementing agent* kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis. Tentu saja relasi diantara keempat faktor tersebut merupakan sesuatu yang dinamis, dalam arti dalam implementasi kebijakan pariwisata ini terdapat relasi interaktif antar keempat faktor tersebut.

Berkenaan dengan faktor komunikasi, Edwards III mengemukakan bahwa '*For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent*' (1981:10). Dalam kaitan ini terdapat tantangan kepada pimpinan Dinas Pariwisata agar setiap pegawai sebagai implementor kebijakan yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan informasi kepariwisataan harus benar-benar menguasai tentang materi yang harus disampaikannya. Penugasan untuk mengimplementasikan kebijakan harus diberikan kepada pegawai yang tepat, dan hal tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Dalam praktik pemerintahan dan pembangunan, seringkali terjadi miskomunikasi internal diantara birokrat pemerintah, serta antara pegawai pemerintah sebagai komunikator dengan warga masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dengan kata lain, komunikasi internal dan eksternal yang dilakukan Dinas Pariwisata akan menentukan kelancaran dan keefektifan kebijakan.

Berkenaan dengan sumber daya (*resource*), Edwards III mengemukakan bahwa '*Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended, and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with ti provide services*' (1981:11). Dengan kata lain tampak jelas bahwa sumberdaya yang penting bagi implementasi kebijakan meliputi staf / sumberdaya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Oleh karenanya terdapat tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan, khususnya yang ditugaskan pada bidang destinasi wisata, pemasaran dan ekonomi kreatif. Dengan jumlah pegawai 39 orang, maka kebutuhan peningkatan kualifikasi keilmuan pegawai di bidang manajemen pariwisata, manajemen pemasaran dan ekonomi kreatif merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar.

Demikian pula kemasan dan substansi informasi kepariwisataan yang telah dibuat selama ini dalam berbagai bentuknya selalu dituntut untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan minat warga masyarakat terhadap ragam wisata. Dalam kaitan ini, wawasan, sikap dan tindakan aparat Dinas Pariwisata yang konvensional harus berubah menjadi *out of the box* yang dicirikan antara lain oleh pikiran, sikap dan tindakan inovatif dan kreatif. Wewenang atau otoritas pegawai Dinas Pariwisata sangat penting dalam implementasi kebijakan, apalagi pada era sekarang yang diwarnai oleh transparansi, transparansi dan akuntabilitas, Hal ini karena saat ini birokrasi pemerintah berhadapan dengan ekspektasi publik yang sangat tinggi, sehingga tidak ada kata lain bagi perangkat pemerintah kecuali memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kepariwisataan. Aspek fasilitas, baik yang berada di ruangan kantor Dinas Pariwisata maupun pada seluruh tempat destinasi wisata dalam berbagai bentuknya, termasuk yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak swasta, harus menunjukkan kualitas prima.

Berkaitan dengan *disposition* atau *attitude*, Edwards III mengemukakan bahwa '*If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and how they see the policies affecting their organizational and personnel interests*' (1981:11). Untuk terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif, maka para implementor juga tidak saja harus memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus memiliki dorongan kerja atau motivasi yang kuat dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, dedikasi, komitmen dan loyalitas seluruh pegawai Dinas Pariwisata, termasuk yang berada pada jajaran Sekretariat Dinas sebagai *the supporting staff*, akan sangat menentukan berhasilnya tidaknya implementasi kebijakan kepariwisataan ini.

Dalam kaitan dengan struktur birokrasi, Edwards III menyebutkan bahwa '*Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross purpose, and result in important functions being overlocked. As organizational units administer policies they develop Standard Operating Procedures (SOPs) to handle the routine situations with which they regularly deal*' (1981:12). Fragmentasi organisasi dan prosedur operasi baku dari setiap unit organisasi serta dalam setiap aktivitas kegiatan juga diperlukan bagi efektifnya implementasi kebijakan kepariwisataan. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan otoritas tiap pegawai, termasuk pada kegiatan yang bersifat *ad hoc* harus ditentukan secara detail untuk menghindari munculnya kerancuan dan tumpang tindih. Demikian pula pada kegiatan promosi wisata yang melibatkan pihak sponsor dituntut kejelasan wewenang tiap pihak untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

E. PENUTUP

Sektor pariwisata dan Dinas Pariwisata merupakan bagian integral dari Sistem Kebijakan. Sebagai satu jenis kebijakan publik, pariwisata berkaitan dengan banyak aspek ketika diimplementasikan. Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai *the operating core* urusan pemerintahan bidang pariwisata serta sebagai *implementing agent* kebijakan kepariwisataan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016. Substansi kebijakan kepariwisataannya berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016. Peran Dinas Pariwisata dalam komunikasi implementasi kebijakan kepariwisataan dihadapkan pada beberapa tantangan.

Perlu dibuat kebijakan kepariwisataan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati, sehingga dapat menjadi pedoman operasional bagi pegawai Dinas Pariwisata. Dalam menghadapi beberapa tantangan dalam komunikasi implementasi kebijakan, Dinas Pariwisata perlu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi organisasi internal dan eksternal, ketersediaan sumber daya organisasi, sikap dan komitmen pegawai serta pengaturan tata kerja operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, L.F. et.al. '*Public Policy And Human Resource Development*'. Diakses tanggal 2 Mei 2008. [Http://Unpan1.Un.org/Intradoc/Groups/Public/Documents/Un/Unpan01667.pdf](http://Unpan1.Un.org/Intradoc/Groups/Public/Documents/Un/Unpan01667.pdf)
- Arifin, A.. 2016. *Ilmu Komunikasi. Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffts.
- Edwards III, G.E. 1982. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Harrison, R. 1997. *Employee Development. People And Organizations*. London : Institute of Personnel and Development.
- Hill, M. 1997. *The Policy Process in The Modern State*. Third Edition. London: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
- MacRae, Jr., D. and Wilde J. 1989. *Policy Analysis for Public Decisions*. New York : University Press of America.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Narayanan, V.K dan Nath, Ragu. 1993. *Organization Theory. A Strategic Approach*. Homewood IL: Richard. D. Irwin, Inc.
- Robbins, S. P. 1990. *Organization Theory: Structures, Design and Applications*. Third Edition. Englewood Cliffs : Prentice-Hall International, Inc.

- Roux, N.L. 2002. *'Public policy-making and policy analysis in South Africa amidst transformation, change and globalization: Views on participants and players in the policy analytic procedure'*, Journal of Public Administration. Vol 37 no 4, December 2002. Diakses tanggal 29 April 2008. <[http://www.up.ac.za/dspace/bitstream/2263/3881/1/Roux_Public\(2002\).pdf](http://www.up.ac.za/dspace/bitstream/2263/3881/1/Roux_Public(2002).pdf)>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2027
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata

PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Oleh :

Tatang Sudrajat¹, Hersusetiyati², Nurhaeni Sikki³

FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

Email: [id.tatangsudrajat@gmail.com](mailto: id.tatangsudrajat@gmail.com), [hersusetiyati@gmail.com](mailto: hersusetiyati@gmail.com), [nenitentara@gmail.com](mailto: nenitentara@gmail.com)

ABSTRAK

Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang terlepas dari perhatian pemerintah. Negara melalui kewenangannya dengan dukungan birokrasi pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk kepentingan publik. Salah satu sektor dalam pembangunan nasional saat ini adalah pariwisata. Dalam konteks ini, telah terbit kebijakan publik berupa UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Hal tersebut tentu tidak akan bermakna apabila tidak mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setiap pemerintah daerah tentu memiliki peran dan kekhasan dalam turut membangun sektor kepariwisataan serta dalam kaitannya dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, dari perspektif administrasi publik tampak bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan beberapa produk kebijakan publik. Diantaranya Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, serta Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2015 tentang Someah Hade ka Semah Dalam Pengembangan Pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Terdapat hubungan keterkaitan antara pemerintah daerah Jawa Barat sebagai pembuat kebijakan dengan lingkungan kebijakan serta hubungan hirarkis dengan kebijakan kepariwisataan di tingkat nasional. Terdapat peran penting sekaligus tantangan kepada gubernur sebagai kepala daerah provinsi untuk menindaklanjuti beberapa kebijakan kepariwisataan yang berasal dari tingkat nasional.

Kata kunci : *administrasi publik, kebijakan publik, pariwisata.*

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebagaimana tersurat dalam alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945 tentang cita-cita nasional yang pada hakikatnya merupakan visi bangsa dan negara Indonesia, tentu harus diupayakan pencapaiannya. Dengan adanya tujuan nasional atau fungsi negara yang pada hakikatnya merupakan misi bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, diantaranya fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum, maka negara dengan organ utamanya yaitu pemerintah beserta segenap aparaturnya melaksanakan serangkaian program pembangunan nasional. Hal ini ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, peran aparatur administrasi negara pada berbagai level pemerintahan sangat strategis dan menentukan.

Salah satu sektor pembangunan nasional ini adalah pariwisata, yang dalam praktik pemerintahan dan pembangunan telah menjadi salah satu andalan bagi pendapatan pemerintah. Dalam kerangka ini, terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi sangat penting dan strategis. Pariwisata sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini, telah terbit PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2015-2025. Dari perspektif administrasi publik, hal ini merupakan *entry point* sekaligus landasan yuridis yang kuat bagi implementasinya di lapangan. Dalam kerangka inilah peran pemerintah daerah provinsi sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting untuk menindaklanjuti keputusan politik negara dan pemerintah di bidang kepariwisataan ini.

Dari perspektif ilmu administrasi publik, hadirnya beberapa regulasi tentang kepariwisataan tersebut merupakan salah satu wujud dari kebijakan publik (*public policy*). Menurut Lawrence dan Weber, kebijakan publik adalah '*a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose of affecting a substantial segment of a nations citizens*' (2014:164). Dalam kaitan ini, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, maka pemerintah daerah di tingkat provinsi berperan penting pula dalam menyukseskan kebijakan nasional tersebut. Hal ini antara lain dengan menerbitkan berbagai kebijakan daerah berupa peraturan daerah provinsi dan peraturan kepala daerah /gubernur, dan keputusan kepala daerah /gubernur.

Terbitnya berbagai kebijakan publik tersebut tentu bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Antara negara/pemerintah dengan lingkungannya, khususnya lingkungan sosial budaya yang sangat dinamis, terjadi hubungan interaksi yang resiprokal. Permasalahan yang ada pada masyarakat dapat menjadi pemicu lahirnya satu bentuk kebijakan publik sebagai solusinya.

Sebagai produk administrasi negara, UU Nomor 10 Tahun 2009 dan PP Nomor 50 Tahun 2011 ini lahir atas dasar analisis mendalam terhadap permasalahan dan aktivitas kepariwisataan yang multidimensional. Dengan kata lain, dalam kebijakan administrasi negara mengenai aspek-aspek kepariwisataan ini, pemerintah nasional/pusat sebagai pembentuk UU dan PP berposisi sebagai *policy maker*, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai *policy implementor* sekaligus sebagai *policy maker* yang lebih bersifat teknis operasional, serta pelaku industri pariwisata dan warga masyarakat berkedudukan sebagai *policy target*.

Karena itu, hadirnya berbagai kebijakan publik sebagai dinamikanya administrasi publik yang area substantifnya terkait kepariwisataan dalam pembangunan nasional saat ini serta implementasinya oleh para agen implementasi kebijakan secara konsisten menjadi teramat penting. Dikatakan demikian karena ekspektasi publik untuk hadirnya program-program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya dari waktu ke waktu makin tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi berbagai aspek yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah, dalam hal ini pada level Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan kepariwisataan dari perspektif administrasi publik. Perspektif administrasi publik tentang hal ini mengacu pada pendapat Lane tentang *principles of public administration* (1993:2), diantaranya '*The tasks of public institutions are decided by politicians but executed by order to satisfy the model of rational decision-making, Administration is based on written documents and this tends to make the office (bureau) the heart of modern government*'. Selain itu pada pendapat Keban tentang kebijakan sebagai salah satu dimensi strategis administrasi publik (2004:9), serta Thoha tentang administrasi negara dan administratornya yang memberikan pelayanan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan sebagai salah satu ciri administrasi negara (1992:34)

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pariwisata dan Kepariwisataan

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan menurut Pasal 1 angka 4 tersebut

adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan menurut Pasal 3 berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pariwisata merupakan bagian integral di dalamnya. Pembangunan kepariwisataan menurut Pasal 7 undang-undang ini meliputi industri pariwisata; destinasi pariwisata, pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan.

Pariwisata menurut Sudana (2013:11) adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*).

Merujuk pada hal tersebut, tampak jelas bahwa kebijakan tentang pariwisata merupakan salah satu instrumen negara yang menasbihkan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Melalui berbagai program kepariwisataan inilah, negara melalui pemerintah pada berbagai level akan memberikan yang terbaik bagi rakyat.

2. Administrasi Publik

Hadirnya pengaturan tentang pariwisata dan kepariwisataan tentu tidak dapat terlepas dari administrasi negara atau administrasi publik. Administrasi publik (*public administration*) menurut Dwight Waldo adalah “*the organization and management of man and material to achieve the purpose of government*” (Rosenbloom dkk, 1994:4). Lane mengemukakan apa yang dinamakannya sebagai *principles of public administration* (1993:2), yaitu “*The tasks of public institutions are decided by politicians but executed by order to satisfy the model of rational decision-making; Administration is based on written documents and this tends to make the bureau the heart of modern government; Public services are organized on a continuous, rule-governed basis; The rules may be either technical or legal. In both cases trained individuals are necessary; Each task is furnished with the functionally distinct spheres, each furnished with the requisite authority and sanctions; Officers as well as tasks are arranged hierarchically, the rights of control and complaint being specified; The resources of the organization are unique from the members as private individuals; The office holder cannot appropriate his office for private aims; Public employees orientate towards the public tasks within the sector of terms of vocation or the duty to fulfill the obligations of their roles; and in public sector there is dominant interest, the public interest, which sets the limits of the influence of self-interests in politics and administration*”.

Dengan demikian pembahasan tentang eksistensi administrasi publik akan membahas pula tentang negara dan atau pemerintahan. Administrasi publik ini demikian sangat pentingnya dalam eksistensi dan ketercapaian tujuan-tujuan suatu negara. (Hughes, 1994:104). mengemukakan ada beberapa fungsi pemerintah, yaitu *Providing economic infrastructure, Provision of various collective goods and services, The resolution and adjustment of group conflicts, The maintenance of competition, Protection of natural resources, Provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy The operation of the market sometimes produces results that are cruel or socially unacceptable – poverty, unemployment, malnutrition – in their impact on people, and Stabilisation of the economy*.

Terkait dengan itu, Ranson dan Stewart menyebut bahwa *government in its many levels and its many forms has differing roles in society. They can be conceptualized as a sustaining role, a maintenance role, a responsive role and a developmental role* (1994:117). Dalam kerangka inilah

peran kebijakan publik (*public policy*) akan memberi warna dan label tersendiri pada administrasi publik suatu negara.

Oleh karena itu, dapat dipahami bila para penstudi administrasi publik menyebut kebijakan publik ini sebagai salah satu dimensi prima administrasi negara. Sejalan dengan itu, dikemukakan pula oleh Keban, bahwa kebijakan ini ‘merupakan salah satu aspek atau dimensi strategis dari enam dimensi strategis atau yang paling menentukan dinamika administrasi publik, yaitu berupa respons secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk pembuatan keputusan atau kebijakan publik’ (2004:9). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan dinamikanya administrasi negara. Kebijakan publik terutama yang dapat diimplementasikan dengan efektif akan membawa dampak positif bagi reputasi pemerintah. Dalam konteks inilah dapat difahami ketika sebagian pakar administrasi publik mendefinisikan administrasi publik sebagai proses untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

Di belahan bumi manapun, masyarakatnya akan dihadapkan pada aneka macam permasalahan yang tidak selamanya dapat mereka selesaikan sendiri. Ketika masalah itu lalu menjadi perhatian publik yang luas, menjadi perhatian dan agenda pemerintah, selanjutnya melalui serangkaian proses politik dan atau administratif diputuskan dan diikuti tindakan aktual untuk kepentingan publik, sehingga lahirlah kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik menurut Gerston adalah ‘*the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority*’ (2010:7). Post dkk. mengemukakannya sebagai ‘*a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose affecting a substansial segment of a nation’s citizens*’ (1999:172).

Tidak jauh beda, dengan titik tekannya pada pilihan pemerintah, menurut Dunn kebijakan publik adalah ‘*long series or more less related choices (including decision not to act) made by governmental bodies and officials, are formulated in issue areas which range from defence, energy and health to education, welfare and crime control*’ (1981:47). MacRae Jr. dan Wilde mendefinisikannya sebagai ‘*a policy made by government. Policy is a chosen course of significantly affecting large numbers of people*’ (1989:3). Pakar kebijakan publik lainnya, Anderson menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah ‘*those policies developed by governmental bodies and officials. Nongovernmental actors and factors may, of course, influence policy development*’ (1978:3). Tampak bahwa negara atau pemerintah sangat strategis dalam pembentukan kebijakan publik ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael bahwa ‘*without the existence of the state, the public policy making process, as we know it, could not operate. It is the state that provides the basis for collective decision making, the application and enforcement of those decisions, and the means for changing or altering others*’ (2006:11).

Terdapat lima komponen kebijakan publik menurut Gerston yaitu isu (*issues*), aktor (*actor*), sumberdaya (*resource*), lembaga (*institution*) dan tingkat pemerintahan (*the level of government*). Dikemukakan lebih lanjut bahwa ‘*issues that appear on the public agenda; actors who present, interpret, and respond to those issues; resources affected by those issues; institutions that deal with issues; and the levels of government that address issues*’ (2010:8). Untuk dapat memahami kebijakan publik secara utuh maka bisa dikenali dengan apa yang dinamakan Anderson sebagai kategori kebijakan, yaitu ‘*policy demands, policy decisions, policy statements, policy output dan policy outcome*’ (1978:4).

Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, maka kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang ditetapkan oleh pejabat dan atau lembaga negara/pemerintah yang sebelumnya melibatkan berbagai pihak dan dilanjutkan dengan tindakan nyata sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menangani masalah publik. Dalam konteks kepariwisataan, salah satu bentuk atau wujud kebijakan publik tersebut adalah UU Nomor 9 Tahun 2010 dan PP Nomor 50 Tahun 2011. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan

keputusan kepala daerah ini disebut sebagai kebijakan daerah sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dikatakan sebagai kebijakan publik karena semuanya lahir dari kewenangan lembaga publik dalam hal ini DPR, Presiden dan Pemda Provinsi Jabar untuk menangani masalah publik berkenaan dengan berbagai tuntutan dan harapan publik terkait kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengenai kepariwisataan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Menurut Marzuki (2015:47) tergolong penelitian hukum (*legal research*), atau penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2015:13). Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk peraturan sehingga biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*).

Sesuai dengan kepentingan penelitian, data sekunder dalam bentuk berbagai dokumen, undang-undang dan peraturan, berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, dokumen lain yang dicetak, termasuk surat kabar dan majalah dan sumber cetak lain yang relevan, digunakan teknik dokumentasi. Dokumen yang menjadi penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang *Someah Hade ka Semah* Dalam Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat, serta dokumen terkait lainnya, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2009, PP Nomor 50 Tahun 2011, dan Inpres Nomor 16 Tahun 2005.

D. PEMBAHASAN

1. Profil, Hirarki dan Konteks Kebijakan Kepariwisata

Dari perspektif administrasi publik, sebagaimana dikemukakan Lane, Keban dan Thoha, bahwa ada legalitas dan dimensi kebijakan dalam administrasi publik, dalam hal ini kegiatan kepariwisataan. UU Nomor 10 Tahun 2009, PP Nomor 50 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015, dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2015 merupakan wujud nyata kebijakan publik, karena mengandung kepentingan publik.

UU Nomor 10 Tahun 2009 yang terbit pada 16 Januari 2009 merupakan pengganti UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisata, terdiri dari 70 pasal. Substansi yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah terlihat pada Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.

PP Nomor 50 Tahun 2011 yang terbit pada 2 Desember 2011 merupakan derivasi dari Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009, terdiri dari 70 pasal. Perda Nomor 8 Tahun 2008 yang terbit pada tanggal 4 Agustus 2008 merupakan pengganti Perda Nomor 6 Tahun 1983 dan Perda Nomor 9 Tahun 1990, terdiri dari 59 pasal. Perda Nomor 15 Tahun 2015 yang terbit pada 31 Desember 2015 merupakan pengganti Perda Nomor 48 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 50 pasal. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2015 yang terbit pada 6 Oktober 2015 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2007 terdiri dari 19 pasal.

Mengadopsi pandangan Bromley (1989:32-33), UU Nomor 10 Tahun 2009 berada pada *policy level*, selanjutnya dijabarkan pemerintah dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 yang berada pada *organizational level*. Di Provinsi Jawa Barat hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Perda Nomor 15 Tahun 2015. Selain itu terdapat Perda Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 88

Tahun 2015 yang ketiganya berada pada *operational level*. Hadirnya dua Perda Provinsi Jawa Barat serta 1 Peraturan Gubernur ini, merupakan bentuk peran nyata dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat dalam turut mengimplementasikan kebijakan nasional bidang kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat.

Dari perspektif hirarki kebijakan publik, terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2009 ini merupakan pedoman dasar bagi kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan penyelenggara negara level nasional dan mengikat semua *stakeholders*. Selain itu, selaras pula dengan prinsip hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan pula dengan yang dikemukakan pakar kebijakan publik, Anderson, bahwa salah satu ciri kebijakan publik adalah '*in its positive form is based on law and is authoritative*' (1978:4).

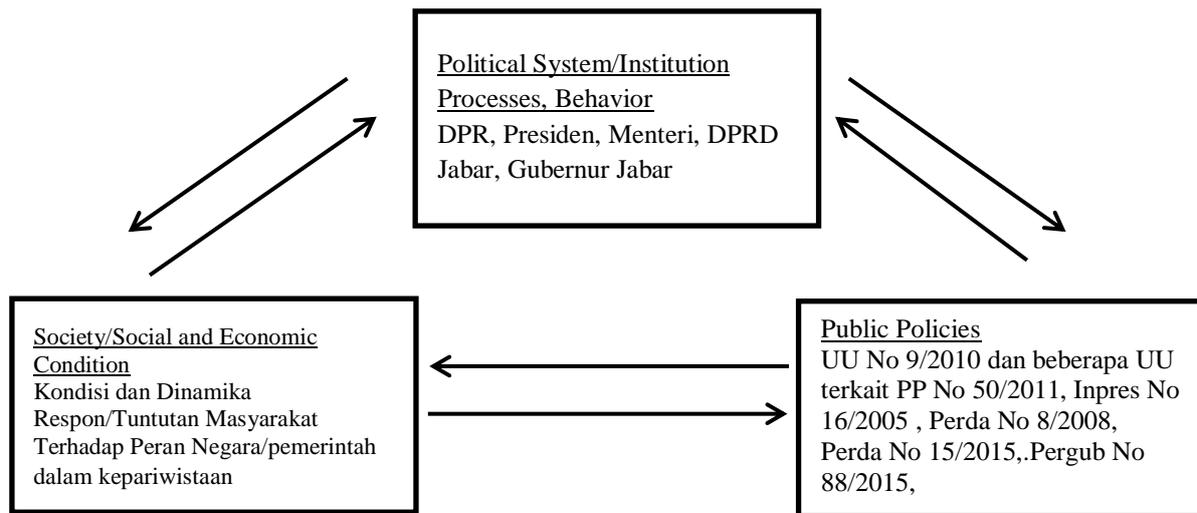
Terbitnya PP Nomor 50 Tahun 2011 merupakan sesuatu yang imperatif berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009. Selain undang-undang tersebut, yang substansinya berkaitan dengan kepariwisataan diatur pula dalam beberapa undang-undang lain, sebagaimana tercantum pada dasar hukum PP tersebut. Beberapa diantaranya yang berkaitan dengan kehutanan, lingkungan hidup dan caagar budaya. Digantinya UU, PP, Perda dan Pergub tersebut menunjukkan interaksi antara institusi publik dengan lingkungannya, dan hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Robert Eyestone bahwa kebijakan publik sebagai "*the relationship of a government unit to its environment*" (Anderson, 1978:2).

Terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2009, PP Nomor 50 Tahun 2011, Inpres Nomor 16 Tahun 2005, Perda Nomor 8 Tahun 2008, Perda Nomor 15 Tahun 2015, dan Pergub Nomor 88 Tahun 2015, dengan merujuk pada pendapat Bromley merupakan bagian dari *institutional arrangement* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kelembagaan negara/pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Ini sejalan dengan yang dikemukakan Dye tentang sistem kebijakan (*The Policy System*) sebagai '*the relationships or linkages between social and economic conditions, characteristic of political systems, and the content of public policy*' (1987:6). Terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2009 dan beberapa UU lain terkait dengan kepariwisataan, PP Nomor 50 Tahun 2011, Inpres Nomor 16 Tahun 2005, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015, dan Pergub Jabar Nomor 88 Tahun 2015, jelas pada dasarnya merupakan wujud kebijakan publik (*Public Policy*). Hal ini merupakan respon terhadap lingkungan kebijakan (*Society/Social and Economic Conditions/Environmental Forces and Conditions*) berupa kondisi makin tumbuhnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap bentuk pelayanan negara/pemerintah dalam bidang kepariwisataan. Sebaliknya terbitnya berbagai regulasi itupun akan mempengaruhi lingkungan kebijakan.

Terbitnya semua regulasi tersebut karena peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kebijakan kepariwisataan, yang terdiri dari institusi dan aktor-aktor negara/pemerintah (*governmental actors*) dan aktor di masyarakat (*nongovernmental actors*). Aktor negara seperti pejabat negara, legislator, birokrat pemerintah serta aktor di masyarakat, diantaranya para pengusaha/pelaku bisnis atau industri pariwisata, semuanya berada pada sistem politik (*Political System/ Political and Governmental Institutions, Processes, and Behaviors*). Kedudukan para pembuat kebijakan (*policy maker*) yang berada tataran lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah, yang dalam konteks sistem kebijakan merupakan bagian dari sistem politik ini, diatur tugas, wewenang dan kewajibannya dalam berbagai UU yang mengaturnya. Antara regulasi kepariwisataan sebagai kebijakan publik dengan sistem politik ini terjadi hubungan saling pengaruh mempengaruhi.

Secara skematis, hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut :

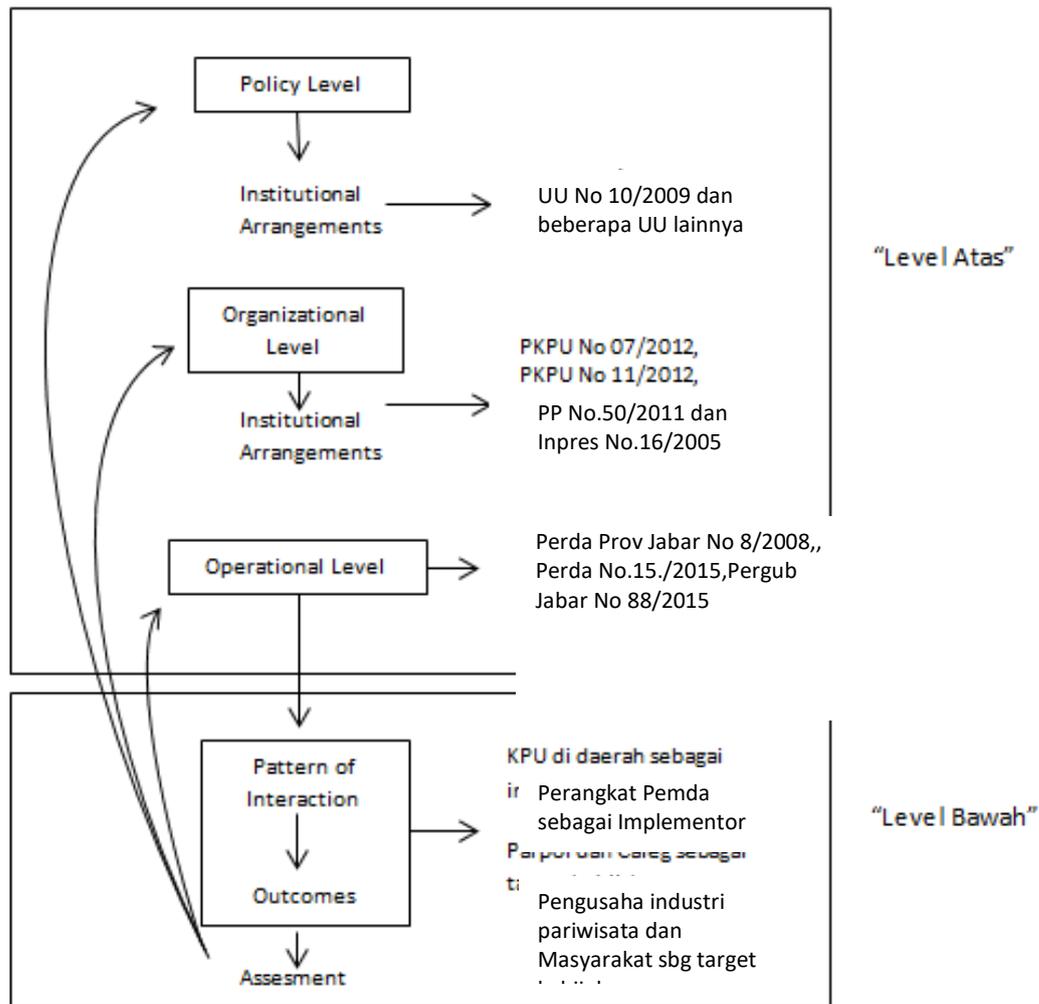


Sumber : Adaptasi dari Dye (1987:6)

Gambar 1. Regulasi Kepariwisata dalam Sistem Kebijakan

Mengacu dan mengadopsi pandangan Bromley (1980:32-33), maka hadirnya UU Nomor 10 Tahun 2009, dan beberapa UU yang terkait, berada pada *policy level*, sedangkan PP Nomor 50 Tahun 2011, berada pada *organizational level*. Pada *operational level* terdapat Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008, Perda Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2015. Dalam implementasinya, semua produk kebijakan tersebut menimbulkan pola-pola interaksi yang berlangsung pada tataran pelaksana kebijakan dan pada publik atau warga masyarakat sebagai target kebijakan. Pada fase ini tentu akan banyak catatan berharga tentang berbagai aspek implementasi kebijakan kepariwisataan yang disampaikan para target kebijakan kepada penyelenggara program. Salah satu catatan masukan tersebut berkenaan dengan prosedur dan substansi pengaturan program kepariwisataan dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya, dilakukan penilaian saksama terhadap aspek implementasinya termasuk masukan dari para pemangku kepentingan program kepariwisataan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang.

Secara skematis, hirarki dan proses kebijakan kepariwisataan ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Sumber : Adaptasi dari Bromley (1980:32-33)
 Gambar 2. Hirarki Kebijakan Kepariwisata

Dari perspektif administrasi publik bahwa setiap keputusan harus berdasarkan hukum, maka Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dasar yuridisnya mengenai kepariwisataan mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Selain itu terdapat beberapa undang-undang lain yang terkait dengan kepariwisataan yang menjadi landasan yuridisnya, diantaranya UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Demikian pula Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009. Selain itu juga berdasarkan pada beberapa UU dan PP yang terkait, diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Dalam perspektif administrasi publik, Peraturan Gubernur Jabar Nomor 88 Tahun 2015 tentang *Someah Hade Ka Semah* Dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, didasarkan antara lain pada UU Nomor 9 Tahun 2010 dan PP Nomor 50 Tahun 2011. Selain itu juga pada beberapa Perda yang terkait dengan pariwisata, diantaranya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat, Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian, serta Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisional, dan Museum.

2. Peran Pemerintah Daerah Jawa Barat Dalam Pengembangan Kepariwisata

Wewenang Gubernur sebagai kepala daerah otonom provinsi diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, antara lain mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; dan menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. Wewenang ini secara atributif dalam kaitan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 digunakan oleh Gubernur Jawa Barat berkenaan dengan kebijakan kepariwisataan ini.

Beberapa hal yang dapat diperankan sekaligus merupakan tantangan kepada gubernur sebagai kepala daerah provinsi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, diantaranya berkenaan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025.
- b. Peran pemerintah daerah provinsi untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang tersebut.
- c. Pasal 17 yang antara lain menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
- d. Pasal 18 yang menyebutkan antara lain bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2015 tentang *Someah Hade ka Semah* Dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Pasal 29 yang mengemukakan bahwa pemerintah provinsi berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- f. Pasal 32 yang menyebutkan antara lain bahwa Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- g. Pasal 52 yang menyebutkan antara lain bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, peran sekaligus tantangan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia.
- b. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan.
- c. Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
- d. Penggunaan tema “ Indonesia Ultimate in Diversity” dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema “Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara” dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.
- e. Peningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah;
- f. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/Sumber Daya Manusia). Hal ini sudah dilakukan dengan terbitnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perda Nomor 15 Tahun 2015.
- g. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- h. Pengembangan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- i. Peningkatan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
- j. Peningkatan dan memberikan kemudahan pemberian perizinan industri kebudayaan dan pariwisata serta kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk syuting film;
- k. Melakukan penataan objek wisata dan penyiapan infrastruktur dasar;
- l. Pengembangan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan nusantara dan di sekitar perkotaan;
- m. Pelestarian tradisi, nilai, dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event daerah. Di Jawa Barat hal ini sudah dilakukan dengan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, dan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif administrasi publik, berbagai isu atau permasalahan yang dihadapi publik, setelah melalui serangkaian proses dalam tatanan infrastuktur maupun suprastruktur politik, ditetapkan menjadi kebijakan publik. Salah satunya kebijakan publik tentang kepariwisataan. Terdapat hubungan yang erat antara administrasi publik, kebijakan publik dan kepariwisataan sebagai salah satu area substantif kebijakan publik. Bahwa produk kebijakan publik tentang kepariwisataan yang meliputi UU Nomor 9 Tahun 2010, dan beberapa UU terkait, PP 50 Nomor Tahun 2011, Perda Provinsi Jabar Nomor 8 Tahun 2008, Perda Nomor 15 Tahun 2015 dan Pergub Jabar Nomor 88 Tahun 2015, menunjukkan adanya hirarki dalam tatanan kebijakan publik secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah Jawa Barat memiliki peran sekaligus tantangan sesuai dengan kebijakan kepariwisataan nasional yang diberikan untuk mengembangkan kepariwisataan di Jawa Barat. Konteks semua kebijakan tersebut adalah dinamika lingkungan kebijakan (*policy environment*) yang menghendaki penyempurnaan substansi kebijakan (*policy content*) untuk pengaturan kebijakan

kepariwisataan. Pemerintah daerah perlu melengkapi beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan kepariwisataan nasional serta menyempurnakan beberapa kebijakan yang telah ada sesuai dengan masukan dari para pemangku kepentingan kebijakan kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. (1978). *Public Policy-Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bromley, Daniel W, (1989). *Economic Interest and Institution. The Conceptual Foundation of Public Policy*. New York: Basil Blackwell Inc.
- Dunn, William N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall Inc.Englewood Cliffs.
- Dye, Thomas R. (1987). *Understanding Public Policy*. Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Edwards III, George E. (1982). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gerston, Larry N. (2010). *Public Policy Making. Process and Principles*. Third Edition. New York: E Sharpe.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Howlett, Michael. (2011). *Designing Public Policies. Principles and Instruments*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Hughes, Owen S. 1994. *Public Management & Administration. An Introduction*. New York: St. Martin Press.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media.
- MacRae Jr. D. dan Wilde James. (1989). *Policy Analysis for Public Decisions*. New York: University Press of America.
- Lane Jan-Erik. (1993). *The Public Sector. Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Publications Ltd.
- Lawrence, Anne T. and James Weber. (2014). *Business and Society. Stakeholders, Ethics, and Public Policy*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Michael, Ewen J. (2006). *Public Policy. The Competitive Framework*. Victoria: Oxford University Press.
- Post, James E dkk. (1999). *Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Boston, Irwin McGraw-Hill.
- Ranson S. dan John Stewart. 1994. *Management for The Public Domain. Enabling The Learning Society*. New York: St. Martins Press.
- Rosenbloom, David H. dkk. (1994). *Contemporary Public Administration*. New York : McGraw-Hill. Inc.
- Sudana, I Putu (2013). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis Di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan*. Analisis Pariwisata: Vol 13 No. 1 Th. 2013. Hal 11.
- Thoha, M. 1992. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
- Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2015 tentang *Someah Hade ka Semah* Dalam Pengembangan Kepariwisataaan di Provinsi Jawa Barat

MOTIVASI KOMUNITAS PENGGERAK PARIWISATA (KOMPEPAR) DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KABUPATEN GARUT

Oleh :

Emarismayanti¹, Mila Karmila²

^{1,2}Program studi Administrasi Negara, FISIP Universitas

²Jl. Cimanuk no.285a Tarogong Kidul Garut

¹e-mail: emarismayanti@fisip.uniga.ac.id

²e-mail: milakarmila14@fisip.uniga.ac.id

ABSTRAK

Praktik pungli diberbagai Kawasan wisata kota Garut menjadikan citra negative bagi wisata yang ada di kabupaten Garut. Adanya peran serta dari komunitas penggerak pariwisata dan masyarakat local sebagai pengembangan wisata merupakan prinsip yang harus selalu dipegang, karena kompepar merupakan social power, pada kenyataannya kompepar di Kabupaten Garut belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi motivasi komunitas penggerak pariwisata dalam pengembangan wisata di kabupaten garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan Kuantitatif dengan Teknik Analisis Faktor Eksploratori, pengolahan data dibantu dengan SPSS versi 23 dengan jumlah responden 75 dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kompepar dalam pengembangan wisata di kabupaten Garut sebanyak 5 faktor yaitu :Informasi, Kesadaran Wisata, Lingkungan, Pengelolaan dan Sikap.

Kata kunci : pariwisata, analisis factor eksploratori, kompepar

A. PENDAHULUAN

Pariwisata Indonesia sudah lama dikenal dimata dunia, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi kawasan wisata di Indonesia. Takheran, jika sector pariwisata di Indonesia menempati posisi keempat setelah minyak, batu bara dan kelapa sawit sebagai devisa Negara (“Wisata Indonesia di Mata Dunia,” 2019).

Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata dalam berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan menurut (A Oka Yoeti, 2016) Pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara.

Prospek sector kepariwisataan Indonesia di masa depan makin nyata ditandai oleh keberpihakan kebijakan pemerintah pada sector tersebut. Pariwisata sebagai *core* bisnis pembangunan ekonomi Indonesia, program desa wisata, Indonesia sebagai pusat halal *tourism* dunia, pengembangan *wellness tourism*, ini adalah kebijakan pro sector kepariwisataan. Makin gencarnya pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara, jalan tol darat dan tol laut serta jaringan rel kereta api untuk memudahkan konektivitas antar wilayah merupakan potensi yang dapat menarik kunjungan wisatawan (Jamaluddin, 2019)

Dalam Pengelolaannya, diperlukan menerapkan model yang baik untuk mendukung tujuan inovasi bersama menurut (Soemaryani, 2016) Model pentahelix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Sektor pariwisata tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, takhanya pemerintah, tetapi juga akademisi, bisnis, media dan komunitas yang disebut dengan konsep

pentahelix, konsep ini dinilai sangat efektif memajukan pariwisata, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peran swasta dalam pengembangan pariwisata adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada komunitas lokal, membuka peluang usaha pariwisata melalui jaringan usaha atau pasar wisata, dan merekrut komunitas local untuk sebagai tenaga kerja dalam usaha pariwisata. Peran perguruan tinggi melalui pelatihan dan kursus bagi pelaku usaha dan masyarakat, melakukan pemetaan potensi, identifikasi permasalahan, rumusan strategi dan penyuluhan, sosialisasi dan pembentukan kelompok binaan. peran media sebagai sumber informasi, alat promosi dan pemasaran pariwisata, sedangkan peran komunitas local sebagai pemandu wisata, menjadi pelaku usaha, mengaktualisasi budaya masa lalu, dan membentuk kelembagaan lokal. (Jamaluddin, 2019).

Kompepar adalah salah satu komunitas yang bermitra dengan pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kompepar berkomitmen membantu pemerintah dalam membangun dunia pariwisata. Dalam mekanisme kerjanya, masyarakat dan pemerintah memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Yakni, pembangunan, terutama sector pariwisata yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local dan memberdayakan peran serta masyarakat sekitar. (“KOMPEPAR JAWA BARAT,” 2017) Kabupaten Garut mempunyai potensi wisata mulai dari wisata bahari, wisata edukasi, wisata alam, wisata religi dan lain-lain. Dalam hal pengembangan sector pariwisata melibatkan komunitas penggerak pariwisata (KOMPEPAR) sebagai unsur paling melekat dengan masyarakat. Kelompok Penggerak Pariwisata yang ada di Kabupaten Garut sangatlah berperan untuk membantu pemerintah terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (“KOMPEPAR KABUPATEN GARUT,” 2011).

Mengingat salah satu fungsi dari KOMPEPAR di Kab. Garut adalah Menggalakan usaha-usaha pencegahan pengaruh buruk yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata atau setidak-tidaknya membatasi pengaruh tersebut sekecil-kecilnya dan meningkatkan daya tahan masyarakat untuk menghadapi akibat negative pariwisata. Akan tetapi pada kenyataannya kompepar di Kabupaten Garut belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya kurangnya motivasi dalam hal menjalankan perannya, Menurut (Samsudin, 2010) bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Liang Gie dalam Samsudin menyatakan bahwa motivasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan inspirasi, semangat dan dorongan kepada orang lain, dalam hal ini karyawannya, untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Berikut data Kompepar di Kabupaten Garut:

Tabel 1
Data Kompepar Kabupaten Garut

No	NAMA KOMPEPAR	NAMA KETUA	JML ANGGOTA	KET. AKTIF/TIDAK
1	FK.Kompepar Kab.Garut		07 Orang	aktif
2	Bagendit	Agus	22 Orang	aktif
3	Cangkuang	Cucu Suparman	12 Orang	aktif
4	Sanghiang Taraje	Muhtar Sany	12 Orang	Tidak aktif
5	Gua Cibongas	Endang R	12 Orang	Tidak aktif
6	Cipanas	Muhamad Muslih	12 Orang	aktif
7	Curug Orok	drs. Iman Badrutamam	12 Orang	aktif
8	Cijeruk Indah	-	12 Orang	Tidak aktif
9	Karang Paranje	Wawan Gunawan	12 Orang	Tidak aktif
10	Kawah Papandayan	NandangSupradinata	12 Orang	Aktif

11	Makam Batu Wangi	Oman Sukarya	12 Orang	Tidak aktif
12	Makam Godog	Nuryaman	12 Orang	Tidak aktif
13	Pantai Cijayana	Yayat	12 Orang	Tidak aktif
14	Cipanas Pakenjeng	A.Saeful Uyun	12 Orang	Tidak aktif
15	Pantai Puncak Guha	Adang Hasbullah	12 Orang	Tidak aktif
16	Pantai Manalusu	Aripin	12 Orang	Tidak aktif
17	Ranca Buaya	Mamat	16 Orang	Aktif
18	Sayang Heulang	Ujanggihini / Ulef	12 Orang	Aktif
19	Sunan Cipancar	Komar Ahmad	12 Orang	Aktif
20	Situs Ciburuy	Drs. Dudeh Ruhiyat M.Pd	12 Orang	Tidak aktif
21	Makam Cinunuk	Drs. Rd Iden SuparnoM.Pd	18 Orang	Aktif
22	Situ Ranca Hideung	Atep	12 Orang	Aktif
23	Cilaut Eureun	E Nurhasan	12 Orang	Tidak aktif
24	Kampung Dukuh	Yayan	-	Tidak aktif
25	Kompepar Santolo	Daya Hidayat	28 Orang	Aktif
26	Kompepar Cikuray	Oliddarsono		Tidak aktif
27	Kompepar Curug Cihanyawar	Deni MT	25 Orang	Aktif
28	Kompepar Gunung sanghyang	Didi DM, S.Pd	20 Orang	Aktif
29	Forum Kompepar Kec. Bumbulang	AsepYayan Cakradimangun	33 Orang	Aktif
30	Kompepar Curuk/Leuwi Jubleug	Ajat Sudrajat	26 Orang	Aktif

Sumber :DinasPariwisata dan kebudayaankabupatenGarut 2015-2020

Dari table diatas, dapat terlihat, jumlah kompepar di Kabupaten Garut sebanyak 30 komunitas, yang terdiri dari 16 komunitas aktif dan 14 komunitas yang tidak aktif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Ini menggambarkan motivasi kompepar dalam pengembangan pariwisata masih belum baik. Berdasarkan halter sebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi motivasi kompepar dalam pengembangan pariwisata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan Teknik analisis factor eksploratori, mengemukakan hubungan antar sejumlah variabel-variabel yang independen atau masing-masing, sehingga dapat diringkas menjadi satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit. (Sugiyono, 2015) Dalam hal ini analisis factor digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan motivasi kompepar dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut dengan penentuan responden adalah anggota kompepar yang masih dikategorikan aktif oleh DISPARBUD kab. Garut berjumlah 75 orang, karena memenuhi kriteria minimum/sampel ideal pada Teknik analisis factor (www.sharingaddicted.com). Teknik pengambilan sampel yaitu *stratified random sampling*. Menurut (Sugiyono, 2015) *Stratified Random Sampling* adalah teknik sampling yang digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Teknik ini digunakan untuk pengelompokan sekolah agar jumlah dari sampel menjadi proporsional. Pengolahan

data dibantu dengan *software Social Package of Sosial Science* (SPSS) Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam dengan informan-informan kunci seperti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, ketua kompepar. Berikut pengambilan sampel dengan Teknik *stratified random sampling* :

Tabel 2
Teknik Pengambilan Sampel

NO	NAMA KOMPEPAR	JUMLAH ANGGOTA	PERHITUNGAN	JUMLAH SAMPEL
1	FK. Kompepar Kab.Garut	07 Orang	$\frac{7}{279} \times 75 = 1,8$	2
2	Bagendit	22 Orang	$\frac{22}{279} \times 75 = 5,9$	6
3	Cangkuang	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
4	Cipanas	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
5	Curug Orok	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
6	Kawah Papandayan	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
7	Ranca Buaya	16 Orang	$\frac{16}{279} \times 75 = 4,3$	5
8	Sayang Heulang	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
9	Sunan Cipancar	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
10	Makam Cinunuk	18 Orang	$\frac{18}{279} \times 75 = 4,8$	5
11	Situ Ranca Hideung	12 Orang	$\frac{12}{279} \times 75 = 3,2$	3
12	Kompepar Santolo	28 Orang	$\frac{28}{279} \times 75 = 7,5$	8
13	Kompepar Curug Cihanyawar	25 Orang	$\frac{25}{279} \times 75 = 6,7$	7
14	Kompepar Gunung sanghyang	20 Orang	$\frac{20}{279} \times 75 = 5,3$	5
15	Forum Kompepar kec. bumbulang	33 Orang	$\frac{33}{279} \times 75 = 8,8$	9
16	Kompepar Curuk/Leuwi Jubleug	26 Orang	$\frac{26}{279} \times 75 = 6,9$	7
Jumlah		279 orang		75 orang

Adapun Hipotesis pada penelitian ini, didugaada 15 variabel yang mempengaruhi motivasi kompepar dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

- P1 : Partisipasi
- P2 : Pengawasan
- P3 : Pengalaman
- P4 : Media
- P5 : Meningkatkanekonomimasyarakat
- P6 : Meningkatkandayatarik

Tabel 7
Faktor Terbentuk

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.016	16.797	16.797	2.016	16.797	16.797	1.759	14.656	14.656
2	1.572	13.102	29.900	1.572	13.102	29.900	1.507	12.558	27.214
3	1.507	12.562	42.462	1.507	12.562	42.462	1.493	12.438	39.652
4	1.269	10.578	53.040	1.269	10.578	53.040	1.417	11.811	51.463
5	1.056	8.799	61.839	1.056	8.799	61.839	1.245	10.376	61.839
6	.923	7.693	69.532						
7	.765	6.376	75.908						
8	.702	5.850	81.758						
9	.678	5.651	87.409						
10	.544	4.534	91.943						
11	.514	4.283	96.226						
12	.453	3.774	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

- a. Faktor 1 menjelaskan varian sebesar 16,8%,
- b. Faktor 2 sebesar 13,1%,
- c. Faktor 3 sebesar 12,5%,
- d. Faktor 4 sebesar 10,6%
- e. Faktor 5 sebesar 8,8% sehingga total varian yang dijelaskan sebesar 61,5%

PEMBAHASAN

Diperoleh lima faktor yang merupakan reduksi dari dua belas variabel, dengan uraian sebagai berikut :

1. Variabel-variabel yang termasuk kedalam faktor pertama berurutan sesuai dengan muatan faktor adalah Pengalaman (0,736) dan Media (0,789). Berdasarkan variabel-variabel yang dijelaskan oleh faktor pertama terlihat bahwa faktor ini ditentukan hal-hal yang mendukung individu atau anggota kompepar dalam pengembangan pariwisatanya itu dipengaruhi oleh informasi, maka faktor ini disebut Faktor Informasi.
2. Faktor kedua terdiri atas tiga variabel dengan urutan sesuai muatan faktor adalah Meningkatkan Ekonomi masyarakat (0,714), Meningkatkan Daya Tarik (0,526) dan Menjaga Potensi Wisata (0,477). Faktor yang kedua ini oleh peneliti dinamakan faktor Kesadaran Wisata, berisi tentang bagaimana individu/anggota kompepar berkeinginan untuk memajukan kawasan wisatanya dengan lebih baik lagi dengan memanfaatkan sumber daya yang baik dan menjaganya.
3. Variabel-variabel yang termasuk kedalam faktor ketiga adalah peneliti menamai faktor ini adalah Lingkungan. Faktor ini terdiri dari variabel-variabel Sosial (0,860) dan Budaya (0,661). Pada faktor ini variabel-variabel yang muncul lebih mengarah pada Lingkungan, dengan Variabel-variabel yang termasuk kedalam faktor empat yaitu Kesadaran (0,815) Ketertarikan (0,393) dan Komunikatif (0,792) faktor ini berisi tentang bagaimana motivasi anggota kompepar dalam pengembangan pariwisata terhadap hal-hal yang berada disekitar wisata tersebut, peneliti menamai faktor keempat yaitu Sikap
4. Variabel-variabel yang termasuk kedalam faktor kelima yaitu Pengawasan (0,258), Pengkoordinasian (0,561) pada faktor ini sangat erat kaitannya interaksi individu/wisatawan dengan pihak-pihak yang mengetahui secara detail terkait informasi tempat wisata religi yang dikunjungi, maka peneliti menamai factor kelima ini dengan Aktor.

Tabel 8
Pengelompokan Variabel

Rotated Component Matrix^a

	Component				
	1	2	3	4	5
Pengawasan (P2)	.049	-.115	-.327	-.593	.258
Pengalaman (P3)	.736	-.051	-.119	-.143	-.080
Media (P4)	.789	.098	-.002	.060	.051
meningkatkan eko. masy (P5)	.292	.714	.277	-.132	.077
Meningkatkan daya tarik (P6)	-.432	.526	-.465	-.029	.110
Sosial (P7)	-.089	.119	.860	-.028	.065
Menjaga potensi wisata (P9)	-.302	.477	.015	-.042	-.182
Pengkoordinasian (P11)	.243	.032	-.446	.209	.561
Kesediaan (P12)	-.108	.019	.109	.815	.112
Ketertarikan (P13)	-.350	-.183	.320	.393	.331
Komunikatif (P14)	-.031	-.031	-.148	.792	.135
Budaya (P15)	.160	.111	.0661	.431	.085

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 10 iterations.

D. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Kelima faktor yang menjadi motivasi kompepar dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Garut setelah mengalami proses reduksi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Informasi

Faktor Informasi tersusun dari variabel-variabel berikut yang disusun berurutan sesuai besaran muatan faktor dari proses ekstraksi, yaitu: Pengalaman dan Media.

2. Faktor Kesadaran Wisata

Faktor Pengetahuan, terdiri atas tiga variabel dengan urutan sesuai muatan faktor dari proses ekstraksi adalah: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, Meningkatkan Daya Tarik, Menjaga Potensi Wisata

3. Faktor Lingkungan

Faktor Kesehatan terdiri atas tiga variabel yaitu Sosial dan Budaya.

4. Faktor Sikap

Faktor Lingkungan terdiri atas tiga variabel yaitu Kesadaran, Ketertarikan dan Komunikatif.

5. Faktor Pengelolaan

Faktor Ekonomi terdiri atas dua variabel yaitu Pengawasan dan Pengkoordinasian.

b. Saran

Diharapkan dalam pengembangan pariwisata semua pihak yang berada didalamnya harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Khususnya Kompepar, kompepar adalah unsur yang paling melekat dengan masyarakat. Maka dari itu tugas dan fungsi yang dijalankan harus terlaksana dengan baik. Seperti, Meningkatkan perannya dalam hal penataan pelayanan, memelihara

potensi yang dimiliki, meningkatkan kebersihan, ketertiban lingkungan, terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang melekat dengan semua pihak baik dengan kompepar yang lainnya atau pihak terlibat dalam pengembangan pariwisata, serta memotivasi sadar wisata bagi setiap anggota kompepar untuk pengembangan wisata di Kabupaten Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Oka Yoeti. (2016). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: makalah press.
analisis faktor. (n.d.). Retrieved from www.sharingaddicted.com website: www.sharingaddicted.com
- Field, A. (2000). *Discovering Statistics Using SPSS for Windows*. London: Sage Publication.
- Jamaluddin Jahid. (2019). Destinasi Wisata: Butuh Sinergi dan Peran Penta Helix. Retrieved from [Fajar.co.id](http://fajar.co.id) website: <https://fajar.co.id/2019/06/17/destinasi-wisata-butuh-sinergi-dan-peran-penta-helix/>
- KOMPEPAR JAWA BARAT. (2017). Retrieved from [kompepar jawa barat.wordpress](http://kompeparjawabarat.wordpress.com) website: <https://kompeparjawabarat.wordpress.com/>
- KOMPEPAR KABUPATEN GARUT. (2011). Retrieved from kompepargarut01.blogspot.com website: <http://kompepargarut01.blogspot.com/2011/01/kompepar-kelompok-penggerak-pariwisata.html>
- Samsudin, S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemaryani Imas. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Academy of Strategic Management Journal*, 15.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Wisata Indonesia di Mata Dunia. (2019). Retrieved from <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia>

PENGEMBANGAN POTENSI WISATA HUTAN PINUS OLEH KARANG TARUNA DI DESA DARMACAANG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Neti Sunarti¹, Eet Saeful Hidayat², Regi Refian Garis³

^{1,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Galuh

² Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

^{1,2,3} Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

E-mail: netisunarti512@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Potensi wisata Hutan Pinus oleh Karang Taruna di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis masih belum optimal di sebabkan oleh masih terbatasnya sarana prasarana terutama transportasi dan pemasaran untuk memperkenalkan tempat wisata hutan dan kualitas sumberdaya masyarakat serta masih banyak lahan-lahan kosong dalam pemanfaatan dan pengelolaan masih relatif sederhana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pengembangan potensi wisata yang dilakukan oleh Karang Taruna di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi saja namun mempunyai peran sangat besar dalam menjamin kesinambungan kebudayaan bangsa sehingga timbul sebuah jati diri, sebagai bangsa yang mengikuti perkembangan jaman. oleh karena itu pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan perlu dilanjutkan dengan pengembangan dan pendayagunaan sumber dan potensi kebudayaan dan kepariwisataan sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan budaya yang dapat diandalkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat, maka dari itu diperlukan langkah kongkrit dan inovatif agar pengembangan potensi wisata lebih relevan dengan zaman. Desa Darmacaang mempunyai keunikan lingkungan dengan salah satu hutan pinus yang bisa dijadikan tempat Camping Ground dan bisa diberdayakan oleh masyarakat dan peran anak muda melalui Karang Taruna. Walaupun hutan tersebut milik perhutani tetapi bisa dijadikan tempat wisata untuk anak muda dengan di tata sedemikian rupa sehingga menarik untuk dikunjungi dan ini merupakan wujud salah satu pengembangan wisata dengan sistem kearifan lokal serta bentuk pemberdayaan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : *Pariwisata, Pengembangan, Karang Taruna*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat di masa yang akan datang maka yang dibutuhkan adalah kemandirian masyarakat dengan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri dimana untuk menopang kehidupan serta untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu masyarakat pun dituntut untuk mengembangkan potensi desa yang ada sehingga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan. Salah satu sebagai pengembangan potensi desa diantaranya adalah hutan pinus yang berada di wilayah desa Darmacaang kecamatan yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tempat berkemah. Yang di dikelola oleh pihak Masyarakat melalui karang taruna Darmacaang namun yang memiliki hak atas kawasan itu ialah pihak Perhutani yang dimana sebagian besar pemasukan dari objek wisata tersebut masuk ke kas pihak Perhutani dan sisanya diberikan kepada pihak masyarakat. Maka desa tersebut sebagai wisata yang banyak diburu oleh para wisatawan baik itu warga lokal maupun dari kota-kota lainnya. Berikut adalah peta lokasi Desa Darmacaang :



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Darmacaang
 Sumber : Data Desa Darmacaang

Letak Geografis Desa Darmacaang terletak di bagian barat Kabupaten Ciamis dan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Adapun Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108° 20' sampai dengan 108° 40' Bujur Timur dan 7° 40' 20" sampai dengan 7° 41' 20" Lintang Selatan yang terdiri dari 4 Kepala Dusun dengan 8 RW dan 26 RT. Topografi Wilayah Desa Darmacaang secara garis besar terdiri dari dataran rendah dengan bentuk dataran, yang terdiri dari dataran dan perbukitan.

Daerah utara dengan bentuk dataran berbukit dan daerah selatan berbentuk dataran. Ketinggian pada bagian daerah dataran pada 75 meter dpl dan pada perbukitan dengan ketinggian lebih kurang 600 meter dpl. Iklim tipe C (agak basah). Suhu udara berkisar antara 20 derajat sampai dengan 30 derajat C dan curah hujan rata-rata sebesar 114 ml per bulan dengan curah hujan tertinggi mencapai 2.987 ml per tahun.

Objek Wisata di desa Darmacaang merupakan wisata alam berupa hutan pinus yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat *camping* bagi kalangan anak-anak milenial maupun rekreasi keluarga. Untuk menggali potensi wisata alam lebih menarik minat pengunjung wisatawan di desa Darmacaang maka perlu adanya Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Dimana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri. Sehingga pemuda identik sebagai sosok yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu *revolusioner*, optimis, berpikir maju, memiliki moralitas. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Dengan mengaktifkan para pemuda pemuda karang taruna melalui dibukanya wisata alam *Camping Ground* agar para pemuda karang taruna memiliki tanggungjawab untuk mengelola lokasi tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya para pemuda Desa Darmacaang dan juga apabila wisata tersebut dikelola secara maksimal akan menjadikan sumber pendapatan berupa materi yang dapat bermanfaat bagi pemuda di Desa Darmacaang selain itu pemuda juga dituntut untuk mengeluarkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi wisata *Camping Ground*. Dengan dibukanya lokasi wisata *camping ground* ini akan meningkatkan optimalisasi SDM

khususnya para pemuda yang ada di Desa Darmacaang dalam meningkatkan perekonomian dan dengan adanya lokasi wisata ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pemuda dalam pengelolaan lokasi wisata tersebut sehingga para pemuda tersebut tidak harus bekerja ke luar daerah.

Dalam kegiatan pengelolaan tempat wisata alam masih banyak yang perlu dan harus dikembangkan dengan memperhatikan perencanaan yang sesuai dengan sasaran maka perlu adanya tehnik pengembangan dimana harus menggabungkan beberapa aspek sebagai penunjang pariwisata dengan aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), serta ditunjang dengan karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat sosial keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lainnya, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resitensi komunitas lokal dan seterusnya.

Sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas masyarakat Desa

Hasil observasi dilapangan untuk Pengembangan Potensi wisata Hutan Pinus oleh karang taruna masih belum optimal di sebabkan oleh masih terbatasnya sarana prasarana terutama transportasi dan pemasaran untuk memperkenalkan tempat wisata hutan dan kualitas sumberdaya masyarakat serta masih banyak lahan-lahan kosong dalam pemanfaatan dan pengelolaan masih relatif sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa Pengembangan Potensi wisata Hutan Pinus oleh karang taruna Di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa indikator-indikator sebagai berikut :

1. masih terbatasnya sarana transportasi seperti terbatas kendaraan untuk menuju hutan pinus tersebut, kondisi jalan pun yang dilalui oleh pengunjung masih ada yang rusak, banyak para pedagang tidak tertata dengan baik serta masihnya banyak sampah yang membuang sembarangan
2. Kurang dikenal oleh pengunjung karena kurang memperkenalkan secara luas kepada masyarakat lainnya, adapun para wisata yang sering berkunjung ke tempat tersebut adalah mereka yang sering melakukan kegiatan Camping ke hutan pinus tersebut.
3. Masih kurangnya tingkat kreatifitas untuk pengelolaan tempat wisata agar lebih menarik, maka karang taruna perlu dilalukan studi komparatif kepada objek wisata yang sejenis, sehingga bisa muncul ide-ide baru.
4. Masih banyak lahan-lahan kosong disekitar hutan tersebut karena yang mengelola hutan tersebut dibatasi oleh pihak perhutani, dan pemasukan dari objek wisata tersebut sebagian masuk ke pihak Perhutani dan sisanya diberikan kepada pihak masyarakat padahal untuk perluasan lahan masih mungkin bisa dilakukan untuk dikembangkan lebih menarik minat pengunjung.

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam pengembangan pariwisata sering diartikan sebagai wahana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah setempat, tetapi pendapatan tersebut adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat kearah pembangunan yang bersifat membangun perekonomian yang seutuhnya serta untuk perolehan devisa yang ditentukan oleh jumlah pengunjung, pengeluaran dan lamanya kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia. maka akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan yang sering dinilai dengan pencapaian target, yaitu jumlah kunjungan wisatawan juga selain itu adalah untuk mewujudkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Sejalan pendapat Sedarmayanti (2014 : 14-13) perkembangan pariwisata harus memenuhi kriteria adalah :

(1) berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, (1) memberi manfaat bagi rakyat, manfaat material, spiritual, kultural dan intelektual (3) berdasarkan prinsip lingkungan dan ekologi sehat, peka terhadap atau tidak bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan tradisi keagamaan yang dianut penduduk serta tidak menempatkan penduduk setempat pada posisi yang merendahkan martabat sebagai manusia (4) hendak dikendalikan sehingga tidak melampaui ambang batas daya dukung lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas hubungan manusia yang sehat berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan dari pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan untuk pengembangan pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi saja namun mempunyai peran sangat besar dalam menjamin kesimbangan kebudayaan bangsa sehingga timbul sebuah jati diri adalah sebagai bangsa yang mengikuti perkembangan jaman atau identiknya adalah di era globalisasi. oleh karena itu pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan perlu dilanjutkan dengan pengembangan dan pendayagunaan sumber dan potensi kebudayaan dan kepariwisataan sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan budaya yang dapat diandalkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat.

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Adapun ciri-ciri destinasi menurut Kusudianto Pitama dan Surya Diarta (2009 : 126-127) adalah :

1. Destinasi sumber daya alam seperti iklim pantai, hutan ;
2. Destinasi sumber daya budaya seperti tempat bersejarah, museum, teater dan masyarakat lokal ;
3. fasilitas rekreasi seperti taman hiburan ;
4. Event seperti pesta kesenian Bali, pesta Danau toba dan pasar malam ;
5. Aktivitas spesifik seperti kasino, di Genting *highland* malaysia, wisata belanja di hongkong ;
6. Daya tarik psikologis seperti, petualangan perjalanan romantis keterpencilan

2. Proses Perencanaan Pariwisata

Proses perencanaan pariwisata pada umumnya memerlukan kebijakan dan perencanaan strategis yang sistematis dengan beberapa tahapan menurut Pitama dan Surya Diarta (2009 : 109) yaitu :

1. Memerlukan bisnis/usaha yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi tergantung pada jenis usaha yang dimasuki misal untuk mengakselerasikan pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dari industri pariwisata ;
2. menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, seperti penguasaan pasar untuk pengenalan produk baru ;
3. mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena kualitas pengambilan keputusan tergantung kepada kualitas informasi yang dikumpulkan baik secara internal maupun eksternal ;
4. menganalisis informasi terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan dari organisasi tersebut ;
5. menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan ;
6. menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan ;
7. mengimplementasi rencana ;
8. mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan proses perencanaan yang sistematis tersebut adalah perlu dengan mempersiapkan infrastruktur penggunaan tanah atau ruang dan sebagainya, sehingga untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya alam serta hubungan manusia dengan memperhatikan nilai-nilai agama, pelestarian, sumberdaya alam dan budaya demi kepentingan ekonomi, politik, sosial, serta pertahanan keamanan.

3. Pengembangan sumberdaya manusia dibidang pariwisata

Dalam pengembangan sumberdaya manusia yang profesional dibidang pariwisata dan pengelolaan usaha harus memiliki kualitas terutama menampilkan keunggulan, bertanggungjawab, tangguh, kreatif, mandiri, profesional dan produktif di bidang pariwisata dengan melalui pengembangan sumberdaya manusia dibidang pariwisata yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014: 39-40)

1. arti dan pentingnya pelatihan dan pengembangan : usaha untuk mengurangi seseorang yang dikehendaki melalui peningkatn kompetensi yang dimilikinya dengan menambah pengetahuan keterampilan dan merubah perilaku. hal ini merupakan kekayaan yang paling berharga karena kompetensi yang dimiliki serta mampu untuk berprestasi karena mempunyai kompetensi yang tinggi untuk mencapai visi dan misi kepariwisataan
2. Persamaan dan perbedaan pelatihan dan pengembangan : untuk menangkap dan memenangkan peluang pengembangan sumberdaya manusia yang diarahkan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada bidang pariwisata sehingga mampu meningkatkan daya saing tingkat nasional dan internasional
3. Pengembangan SDM Pariwisata : yang mempunyai penting dalam pengembangan pariwisata yaitu terdiri dari :
 - a) Sumberdaya manusia yang berada dalam lembaga pemerintah yang menghasilkan kebijakan/peraturan dalam pembangunan pariwisata
 - b) Sumberdaya manusia yang berada dalam lembaga pendidikan namun belum terlibat langsung usaha pariwisata terdiri dari manajemen, anak didik, karyawan dsb
 - c) sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pariwisata pihak yang berperan menghasilkan produk dan/jasa bagi wisatawan dalam kegiatan usaha formal yang terdiri dari Pengelola usaha pariwisata, meliputi ; pengusaha sektor formal usaha pariwisata yang mengelola berbagai usaha pariwisata pekerja/karyawan usaha pariwisata yang bernaung di bawah satu usaha pariwisata yang formal.

Sumber daya manusia pariwisata merupakan aspek yang mendukung kegiatan wisata (berwujud dan tidak terwujud) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan yang berdampak positif pada ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan budaya pariwisata

4. Pemberdayaan dan program pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai memberi kemampuan atau keberdayaan. Sugjogjo (dalam Kartasmita, 1996:165) :

Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan tiga jurusan, Pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak adalah pengenala bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dikembangkan, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan, kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka inilah diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi

makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Ketiga, memberdayakan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah.

Adapun sasaran pokok daripada kebijakan program pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2001 : 166) adalah

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat ditingkat bawah dan menurunkan jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan
2. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat dipedesaan:
3. Berkembangnya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga.

Dalam menentukan formulasi konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat, hendaknya tidak diberlakukan secara generik akan tetapi perlu yang dipikirkan adalah formulasi konsep, dan operasiobal pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih cenderung bersifat spesifik.

5. Karang Taruna

Karang taruna adalah merupakan wadah generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggungjawab dari, dan oleh masyarkat dengan mempunyai tujuan terbentuk sebagai pemuda yang terampil, berpengatahuan, serta penuh dengan kepribadian yang baik serta mampu menggali potensi dan bisa mengembangkan potensi tersebut sehingga bisa menunjang dalam perekonomian untuk mensejahterakan kehidupan. dimana kelompok pemuda tersebut adalah kumpulan dua orang atau lebih untuk mempuyai satu tujuan adapun pengertian kelompok tersebutadalah “serangkaian individu yang mempunyai persamaam yang saling berdekatan dan yang terlibat dalam satu tugas bersama jadi anggota-anggota merasa saling bergantung untuk mencapai tujuan” berdasarkan dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dipersepsikan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan motivasi serta mempunyai fungsi untuk berinteraksi yang menunjukkan satu sama lain ketergantungan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sebagaimana menurut pendapat Nawawi (2001 : 63) dimana metode penelitian deskriptif analisis adalah sebagai berikut: Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Penelitian kualitatif ini dipilih karena lebih sensitif dan adaptif terhadap peran dan berbagai pengaruh yang timbul. Disamping itu karena peneliti akan mencoba menggali atau mengeksplorasi, menggambarkan dan mengembangkan pengetahuan bagaimana pengetahuan yang diketahui. Sehingga metode penelitian kualitatif dianggap sesuai dengan masalah yang dikaji.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan adalah keberhasilan pembangunan dibidang kebudayaan dan pariwisata nasional yang dapat dicapai berkat keterpaduan dan kesinergian antara kekuatan masyarakat pemerintah, media masa dan pelaku kebudayaan dan kepariwisataan. Dalam pengembangan kepariwisataan dimana pariwisata sebagai alat pelestarian budaya dengan memperkenalkan hasil

budaya Indonesia. Peran serta dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor penentu nyata dengan diwujudkan pada partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan pengembangan tergantung kepada prinsip pengelolaan pariwisata menurut Pendapat Pitama dan Surya Diarta (2009 : 81) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan spasial local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan
2. preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumberdaya yang menjadi basis pengembangan kawasan wisata
3. pengembangan antraksi wisata tambahan yang mengakar pada kekhasan budaya lokal
4. pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal
5. memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat yang positif tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melalui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jika disimpulkan dari pernyataan tersebut maka harus menjaga keunikan dan kekhasan daerah yang berada dalam lingkungan tersebut supaya terlihat nilai-nilai ciri khas sehingga menarik minat untuk pengunjung serta bisa memberikan manfaat kepada daerah tersebut serta membantu dalam pencapaian perekonomian yang lebih baik.

Dalam mewujudkan industri kepariwisataan dan budaya maka perlu diterapkan “ Sapta Pesaona Pariwisata Indonesia “ atau di kenal dengan istilah 7-K yaitu : keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan ketenangan hal ini adalah sebagai perwujudan untuk menarik pengunjung/wisatawan sehingga memberikan peran proses pembangunan sebagai fungsi untuk sumber pendapatan masyarakat, pemerintah dan swasta sesuai dengan kearifan lokal yang di antaranya mempunyai keunikan lingkungan.

Objek Wisata Hutan pinus yang bisa dijadikan tempat *Camping Ground* oleh masyarakat melalui peran anak muda melalui Karang Taruna. Walaupun hutan tersebut milik perhutani tetapi bisa dijadikan tempat wisata untuk anak muda dengan di tata sedemikian rupa sehingga menarik untuk dikunjungi dan ini merupakan wujud salah satu pengembangan wisata dengan sistem kearifan lokal serta bentuk pemberdayaan dimasa yang akan datang.

Pemberdayaan merupakan salah satu proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh pemikiran dalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan terus-menerus. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara melakukan revitalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi termasuk SDM sehingga memberikan energi baru secara optimal agar dapat lebih berguna. Sedangkan pengembangan merupakan usaha untuk mengurangi menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan sumber daya manusia dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja dengan cara penambah pengetahuan dan keterampilan serta merupakan sikap. Dimana sumber daya manusia merupakan sebuah kekayaan organisasi yang berharga, karena pada intinya adalah potensi yang dimiliki SDM dapat dilatih dan dikembangkan sehingga menjadi prestasi, prestasi secara optimal dan unggul untuk mencapai tujuan organisasi.

Industri pariwisata mampu memberikan peran besar bagi proses pembangunan yang berfungsi juga sebagai pendapatan masyarakat dibidang sektor ekonomi yang prospektif untuk dikembangkan secara nasional dan internasional dimasa yang akan datang maka perlu diadakan strategi pemberdayaan industri pariwisata informasi melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen dimana sebagai sistem yang terdiri dari Manusia, peralatan prosedur dan tata kerja lainnya yang terpadu untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan dan mengambil kembali informasi guna mendukung/melancarkan pengambilan serta pencapaian tujuan di bidang industri pariwisata.

Komputer adalah salah satu peralatan teknologi baru dan canggih pada sistem informasi dimana untuk membantu dalam mempromosikan tempat-tempat wisata serta akan memberikan mafaat yang besar dan rancangan sistem informasi manajemen sebagai pengolah informasi maka ada beberapa langkah yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 125) : antara lain adalah

1. Temukan informasi yang diperlukan untuk keperluan apa ;
2. membuat pola klasifikasi informasi ;
3. merumuskan maksud dan manfaat sistem informasi yang ingin dicapai ;
4. membuat pusat/lokasi jaringan lintas informasi ;
5. menyusun pusat data untuk mengola, menyimpan,mendistribusikan dan memelihara informasi ;
6. menentukan proses informasi (secara otomatis/manual).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan maka diharapkan dari informasi akurat tersebut akan bermanfaat untuk diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan. selain itu juga perlu ditunjang oleh aspek promosi/pemasaran melalui media yang bermanfaat dengan tidak mahal tetapi tepat pada sasaran. Selain itu juga sebagai bahan untuk perkembangan industri pariwisata ini maka perlu diciptakan jaringan pada prosedur pengolahan data yang dikembangkan dan diintegrasikan bagi pengguna, sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Untuk mengembangkan kawasan wisata hutan yang dijadikan tempat *camping ground* ini dikelola oleh sekelompok karang taruna dimana sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dengan memafaat salah satu kelompok karang taruna dimana kelompok tersebut mempunyai syarat-syarat kelompokadalah sagaiberikut :

1. adanya kesadaran sebagi kelompok yang bersangkutan ;
2. adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu ;
3. adanya faktor pengikat yang memiliki bersama oleh anggota kelompok berupa kepentingan yang sama, ideologi yang sama, tujuan dan ideologi lainnya ;
4. memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama ;
5. bersistem dan berproses.

Dari uraian tersebut menandakan masyarakat/kelompok karang taruna jelasmasih sangat sederhana, persamaam perilaku serta sikap yang masih kuat dengan kesadaran secara kolektif, yaitu kesadaran bersama yang mempunyai karakteristik yang mengacu kepadakeseluruhan seperti kepercayaan, perasaan dan bersikap memaksa.

D . KESIMPULAN

Adapun hasil penelitian di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng dapat disimpulkan bahwa Desa Darmacaang merupakan desa yang memiliki cukup potensi wisata alam untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi warganya sebagai suatu pencapaian untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pembukaan potensi wisata yang lokasinya tidak jauh dari hutan pinus Darmacaang dimana dengan pembukaannya lokasi wisata ini dapat menjadikan SDM yang ada didaerah sekitar khususnya pemuda Karang Taruna ini akan lebih optimal dengan diberikan tanggungjawab berupa pengelolaan lebih lanjut mengenai lokasi wisata *camping ground* dengan sasaran atau target yaitu optimalisasi Potensi Desa Dalam Meningkatkan Perekonimian Masyarakat Dikabupaten Ciamis.

Sesuai dengan kearifan lokal di antaranya mempunyai keunikan lingkungan adalah salah satu hutan pinus yang bisa dijadikan tempat *Camping Ground* yang yang bisa diberdayakan oleh masyarakat melalui peran anak muda melalui Karang Taruna. Walupun hutan tersebut milik perhutani tetapi bisa dijadikan tempat wisata untuk anak muda dengan di tata sedemikian rupa sehingga menarik

untuk dikunjungi ini merupakan wujud salah satu pengembangan wisata dengan sistem kearifan lokal serta bentuk pemberdayaan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasasmita, G.1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan.*
Jakarta : CIDES.
- Sedarmayanti. 2004.Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: Mandar Maju.
- Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata.* Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nawawi, Hadari. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif.*Cetakan Keempat. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Sumodiningrat, 2001.Pengantar Statistika, Jakarta: Penerbit Andi.*

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA DAYA TARIK WISATAWAN GUNUNG GUNTUR DI KABUPATEN GARUT

Oleh :

Ikeu Kania¹, Muchtar²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Garut

^{1,2}Jln. Cimanuk No 285 A Garut

¹ikeukania@fisip.uniga.ac.id

²muchtar@uniga.ac.id

ABSTRAK

Objek wisata Gunung Guntur memiliki panorama alam yang sangat indah dan mempesona. Namun keindahan alam ini belum dapat memikat dan meningkatkan jumlah wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya kunjungan wisatawan ke Gunung Guntur jika dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Papandayan dan Gunung Cikuray. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mengenai faktor-faktor yang dominan terkait dengan rendahnya daya tarik wisatawan terhadap objek wisata Gunung Guntur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket terhadap 70 orang responden. Teknik analisis data menggunakan confirmatory faktor analysis berdasarkan konsep objek penawaran pariwisata yang dikemukakan oleh Yoeti (2016) yang diolah dengan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan dari 14 indikator rendahnya daya tarik wisatawan Gunung Guntur menghasilkan 3 faktor baru yaitu Daya Tarik, Fasilitas dan Kemudahan. Saran dari peneliti untuk meningkatkan daya tarik wisatawan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata dengan melengkapi fasilitas umum dan kemudahan aksesibilitas.

Kata Kunci : *Wisata Gunung, Confirmatory Faktor Analysis, Daya Tarik*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, di Indonesiasektor pariwisata mulai berkembang menjadi satu industri dibidang jasa yang berusaha untuk menarik dan memberikan pelayanan yang baik serta memuaskan bagi wisatawan. Pemerintah berkeinginan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesempatan berusaha dalam industri sektor pariwisata (Yoeti, 2016). Kedatangan wisatawan yang melakukan kegiatan berkunjung atau berwisata pada suatu tempat medatangkan manfaat dan keuntungan bagi negara (Lantif, Nastiti, Hapsari, & Fatimah, 2019). Gambaran pariwisata sebagai suatu industri diberikan untuk menggambarkan pariwisata secara kongkret dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa pariwisata memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Yoeti, 2016).

Potensi pariwisata kini semakin berkembang pesat, oleh karena itu pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan katalisator pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor yang lainnya. Perkembangan industry pariwisata ini didukung dengan dikeluarkannya kebijakan kepariwisataan dalam bentuk Undang-Undang No 10 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa kegiatan wisata perlu didukung dengan berbagai layanan yang baik serta fasilitas yang memadai yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar dapat menarik para wisatawan.

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Fitri & Rahayu, 2017). Pariwisata kini menjadi bagian yang

sangat penting dalam pembangunan karena disamping dapat menciptakan lapangan kerja baruan pendapatan masyarakat, daerah dan negara juga dapat memperkenalkan dan melestarikan seni budaya, serta keindahan alam kepada wisatawan yang mengunjunginya. Dalam sektor pariwisata diperlukan adanya objek penawaran pariwisata seperti adanya daya tarik, fasilitas dan kemudahan agar memikat wisatawan (Yoeti, 2016). Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pariwisata disemua wilayah termasuk di Kabupaten Garut diperlukan peningkatan usaha pariwisata yang saling terkait baik barang maupun jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan.

Kabupaten Garut mendapat julukan Swiss van Java karena dikelilingi banyak gunung sama halnya seperti Swiss yang dikelilingi oleh Pegunungan Alpen. Ada 7 (tujuh) gunung yang masuk wilayah Kabupaten Garut yakni Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Puteri, Gunung Sedahurip (Piramid), Gunung Haruman dan Gunung Talaga Bodas. Hampir semua gunung yang ada di Kabupaten Garut merupakan kesukaan para pendaki di Jawa Barat termasuk Gunung Guntur yang memiliki ketinggian 2.249 mdpl, gunung ini terakhir kali meletus pada 1847 (Dimiyati, 2020).

Gunung Guntur memiliki panorama alam yang dapat memikat wisatawan untuk berkunjung. Potensi alam yang sangat indah dengan budaya dan adat istiadat yang melimpah dan melekat erat sebagai jati diri dan dipegang teguh oleh masyarakat. Panorama Gunung Guntur sangat mempesona dengan memiliki 7 (tujuh) puncak. Namun, yang paling populer dan sering didaki adalah puncak ke-5. Karakteristik dari puncak tersebut berbeda-beda, misalnya dari puncak 1 hingga 4 hampir sama yaitu ditumbuhi rerumputan yang membentuk sabana yang indah dan banyak ditumbuhi oleh tanaman pinus, cantigi, dan beberapa tanaman edelweis. Sementara dari puncak 5 hingga 7 ditumbuhi oleh hutan tropis yang rimbun, dan konon dari puncak 5 hingga 7 masih didiami oleh hewan liar seperti babi hutan, ular, harimau, dan macan kumbang (Dimiyati, 2020). Dari puncak Gunung Guntur akan terlihat berbagai pemandangan indah salah satunya kawah yang terbentuk akibat letusan dahsyat. Letusan tersebut kemudian menimbulkan jejak sejarah vulkanis berupa bentangan luas dua kaldera yang dalam. Kedua kaldera tersebut adalah Kaldera Pangkalan di sebelah timur dan Kaldera Ganda pura di sebelah barat gunung.

Panorama yang indah ini seharusnya menjadi daya tarik wisatawan itu belum dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan observasi dan wawancara dapat dikemukakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Guntur jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Papandayan. Jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Papandayan per minggu (Sabtu dan Minggu) sekitar 1.700 sampai 2.500 orang sedangkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Gunung Guntur sebanyak 300-500 per minggu. Rendahnya daya tarik wisatawan dipicu oleh berbagai permasalahan yang ditemukan diantaranya :

1. Fasilitas seperti tempat parkir yang belum memadai sehingga kendaraan wisatawan diparkir disembarang tempat umum dan tidak terjamin keamanannya. Selain itu fasilitas seperti toilet juga kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kebersihannya.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pariwisata seperti menjaga keamanan, kebersihan dan keindahan hal ini dibuktikan dengan banyaknya sampah berserakan disekitar lokasi
3. Souvenir sebagai oleh-oleh dan daya tarik wisatawan juga tidak tersedia sehingga wisatawan tidak memiliki kesan seperti berkunjung ke objek wisata yang lain yang bisa mendapatkan souvenir khas objek wisata yang dituju.
4. Papan petunjuk jalan belum tertata dengan baik sehingga beberapa kejadian ada wisatawan yang tersesat.

5. Medan pendakian Gunung Guntur dikenal berat karena tidak memiliki banyak pepohonan sehingga terlihat gundul dan tandus. Selain itu, gunung ini memiliki kemiringan yang curam dengan stabilitas tanah yang tergolong labil sehingga rentan longsor.

Untuk mendaki gunung yang terletak di Kecamatan Tarogong Keler, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini bisa melalui jalur Curug Citiis yang berada di Kampung Citiis, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Jalur pendakian ini merupakan yang terpendek dan termudah. Tiket masuk kawasan Gunung Guntur untuk mentara tiket masuk Simaksi (surat izin masuk kawasan konservasi) adalah Rp15.000 per orang. Tiket tersebut sudah termasuk asuransi, biaya masuk, dan biaya berkemah. Untuk masuk kawasan gunung dikenakan biaya Rp3.000 per motor dan Rp5.000 per mobil.

Agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka objek wisata Gunung Guntur ini perlu dilakukan pengembangan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Keberhasilan pengembangan suatu pariwisata tidak hanya menjadikan target utama menarik wisatawan untuk datang, tetapi lebih mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat didalamnya untuk berkembang dan maju. Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Sampai saat ini usaha-usaha pengembangan objek wisata Gunung Guntur yang berorientasi pada masyarakat lokal masih kurang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang dominan terkait dengan rendahnya daya tarik wisatawan terhadap objek wisata Gunung Guntur dan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk perencanaan strategis dalam pengembangan objek wisata Gunung Guntur.

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket terhadap 70 orang responden yaitu para wisatawan Gunung Guntur selanjutnya teknik analisis data menggunakan *confirmatory faktor analysis* berdasarkan konsep objek penawaran pariwisata yang dikemukakan oleh Yoeti (2016) yang diolah dengan SPSS 23. Berikut dalam tabel 1 dibawah ini adalah indikator yang digunakan untuk dianalisis berdasarkan konsep menurut Yoeti (2016) :

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Rendahnya Daya Tarik Wisatawan Youti (2016)	1. Daya Tarik	1. Medan Pendakian 2. HargaTiket 3. KurangnyaWisatawan 4. Tingkat KemiringanGunung 5. AtraksiBudaya 6. Souvenir 7. Kebersihan
	2. Fasilitas	1. Infrastruktur Jalan 2. Pos Jaga 3. Toilet Umum 4. LahanParkir 5. WarungMakanan
	3. Kemudahan	1. Transportasi 2. PapanPetunjukArah

C. PEMBAHASAN

1. Menilai variabel yang layak

Hasil output dengan menggunakan SPSS 23 dari 14 indikator yang dijawab oleh 70 responden menghasilkan hasil sebagai berikut :

1. KMO and Bartlett's test.

Hasil nilai KMO and Bartlett's test dapat dilihat dari tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.781
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	421.155
	df	91
	Sig.	.000

Hasil output dari tabel KMO and Bartlett's Test menunjukkan angka 0,781. Nilai tersebut di atas angka 0,5 maka variabel layak untuk dianalisis lebih lanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian nilai signifikannya yaitu sebesar 0,000, angka tersebut dibawah 0,05. Hasil menunjukkan variabel dan sampel layak untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Anti image correlation.

Setelah pengujian KMO and Bartlett's test, maka tahap selanjutnya menganalisa nilai anti image correlation. Berikut nilai anti image correlation dalam tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Anti Image Correlation

No	Indikator	Nilai MSA
1	Medan Pendakian	0,717
2	Harga Tiket	0,632
3	Kurangnya Wisatawan	0,668
4	Tingkat Kemiringan Gunung	0,850
5	Atraksi Budaya	0,840
6	Souvenir	0,887
7	Kebersihan	0,820
8	Infrastruktur Jalan	0,901
9	Pos Jaga	0,820
10	Toilet Umum	0,714
11	Lahan Parkir	0,826
12	Warung Makanan	0,771
13	Transportasi	0,526
14	Papan Petunjuk Arah	0,566

Berdasarkan tabel diatas ke 14 indikator menghasilkan nilai MSA diatas 0,5. Dari indikator pertama medan pendakian dengan nilai MSA sebesar 0,717, harga tiket dengan nilai MSA sebesar 0,632, kurangnya wisatawan dengan nilai MSA sebesar 0,668, tingkat kemiringan gunung dengan nilai MSA sebesar 0,850, atraksi budaya dengan nilai MSA sebesar 0,840, souvenir dengan nilai MSA sebesar 0,887, kebersihan dengan nilai MSA sebesar 0,820, infrastruktur jalan dengan nilai MSA sebesar 0,901, pos jaga dengan nilai MSA sebesar 0,820, toilet umum dengan nilai MSA sebesar

0,714, lahan parkir dengan nilai MSA sebesar 0,826, warung makanan dengan nilai MSA sebesar 0,771, transportasi dengan nilai MSA sebesar 0,526, papan petunjuk arah dengan nilai MSA sebesar 0,566. Dari hasil diatas dapat dianalisa bahwa semua indikator dapat dianalisis lebih lanjut ke tahapan berikutnya.

3. Total Variance Explained.

Pada tabel total variance explained yaitu pengelompokkan berapa faktor baru yang terbentuk. Factor yang terbentuk dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.319	37.989	37.989	5.319	37.989	37.989	4.175	29.818	29.818
2	1.840	13.141	51.131	1.840	13.141	51.131	2.698	19.274	49.092
3	1.379	9.849	60.979	1.379	9.849	60.979	1.664	11.888	60.979
4	.933	6.666	67.646						
5	.885	6.324	73.970						
6	.681	4.864	78.834						
7	.627	4.475	83.309						
8	.534	3.811	87.120						
9	.446	3.184	90.304						
10	.410	2.930	93.235						
11	.300	2.145	95.379						
12	.257	1.836	97.215						
13	.230	1.643	98.858						
14	.160	1.142	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Pada tabel total variance explained diatas, dari 14 indikator yang dianalisis ternyata dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor baru, yaitu yang menunjukkan nilai eigenvalues nya diatas satu. Oleh karena itu didapatkan hasil terbentuk 3 faktor baru.

4. Rotated Component Matrix.

Tahapan selanjutnya adalah dilakukan rotasi untuk memperjelas indikator-indikator mana yang masuk ke dalam faktor. Hasil rotasi dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5
Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Medan Pendakian	.148	.619	.113
Harga Tiket	.042	.803	-.034
Kurangnya Wisatawan	-.009	.744	-.058
Tingkat Kemiringan Gunung	.354	.652	.089
Atraksi Budaya	.471	.618	.143
Souvenir	.631	.325	.187
Kebersihan	.716	.042	.206
Infrastruktur Jalan	.768	.215	.284
Pos Jaga	.737	.205	.248
Toilet Umum	.868	.020	-.147
Lahan Parkir	.789	.049	-.057
Warung Makanan	.593	.319	.124
Transportasi	.091	.084	.814
Papan Petunjuk Arah	.161	-.013	.834

Berdasarkan hasil rotasi, maka dapat diketahui bahwa:

- Indikator medan pendakian masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading sebesar 0,619
- Indikator harga tiket masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading 0,803
- Indikator kurangnya wisatawan masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading sebesar 0,744
- Indikator tingkat kemiringan gunung masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading sebesar 0,652
- Indikator atraksi budaya masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading sebesar 0,618
- Indikator souvenir masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading sebesar 0,631
- Indikator kebersihan masuk ke dalam faktor 2 dengan faktor loading sebesar 0,716
- Indikator infrastruktur jalan masuk ke dalam faktor 1 dengan faktor loading sebesar 0,768
- Indikator pos jaga masuk ke dalam faktor 1 dengan faktor loading sebesar 0,737
- Indikator toilet umum masuk ke dalam faktor 1 dengan faktor loading sebesar 0,868
- Indikator lahan parkir masuk ke dalam faktor 1 dengan faktor loading sebesar 0,789
- Indikator warung makanan masuk ke dalam faktor 1 dengan faktor loading sebesar 0,593
- Indikator transportasi masuk ke dalam faktor 3 dengan faktor loading sebesar 0,814
- Indikator papan petunjuk arah masuk ke dalam faktor 3 dengan faktor loading sebesar 0,834

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, dengan teknik *Confirmatory Faktor Analysis*, maka dihasilkan 3 nama faktor baru sebagaimana yang tertera dalam tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Nama Faktor Baru

No	Nama Faktor Loading	Nama Faktor Baru
1.	Medan Pendakian Harga Tiket Kurangnya Pengunjung Tingkat Kemiringan Gunung	Faktor Daya Tarik

	Atraksi Budaya Souvenir Kebersihan	
2.	Infrastruktur Jalan Pos Jaga Toilet Umum Lahan Parkir Warung Makanan	Faktor Fasilitas
3.	Transportasi Papan Petunjuk Arah	Faktor Kemudahan

Dari faktor baru yang dihasilkan sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa faktor daya tarik menjadi faktor baru dalam penawaran objek pariwisata dimana daya tarik ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memikat dan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Gunung Guntur. Yang menjadi faktor rendahnya daya tarik wisatawan diataranya adalah medan pendakian yang sangat curam serta kuranya pepohonan yang besar (gundul) sehingga pendakian yang dilakukan cukup berat. Selain itu, gunung ini memiliki kemiringan yang curam dengan stabilitas tanah yang tergolong labil sehingga rentan longsor. Kurangnya wisatawan yang berkunjung menjadi faktor rendahnya daya tarik sehingga keindahan panorama Gunung Guntur tidak banyak diketahui oleh wisatawan lainnya. Hal ini di perparah oleh kondisi lingkungan yang kurang bersih seperti banyak bertebaran sampah di sekitar Gunung Guntur.

Fasilitas menjadi faktor baru berikutnya dari hasil penelitian ini. Fasilitas di objek wisata Gunung Guntur kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Seperti tidak adanya lahan parkir yang luas menjadi penyebab rendahnya wisatawan, kendaraan yang digunakan wisatawan baik mobil ataupun motor menjadi tidak beraturan tempatnya dan menimbulkan kemacetan. Fasilitas lain yang menjadi penyebab rendahnya wisatawan adalah kurang memadainya keberadaan toilet umum untuk para wisatawan terutama dari segi kebersihannya, masyarakat kurang menjaga kebersihan fasilitas umum sehingga kondisinya menjadi kumuh.

Fasilitas kemudahan khususnya transportasi menjadi faktor baru yang ketiga yang menyebabkan rendahnya kunjungan wisatawan. Transportasi yang ada dan banyak digunakan untuk para wisatawan adalah objek pangkalan dan mobil bak terbuka yang ada dipinggir jalan utama menuju basecamp sebelum ke posko pendakian. Tarif yang mereka tentukan kadang-kadang menawarkan dengan jumlah yang kurang wajar. Papan petunjuk arah menjadi bagian penting yang harus diperhatikan mengingat ada beberapa jalur yang bisa digunakan untuk mencapai puncak gunung. Papan ini sangat penting untuk memudahkan para wisatawan melakukan pendakian.

D. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa dari empat belas indikator yang diteliti, melalui proses faktoring dapat direduksi menjadi tiga faktor baru. kemudian tiga faktor yang terbentuk tersebut diantaranya faktor daya tarik yang terdiri dari medan pendakian, harga tiket, kurangnya wisatawan, tingkat kemiringan gunung, atraksi budaya, souvenir, kebersihan. Faktor fasilitas terdiri dari infrastruktur jalan, pos jaga, toilet umum, lahan parkir, warung makanan. Faktor kemudahan terdiri dari transportasi dan papan petunjuk arah.

Saran dari peneliti untuk meningkatkan daya tarik wisatawan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata dengan melengkapi fasilitas umum dan kemudahan aksesibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, G. (2017). Hubungan Perkembangan Wisata terhadap Ekonomi Wilayah di Gunungkidul Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.16-27>
- Ario, A., Kartono, A. P., Prasetyo, L. B., & Supriatna, J. (2019). Pre-release assessment of Javan Gibbon (*Hylobates moloch*) during acclimatization phase in Mount Malabar Protected Forest, West Java. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 189. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.189-196>
- Asriningrum, W., Noviar, H., & Suwarsono. (2004). Pengembangan Metode Zonasi Daerah Bahaya Letusan Gunung Api Studi Kasus Gunung Merapi. *Jurnal Penginderaan Jauh Dan Pengeolahan Data Citra Digital*, 1(1), 66–75.
- Da, P. G. C. do R. C., & Anom, I. P. (2019). Dampak Ekonomi Pengembangan Daya Tarik Wisata “ Hot Spring ” Di Kecamatan Marobo ., *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 226–230.
- Dimiyati, V. (2020). Terpikat Keindahan Gunung Guntur di Garut, Miliki 7 Puncak & Sabana yang Eksotis. Retrieved January 7, 2020, from i NEWS.id website: <https://www.inews.id/travel/destinasi/terpikat-keindahan-gunung-guntur-di-garut-miliki-7-puncak-sabana-yang-eksotis>
- Fitri, W., & Rahayu, B. S. (2017). Strategi Pengembangan Objek Wisata Gunung Gambar di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1), 1–7. Retrieved from <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/792/765>
- Hidayat, A. A., & Hendra. (2019). Prospek Pengembangan Ecotourism Di Taman Nasional Gunung Tambora Adi. *Jurnal Sadar Wisata*, 2(1), 24–39.
- Hutabarat, H., Agung, I. G., & Mahagangga, O. (2019). Perkembangan Wisata Mendaki Di Gunung Agung : Studi Kasus Gunung Agung , Kabupaten. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 218–225.
- Lantif, M. A. F., Nastiti, N. De, Hapsari, N. M., & Fatimah, S. (2019). Branding Destinasi Wisata Gunung Bromo Melalui Instagram Sebagai Upaya Glokalisasi. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 108–115. <https://doi.org/10.31311/par.v6i2.5583>
- Sari, I. P. (2016). *Strategi Pengembangan Potensi Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Sebagai Destinasi Ekowisata di Yogyakarta*.
- Sasmita, D., & Nugroho, S. (2019). Implikasi Erupsi Gunung Agung Terhadap Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Pariwisata Di Kawasan Pantai Batu Bolong , Canggu. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 304–309.
- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Sukarmin, Y. (2016). Persiapan Fisik Bagi Pendaki Gunung: Sebuah Alternatif Pencegahan Kecelakaan. *Cakrawala Pendidikan*, 1(1), 91–102. <https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.9166>
- Widodo, D. R., Nugroho, S. P., & Asteria, D. (2018). Analisis Penyebab Masyarakat Tetap Tinggal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi (Studi di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 135. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.135-142>
- Yoeti, O. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Zhang, L., & Yang, J. (2015). Smart tourism. In *Encyclopedia of Tourism*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_175-1

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM PANTAI SANTOLO KABUPATEN GARUT

Oleh :

¹Mila Karmila ²Ema Rismayanti

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

¹e-mail : milakarmila14@fisip.uniga.ac.id

²e-mail : emarismayanti@fisip.uniga.ac.id

Jl. Cimanuk No. 285A Tarogong Kidul Garut

ABSTRAK

Pantai santolo merupakan salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Garut. Pengelolaan pantai santolo di Kabupaten Garut masih belum maksimal, terlihat dari kurang terpeliharanya infrastruktur, kurangnya fasilitas pendukung kepariwisataan dan kurangnya rasa aman, nyaman bagi wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan kurangnya pengelolaan wisata alam pantai santolo di Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, survey dilakukan pada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengelola pantai santolo sebanyak 95 orang. Analisis data menggunakan exploratory faktor analysis(EFA) dengan hasil kuisioner skala likert sebagai input yang diolah dengan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 indikator yang diujikan, terbentuk 4 faktor yang menyebabkan rendahnya pengelolaan Objek Wisata Pantai Santolo di Kabupaten Garut. Faktor tersebut antara lain sumber daya manusia (skor eigen 0,6159), lingkungan (skor eigen 2,253), manajemen (skor eigen 2,120) dan regulasi (skor eigen 1,435). Faktor yang paling dominan dalam pengelolaan objek wisata pantai santolo yaitu faktor sumber daya manusia dengan skor eigen value sebesar 6,159. Saran penelitian agar pemerintah lebih memperhatikan dalam hal pengelolaan objek wisata pantai santolo khususnya dalam akseibilitas, amenities dan daya tarik wisata.

Kata kunci : *Pariwisata, Exploratory Factor Analysis, Daya Tarik Wisata, Amenitas.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata yang tersebar dari sabang sampai merauke. Banyaknya potensi wisata yang dimiliki Indonesia dapat menarik wisatawan local maupun mancanegara yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Tentunya hal ini berpengaruh pada pendapatan negara yang menjadikan pariwisata menjadi andalan utama sumber devisa negara Indonesia. Pariwisata merupakan pergerakan manusia yang bersifat sementara ke tujuan-tujuan wisata (Mathieson, & Wall, G, 1982) dengan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, dan keluar dari kediamannya (Marpaung, 2002).

Pengelolaan pariwisata membutuhkan kerjasama semua unsur baik lapisan masyarakat, pemerintah dan juga swasta (Nawawi, 2013). Maka dari itu diharapkan kerjasama yang baik dari semua kalangan khususnya masyarakat lokal, karena mereka paling tahu persoalan yang terjadi dan menerima dampak positif maupun negatifnya (Hermanto, 2009). Pemerintah merupakan fasilitator yang berfungsi membuat dan menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata yang ada di daerahnya.

Salah satu faktor utama yang dapat menarik wisatawan mengunjungi objek wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki objek wisata tersebut. Daya tarik wisata merupakan unsur wajib yang harus dimiliki dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang didalamnya terdapat berbagai jenis pariwisata yang potensial untuk dikembangkan dari mulai wisata alam, wisata Religi, Wisata Budaya,

Wisata Minat Khusus dan Wisata Buatan. Khususnya wisata alam yang di dukung dengan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Saat ini pemerintah Kabupaten Garut sedang menggalakan program pariwisata yang kebijakannya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Serta Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Garut yang mana DISPARBUD merupakan penyelenggara rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata, kebudayaan dan kesenian skala Kabupaten serta menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan kesenian skala Kabupaten.

Objek Wisata Alam Pantai Santolo salah satu objek wisata yang terdapat di Kecamatan Pamengpeuk yang terkenal dengan pesona pantai dan pulau kecil yang berbatasan langsung dengan samudera hindia. Pantai santolo menjadi salah satu objek wisata unggulan di kabupaten garut karena memiliki daya tarik yang dimiliki Daya tarik yang dimiliki oleh pantai santolo yaitu perairan pantai berwarna biru, tidak bau, air normal, nyaman, segar, tiupan angin yang relatif besar, pulau santolo, dermaga o roket, peluncuran roket, sajian makanan laut.

Berkembangnya objek wisata pantai santolo setiap tahunnya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Adapun jumlah kunjungan wisatawan selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Data Kunjungan Wisata Pantai Santolo Tahun 2014-2018

No	Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah Total
1	2014	394	221.341	221.735
2	2015	71	231.211	231.282
3	2016	356	373.822	374.178
4	2017	258	116.987	117.245
5	2018	160	273.699	273.859
Jumlah		1.239	1.217.060	1.218.299

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2020

Tabel 1 menunjukkan jumlah wisatawan rata-rata meningkat setiap tahunnya. Peningkatan wisatawan tersebut harusnya dibarengi dengan pengelolaan dan pengembangan yang mendalam. Namun kenyataannya kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan di pantai santolo. Hal ini terlihat dari kurang terpeliharanya infrastruktur, kurangnya fasilitas pendukung kepariwisataan dan kurangnya rasa aman dan nyaman masyarakat. Berikut data amenitas yang terdapat di pantai santolo dalam tabel 2.

Tabel 2
Daftar Amenitas Di Pantai Santolo

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Pintu keluar-masuk	1	Cukup baik
2	Warung Mamin	5 Buah	Cukup baik
3	Mesjid Jami	1 Buah	Baik
4	Mushola	3 Buah	Cukup baik
5	Kantor POAIRUT		
6	MCK	60 Buah	Cukup baik

7	Penginapan	60 Buah	Cukup baik
8	Hotel	1 Buah	Cukup baik
9	Restoran	20 Buah	Cukup baik
10	Tempat Sampah	80 Buah	Baik
11	Tempat Parkir	4 Ha	Baik
12	Banana UFO Boot	5 Buah	Baik
13	Meeting Room LAPN	1 Buah	Baik

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2020

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa amenities yang terdapat di pantai santolo masih terbatas, seharusnya fasilitas yang disediakan dapat membuat wisatawan nyaman berkunjung ke pantai. Penambahan dan perbaikan sarana pendukung dibutuhkan agar minat masyarakat mengunjungi objek wisata terus meningkat baik wisatawan lokal maupun mancanegara (Robi, 2017). Dalam hal pengelolaan kebersihan masih ditemukan kurang baik terlihat dari banyaknya sampah di pantai, terbatasnya gazebo yang disediakan oleh pengelola pantai membuat wisatawan susah untuk mencari tempat peristirahatan.

Pasal 34 undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan hayati dan ekosistemnya menyebutkan bahwa pengelolaan taman wisata dilaksanakan oleh pemerintah, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten garut untuk mengupayakan peningkatan dalam hal fasilitas-fasilitas pendukung objek wisata dan tata kelolanya juga harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah pada sector wisata. Dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan kebijakan merupakan unsur yang penting, terlepas dari kebijakan pemerintah terkait untuk menentukan kriteria agar objek wisata dapat dinikmati (Yoeti, 2016).

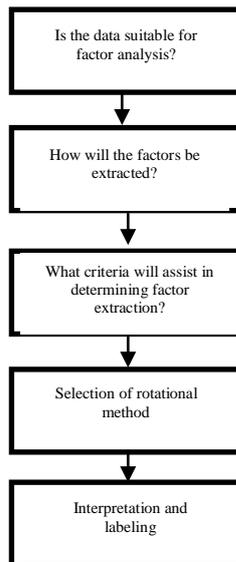
Oleh karena itu perlunya suatu pengelolaan yang maksimal yang memperhatikan semua aspek dari mulai hal kecil sampai hal terbesar agar suatu objek wisata dapat menarik banyak kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan kurangnya pengelolaan wisata alam pantai santolo di Kabupaten Garut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Terdapat dua tahapan yang dilakukan, tahap pertama adalah wawancara pada sejumlah informan mengenai kondisi Objek Wisata Pantai Santolo saat ini dan tahap kedua adalah penyebaran kuesioner pada responden yang ditentukan. Tahap pertama dilakukan guna memperoleh informasi yang selanjutnya menjadi faktor yang diujikan, sebanyak 20 faktor dihasilkan. Dalam tahap kedua, distribusi penyebaran kuesioner dilakukan kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berjumlah 95 responden. Setelah data terkumpul, data selanjutnya dianalisis dengan *exploratory factor analysis* dan menggunakan bantuan software SPSS 23. *Exploratory factor analysis* (EFA) digunakan jika banyaknya factor yang terbentuk tidak ditentukan terlebih dahulu, justru dicari sampai dapat menjawab kebutuhan dalam menerangkan keragaman data variabel-variabel asal (Sitinjak & Sugiarto, 2006)

Dalam pendekatan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA) memiliki urutan secara linier untuk pembentukannya. Adapun langkah pendekatan EFA dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1 Langkah pembentukan Exploratory Factor Analysis

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menentukan variabel yang akan dianalisis

Tahapan pertama dalam pengujian faktor-faktor rendahnya pengelolaan objek wisata pantai santolo adalah menilai variabel yang layak untuk dimasukkan kedalam analisis selanjutnya. Dilakukan pengujian sebagai berikut :

1. Nilai Barlett's Test Of Sphericity yang dipakai untuk mengetahui kecukupan variabel-variabel dalam sampel berkorelasi.
2. Uji Kaiser-Meyer Olkin (KMO), dalam uji ini analisis factor dianggap layak jika nilai $KMO > 0,5$. Uji KMO digunakan untuk mengetahui kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan sampel.
3. Uji Measure Of Sampling Adequacy (MSA) digunakan untuk mengukur derajat korelasi antar variabel dengan kriteria $MSA > 0,5$.

Hasil pengujian KMO dan Barlett's Test dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
KMO dan Barlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.798
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	823.777
	Df	171
	Sig.	.000

Sumber : Pengolahan Data 2020

Tabel 3 menunjukkan nilai yang diperoleh dari uji barlett's test of sphericity adalah sebesar 823.777 dengan signifikasn $< 0,05$ yaitu 0,000 artinya antar variabel terjadi korelasi. Hasil *Kaiser Meyer Olkin* didapat nilai 0,798, angka tersebut $> 0,5$ artinya variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diproses lebih lanjut.

Tahapan selanjutnya pengujian measure of sampling adequency yaitu untuk mengetahui variabel mana saja yang diproses lebih lanjut dan dikeluarkan. Nilai MSA tersebut dilihat dari tabel

anti image correlation yang bertanda “a” dengan arah diagonal ke kiri atas dan kanan bawah dan ketentuan nilai MSA harus diatas 0,5 maka dapat dilanjut ke proses berikutnya. Berikut hasil dari MSA dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Tabel Anti Image Correlation

No	Faktor	Nilai MSA
1	Kondisi lingkungan sosial	0,745
2	Kondisi lingkungan ekonomi	0,611
3	Kondisi lingkungan politik	0,717
4	Kondisi lingkungan budaya	0,812
5	Kondisi keamanan	0,830
6	Kualifikasi Pendidikan pegawai	0,826
7	Keahlian pegawai	0,851
8	Rasa tanggung jawab	0,906
9	Pemahaman tufoksi kerja	0,849
10	Pengetahuan pegawai	0,817
11	Pelatihan kerja	0,844
12	Kesadaran akan wisata	0,778
13	Perencanaan objek wisata	0,650
14	Struktur organisasi	0,835
15	Penganggaran untuk objek wisata	0,738
16	Pengawasan	0,866
17	Formulasi kebijakan pariwisata	0,742
18	Implementasi kebijakan pariwisata	0,764
19	Evaluasi kebijakan pariwisata	0,763
20	Sasaran kebijakan	0,459

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa ada satu variabel yang nilainya kurang dari 0,5. Sehingga variabel sasaran kebijakan akan dikeluarkan dari proses berikutnya dan dilakukan ekstraksi kedua.

2. Penentuan jumlah factor

Untuk menentukan jumlah factor yang terbentuk dengan melihat nilai eigen value, dengan ketentuan nilai eigen value > 1. Untuk melihat jumlah factor yang terbentuk maka dapat dilihat dari tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5
Tabel Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.159	32.416	32.416	6.159	32.416	32.416	4.349	22.890	22.890
2	2.253	11.857	44.273	2.253	11.857	44.273	2.756	14.503	37.393
3	2.120	11.159	55.432	2.120	11.159	55.432	2.579	13.575	50.968

4	1.435	7.555	62.987	1.435	7.555	62.987	2.284	12.019	62.987
5	.917	4.829	67.816						
6	.804	4.229	72.045						
7	.796	4.191	76.236						
8	.639	3.365	79.601						
9	.552	2.904	82.506						
10	.487	2.562	85.067						
11	.473	2.492	87.559						
12	.452	2.379	89.938						
13	.378	1.991	91.929						
14	.339	1.782	93.712						
15	.336	1.771	95.482						
16	.263	1.383	96.866						
17	.239	1.260	98.126						
18	.210	1.105	99.230						
19	.146	.770	100.000						

Sumber : Pengolahan Data 2020

Pada tabel 5 diketahui dari 19 variabel baru yang sudah dikeluarkan 1 variabel , hanya terdapat 4 faktor baru yang terbentuk. Dapat dilihat dari nilai eigen value hanya 4 faktor yang menunjukkan eigen value > 1. Jadi diketahui 4 faktor adalah jumlah yang paling optimal.

4. Interpretasi factor

Tahapan selanjutnya adalah menginterpretasikan factor-faktor yang terbentuk dengan melihat tabel *rotated component matrix* yang menunjukkan distribusi ke-19 variabel tersebut pada 4 faktor baru. Tabel 6 berikut menunjukkan hasil dari *rotated component matrix*.

Tabel 6
Rotated Component Matrix

	Component			
	1	2	3	4
Kondisi lingkungan social	.131	.589	.018	.049
Kondisi lingkungan ekonomi	.035	.797	.103	-.068
Kondisi lingkungan politik	.017	.761	.143	.115
Kondisi lingkungan budaya setempat	.252	.727	-.055	.192
Kondisi keamanan	.494	.552	-.001	.311
Kualifikasi pendidikan pegawai	.628	.349	-.084	.204
Keahlian pegawai	.712	-.022	-.025	.334
Rasa tanggung jawab	.730	.187	.310	.104
Pemahaman tufoksi kerja	.745	.152	.247	.105
Pengetahuan pegawai	.789	.044	.198	-.047
Pelatihan kerja	.808	.089	.166	-.071
Kesadaran akan wisata	.670	.142	.259	-.112
Perencanaan objek wisata	.151	.068	.870	-.024
Struktur organisasi	.279	-.075	.583	.493
Penganggaran untuk objek wisata	.178	.252	.726	.150
Pengawasan	.308	-.082	.725	.237

Formulasi kebijakan kepariwisataan	.116	.146	.067	.827
Impelementasi kebijakan kepariwisataan	.128	.057	.091	.763
Evaluasi kebijakan kepariwisataan	-.230	.213	.290	.588

Sumber : Pengolahan Data 2020

Tabel 6 dapat diketahui distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Pengelompokan variabel kedalam factor dilihat dari nilai terbesar dari setiap component, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Factor pertama:kualifikasi pendidikan pegawai, keahlian pegawai, rasa tanggung jawab, pemahaman tufoksi kerja, pengetahuan pegawai, pelatihan kerja dan kesadaran akan wisata.
- Faktor kedua : kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan ekonomi, kondisi lingkungan politik, kondisi lingkungan budaya setempat, kondisi keamanan.
- Faktor ketiga : perencanaan objek wisata, struktur organsisasi, penganggaran untuk objek wisata, pengawasan.
- Faktor keempat : formulasi kebijakan kepariwisataan, implementasi kebijakan kepariwisataan, evaluasi kebijakan kepariwisataan.

Secara lengkap pembagian variabel-variabel berdasarkan factor yang terbentuk dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Variabel diurutkan berdasarkan nilai factor loading dari yang terbesar, untuk pemberian nama pada masing-masing factor baru yang terbentuk bersifat subyektif (Ghozali, 2005).

Tabel 7
Pembagian Variabel Yang Terbentuk

Faktor yang terbentuk	Variabel	Eigen Value	Loading Faktor
Faktor SDM	Pelatihan Kerja	6.159	0,808
	Pengetahuan Pegawai		0,789
	Pemahaman Tufoksi Kerja		0,745
	Rasa Tanggung Jawab		0,730
	Keahlian Pegawai		0,712
	Kesadaran Akan Wisata		0,670
	Kualifikasi Pendidikan Pegawai		0,628
Faktor Lingkungan	Kondisi Lingkungan Ekonomi	2.253	0,797
	Kondisi Lingkungan Politik		0,761
	Kondisi Lingkungan Budaya Setempat		0,727
	Kondisi Lingkungan Sosial		0,589
	Kondisi Keamanan		0,552
Faktor Manajemen	Perencanaan Objek Wisata	2.120	0,870
	Penganggaran Untuk Objek Wisata		0,726
	Struktur Organsisasi		0,725
	Pengawasan		0,583
Faktor Regulasi	Formulasi Kebijakan Kepariwisataan	1.435	0,827
	Implementasi Kebijakan Kepariwisataan		0,763
	Evaluasi Kebijakan Kepariwisataan		0,588

Sumber : Pengolahan Data 2020

Hasil penelitian menunjukkan dari 20 indikator yang dianalisis terbentuk 19 indikator yang dikeluarkan satu variabel, kemudian terbentuk 4 faktor baru yang mempengaruhi pengelolaan objek

wisata pantai santolo. Empat faktor baru tersebut diantaranya faktor sumber daya manusia, faktor lingkungan, faktor manajemen dan faktor regulasi.

Faktor yang paling dominan berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata pantai santolo adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pengelolaan objek wisata, kualifikasi yang dimiliki oleh setiap SDM akan mampu menghasilkan hasil kerja yang maksimal. Begitupula dengan pengelolaan objek wisata pantai santolo dimana sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan di dukung oleh regulasi/kebijakan yang ada, kondisi lingkungan yang mendukung serta fungsi-fungsi manajemen yang di implementasikan dengan baik.

Hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pengelolaan objek wisata pantai santolo belum maksimal. Seperti kurangnya fasilitas pendukung, daya tarik wisata yang kurang dikembangkan serta keterbatasannya anggaran dalam mengelola objek wisata.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya pengelolaan objek wisata pantai santolo maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Diperoleh empat factor baru paling dominan terhadap pengelolaan objek wisata pantai santolo. Factor tersebut adalah :
 - a. Faktor SDM, terdiri dari kualifikasi pendidikan pegawai, keahlian pegawai, rasa tanggung jawab, pemahaman tugas kerja, pengetahuan pegawai, pelatihan kerja dan kesadaran akan wisata.
 - b. Faktor lingkungan, terdiri dari kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan ekonomi, kondisi lingkungan politik, kondisi lingkungan budaya setempat, kondisi keamanan.
 - c. Faktor manajemen, terdiri dari perencanaan objek wisata, struktur organisasi, penganggaran untuk objek wisata, pengawasan.
 - d. Faktor regulasi, terdiri dari formulasi kebijakan kepariwisataan, implementasi kebijakan kepariwisataan, evaluasi kebijakan kepariwisataan.
2. Faktor yang paling dominan dalam pengelolaan objek wisata pantai santolo yaitu factor sumber daya manusia dengan skor eigen value sebesar 6,159

Saran penelitian agar pemerintah lebih memperhatikan dalam hal pengelolaan objek wisata pantai santolo khususnya dalam aksesibilitas, amenities dan daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Mathieson., & Wall, G. (1982). *Tourism Economic, physical, and social impact*. London: Laguna.
- Apriani, W. (2017). *Perencanaan Media Interpretasi Non-Personal Peristiwa Di Cagar Alam Pantai Santolo Sebagai Sarana Edukasi*. Doctoral Dissertation: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Baiquni.M. (2010). *Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global, Pariwisata Dan Krisis Lingkungan Global*. Denpasar Bali: Udayana University Press.
- Datukramat, H. P., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2017). Factor-Faktor Penyebab Tidak Terkelolanya Objek Wisata Pantai Batu Pinagut Bolaang Mongondow Utara. *Spasial*, 4(1), 1–12.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartika, W., Syarbini, A., & Widyastuti, Y. (2012). *Strategi Pengelolaan Pariwisata bahari di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak*. Dissertation: FISIP UNTIRTA.
- Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, A. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek*

- Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 104.
- Robi, Y. (2017). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Upaya Peningkatan Kualitas Objek Wisata. *Citec Journal*, 4(3), 163–173.
- S, S., & Novitasari, R. (2016). Pengelolaan Wisata Alam watu Payung Sebagai Ikon Wisata Berbasis BUdaya di Gunungkidul Yogyakarta. *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 43–50.
- Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). Jurnal Ilmiah Administrasi Public dan Pembangunan. *Kolaborasi Yang Dilaksanakan Di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangkaraya*, 10(2).
- Suweta, I. (2019). Implementasi Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Media Nusantara*, 15(1), 81–102.
- Yesita, A. (2010). *Manajemen Pariwisata*. Pagaralam: Makalah Press.
- Yoeti, O. (2016). *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN OBJEK WISATA CANDI CANGKUANG DI KABUPATEN GARUT

Oleh :

¹Nurbudiwati, Rd. Ade Purnawan²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

¹Jln. Cimanuk No. 285 A Garut

e-mail nurbudiwati11@yahoo.com

ABSTRAK

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, dimana keberadaannya langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa manfaat terhadap masyarakat. Saat ini perkembangan objek wisatamengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga menjadikan tantangan berat bagi pemerintah, upaya revitalisasi telah dilakukan namun belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Karenanya dibutuhkan strategi yang tepat dalam pengelolaan objek wisata agar mampu menjadi tujuan tetap wisatawan serta referensi dalam revitalisasi objek wisata lainnya dalam mewujudkan kawasan strategi pariwisata nasional. Konsep Kawasan Strategi Pariwisata nasional digunakan untuk pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. (Permen Pariwisata No. 3 Tahun 2018). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh Polisi Khusus dan Juru Pelihara Objek Wisata Candi Cangkuang dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pengelolaan Objek Wisata. Adapun peneliti menggunakan teori manajemen strategi dari Sedarmayanti (2014:67). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling. Penulis mengambil lokasi penelitian di Objek Wisata Candi Cangkuang, melibatkan 24 informan, yakni: Polsus, Jupel, Petugas Tiket, Pemilik Rakit, Pedagang kaki lima, Penghuni Rumah Pulo dan Wisatawan. Hasil penelitian strategi pengelolaan kawasan objek wisata candi cangkuang, melalui analisis SWOT didapatkan 8 isu strategi, faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi tersebut.

Kata Kunci : *strategi, SWOT, pengelolaan, objek wisata*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa manfaat terhadap masyarakat.

Dalam Undang-Undang NO. 10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan *pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*

Seiring dengan perkembangan zaman, Objek Wisata semakin berkembang dan menurut Hadiwijoyo (2012) Objek Wisata terbagi dalam 3 yaitu : 1) Objek Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya , 2) Objek Wisata Sosial Budaya, meliputi museum, peninggalan sejarah, situs arkeologi, upacara adat, kerajinan dan seni pertunjukkan. 3) Objek Wisata Minat Khusus.

Strategi secara khusus adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat, terus menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan

(Sedarmayanti 2014:2). Berbicara mengenai strategi, yang ada dalam suatu organisasi, maka erat kaitannya dengan istilah manajemen strategi. Siagian (2004:9) mengemukakan manajemen strategi sebagai suatu rangkaian keputusan serta tindakan yang disusun oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasi oleh semua jajaran entitas atau organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi tersebut. manajemen strategi tidak hanya dipakai pada sektor swasta namun juga telah diterapkan pada sektor publik. Karena instansi atau organisasi sektor publik membutuhkan rencana yang strategis untuk menggapai tujuan yang dirinci program dan aktivitas yang bisa bersinergi.

Tujuan Revitalisasi objek wisata diantaranya adalah: mendorong agar objek wisata mampu bersaing objek wisata lainnya, sehingga dapat meningkatkan omset retribusi pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada wisatawan, sekaligus menjadikan objek wisata sebagai penggerak perekonomian daerah, mewujudkan objek wisata yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap wisatawan serta referensi dalam revitalisasi objek wisata lainnya dalam mewujudkan kawasan strategi pariwisata nasional. Konsep dan Prinsip Kawasan Strategi Pariwisata nasional digunakan untuk pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. (Peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2018).

Objek Wisata Candi Cangkuang yang terletak di Kp. Pulo Desa Cangkuang Kec. Leles. Kab. Garut – Jawa Barat merupakan objek wisata yang terpadu, diawali dari adanya situ cangkuang yang merupakan objek wisata alam yang secara alami memiliki daya tarik bagi pengunjung dilengkapi dengan adanya rakit sebagai sarana transportasi yang menghubungkan wisatawan untuk bisa sampai ke kampung pulo (yang terdiri dari 6 rumah adat, dan 1 buah mesjid), setelah melewati kampung pulo barulah sampai ke makam Embah Dalem Arief Muhammad yang merupakan penyebar agama islam di kp Pulo bada abad ke XVII M, candi cangkuang yang merupakan peninggalan agama hindu pada abad ke VIII M dan musium situs candi cangkuang, yang didalamnya tersusun rapi bukti penyebaran Islam saat itu, antara lain al-qur'an dan fiqih yang tertulis dalam kulit kayu yang disebut Daluang. Kampung Pulo, Candi cangkuang dan musium merupakan objek wisata yang termasuk pada Objek Wisata Sosial Budaya, sekaligus juga merupakan Objek Wisata Minat Khusus, dimana banyak wisatawan yang datang kesana sekaligus dalam rangka untuk meneliti tentang struktur masyarakat pada masa itu, didorong oleh fakta yang menunjukkan bersebelahannya makam tokoh penyebar agama islam dengan candi cangkuang peninggalan agama hindu.

Objek Wisata Candi Cangkuang dapat diakses oleh wisatawan baik wisatawan dari Kabupaten Garut sendiri maupun dari Kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.

Gambar 1.1
Situ Cangkuang



Gambar 1.2
Kampung Pulo



Gambar 1.3
Pedagang di jalan menuju Kampung Pulo



Gambar 1.4
Gambar Makam Embah Dalem Arief Muhammad dan Candi Cangkuang



Tabel 3.1
Kondisi Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang
Sebelum dan Sesudah Revitalisasi

No	Jenis	Sebelum	Sesudah
1	Fisik Bangunan	a.Pintu candi belum dipagar b.Lingkungan situ belum di Kirmir c.WC yang belum representatif d.Jalan setapak menuju candi yang semula tanah	a.Pintu candi dipagar besi b.Lingkungan situ di kirmir c.WC yang representatif d. Jalan setapak menuju candi memakai papin blok
2	Alat Transfortasi Rakit	Tidak dibatasi jumlahnya	Dibatasi hanya 24 buah
3	Dekorasi di jalan setapak, halaman kampung pulo dan ruang terbuka hijau	Tidak Ada	Dibuat dekorasi dari payung payung terbuka yang berwarna warna sehingga bagus untuk berswafoto dan juga dapat menambah daya tarik wisatawan.

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang merupakan kelemahan dan menjadi penghambat dalam terwujudnya tujuan yang dimaksud, sehingga diperlukan strategi baru dalam penyelesaiannya, mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh Objek Wisata Candi Cangkuang, terlebih setelah direvitalisasi. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Pertama : kondisi situ cangkuang setelah revitalisasi tidak banyak berubah. Penempatan rakit yang sedang parkir menunggu wisatawan yang datang terlihat menutupi sepertiga dari luas situ, ditambah banyaknya rakit rakit kecil yang digunakan masyarakat untuk mencari ikan juga menambah banyaknya rakit yang menutupi situ.
- Kedua : tidak beragamnya harga jasa penggunaan rakit, menyebabkan keengganan wisatawan untuk kembali berkunjung ke candi cangkuang, karena banyak tukang rakit yang memasang harga tinggi, sekali jalan Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per orang, padahal dalam aturan dewasa Rp.5000 per orang, anak-anak Rp.3.000 dan apabila diborong satu rakit Rp.100.000.
- Ketiga : Setelah turun dari rakit dan naik ke lokasi kampung pulo, wisatawan disambut para pedagang kaki lima yang kadang menghabiskan jalan untuk wisatawan lewat, dampaknya wisatawan menjadi ngantri panjang tuk bisa sampai ke candi.
- Keempat : kondisi rumah-rumah di kampung pulo yang memang dijaga keberadaannya menjadi agak terganggu karena banyaknya wisatawan yang numpang beristirahat di rumah-rumah tersebut, tanpa menjaga kondisi rumahnya.
- Kelima : kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan, mengakibatkan timbulnya kondisi sampah yang menumpuk di area jalan/ kios pedagang menuju kampung pulo.

Keenam : kurangnya optimalisasi pemanfaatan kawasan objek wisata cangkuang untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat. Hal tersebut dapat diamati dari masih adanya masyarakat yang mencuci alat-alat rumah tangga dan pakaian di situ cangkuang.

Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang di kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi apa saja yang dilakukan oleh Polisi Khusus dan Juru Pelihara di kawasan objek wisata candi cangkuang selaku pengelola kawasan objek wisata candi cangkuang, dengan memanfaatkan kekuatan, kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman dimasa mendatang. Yang selanjutnya dijadikan tema penelitian dengan judul: **“Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang.”**

B. METODE PENELITIAN

1) Metode penelitian

Bersifat deskriptif yaitu menemukan data, fakta dan melakukan interpretasi dengan melakukan secara akurat sifat dari beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan objek wisata candi cangkuang.

2) Operasional Konsep

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Operasional Konsep

No	Variabel	Operasional Penelitian	Dimensi	Indikator
1	Perumusan Strategi (Sedarmayanti, 2014:67)	Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dinilai dari kekuatan dan kelemahan perusahaan.	1. Perumusan Misi 2. Pencermatan Lingkungan internal dan eksternal 3. Analisis Pilihan Strategi dan Faktor Kunci Keberhasilan 4. Penetapan tujuan, saran dan strategi	a. Misi Kawasan Objek Wisata Cangkuang b. SWOT a. Matrik SWOT a. Hasil Strategi

3) Instrumen Penelitian

Berdasarkan uraian di atas mengenai instrumen penelitian digunakan oleh peneliti pada saat pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Adapun Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan observasi terkait Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang.

4) Sumber data

Lofland (dalam, Moleong, 2001:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dengan wawancara yang merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu data maupun informasi yang diperlukan mengenai strategi pengelolaan kawasan wisata candi cangkuang. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data objek di lapangan. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan terlebih dahulu menentukan kunci informasi (informan) yang dilakukan secara *purposive*. Teknik tersebut digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan dimana informan yang dipilih tersebut merupakan orang yang mengetahui informasi mengenai Kawasan Wisata Objek Candi Cangkuang. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Data Dan Kategori Informan Penelitian

No	Informan	Kategori
1	Polisi Khusus Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang	Key Informan
2	Juru Pelihara Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang	Secondary Informan
3	Asosiasi Warga Pemilik Rakit Situ Cangkuang	Secondary Informan
4	Juru Karcis / Tiket Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang	Secondary Informan
5	Penghuni Rumah Adat Kampung Pulo	Secondary Informan
6	Wisatawan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang	Secondary Informan
7	Pedagang Di Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang	Secondary Informan

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait dengan masalah Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang Kabupaten Garut.

5) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik berupa sumber lisan maupun sumber tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang peneliti kumpulkan selama penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penelitian atas gejala – gejala yang ada kaitannya dengan Objek yang diteliti, sehingga melalui proses ini peneliti mendapatkan hasil data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke lapangan guna

memperoleh data dan informasi yang diperlukan mengenai Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkung Kabupaten Garut.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait informan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Penelitian memerlukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang sifatnya mendalam dengan informan yang ditentukan sebelumnya. Hal ini, dilakukan untuk dapat mengetahui sumber informasi mengenai Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkung Kabupaten Garut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh informan dari dokumen-dokumen yang menunjang untuk mengetahui data mengenai penelitian yang diteliti. Dokumen ini dapat berupa video, foto-foto, maupun berbagai sumber seperti buku dan sebagainya sebagai penguat untuk mengetahui informasi melalui data tersebut. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan di Kawasan Objek Wisata Candi Cangkung Kabupaten Garut.

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji data-data secara mendalam mengenai Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkung Kabupaten Garut.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2001:103) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data dianalisis dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan suatu data. Penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu secara umum di dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data itu terdiri dari tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mengumpulkan data-data faktual mengenai Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkung Kabupaten Garut., kemudian data tersebut dipilih data yang diperlukan kemudian membuang data yang tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data, seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya dan disusun secara sistematis. Peneliti menyaring data-data yang dianggap penting tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkung Kabupaten Garut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam penyajian data. Melalui informan tersebut, peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti. Data yang telah direduksi dan disajikan oleh peneliti, maka tahap selanjutnya yaitu data mengenai program revitalisasi yang akan diverifikasi berdasarkan data-data yang factual dan analisa peneliti di lapangan untuk ditarik kesimpulan.

7) Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian keabsahan data sebagai berikut :

a. Triangulasi

Menurut Wiersma (Dalam Sugiyono, 2017:273) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

C. PEMBAHASAN

Pembangunan Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa manfaat terhadap masyarakat. Dalam Undang-Undang NO. 10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan *pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.

Seiring dengan perkembangan zaman, Objek Wisata semakin berkembang dan menurut Hadiwijoyo (2012) Objek Wisata terbagi dalam 3 yaitu : 1) Objek Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya , 2) Objek Wisata Sosial Budaya, meliputi museum, peninggalan sejarah, situs arkeologi, upacara adat, kerajinan dan seni pertunjukkan. 3) Objek Wisata Minat Khusus.

Tujuan Revitalisasi kawasan objek wisata diantaranya adalah: mendorong agar objek wisata mampu bersaing objek wisata lainnya, sehingga dapat meningkatkan omset retribusi pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada wisatawan, sekaligus menjadikan objek wisata sebagai penggerak perekonomian daerah, mewujudkan objek wisata yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap wisatawan serta referensi dalam revitalisasi objek wisata lainnya dalam mewujudkan kawasan strategi pariwisata nasional. Konsep dan Prinsip Kawasan Strategi Pariwisata nasional digunakan untuk pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. (Peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2018).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh UPTD Pasar wanaraja Kabupaten Garut dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan kawasan objek wisata candi cangkuang. Adapun peneliti menggunakan teori manajemen strategi dari Sedarmayanti (2014:67):

Hasil penelitian strategi pengelolaan kawasan objek wisata candi cangkuang di Kabupaten Garut, melalui analisis SWOT didapatkan 10 isu strategi, dan didapatkan juga faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi tersebut. Proses yang dilakukan oleh peneliti dalam strategi pengelolaan kawasan objek wisata candi cangkuang adalah dengan menggunakan Analisis SWOT yang didasarkan pada Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang ada di kawasan objek wisata candi cangkuang yang disajikan kedalam Matrix SWOT berikut ini:

MATRIX SWOT

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strengths (Kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan Misi • Letak Kawasan Objek Wisata yang strategis • Terpadunya 4 objek wisata dalam satu kawasan • SDM yang memadai 	<p>Weaknesses (Kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penataan rakit di situ • Kurangnya Daya tarik lain • Kurangnya Ketegasan penegakan aturan • Prilaku & kesadaran wisatawan
<p>Opportunities (Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi kawasan objek wisata yang unggul • Perkembangan Teknologi • Perubahan prilaku masyarakat ke arah modern • Potensi Jumlah Wisatawan • Keterlibatan Stakeholder 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Kualitas Pelayanan kawasan candi cangkuang, dan produk misalnya dengan menambah fasilitas lain yang belum ada. 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Polisi Khusus dan Juru Pelihara, masyarakat kampung pulo, dan pedagang di lingkungan kawasan wisata. • Memperluas pengembangan kawasan wisata candi cangkuang kepada masyarakat melalui promosi menggunakan jaringan teknologi berbasis online. • Meningkatkan Potensi kawasan wisata candi cangkuang. • Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dalam penertiban kawasan objek wisata candi cangkuang .
<p>Threats (Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dengan objek wisata lain. • Perubahan gaya hidup masyarakat 	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kondisi kawasan objek wisata candi cangkuang yang lebih menarik bagi pengunjung / masyarakat 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya Revitalisasi manajemen untuk optimalisasi penataan kawasan objek wisata candi cangkuang • Meningkatkan Potensi

		Kualitas dan peran kawasan objek wisata candi cangkuang.
--	--	--

Sumber : Hasil Penelitian 2019

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang di Kabupaten Garut, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang di Kabupaten Garut merupakan salah satu kawasan objek wisata terlengkap di Kabupaten Garut, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan baik dari sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya menunjang, serta kurangnya tingkat kesadaran para wisatawan dalam mematuhi aturan ketertiban umum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan dan analisis hasil penelitian diberbagai hal. Dan apabila ditinjau dari beberapa aspek ukuran indikator analisis swot dapat disimpulkan sebagai berikut

Kelemahan bagi Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang adalah harga sewa rakit yang tidak seragam dan mahal, Pkl di dalam area kawasan wisata candi cangkuang, yang dirasa mengganggu kenyamanan wisatawan, daya tarik pengunjung, kurangnya ketegasan penegakan aturan, perilaku & kesadaran wisatawan. Hal itu dilihat dari hasil analisis SWOT yang dianalisis oleh peneliti.

E. SARAN

1. Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang Kabupaten Garut harus memperbaiki kelemahan-kelemahan baik dari sarana dan prasarana yang belum menunjang, meningkatkan tingkat kesadaran para pedagang dan wisatawan dalam mematuhi aturan ketertiban umum yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan Kawasan objek wisata yang, sehat, aman dan nyaman.
2. Meningkatkan kekuatan Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang dengan memperluas pengembangan Kawasan Objek Wisata melalui promosi menggunakan jaringan teknologi, meningkatkan produk yang berkualitas, pengaturan tata letak rakit dan harga sewa rakit sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan dan revitalisasi Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang, adanya hukuman yang tegas untuk pelanggaran peraturan, melakukan kerjasama dengan para investor agar kawasan objek wisata dapat dikembangkan lebih menarik di kalangan wisatawan, serta pengembangan kondisi budaya masyarakat pulo dan pedagang yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. (2010). Bimbingan dan Konseling Bandung: CV Pustaka Setia
- David, Fred R. 2009, (terj.). Manajemen Strategis: Konsep. Jakarta: Salemba Empat
- George R Terry, L. W. (2014). Dasar Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan Djafar. (2012) Candi Cangkuang, Program Pendidikan Sejarah, FIPPS UNINDAR PGRI, Jakarta.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. "Manajemen Strategis, Terj. Agung Yulianto. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Iriantara, Yosol. 2004. Manajemen Strategi Public Relation. Simbiosis Rekatama Media. Jakarta
- Moloeng, Lexy. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Cetakan Delapan. Bandung: Alfabeta

Rangkuti, Freddy. (2011). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sedarmayanti, (2014). Manajemen Strategi. Bandung: Refika Aditama

Siagian, P. Sondang. (2012). Manajemen Strategik. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Toto Sucipto dan Heni Fajria Riftani. (2002) Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat, Bandung : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat.

Torang, D. S. (2014). Organisasi dan Manajemen (Perilaku,Struktur,Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Dokumen :

Arsip UPT Kawasan Objek Wisata Candi Cangkuang Kabupaten Garut, 2019

Peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan danaalokasi khusus bidang pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Kepariwisataan.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP¹, Diah Andani, S.AN., M.AP²

Ilmu Administrasi Negara Universitas Subang

Jl. RA. Kartini km 03 Subang

A. PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih memiliki banyak potensi sumber daya alam yang tersebar di beberapa Daerah yang belum dikembangkan secara maksimal. Sektor Pariwisata juga sebenarnya merupakan sektor yang begitu potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan potensi pariwisata diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan perekonomian Daerah. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam di seluruh Daerah Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih kepada mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi suatu daya tarik wisata.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki keragaman sumber daya wisata. Dilihat dari kondisi geomorfologinya, Kabupaten Subang yang memiliki bentang alam yang bervariasi ini, mulai dari daerah pegunungan, berbukit, hingga dataran rendah, memiliki ODTW Alam, ODTW Budaya serta, ODTW Minat Khusus. Berdasarkan keragaman Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada, Kabupaten Subang ditetapkan menjadi salah satu dari enam Wilayah Pengembangan Wisata (WPW) Jawa Barat dan Banten yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Keragaman potensi membuat daerah-daerah di Kabupaten Subang yang ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) menjadi ramai dikunjungi wisatawan.

Dalam memberikan perhatian bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Subang dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata, dan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Subang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah daerah Kabupaten Subang perlu menarik perhatian dan minat kunjungan masyarakat, baik melalui swasta maupun pemerintah membangun semua fasilitas. seperti pembangunan fasilitas pantai, pembangunan hotel atau penginapan, pembangunan jalan, pengadaan transportasi laut dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung. serta melakukan berbagai macam promosi. agar obyek wisata ditempat tersebut mendapat pengunjung dan layak dijadikan sebagai obyek wisata unggulan.

Inovasi menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan daerah agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna. Dalam melakukan pembangunan diperlukan kreativitas daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun dalam pengembangan pariwisata tersebut seringkali dilakukan kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di daerah. Oleh karena itu daerah perlu menyusun visi, misi dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah agar pengembangan pariwisata daerah semakin terarah sesuai dengan kebijakan dan regulasi pemerintah.

2. Konsep Pariwisata

Berkaian dengan pengembangan kepariwisaa, Pemerinah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Lebih lanjut pada pasal 4 dinayakan tujuan kepariwisaaan adalah : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Cakupan pembangunan kepariwisaaan meliputi : indusri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Diamanahkan dalam UU 10 tahun 2009, bahwa pembangunan kepariwisaaan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kanbupaten/kota. Mengacu pada amanah tersebut, untuk kepentingan nasional, pemerintah menetapkan peraturan pemerinah nomor 50 tahun 2011 tenang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) ahun 2010-2015.

2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas tersebut. Pariwisata dewasa ini merupakan sebuah mega bisnis. Ribuan bahkan jutaan orang mengeluarkan dana triliunan dolar, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (pleasure) dan menghabiskan waktu luang (leisure). Pariwisata menjadi bagian penting dan gaya hidup di negara-negara maju. Berkaitan hal tersebut, Thomas Mun seorang merkantilisme dalam bukunya Navigation Act menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan bagi pengusaha yang menyediakan jasa perjalanan, termasuk penginapan dan rumah makan sejak tahun 1960 (Spiegel, 1991).

Menurut WTO (1999), yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Selanjutnya menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Lebih lanjut Kodhyat (1998), menyatakan pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sementara itu, Murphy (1985), mendefinisikan sektor pariwisata sebagai keseluruhan dari elemen yang terkait dengan wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain, yang merupakan akibat dari perjalanan wisatawan ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Pengertian senada diberikan oleh Fennell (1999), yang menyatakan bahwa pariwisata adalah sebagai suatu sistem yang memasukkan wisatawan dan pelayanan yang disediakan (berupa fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk memuaskan dan mendukung perjalanan mereka. Lebih lanjut Marpaung (2002), mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutinnnya, atau juga dari tempat kediamannya. Berkaitan dengan hal ersebut, Soekadijo (2000) mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Karena pariwisata terdiri

atas berbagai kegiatan organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk wisatawan, seperti angkutan wisata, akomodasi, atraksi manusia dan daya tarik alam, jasa perseorangan dan jasa pemerintah, perantara seperti pedagang serta agen perjalanan, maka sektor pariwisata sering disebut industri pariwisata (Bull, 1991).

Dari beberapa pengertian sebagaimana diuraikan di atas, maka faktor-faktor penting yang terdapat dalam konsep pariwisata adalah adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan merupakan tempat tinggalnya ke tempat yang lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dari rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara, mereka tidak mendapatkan penghasilan, tetapi sebagai konsumen. Tempat yang memiliki daya tarik wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan lebih dikenal dengan sebutan destinasi pariwisata.

Dari beberapa pengertian sebagaimana diuraikan di atas, maka faktor-faktor penting yang terdapat dalam konsep pariwisata adalah adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan merupakan tempat tinggalnya ke tempat yang lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dari rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara, mereka tidak mendapatkan penghasilan, tetapi sebagai konsumen. Tempat yang memiliki daya tarik wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan lebih dikenal dengan sebutan destinasi pariwisata.

Pengertian pariwisata modern oleh Freuler dalam bukunya yang berjudul *Handbuch des Schweizerischen Volkswirtschaft* (dalam Pendit, 1999) merumuskan bahwa pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian yang sadar terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada kekhususannya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan antar bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan. Lebih teknis, pengertian pariwisata dikemukakan oleh Hunzeiker dan Kraft (dalam Yoeti, 2001), yang dimaksud dengan pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perjalanan orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan perjalanan tersebut tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu.

Dari beberapa pengertian sebagaimana diuraikan di atas, maka faktor-faktor penting yang terdapat dalam konsep pariwisata adalah adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan merupakan tempat tinggalnya ke tempat yang lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dari rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara, mereka tidak mendapatkan penghasilan, tetapi sebagai konsumen. Tempat yang memiliki daya tarik wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan lebih dikenal dengan sebutan destinasi pariwisata.

2.2 Jenis-jenis Usaha Pariwisata

Ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata antara lain:

1. Restoran. Di dalam bidang restoran, perhatian antara lain dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. Disamping itu, dari segi kandungan gizi, kesehatan makanan dan lingkungan restoran serta penemuan makanan-makanan baru dan tradisional baik resep, bahan, maupun penyajiannya yang bias dikembangkan secara nasional, regional bahkan internasional.

2. Penginapan. Penginapan yang terdiri dari hotel, motel, resort, kondominium, time sharing, wisma-wisma dan bed and breakfast, merupakan aspek-aspek yang dapat diakses dalam pengembangan bidang kepariwisataan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penginapan ini dapat berupa; strategi pemasaran, pelayanan saat penginapan, integrasi dan restoran atau biro perjalanan, dan sebagainya. Penelitian juga dapat diarahkan pada upaya memperkecil limbah dari industry pariwisata tersebut.
3. Palayanan perjalanan. Meliputi biro perjalanan, paket perjalanan (tour wholesalers), perusahaan incentive travel dan reception service.
4. Transportasi. Dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisata seperti mobil/bus, pesawat udara, kereta api, kapal pesiar, dan sepeda.
5. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. Dapat berupa penelitian pasar dan pangsa, kelayakan kawasan wisatawan, arsitektur bangunan, dan engineering, serta lembaga keuangan.
6. Fasilitas Rekreasi. Meliputi pengembangan dan pemanfaatan taman-taman Negara, tempat perkemahan (camping ground), ruang konser, teater, dan lain-lain.
7. Atraksi wisata. Meliputi taman-taman bertema, museum-museum, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam, kegiatan seni dan budaya, dan lain sebagainya.

B. PEMBAHASAN

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan sektor potensial pariwisata dimana Kabupaten Subang memiliki 3 dataran yakni dataran pantai, dataran perkotaan dan dataran perbukitan. Selain daripada itu Kabupaten Subang juga merupakan kabupaten dengan perlintasan jalur pantura di bagian utara merupakan salah satu yang paling sibuk di Pulau Jawa. Kemudian selain dilintasi jalur Pantura, Kabupaten Subang dilintasi pula jalur jalan Alternatif Sadang Cikamurang, yang melintas di tengah wilayah Kabupaten Subang dan menghubungkan Sadang, Kabupaten Purwakarta dengan Tomo, Kabupaten Sumedang, jalur ini sangat ramai terutama pada musim libur seperti lebaran. Kabupaten Subang yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bandung disebelah selatan memiliki akses langsung yang sekaligus menghubungkan jalur pantura dengan kota Bandung. Jalur ini cukup nyaman dilalui dengan panorama alam yang amat indah berupa hamparan kebun teh yang udaranya sejuk dan melintasi kawasan pariwisata Air Panas Ciater dan Gunung Tangkuban Parahu, dan masih banyak daerah lainnya yang memiliki potensi menjadi kawasan wisata namun belum tersentuh oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam hal ini diperlukan adanya peran pemerintah daerah kabupaten subang untuk menggali dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Subang.

Kabupaten Subang memiliki berbagai potensi alam dan budaya yang dapat digali serta dilestarikan dan dijadikan sebagai aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Potensi tersebut sangat berhubungan dengan daya tarik dan nilai obyek wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan yang terdiri atas obyek wisata pantai di bagian utara, wisata alam di bagian tengah dan perbukitan, dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkan berbagai potensi daerah termasuk potensi wisata perlu didukung oleh sektor penunjang, yaitu sarana dan prasarana. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat seperti sarana transportasi, dan irigasi senantiasa dihadapkan pada kendala keterbatasan kemampuan pendanaan. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Subang berupaya untuk memenuhi fasilitas-fasilitas publik yang strategis yang meliputi: Sarana dan Prasarana Transportasi. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk membangun jalan dan jembatan yang bersifat baru untuk mendukung kawasan terisolir, sentra produksi dan jalan-jalan strategis, peningkatan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sudah ada dari kondisi jalan tanah menjadi sirtu, telpord, lapen dan hotmix sedangkan

pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksudkan adalah untuk menjaga kondisi jalan agar tetap mantap dan terpelihara.

Program Penanganan Jalan dan Jembatan dilaksanakan mengacu kepada Rencana Strategis Kabupaten Subang dan selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan pembangunan daerah, sehingga sasaran yang mendasar dalam menuntaskan permasalahan prasarana jalan dan jembatan adalah: Memperhatikan akses menuju kawasan terisolir; Memperhatikan akses menuju kawasan-kawasan; Memperhatikan jalan menuju sentra-sentra produksi; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang transportasi antar wilayah; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang transportasi ke potensi obyek-obyek wisata.

Untuk tercapainya sasaran infrastruktur jalan dan jembatan maka dilakukan beberapa kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di beberapa bagian wilayah. Dari data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa capaian hasil yang telah dilaksanakan berupa jalan hotmix dengan peningkatan tipe dari kondisi jalan sirtu/teleport ataupun aspal biasa dan pembangunan jembatan di beberapa tempat serta jembatan gantung juga di beberapa tempat.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Subang ke depan secara mendasar mengacu pada beberapa konsep, seperti: Konsep Pembangunan Berkelanjutan; Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu; Konsep Pengembangan Produk; Konsep Pengembangan Pemasaran Dan Investasi; Konsep Pengembangan Kelembagaan; Konsep Pengembangan Lingkungan.

Konsep Pengembangan Berkelanjutan, dengan kondisi potensi wisata berbasis alam (pegunungan, hutan, sungai, keunikan geologis dan danau) dan budaya yang mulai terancam kelestariannya, pembangunan keparawisataan Kabupaten Subang sudah saatnya berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Pendekatan wilayah yang bertujuan sedemikian perlu dibarengi untuk mengembangkan keterpaduan antar sektor yang diharapkan dapat berfungsi dan bersinergi dalam pengembangan daerah.

Kegiatan pariwisata pada dasarnya adalah kegiatan manusia yang dalam mobilitasnya didorong oleh keinginan tahu dan menikmati objek wisata dan atraksi wisata tanpa mengenal batas wilayah administratif. Oleh karena itu konsep pengembangan wilayah terpadu dapat mengatasi dan membantu perbedaan administratif antar wilayah kabupaten menjadi kesatuan perencanaan dan pengembangan wilayah dengan kegiatan pariwisata di Kabupaten Subang.

C. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Bahwa sektor pariwisata adalah merupakan salah satu sektor alternatif dan penting dalam pendapatan asli daerah. Karena sektor pariwisata merupakan sumber yang berbeda dengan eksplorasi sumberdaya alam yang tidak tergantikan. Artinya sepanjang waktu sektor pariwisata dapat di eksplorasi dan eksploitasi tanpa harus takut kehabisan bahan baku seperti mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumberdaya alam.

Banyak alternatif dalam menciptakan dan mengembangkan sektor pariwisata, ada pariwisata alam, pariwisata kuliner, ada pariwisata belanja dengan berbagai ciri khas masing-masing. Namun demikian sudah barang tentu, pemerintah harus memberikan dukungan yang memadai agar senantiasa sektor pariwisata dapat tumbuh berkembang sebagaimana yang di harapkan.

b. Saran

Sosialisasi mengenai keparawisataan perlu ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pariwisata dan memiliki kemampuan untuk melihat serta mengelola potensi wisata ekonomi di daerah kabupaten subang. Kemudian sarana prasarana wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu untuk melakukan perbaikan dan penambahan secepat cepatnya agar wisatawan lebih nyaman dalam berwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Chafid Fandeli, 1995. Dasar-dasar Manejemen Kepariwisata Alam Yogyakarta, Liberty
- Gamal Suwanto, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta : Andi.
- GBHN. Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia. Surabaya. Arloka. Kusmayadi, 2004. Statistika Pariwisata Deskriptif. Jakarta : PT. Gramedia Pusat Utama Nugroho Iwan. 2011. Ekowisata dan pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ridwan, Mohammad.2012. perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata, Medan Polonia: PT. Sofmedia
- Yoeti, Okta A. 1985. Pemasaran Pariwisata. Bandung, Angkasa. Yoeti, Okta A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung, Angkasa.

POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SITU LENGKONG PANJALU JAWA BARAT BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED TOURISM*)

Oleh :

Ai Siti Munawaroh¹, Ahmad Juliarso²

¹Prodi Arsitektur, FT Universitas Bandar Lampung

²Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

¹Jln. ZA. Pagar Alam No.26 Bandarlampung

²Jln. RE. Martadinata No.150 Ciamis

e-mail: aisiti.arch@ubl.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata seharusnya dilakukan dengan cara membuat ekonomi tumbuh tanpa membuat lingkungan menjadi rusak. Namun pada kenyataannya, tempat wisata kadang hanya menguntungkan salah satu pihak. Seperti yang terjadi di Objek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui alternative pengelolaan wisata yang dapat menguntungkan dari sisi ekonomi dan lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini terdiri dari pengumpulan, analisis dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati. Data diperoleh dari berbagai sumber yaitu media massa dan hasil penelitian baik berbentuk laporan maupun yang telah diterbitkan pada jurnal. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan keadaan di Situ Panjalu dengan objek wisata lain yang telah menerapkan konsep Community Based Tourism (CBT). Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan wisata Situ Lengkong yang alternatif dan partisipatif dalam meningkatkan ekonomi dan menjaga lingkungan yaitu dengan menerapkan Community Based Tourism (CBT). Penerapan CBT bisa dilakukan dengan membuat kelompok sadar wisata, melakukan pendidikan bagi masyarakat lokal, pelaku industri dan pengunjung/ wisatawan, dan melakukan penjagaan terhadap lingkungan. Keberhasilan penerapan konsep CBT bergantung kepada kemampuan stakeholder (masyarakat, tokoh, pemerintah dan swasta) dalam proses pengelolaannya. Kerjasama antar stakeholder merupakan kunci sukses tidaknya CBT. Selain itu, kesediaan dari wisatawan untuk ikut berpartisipasi dalam proses penerapan konsep ini juga tidak kalah penting.

Kata kunci: CBT; Situ Lengkong; Ciamis

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Hal ini karena pariwisata dapat memberikan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan katalisator bagi sektor lainnya (Wahab & Gromang, 1996).

Sejatinya pertumbuhan ekonomi juga harus tetap membuat ekosistem tetap lestari. Namun pada kenyataannya, tempat wisata kadang hanya menguntungkan salah satu pihak. Seperti yang terjadi di Objek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Ekosistem yang ada di Situ Lengkong mengalami degradasi. Hal ini ditunjukkan dengan mulai berkurangnya kalong (kelelawar) menjadi hanya 1200 ekor dari sekitar 13000 ekor pada tahun 1996 (Supendi, 2014). Dimana kalong merupakan salah satu satwa yang telah lama hidup di sana dan menjadi ciri khas Situ Lengkong. Berkurangnya kalong di Situ Lengkong lama kelamaan akan membuatnya punah. Hal tersebut dapat membuat kerusakan ekosistem menjadi lebih parah.

Berkurangnya jumlah kelelawar salah satu penyebabnya adalah karena ada perburuan kalong secara liar oleh masyarakat setempat. Kalong yang diburu kemudian dijual dan dimanfaatkan untuk pengobatan. Berkurangnya jumlah kalong yang berada di Situ Lengkong Panjalu dapat mempengaruhi

kelangsungan hidup ekosistem lain. Karena kalong memiliki peranan yang cukup berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Secara biologis, manfaat dari kotoran kalong dapat menjadi pupuk bagi pohon-pohon yang berada di Nusa Gede. Selain itu, keberadaan kalong juga dapat membantu pendistribusian biji-bijian dan buah-buahan dari lokasi lain ke cagar alam Nusa Gede yang terdapat di Situ Lengkong Panjalu. Sedangkan masalah pendangkalan situ disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah pemukiman penduduk, pembuangan sampah rumah tangga ke dalam situ dan kurangnya pemeliharaan lingkungan di sekitar situ (Kusumawati, 2015).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat ekonomi tetap tumbuh tanpa membuat lingkungan rusak. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui alternative pengelolaan wisata yang dapat menguntungkan dari sisi ekonomi dan lingkungan.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Upaya menemukan keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan Cronin menkonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang terfokus pada dua hal, keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas di sisi lainnya (Garden, Garden, & Sharpley, 2015). Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten/sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Stabler & Goodall, 1997). Pariwisata berkelanjutan adalah hubungan tiga aspek yang seimbang antara daerah tempat wisata, habitat dan manusianya, kegiatan wisata, dan industri pariwisata, dimana tidak ada satupun *stakeholder* merusak keseimbangan (Lane, 1994).

Community Based Tourism (CBT)

Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah dengan menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. Definisi CBT yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntun pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan. Dengan demikian dalam pandangan Hausler CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang mene-kankan pada masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata dapat memberdayakan masyarakat dan memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat local. Hauler menyampaikan gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata (Nurhidayati, 2007). Pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya (Suansri, 2003). CBT merupakan alat pembangun an komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Nurhidayati, 2007).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini terdiri dari pengumpulan, analisis dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.

Data diperoleh dari berbagai sumber yaitu media massa dan hasil penelitian baik berbentuk laporan maupun yang telah diterbitkan pada jurnal.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan keadaan di Situ Panjalu dengan objek wisata lain yang telah menerapkan konsep *Community Based Tourism* (CBT).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Situ Lengkong

Situ Lengkong/ Situ Panjalu merupakan sebuah situ alam yang terletak di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Luas Situ Panjalu yaitu 57,95 Ha. Di Tengah situ terdapat pulau yang dinamakan Nusa Gede. Luas Nusa Gede yaitu 67,2 Ha. Pulau Nusa Gede dikenal sebagai pulau tempat pusat kerajaan Panjalu yang merupakan leluhur masyarakat Desa Panjalu, dan di tempat ini terdapat makam penyebar ajaran agama Islam yang disebut Mbah Panjalu. Saat ini, Pulau Nusa Gede dikenal juga sebagai kawasan Cagar Alam Nusa Gede dan ditetapkan menjadi salah satu kawasan hutan konservasi dibawah pengawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) wilayah VI Tasikmalaya, Jawa Barat (PSIK BPK, 2002) dalam (Nasution & Yanti, 2014).

Desa Panjalu memiliki 3.044 orang kepala keluarga, dengan mata pencaharian utama sebagai pedagang, petani dan buruh baik buruh perkebunan, buruh industri dan buruh bangunan. Walaupun Desa Panjalu memiliki Situ Panjalu akan warga Desa Panjalu tidak ada profesi yang tercatat dalam demografi desa sebagai petani. Hal ini dikarenakan pemanfaatan Situ Panjalu oleh masyarakat Desa Panjalu lebih ke sektor pariwisata khususnya wisata alam (Cagar Alam Nusa Gede) dan wisata budaya (ziarah). Masyarakat mendapatkan penghasilan dengan cara berdagang dan menyewakan perahu. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam hanya sebagai penghasilan tambahan. Namun jika dilihat dari kondisi geografis Desa Panjalu yang terletak di pegunungan dengan kondisi tanah yang subur; serta seiring dengan kemajuan bidang transportasi dan komunikasi yang disertai dengan peningkatan kemampuan penduduk dibidang pendidikan, maka terdapat perubahan orientasi mata pencaharian penduduk, terjadi pergeseran mata pencaharian dari pertanian ke arah perdagangan, transportasi dan jasa untuk memanfaatkan potensi wisata di Desa Panjalu (Nasution & Yanti, 2014).

b. Situ Lengkong sebagai Wisata Ziarah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kawasan Wisata Situ Lengkong didapatkan bahwa makam penyebar agama Islam yang terdapat di sana mampu menarik wisatawan untuk berziarah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya wisatawan yang datang setiap harinya. Wisatawan datang dari berbagai daerah baik yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan provinsi lainnya. Kondisi ini menjadikan wisata Situ Lengkong Panjalu merupakan andalan wisata di Kabupaten Ciamis (Anggraeni, 2018).

c. Situ Lengkong sebagai Wisata Budaya

Upacara nyangku adalah salah satu acara rutin di Desa Panjalu setiap tahun dalam bulan Maulud (Penanggalan bulan Islam). Upacara ini merupakan refleksi budaya masyarakat Panjalu. Upacara Nyangku juga merupakan daya tarik bagi para wisatawan untuk datang setiap tahunnya (Asrini, 2013).

d. Situ Lengkong sebagai Ekowisata

Berdasarkan penelitian didapat bahwa suhu dan kemiringan lereng wisata Situ Lengkong sangat mendukung untuk dijadikan sebagai ekowisata. Keberagaman tofografi memberikan pemandangan yang bagus bagi para wisatawan. Ketinggian Situ Lengkong berada 731 meter di atas permukaan laut menjadikan suhu di sekitar Situ Lengkong terasa sejuk. Faktor lain yang memberikan nilai tambah untuk Situ Lengkong adalah adanya atraksi social, budaya dan aksesibilitas menuju ke sana sangat mudah. Selain itu, adanya cinderamata dan makanan khas Desa Panjalu yang dapat dijadikan buah tangan oleh wisatawan yang berkunjung (Kusumawati, 2015).

Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Objek Wisata Lain

1. Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang

Masyarakat di kawasan wisata Pantai Clungup membuat kelompok sadar wisata Bakti Alam yang beranggotakan 70 orang. Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) pada pengelolaan kawasan wisata Pantai Clungup sudah bagus, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anggota kelompok sadar wisata diikutsertakan dalam semua aspek termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanta dilakukan dalam rapat mingguan.
- b. Anggota kelompok mendapatkan pengembangan kualitas hidup. Pengembangan dilakukan dengan cara melakukan peningkatan *softskill* dan pelatihan yang diadakan oleh kelompok maupun dengan cara bekerjasama dengan kelompok/ pihak lain.
- c. Keberlanjutan lingkungan tetap terjamin dan terjaga oleh kelompok sadar wisata.

Penerapan CBT di kawasan wisata Pantai Clungup di Kabupaten Malang berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini ditandai dengan adanya dana untuk pengembangan komunitas, tersedianya lapangan pekerjaan, adanya penghasilan bagi masyarakat sekitar dan adanya keuntungan bagi setiap anggota kelompok secara merata (Yachya, 2016).

2. Wisata di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta

Penerapan CBT di Kabupaten Kulon Progo memberikan manfaat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, melestarikan lingkungan dan budaya setempat.

Model CBT akan berhasil jika semua aspek terpenuhi dan adanya dukungan dari *stakeholders*. Dukungan tersebut berupa adanya program dan regulasi, adanya modal, adanya kemitraan, adanya infrastruktur dan yang paling penting adanya keterlibatan masyarakat (Rahayu, Dewi, & Fitriana, 2015).

3. Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari dan Nglanggeran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan yaitu:

- a. Setiap desa wisata memiliki ukuran keberhasilan CBT yang berbeda-beda.
- b. Desa Wisata Kembangarum pengelolaannya dilakukan oleh oleh pihak ketiga mampu menyajikan atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan dengan sangat kuat.
- c. Desa Wisata Pentingsari pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat melalui pengurus desa wisata. Dengan mempertahankan manajemen tradisional, Desa Wisata Pentingsari mampu membentuk suatu atraksi wisata yang tercipta dari kearifan lokal masyarakat setempat.
- d. Desa Wisata Nglanggeran, dengan potensi atraksi alamnya yang luar biasa, didukung kelembagaannya yang kuat serta manajemen yang baik membawa Desa Wisata Nglanggeran menjadi desa wisata yang berhasil (Purbasari & Asnawi, 2014).

4. Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek

Desa Wisata Bangun adalah desa yang dirintis menjadi desa wisata dengan potensi masyarakat yang memiliki antusiasme yang tinggi dalam pengelolaannya. Konsep CBT yang diterapkan dengan membentuk kelembagaan desa yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pengelolaan daya tarik wisata dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan di Desa Wisata Banguna dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga lingkungan tetap lestari (Rizkianto & Topowijoyo, 2018).

5. Desa Wisata Banjarejo Kabupaten Grobogan

Desa Wisata Banjarejo merupakan desa wisata yang memiliki potensi keunikan dengan memadukan pengetahuan sejarah purbakala dan kebudayaan, menjadikan daya tarik wisata yang ditawarkan memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan desa lainnya, baik dari karakter fisik berupa lingkungan asli pedesaan, ataupun dari kehidupan sehari - hari masyarakat setempat yang di kelola secara menarik dan alami (Syah, 2019).

Pengembangan potensi wisata Situ Lengkong Panjalu Jawa Barat berbasis masyarakat (Community Based Tourism)

Berdasarkan penerapan konsep *Community Based Tourism* yang telah dilakukan di beberapa daerah, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan di Situ Lengkong yaitu:

- a. Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata.

- b. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Membuat kelompok sadar wisata yang terdiri dari tokoh, investor, penjual barang, penjual jasa dan masyarakat lainnya.
 - 2) Melakukan rapat perencanaan.
 - 3) Melakukan pembangunan bersama-sama.
 - 4) Melakukan rapat evaluasi.
 - 5) Melakukan rapat rutin mingguan.
- c. Pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan.
Pendidikan dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Melakukan pelatihan terhadap pelaku industri dan masyarakat bekerjasama dengan dinas terkait ataupun perguruan tinggi.
 - 2) Melakukan sosialisasi/ pengarahan terhadap wisatawan saat pertama datang ke lokasi Situ Lengkong.
 - 3) Memberikan informasi mengenai tata cara wisata pada papan-papan yang mudah terlihat di beberapa lokasi.
- d. Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung.
Dalam upaya menjaga lingkungan, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Untuk menjaga kalong, penggunaan alat transportasi danau dapat menggunakan kapal yang tidak mengeluarkan bunyi mesin yang berlebihan.
 - 2) Melakukan penjagaan terhadap kalong dengan cara memberikan sanksi tegas terhadap pemburu kalong.
 - 3) Melakukan himbauan terhadap masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu kalong.
 - 4) Agar ikan yang ada di danau tetap ada, dilakukan upaya penanaman ikan secara rutin dan pengambilan ikan dilakukan secara terkontrol.
 - 5) Dalam upaya menjaga iklim mikro tetap baik, penebangan terhadap pohon dikurangi dan penambahan jumlah pohon dapat dilakukan.
 - 6) Agar danau tetap bersih, masyarakat dan wisatawan dilarang membuang sampah sembarangan dan disediakan tempat sampah yang tertutup. Karena tempat sampah yang terbuka dapat memicu sampah terbang ke danau jika ada angin.
- e. Investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternative.
Untuk menjaga agar daerah wisata tidak terlalu banyak polusi, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Menempatkan kendaraan wisatawan di tempat yang jauh dari lokasi wisata.
 - 2) Untuk mencapai tempat wisata, bisa menggunakan becak, sepeda, andong, kuda atau kendaraan lain yang tidak mengeluarkan polusi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan wisata alternative yang partisipatif dalam meningkatkan ekonomi dan menjaga lingkungan yaitu dengan menerapkan *Community Based Tourism* (CBT).

Situ Lengkong sebagai wisata ziarah, budaya dan ekowisata dapat menerapkan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan dengan cara: membuat kelompok sadar wisata yang terdiri dari tokoh, investor, penjual barang, penjual jasa dan masyarakat lainnya. melakukan rapat perencanaan. melakukan pembangunan bersama-sama, melakukan rapat evaluasi. melakukan rapat rutin mingguan.

Selain itu, pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/ wisatawan penting dilakukan dengan cara: melakukan pelatihan terhadap pelaku industri dan masyarakat bekerjasama dengan dinas terkait ataupun perguruan tinggi, melakukan sosialisasi/ pengarahan terhadap wisatawan saat pertama datang ke lokasi Situ Lengkong, dan memberikan informasi mengenai tata cara wisata pada papan-papan yang mudah terlihat di beberapa lokasi.

Guna menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat transportasi danau menggunakan kapal yang tidak mengeluarkan bunyi mesin yang berlebihan agar tidak mengganggu kalong, melakukan penjagaan terhadap kalong dengan cara memberikan sanksi tegas terhadap pemburu kalong, melakukan himbauan terhadap masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu kalong, agar ikan yang ada di danau tetap ada, dilakukan upaya penanaman ikan secara rutin dan pengambilan ikan dilakukan secara terkontrol, dalam upaya menjaga iklim mikro tetap baik, penebangan terhadap pohon dikurangi dan penambahan jumlah pohon dapat dilakukan, agar danau tetap bersih, masyarakat dan wisatawan dilarang membuang sampah sembarangan dan disediakan tempat sampah yang tertutup. Karena tempat sampah yang terbuka dapat memicu sampah terbang ke danau jika ada angin.

Untuk menjaga agar daerah wisata tidak terlalu banyak polusi, dapat dilakukan dengan cara: menempatkan kendaraan wisatawan di tempat yang jauh dari lokasi wisata. Sedangkan untuk mencapai tempat wisata, bisa menggunakan becak, sepeda, andong, kuda atau kendaraan lain yang tidak mengeluarkan polusi.

Keberhasilan penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) bergantung kepada kemampuan *stakeholder* (masyarakat, tokoh, pemerintah dan swasta) dalam proses pengelolaannya. Kerjasama antar *stakeholder* merupakan kunci sukses tidaknya *Community Based Tourism* (CBT). Selain itu, kesediaan dari wisatawan untuk ikut berpartisipasi dalam proses penerapan konsep ini juga tidak kalah penting.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat, tokoh, pemerintah, swasta dan wisatawan dalam menerapkan konsep ini agar wisata Situ Lengkong tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. (2018). *Strategi Pengembangan Pariwisata Situ Lengkong Panjalu Sebagai Wisata Ziarah* (Universitas Gadjah Mada). Retrieved From [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/)
- Asrini, T. P. (2013). *KESENIAN GEMBYUNGAN PADA UPACARA NYANGKU DI DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu*. Bandung.
- Garden, A., Garden, A., & Sharpley, R. (2015). Flagship Attractions And Sustainable Rural Tourism Development: The Case Of Flagship Attractions And Sustainable Rural Tourism Development: The Case Of The. *Journal Of Sustainable Tourism*, 15(2), 125–143. <https://doi.org/10.2167/jost604.0>
- Kusumawati, T. (2015). *ANALISIS GEOGRAFIS KELAYAKAN SITU LENGKONG PANJALU SEBAGAI OBJEK WISATA BERBASIS EKOWISATA*.
- Lane, B. (1994). What Is Rural Tourism? *Journal Of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 7–21.
- Nasution, Z., & Yanti, B. V. I. (2014). PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SITU PANJALU Di CIAMIS, JAWA BARAT. *Buletin Riset Sosek Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 49–53.
- Nurhidayati, S. E. (2007). *Community Based Tourism (CBT) Sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. 7(3), 191–202.
- Purbasari, N., & Asnawi, A. (2014). *KEBERHASILAN COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA KEMBANGARUM , PENTINGSARI DAN NGLANGGERAN*

- PENDAHULUAN Kemiskinan Terjadi Di Seluruh Wilayah Indonesia , Tak Terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta . Upaya Pengentasan Kemiskinan Telah Dilakukan Oleh Pemer. *Jurnal Teknik PWK*, 3(3), 476–485.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2015). *PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI KABUPATEN KULON PROGO*. Yogyakarta.
- Rizkiyanto, N., & Topowijoyo, T. (2018). PENERAPAN KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERKELANJUTAN (Studi Pada Desa Wisata Bangun ,. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 58(2), 20–26.
- Stabler, M., & Goodall, B. (1997). Environmental Awareness, Action And Performance In The Guernsey Hospitality Sector. *Tourism Management*, 18(1).
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Supendi, D. (2014, September 3). *Eksositem Kawasan Situ Panjalu Ciamis Rusak - Harapan Rakyat Online*.
- Syah, D. P. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Wahab, S., & Gromang, F. (1996). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yachya, A. N. (2016). PENGELOLAAN KAWASAN WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS CBT (COMMUNITY BASED TOURISM) (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 39(2), 107–116.

**PENGUNAAN AKUN INSTAGRAM @JAJANANGARUT
SEBAGAI MEDIA REFERENSI INFORMASI WISATA KULINER
KABUPATEN GARUT**

Oleh :

Mutiana Nurmalasari¹, Ikeu Kania²

^{1 2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

^{1 2}Jln. Cimanuk No. 285A Garut

e-mail: mutiana@fisip.uniga.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia saat ini media online berkembang dengan sangat cepat. Penggunaannya pun meningkat dari setiap tahunnya. Salah satu penggunaan media online adalah sebagai referensi informasi yang sangat mudah didapat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penggunaan salah satu akun instagram kuliner @jajanangarut sebagai media referensi informasi wisata kuliner di Kabupaten Garut. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perilaku masyarakat di dunia maya, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis etnografi virtual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan carawawancara dengan beberapa informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa akun instagram @jajanangarut sangat berperan dalam memberikan informasi wisata kuliner di Kabupaten Garut bagi para followers-nya. Para followers akun instagram @jajanangarut menjadikan akun ini sebagai media referensi informasi wisata kuliner Kabupaten Garut. Dengan pengemasan dan ulasan yang lengkap dan terperinci memudahkan para followers akun @jajanangarut dalam mendapatkan informasi wisata kuliner yang ada di kabupaten Garut.

Kata Kunci : *Instagram; Media Online; Dunia Maya; @jajanangarut; Kuliner.*

A. PENDAHULUAN

Teknologi bukan lagi menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Dilihat dari manfaatnya, teknologi memberikan banyak kemudahan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna teknologi tersebut. Adanya teknologi juga mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Mengingat komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia karena pada hakikatnya manusia sebagaimahluk sosial yang di dalam kehidupannya tidak bisamelepaskan diri dari pengaruh manusia ataupunmahluk lain. Manusia sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dan bersosialisasidengan cara berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, maka adanya teknologi pun merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Selain memudahkan kita dalam berkomunikasi, teknologi juga memudahkan kita dalam mendapatkan informasi secara cepat. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang sering kita sebut sebagai Internet (interconnection-networking).

Pada awal kemunculannya, internet cukup sulit diakses dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk mengakses internet tidak sedikit. Keterbatasan fasilitas juga menjadi salah satu penyebab yang menghambat dalam mengakses internet. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, aksesibilitas teknologi Internet menjadi semakin luas dan mudah. Hal itu membuat teknologi informasi berkembang semakin cepat.

Salah satu produk yang lahir dari adanya akses internet adalah jejaring sosial. Jejaring sosial atau yang lebih sering disebutkan sebagai media sosial dapat didefinisikan sebagai sebagai aplikasi yang berbasis internet dan dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content (Andreas, Kaplan M., Haenlein Michael, 2010). Sedangkan Dr.Rulli Nasrullah M.Si menyebutkan bahwa Media Sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunaannya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Nasrullah, 2015).

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat lain menggunakan jaringan Internet. Dengan adanya jejaring sosial, jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Informasi dan pesan dapat tersampaikan secara global dalam waktu yang singkat. Pengguna jejaring sosial atau media sosial di dunia ini sangat banyak jumlahnya, tak terkecuali di negara kita Indonesia. Seiring dengan banyaknya pengguna Internet maka banyak pula media sosial yang beredar luas di masyarakat. Di Indonesia, jejaring sosial atau media sosial pun sudah sangat berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan akses jejaring atau media sosial yang sangat mudah. Hanya dengan membuka gadget yang hampir dimiliki semua orang, media sosial sudah bisa diakses. Dengan mengakses media sosial kita bisa dengan mudah memperoleh banyak informasi dari segala penjuru dunia. Adanya media sosial juga mempermudah penggunaannya dalam mendapatkan informasi yang sedang menjadi topik pembicaraan atau informasi apapun mereka inginkan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu situs layanan manajemen konten, lima media sosial yang banyak diakses di Indonesia diantaranya Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Penelitian ini akan fokus pada salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu Instagram.

Nama Instagram berasal dari dua kata, yaitu “insta” dan “gram” yang mengacu pada keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berawal dari kata “instan”, maksudnya adalah seperti kamera polaroid yang jaman dahulu lebih sering dikenal dengan kata “foto instan”. Seperti yang kita ketahui bahwa Instagram juga menampilkan foto-foto secara instan, layaknya polaroid. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, sesuai dengan cara kerja telegram sendiri yaitu untuk mengirimkan informasi informasi kepada orang lain dengan waktu yang singkat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram berawal dari instan-telegram (Aditya, 2015). Saat ini terdapat banyak akun-akun Instagram yang memberikan informasi kepada penggunaannya. Ada akun Instagram yang mengandung informasi kuliner, wisata, berita, tutorial make up, sampai akun yang bertujuan untuk menjual belikan sesuatu atau yang sering dikenal dengan istilah online shop.

Di Kabupaten Garut sendiri akun Instagram dengan pengikut (follower) terbanyak dimiliki oleh akun kuliner @jajanagarut dengan *followers* sejumlah 165.000 *followers*.



sumber: dok. Penulis 2020

Akun Instagram @jajanangarut merupakan akun instagram yang menyediakan informasi kuliner di kabupaten Garut. Akun ini juga memberikan informasi yang detail mengenai wisata kuliner di Kabupaten Garut, dari mulai lokasi, harga, sampai dengan memberikan ulasan tentang rasa dari makanan tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian peneliti dalam meneliti wisata kuliner di Kabupaten Garut. Maka peneliti melakukan analisis terhadap akun instagram @jajanangarut dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Akun Instagram @jajanangarut Sebagai Media Referensi Informasi Wisata Kuliner Kabupaten Garut”.

B. METODE PENELITIAN

Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penggunaan akun instagram kuliner @jajanangarut sebagai media referensi informasi wisata kuliner di kabupaten Garut, maka metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan dari metode penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi atau dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam menganalisis data. Etnografi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekaligus metode analisis untuk meneliti masyarakat (Achmad & Ida, 2018). Penelitian yang dilakukan melibatkan masyarakat dan hubungannya dengan dunia maya. Maka, metode etnografi yang diadopsi adalah metode etnografi virtual. Hal ini sejalan dengan pengertian dan tujuan dari etnografi virtual itu sendiri yang dikemukakan oleh Hine “Etnografi di dunia maya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang khas dari signifikansi dan implikasi dari penggunaan Internet dan dinamai etnografi virtual (Hine, 2000)”

Christine Hine (dalam Arif, 2012) menyebutkan adanya 10 prinsip virtual etnografi, yaitu:

1. Etnografi virtual mempertanyakan asumsi yang sudah berlaku secara umum mengenai Internet. Oleh karena itu dalam penelitian ini hendaknyamenginterpretasikan sekaligus reinterpretasi Internet sebagai sebuah cara sekaligus medium yang digunakan untuk berkomunikasi.
2. Berbeda dengan kehidupan nyata dan fenomenayang muncul dari interaksi *face to face*, Internet merupakan lapangan yang sangat kompleks dan relasi yang terjadi berdasarkan pada konteks apayang digunakan termasuk terhadap penggunaanteknologi. Sehingga ketika meneliti Internet, maka semestinya menempatkan Internet sebagai sebuah kultur dan artefak cultural.
3. Internet mengubah pemahaman tentang ‘lokasi’ penelitian. Internet adalah tempat yang interaktif dan selalu bergerak sehingga lebih tepat dalam pendekatan etnografi untuk melihat bagaimana tempat virtual di Internet itu dibuat dan dibuat kembali.

4. Konsekuensi dari gagasan tentang 'lokasi' tersebut memunculkan pertanyaan yang serius. Sebab, dalam etnografi kultur serta komunitas bisa diidentifikasi dalam lapangan atau lokasi yang nyata. Hal ini menawarkan solusi bahwa penelitian dilepaskan dari pemahaman umum terhadap lokasi dan batas-batas, melainkan memfokuskan diri pada arus dan konektivitas antar-user di Internet.
5. Etnografi virtual pada dasarnya juga mengangkat persoalan batas-batas, akan tetapi konteks tersebut untuk melihat kenyataan antara yang "real" dengan "virtual".
6. Etnografi virtual merupakan persinggahan sementara. Kehidupan pengguna di Internet tidak terjadi dalam 24 jam yang sesungguhnya, pengguna internet tidak dapat dipastikan kapan mereka "berada" di internet.
7. Dalam etnografi virtual fenomena yang diangkat merupakan kepingan-kepingan semata, tidak menggambarkan bagaimana sesungguhnya kehidupan di Internet itu berlangsung. Bagi Hine, ada kerumitan dalam hal menjangkau informan, lokasi dan bahkan kultur itu sendiri secara seutuhnya.
8. Etnografi hendaknyamereka yang juga menjadi bagian dalam cyberspace. Hubungan antara etnografer dengan subjek atau objek penelitian yang menggunakan teknologi merupakan bagian dari pengalaman pribadi etnografer ketika bersentuhan dengan (teknologi) Internet dan menjadi bagian dalam cyberspace harus diabaikan demi menjaga objektivitas dalam melihat fenomena.
9. Etnografer maupun informan (penelitian) harus dirasakan kehadiran antar keduanya. Etnografi virtual dijelaskan sebagai "ethnography in, of and through the virtual" sehingga interaksi tatap muka atau face to face tidak diperlukan.
10. Beberapa terminologi, prinsip, maupun aturan yang selama ini dipahami dalam etnografi, pada dasarnya tidak bisa diterapkan dalam etnografi virtual. Bahkan ketika membahas kata 'virtual' pun definisi ini menemukan bentuk dan keluaran yang tidak terduga. Oleh karena itu, ketika meneliti cyberculture maka konteks yang digunakan sebisa mungkin merupakan kondisi yang mendekati 'apa yang terjadi' di cyberspace dan bisa digunakan dalam tataran praktis untuk mengeksplorasi relasi yang terjadi melalui media Internet yang ditemui oleh etnografer.

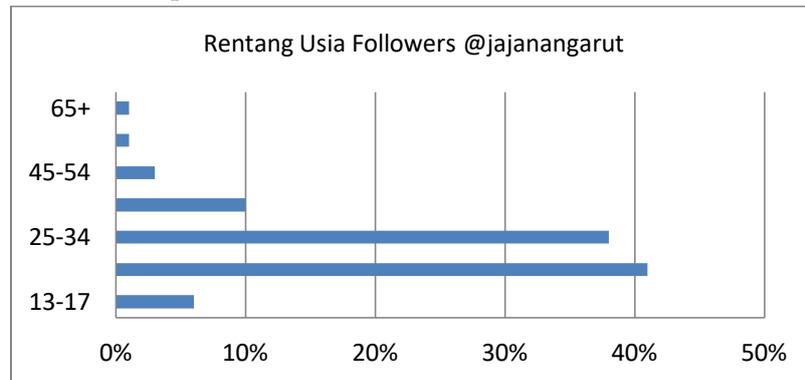
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah founder akun Instagram @jajanangarut dan *followers* @jajanangarut. Peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati aktivitas akun @jajanangarut dan interaksi atau respons dari para *followers*-nya. Tidak hanya itu, data juga didapatkan dari hasil dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari aktivitas akun Instagram @jajanangarut, konten yang di *post*, jumlah *followers*, dan komentar-komentar yang ada dalam akun Instagram @jajanangarut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana informasi didukung oleh fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Instagram itu sendiri. Di dalam Instagram kita dapat menampilkan foto, text, audio, bahkan video yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi yang lengkap. Banyaknya pengguna media sosial Instagram pun mendukung kegunaan media tersebut sebagai media informasi yang mudah diakses. Sesuai dengan hasil penelitian dari Romyeni, Evawani, & Yohana (2015) yang menyatakan bahwa mayoritas kaum muda mengakses media sosial adalah melalui telepon seluler atau smartphone. Alasan utama mengapa kaum muda ini memilih media sosial Instagram adalah karena daya tarik yang dimiliki aplikasi tersebut, keseruan, dan tren yang berkembang masyarakat akan penggunaan Instagram. Instagram juga memberikan pengalaman yang

menyenangkan, media sosial ini menyuguhkan konten-konten yang menyenangkan bagi audiens dari segi estetika (Ayutiani & Putri, 2018).

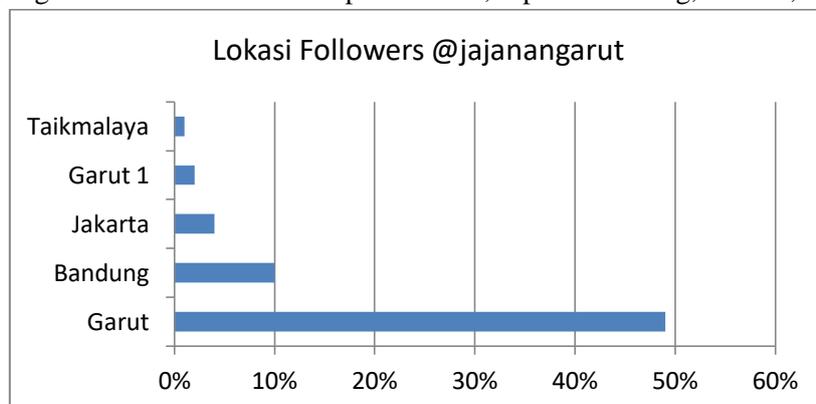
Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap founder akun Instagram @jajanangarut menunjukkan bahwa akun yang dikelola sejak tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah *followers*. Pada tahun 2015 akun Instagram @jajanangarut memiliki kurang lebih 150 *followers*. Saat ini jumlah *followers* akun @jajanangarut sejumlah 165.000. *Followers* akun tersebut terus menerus mengalami peningkatan jumlah *followers*. Setiap harinya *followers* akun Instagram @jajanangarut bertambah hampir 150 *followers*.



sumber: dok. @jajanangarut

Akun @jajanangarut diikuti oleh hampir 50% oleh pengguna media sosial Instagram di rentang usia 18 sampai 24 tahun.

Walaupun akun Instagram @jajanangarut hanya memberikan informasi wisata kuliner di daerah Kabupaten Garut, namun *followers* akun ini tidak hanya berdomisili di Garut saja. Hampir 60% *followers* yang berdomisili di luar Kabupaten Garut, seperti Bandung, Jakarta, dan Tasikmalaya.



sumber: dok. @jajanangarut

Akun @jajanangarut pun selalu mendapat komentar positif di setiap informasi kuliner yang diunggah. Terbukti dalam setiap gambar yang diunggah, akun @jajanangarut disukai hampir 3.000 dan dikomentari lebih dari 100 *followers*.



sumber: dok. @jajanangarut

Alasan ketujuh informan ini mem-follow akun Instagram @jajanangarut adalah untuk mendapatkan informasi kuliner yang ada di Kabupaten Garut. Mereka menjadikan postingan akun Instagram @jajanangarut sebagai referensi informasi mereka saat melakukan wisata kuliner di kabupaten Garut. Para informan juga memutuskan untuk mem-follow akun @jajanangarut karena tulisan (*caption*) yang ditampilkan di setiap gambar yang diposting sangat informatif, lengkap dengan lokasi dan harga makanan tersebut. Dengan adanya akun Instagram @jajanangarut ini mereka menjadi lebih mudah dalam mencari informasi kuliner di Kabupaten Garut, baik tempat maupun jenis makanan yang dicari. Bahkan di beberapa kesempatan para *followers* akun ini sering mengakses akun Instagram @jajanangarut saat mencari tempat makan.

Tidak hanya saat membutuhkan informasi tempat kuliner, *followers* akun Instagram @jajanangarut ini juga seringkali melakukan kegiatan mencari (*searching*) tempat makan saat mereka memiliki waktu senggang dengan tujuan mendapatkan informasi untuk kegiatan wisata kuliner mereka selanjutnya. Apalagi informasi yang disajikan oleh akun Instagram @jajanangarut selalu *update* setiap hari nya. Setiap Hari nya akun Instagram @jajanangarut mem-*posting* 5-8 gambar. Menurut pendapat dari Guha (2004) kegiatan ini dikategorikan ke dalam kebutuhan informasi yaitu *exhaustic need approach*, yaitu kebutuhan para pengguna yang ingin mendapatkan informasi yang mendalam, pengguna informasi pun menjadi ketergantungan yang tinggi akan informasi yang dibutuhkannya.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, observasi pada aktifitas akun @jajanangarut di media sosial Instagram, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kegunaan atau manfaat dari akun Instagram @jajanangarut sebagai media referensi informasi wisata kuliner di Kabupaten Garut. *Followers* akun Instagram @jajanangarut mendapatkan informasi dan manfaat yang lengkap tentang kuliner yang ada di Kabupaten Garut dengan postingan akun tersebut yang dikemas secara menarik dan informatif. Tidak hanya itu, para *followers* juga terkadang memiliki keingintahuan terhadap tempat yang direferensikan oleh akun @jajanangarut dan berkeinginan datang ke tempat makan yang sudah direferensikan oleh @jajanangarut.

Ada beberapa saran yang diharapkan dalam penelitian ini dan semoga menjadi masukan meskipun saran ini masih jauh dari kata sempurna. Penggunaan akun Instagram kuliner @jajanangarut sebagai media informasi kuliner sudah sangat baik. Akun Instagram @jajanangarut menjadi akun Instagram dengan *followers* terbanyak di Kabupaten Garut. Disarankan untuk akun Instagram @jajanangarut agar menjaga kualitas dan konsistensi postingan agar tetap informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. A., & Ida, R. (2018). Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. *The Journal of Society & Media 2018, Vol. 2(2)*, 130-145.
- Aditya, R. (2015). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru. *Jom FISIP Volume 2 No. 2*, 1-14.
- Andreas, Kaplan M., Haenlein Michael. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons 53(1)*, 59-68.
- Arif, M. C. (2012). ETNOGRAFI VIRTUAL, Sebuah Tawaran Metodologi Kajian Media Berbasis Virtual. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.2*, 165-179.
- Ayutiani, D., & Putri, B. (2018). Penggunaan Akun Instagram sebagai Media Informasi Wisata Kuliner. *PROfesi Humas, Volume 3, No. 1*, 39-59.
- Guha, B. (2004). *Documentation and Information*. New Delhi: World Press.
- Hine, C. (2000). *Virtual Ethnography*. London: Sage Publications Ltd.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial, perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rumiyeni, L., Evawani, E., & Yohana, N. (2015). Penggunaan media social Facebook sebagai media komunikasi dan interaksi di kalangan siswa sekolah menengah atas negeri 12 kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 6 (2)*, 113-190.

PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ALAM DATARAN KONDANG DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Ii Sujai¹, Irfan Nursetiawan², Aan Anwar Sihabudin³

¹²³)Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Galuh

¹²³)Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: irfan.nursetiawan@gmail.com

ABSTRAK

Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi mendorong perekonomian masyarakat desa. Tetapi terdapat permasalahan dalam bidang pariwisata, salah satunya menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pula pada perekonomian masyarakat. Hal ini menjadi urgensi untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan potensi wisata, khususnya wisata alam. Salah satu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan wisata alam, yakni Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Potensi yang dapat dikembangkan di desa tersebut, yakni kawasan Dataran Kondang yang mempunyai keindahan alam sebagai faktor pendukung dan dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata alam. Strategi yang diterapkan pemerintah desa, yakni pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Aksesibilitas masih menjadi kendala, terutama jalan dan jaringan telekomunikasi. Sehingga diperlukan perbaikan akses untuk menuju ke lokasi tersebut dan tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengembangkan potensi wisata alam.

Kata Kunci : *Pariwisata, Wisata Alam, Dataran Kondang*

A. PENDAHULUAN

Modernisasi desa merupakan salah satu hal yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan. Sektor pariwisata dapat menjadi pilihan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat perdesaan untuk sektor unggulan perekonomian masyarakat desa. Kabupaten Ciamis sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Jawa Barat mempunyai beragam potensi wisata. Namun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah wisatawan mengalami penurunan. Bahkan untuk wisatawan mancanegara hampir tidak ada. Di tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara (lokal) sebanyak 371.530 orang, sedangkan di tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara (lokal) sebanyak 280.934 orang (Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini, selain berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari pemasukan retribusi pariwisata, juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat perdesaan. Kesejahteraan masyarakat perdesaan harus menjadi perhatian untuk peningkatan perekonomian suatu daerah.

Salah satu desa yang mempunyai masalah kesejahteraan masyarakatnya, yakni Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Desa Sukamaju merupakan daerah yang subur untuk bercocok tanam sehingga selain penduduk asli lambat laun daerah ini juga didatangi oleh penduduk dari luar desa yang berkeinginan ikut bercocok tanam di kawasan ini, sehingga lambat laun kehidupan sosial budaya sudah mulai agak kompleks, adapun sumber lain pendapatan desa diantaranya tanah bengkok (Carik) hasil dari tanah titian desa, tanah milik Desa. Tetapi, desa tersebut tidak terlepas dari permasalahan. Di desa tersebut masih terdapat masyarakat yang tergolong prasejahtera. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sukamaju, didominasi oleh petani sebanyak 870 orang dan buruh tani sebanyak 811 orang di tahun 2015 (Pemerintah Desa Sukamaju, 2016). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel. 1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukamaju
Per-Tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh	518
2	Tukang	41
3	Wiraswasta	215
4	Pedagang Keliling	45
5	Pedagang	441
6	Petani	870
7	Peternak	423
8	Buruh tani	811
9	Buruh ternak	72
10	Sopir	17
Total		3.453 orang

Sumber: Pemerintah Desa Sukamaju, 2016

Sektor pariwisata menjadi primadona setiap daerah untuk memajukan dan mengembangkan potensi daerahnya untuk lebih produktif dari segi ekonomi. Menurut Kodhyat (dalam Primadany, S. R., 2013) menyatakan Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Dalam hal dimensi sosial, kesejahteraan melalui pemberdayaan merupakan salah satu hal yang bersifat solutif dalam pengentasan masyarakat prasejahtera. Keseimbangan lingkungan juga menjadi pertimbangan lain dalam upaya eksploitasi lingkungan dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pariwisata.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi objek wisata alam di Desa Sukamaju, sebagai salah satu rekomendasi arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Sukamaju dalam melakukan pengembangan pariwisata, faktor-faktor pendukung dan penghambat di dalam pengembangan objek wisata tersebut.

Selain itu, terlepas dari permasalahan masyarakat desa yang masih tergolong prasejahtera, ternyata masih ada peluang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Kebaruan dalam penelitian ini, yakni identifikasi potensi objek wisata alam yang berasal dari kelompok masyarakat atau mengacu kepada *community empowerment* di perdesaan. Penelitian ini merupakan sebuah karya nyata hasil dari observasi dan pengolahan data secara mendalam. Penelitian ini pula diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan *social science* dan mendorong bagi masyarakat perdesaan untuk lebih berdaya.

Sumber daya lokal merupakan salah satu yang dapat dijadikan modal utama untuk pengembangan potensi pariwisata. Keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA) dapat menjadi sumber potensi ekonomi masyarakat. Menurut Besra, E. (2015), menyatakan pengembangan pariwisata yang berbasis sumber daya lokal ini akan memberikan efek ganda terhadap sektor ekonomi lainnya melalui peningkatan nilai tambah dan kenaikan pendapatan masyarakat. Hal ini akan menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Wisata alam dapat menjadi pilihan dalam pengembang pariwisata dengan dominasi SDA yang mendukung kegiatan pariwisata di daerah. Inilah yang menjadi urgensi untuk dilakukan penelitian di wilayah Kabupaten Ciamis, khususnya di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti. Permasalahan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan peluang pengembangan wisata alam menjadi urgensi untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Karena diharapkan dalam penelitian tersebut dihasilkan strategi yang tepat dalam pengembangan potensi objek wisata alam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Indrawan. R dan Yaniawati. P (2016:68), menyatakan metode kualitatif berhubungan dengan kehidupan manusia dalam tipe situasi (*setting*) yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dan dari prespektif yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam penelitian ini meneliti berkaitan dengan fenomena sosial, khususnya berkaitan dengan fenomena pengembangan pariwisata. Untuk proses pengambilan data dilakukan melalui observasi pendahuluan, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Pemerintah Desa Sukamaju dengan masyarakat desa tentunya memberi dampak dalam mewujudkan kesejahteraan. Potensi wisata alam yang ada di desa tersebut merupakan sumber daya yang harus diprioritaskan sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu aspek yang dapat mendukung berkaitan dengan pengembangan wisata alam, yakni aspek hidrologi suatu wilayah.

Aspek Hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan Hidrologinya, aliran sungai di wilayah Desa Sukamaju membentuk pola Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Cibaruyan. Tercatat beberapa saluran air baik dengan skala kecil, sedang dan besar terdapat di Desa Sukamaju seperti :

1. Saluran Irigasi Baru Sigung.
2. Saluran Irigasi Batu Lawang.
3. Saluran Irigasi Gintung Satu.
4. Saluran Irigasi Gintung Dua.
5. Saluran Irigasi Cibinuang.
6. Saluran Irigasi Kihiang.
7. Saluran Irigasi Cijulang.
8. Saluran Irigasi Naringul.

Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih Maupun sumber air untuk lahan pertanian. Mata air utama yang menghidupi masyarakat Desa Sukamaju adalah diantaranya, sebagai berikut:

1. Mata air Cinangsi.
2. Mata air Surian.
3. Mata air Batu Gede.
4. Mata air Cilbing.
5. Mata air Cikonang.
6. Mata air Cisampih.
7. Mata air Cipulus.
8. Mata air Cileungsing.
9. Mata air Batu Sirap.

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Sukamaju digunakan secara produktif, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Sukamaju memiliki

sumberdaya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan berupa sawah seluas 140 Ha dan lahan darat 287 Ha dan lahan darat berupa lahan pekarangan 90 Ha.

Secara aspek hidrologi, maka wilayah Desa Sukamaju mempunyai potensi dalam bidang wisata alam. Menurut Widagdyo, K. G. (2015), menyatakan terdapat 3 (tiga) produk utama yang ditawarkan, yaitu budaya, alam dan produk buatan manusia dengan komposisi sebagai berikut: (1) Wisata Alam yang meliputi wisata bahari, wisata petualangan, dan ekowisata; (2) Wisata Budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, wisata kota dan desa; dan (3) Wisata Buatan yang meliputi wisata olah raga, dan wisata terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya salah satu dimensi ekowisata di Desa Sukamaju, yakni keberadaan hidrologi yang memadai, maka potensi arah pengembangan pariwisata di desa tersebut dapat mengarah ke wisata alam.

Salah satu pesona yang ditawarkan oleh Desa Sukamaju, yakni wilayah Dataran Kondang. Di wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata alam. Penataan menuju ke lokasi tersebut telah dilakukan oleh warga sekitar. Partisipasi masyarakat memang sangat diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berasal dari keinginan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan pendapat Mubyarto (dalam Raharjana, D. T., 2012) menegaskan bahwa partisipasi merupakan kesediaan membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan sendiri. Gotong royong sebagai prinsip dan implementasi kebersamaan dalam mencapai tujuan masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Sukamaju.

Semangat kemandirian dan berdaya saing untuk menjadi wilayah atau kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan menjadi hal yang pokok untuk diwujudkan. Di wilayah Dataran Kondang, kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah, karena berdekatan langsung dengan wilayah Gunung Sawal. Konservasi lingkungan dan eksploitasi terbatas menjadi prioritas dalam pembangunan desa yang menjaga kelestarian lingkungan.

Ekologi menjadi hal yang utama dalam pengembangan objek wisata alam yang dirintis oleh masyarakat Desa Sukamaju. Menurut Soemarwoto, Otto (2004:309) menyatakan, pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat desa tidak melakukan pengrusakan lingkungan. Masyarakat hanya membuka akses jalan untuk menuju ke lokasi tersebut. Strategi dalam pengembangan objek wisata tersebut, yakni pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Istilah lain, yang populer yakni *Community Based Tourism (CBT)*.

Menurut Hausler (dalam Purnamasari, A. M., 2011) *Community Based Tourism* adalah suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung pada industri pariwisata. Keberlanjutan dan keberlangsungan pariwisata sangat ditentukan oleh keberadaan masyarakat dalam mengelola suatu tempat objek wisata tertentu. Dalam pengembangan suatu objek wisata, juga diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkan industri pariwisata yang tidak mengabaikan unsur lingkungan yang menjadi penopang dalam menjaga kelestarian.

Dampak positif dan negatif dari industri pariwisata memang tidak dapat dilepaskan. Menurut Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2014), menyatakan pariwisata memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan, namun di saat bersamaan ternyata kegiatan industri pariwisata juga melahirkan sejumlah dampak negatif, seperti merosotnya kualitas lingkungan hidup, tergesernya budaya lokal serta kesenjangan sosial ekonomi di antara masyarakat. Untuk menghindari dampak tersebut, diperlukan penguatan kepada masyarakat mengenai pengelolaan objek wisata yang mendukung terhadap daya dukung lingkungan.

Konsep pemberdayaan bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, namun lebih terfokus pada cara berpikir atau paradigma berpikir untuk berbuat lebih maju tanpa mengabaikan dampak yang nanti akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, maupun bencana

yang diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata harus disertai dengan kompetensi masyarakat dalam mengelola secara *professional*. Profesionalisme dalam pengelolaan pariwisata diharapkan dapat menjadikan sebuah objek wisata menjadi unggul.

Akses menuju lokasi Dataran Kondang hanya berupa jalan yang belum di aspal. Hal ini menjadi hambatan bagi para pengunjung untuk menuju ke lokasi tujuan. Sehingga, hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata. Pengembangan objek wisata dengan basis atraksi yang baik harus didukung oleh komponen aksesibilitas dan fasilitas, aksesibilitas memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk menjangkau suatu objek wisata sementara fasilitas dapat memenuhi kebutuhan pengunjung selama mereka menikmati atraksi di suatu objek wisata yang dipilihnya (Abdulhaji, S., & Yusuf, I. S. H., 2017). Aksesibilitas bukan hanya sebagai sarana penunjang, tetapi menjadi hal yang utama dalam menjangkau para wisatawan yang akan mengunjungi tempat wisata.

Beragam potensi keindahan alam yang ditawarkan oleh Dataran Kondang dan antusiasme masyarakat Desa Sukamaju, menjadi harapan dan peluang yang baik untuk pengembangan objek wisata alam. Pengembangan objek wisata harus disertai dengan pembangunan infrastruktur dan keberadaan atraksi wisata akan mampu menarik minat para wisatawan untuk datang. Pola masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal tentunya membuka peluang sebagai pembeda untuk atraksi wisata. Modernisasi industrialisasi pariwisata yang fokus terhadap wisata alam akan berdampak pada perubahan dalam memandang industri pariwisata, sebagai industri yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Dataran Kondang merupakan salah satu potensi objek wisata alam yang layak untuk menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Ciamis. Potensi keindahan alam di wilayah tersebut menjadi hal yang paling menarik untuk dipromosikan kepada para wisatawan. Walaupun demikian terdapat permasalahan dalam akses menuju ke lokasi objek wisata tersebut. Sehingga dalam upaya pengembangan objek wisata tersebut, diperlukan: (1) Pemerintah Kabupaten Ciamis membantu masyarakat desa dalam membuka akses jalan dan telekomunikasi ke lokasi Dataran Kondang; (2) Diperlukan pelatihan pengelola objek wisata alam; (3) Diperlukan pembangunan sarana prasarana yang lengkap untuk menarik minat wisatawan; dan (4) Diperlukan promosi melalui *platform* digital untuk promosi dan pengelolaan yang berbasis komputer. Keberadaan Dataran Kondang menjadi sumber daya baru untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal, dan dapat dijadikan media pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhaji, S., & Yusuf, I. S. H. (2017). Pengaruh atraksi, aksesibilitas dan fasilitas terhadap citra objek wisata Danau Tolire Besar di Kota Ternate. *HUMANO*, 7(2), 134-148.
- Besra, E. (2015). Potensi Wisata Kuliner dalam Mendukung Pariwisata di Kota Padang. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 12(1).
- Indrawan, R dan Yaniawati, P (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135-143.

- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1), 49-64.
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. *Jurnal Kawistara*, 2(3).
- Soemarwoto, Otto (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2014). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *Epigram*, 11(1).
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis pasar pariwisata halal indonesia. *Tauhidinomics*, 1(1), 73-80.

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS DI KAWASAN SITU BAGENDIT KABUPATEN GARUT)**

Oleh :

Lia Juliasih¹, Pasciana Rostiena²

Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

liajuliasih@fisip.uniga.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat menjadi subjek yang ikut serta menentukan keberhasilan program pembangunan pariwisata di Kawasan Situ Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Pada Tahun 2020, Kawasan Situ Bagendit menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk dijadikan kawasan wisata kelas dunia. Keberhasilan program ini salah satunya ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat sehingga penelitian ini sangat bermanfaat untuk membuktikan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan pariwisata di kawasan Situ Bagendit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengambilansampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wujud partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam setiap bentuk dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pariwisata di kawasan Situ Bagendit. Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga masyarakat diikutsertakan dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci : *Partisipasi masyarakat, pembangunan pariwisata berkelanjutan, kawasan wisata*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata merupakan satu hal yang penting dilakukan oleh suatu negara karena memberikan nilai positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, selain juga memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah atau kawasan memerlukan perencanaan yang matang secara konsep. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli, 1995).

Saat ini, pengembangan pariwisata harus menunjukkan konsep pariwisata yang berkelanjutan. World Tourism Organization (WTO) menunjukkan bahwa dalam pariwisata berkelanjutan terdapat keserasian antara kebutuhan ekonomi, sosial, integritas budaya, proses ekologi essensial, keanekaragaman hayati, dan sistem penunjang kebutuhan pada lain pihak. Menurut World Tourism Organization (WTO) terdapat Sembilan (9) indikator pembangunan atau pengembangan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Development for Tourism Destinations*) yaitu :

1. Kesejahteraan (well being) masyarakat tuan rumah
2. Terlindunginya asset-aset budaya
3. Partisipasi masyarakat
4. Jaminan kesehatan dan keselamatan
5. Manfaat ekonomi
6. Perlindungan terhadap aset alami
7. Pengelolaan sumber daya alam yang langka
8. Pembatasan dampak dan,
9. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

Salah satu indikator pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat. Tentu saja, pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari partisipasi. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek yang hanya menerima kebijakan pemerintah, tetapi masyarakat pada saat ini juga harus dilibatkan sebagai subjek dalam kerangka mengembangkan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata akan menyebabkan timbulnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sehingga masyarakat ingin turut memelihara potensi pariwisata yang berada di daerahnya.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat atau bisa disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat (RMunawaroh, 2014). Hal ini diperkuat oleh Kalesaran et al (2015) yang mengungkapkan bahwa :Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya.

Menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32), partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Keith Davis pada bukunya *Human Relations at work* (1962) dalam santoso (1988:13), menyatakan: “*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*” (Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Tahapan partisipasi yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat bermanfaat pada peningkatan taraf hidup masyarakat dari aspek pengetahuan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik (RMunawaroh, 2014)

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam

evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasisetidak-tidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu:

1. Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, kehadiran secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah merupakan partisipasi.
2. Ketersediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan, sebuah pikiran, ketrampilan dan sebagainya.
3. Ketersediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati.

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan wisata Situ Bagendit mengarah pada pelibatan beberapa unsur kelompok masyarakat. Menurut World Tourism Organization (2004) unsur kelompok masyarakat tersebut terdiri dari :

1. Masyarakat setempat
2. Sektor Pemerintah
3. Sektor Swasta
4. LSM
5. Wisatawan

World Tourism Organization (2004) juga memberikan penekanan pada unsur masyarakat setempat yang potensial terlibat dalam kegiatan pariwisata, yaitu :

1. Kelompok masyarakat setempat
2. Kelompok masyarakat dan budaya

3. Pekerja sektor swasta (tenaga kerja lokal)
4. Pemilik aset lokal
5. Kelompok usaha (tenant)

Pemerintah merencanakan pembangunan dimulai tahun depan. Upaya itu merupakan langkah maju yang dilakukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemda Garut memulai proses revitalisasi Situ Bagendit pada tahun depan.... Total anggaran hingga Rp120 miliar siap digelontorkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan proyek ambisius kawasan wisata dunia di Kota Intan tersebut. Rencananya, tahun depan pembangunan mulai dilaksanakan, sehingga 2021 revitalisasi Bagendit usai (www.liputan6.com.2019)

Penulis mengambil Kawasan Situ Bagendit sebagai bahan kajian, karena kawasan ini menjadi salah satu kawasan wisata di Jawa Barat yang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuju wisata kelas dunia.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kawasan Situ Bagendit Kabupaten Garut). Adapun rumusan masalah yang menjadi perhatian adalah bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Situ Bagendit.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Situ Bagendit.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami, oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Menurut Arikunto (2002:120) penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

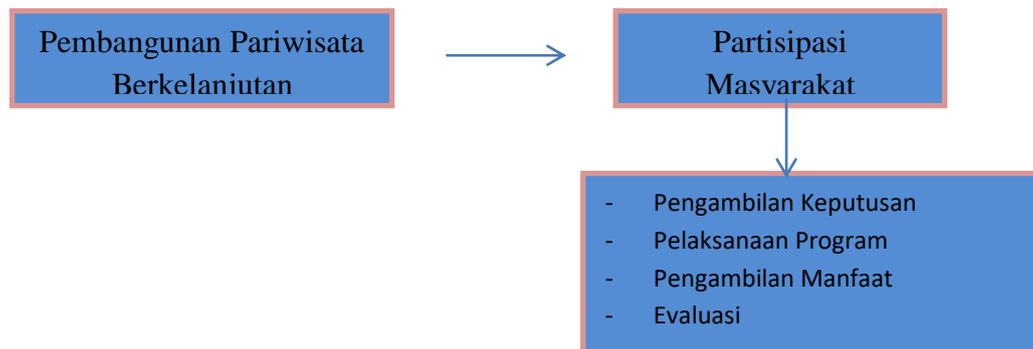
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2008:3000) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1
Penentuan Sampel Penelitian

No.	Kelompok Masyarakat	Jumlah
1.	Kelompok masyarakat setempat	1 orang
2.	Kelompok masyarakat dan budaya	1 orang
3.	Pekerja Sektor Swasta (Tenaga Kerja Lokal)	-
4.	Pemilik Aset Lokal	1 orang
5.	Kelompok Usaha	2 orang

Penentuan sumber/ subjek penelitian berdasarkan atas informasi apa saja yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Kerangka Berfikir



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Situ Bagendit Garut merupakan objek wisata alam berupa danau yang terletak di Jl. K.H. Hasan Arif Banyuresmi, tepatnya di Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat secara historis, Kawasan Situ Bagendit ini berada di dalam wilayah 5 (lima) desa yaitu Desa Bagendit, Desa Sukamukti, Desa Banyuresmi, Desa Sukaratu dan Desa Cipicung. Secara administratif, Desa Bagendit berbatasan dengan beberapa desa yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipicung, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Binakarya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamukti. Kecamatan Banyuresmi sendiri berbatasan administratif di sebelah utara dengan Kecamatan Leuwigoong dan Leles, di sebelah Selatan dengan Kecamatan Tarogong Kaler dan Karang Pawitan, di sebelah barat dengan kecamatan Tarogong Kaler dan di sebelah timur dengan Kecamatan Karangpawitan.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Situ Bagendit Garut antara lain menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit. Para pengunjung juga dapat melakukan kegiatan rekreasi keluarga, menikmati pemandangan serta kegiatan bersepeda air. Berdasarkan data pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Garut, bahwa Situ Bagendit memiliki luas kawasan sekitar 124 ha dengan kawasan yang terairi hanya sekitar 87 ha. Situ Bagendit berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan laut, memiliki konfigurasi umum lahan datar dan berbukit. Dilihat dari tingkat stabilitas tanah serta daya serap tanah yang baik serta didukung oleh tingkat abrasi yang rendah, menjadikan kawasan Situ Bagendit secara aspek geologi baik untuk kegiatan pariwisata.

Situ Bagendit berstatus kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat melalui Perda Jabar Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung khususnya bagi wilayah Kecamatan Banyuresmi. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut juga memanfaatkan kawasan Situ Bagendit sebagai salah satu objek pariwisata.

Argyo Demartoto (2009:100) menyatakan bahwa "tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu, 1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata, 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata, 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menegaskan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri. Penyusunan perencanaan dalam skala lokal merupakan syarat awal dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat ini, yang mampu mengakomodasikan semua kebutuhan dalam

kerangka tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, dan perencanaan disusun bersamadengan komunitas yang ada (Janianton Damanik,dkk, 2005)

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menegaskan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata. Masyarakatlah yang mengetahui dengan jelas dan detail keadaan sekitar kawasan pariwisata. Pada penelitian ini, partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan indikator yang disampaikan oleh World Tourism Organization. Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu kelompok masyarakat setempat, kelompok masyarakat dan budaya, pekerja sektor swasta (tenaga kerja lokal), pemilik aset lokal dan kelompok usaha (tenant).

Tabel 2
Kelompok Masyarakat di Kawasan Situ Bagendit

No.	Kelompok Masyarakat	Keterangan
1.	Kelompok masyarakat setempat	a. Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) b. Karang Taruna c. KNPI
2.	Kelompok masyarakat dan budaya	a. Kelompok Pencak silat b. Kelompok Marawis c. Kelompok Seni Lukis
3.	Pekerja Sektor Swasta (Tenaga Kerja Lokal)	Belum tersedia
4.	Pemilik Aset Lokal	Bumdes
5.	Kelompok Usaha	a. Kelompok Usaha Makanan b. Kelompok Rakit c. Kelompok Mainan Air

Bentuk partisipasi kelompok masyarakat yang pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program revitalisasi sebagai bentuk pengembangan pariwisata di kawasan Situ Bagendit. Pada proses persiapan menuju tahapan revitalisasi yang akan dimulai pada Tahun 2020, kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Rapat koordinasi tingkat kabupaten yang dilakukan hanya melibatkan unsur pemerintah daerah kabupaten seperti Disparbud dan pemerintahan tingkat kecamatan atau desa yaitu Camat dan Kepala Desa. Hasil rapat koordinasi tersebut, kemudian disosialisasikan kepada kelompok masyarakat dan juga UPT Situ Bagendit.

Sampai sejauh ini, informasi yang disampaikan hanya sebatas informasi secara umum. Belum ada informasi yang disampaikan secara teknis dan detail tentang konsep perencanaan revitalisasi kawasan Situ Bagendit secara menyeluruh. Masyarakat tidak pernah diundang dan diajak duduk bersama untuk mendiskusikan peluang dan rencana program. Masyarakat berharap pemerintah akan segera memberikan kejelasan arah dan tujuan dari program tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat yang kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan program baik perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Pada tahapan perencanaan, masyarakat mendapatkan informasi bahwa revitalisasi kawasan Situ Bagendit yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 akan dikembalikan kepada kondisi awal sesuai historis. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pihak

pemerintah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di sekitar kawasan. karena ada sebagian situ bagendit yang sudah mengalami pendangkalan dan diklaim sebagai milik warga.

Secara umum masyarakat memberikan respon baik terhadap rencana revitalisasi tersebut, walaupun masyarakat belum mengetahui secara pasti arah dan tujuan revitalisasi yang disampaikan secara resmi oleh pihak pemerintah. Masyarakat berharap bahwa mereka akan dilibatkan dalam perencanaan awal melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan atau tingkat desa sehingga masyarakat bisa memberikan masukan dan mendapatkan gambaran manfaat revitalisasi dan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan. Masyarakat berharap akan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya karena yang mengetahui lingkungan secara menyeluruh adalah masyarakat lokal sekitar kawasan situ bagendit.

Program revitalisasi kawasan Situ Bagendit yang akan segera dilaksanakan, tentu juga berdampak pada aktivitas kelompok usaha di kawasan tersebut. Kelompok usaha sudah mendapatkan informasi dari pemerintah setempat untuk menghentikan aktivitas usahanya ketika program revitalisasi mulai dilaksanakan. Kelompok usaha sudah mempersiapkan hal tersebut karena mereka juga menerima baik program tersebut karena akan memberikan dampak bagi masyarakat di kemudian hari. Selain itu, kelompok usaha mengharapkan agar mereka mendapatkan tempat usaha yang layak setelah revitalisasi selesai.

Tabel 3
Jumlah Pelaku Kelompok Usaha di Kawasan Situ Bagendit

No.	Kelompok Usaha	Jumlah
1.	Kelompok Usaha Makanan	65 orang
2.	Kelompok Rakit	60 orang
3.	Kelompok Mainan Air	6 kelompok

Tabel 4
Jumlah Kios Usaha Makanan di Kawasan Situ Bagendit

No.	Kelompok Usaha	Jumlah
1.	Kios	43 buah
2.	Roda dan asongan	22 buah

Bentuk partisipasi masyarakat yang ketiga adalah partisipasi dalam pengambilan manfaat. Masyarakat di sekitar kawasan Situ Bagendit menyambut baik rencana revitalisasi yang akan dilakukan. Masyarakat berharap pengembangan Kawasan Situ Bagendit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Secara ekonomi, masyarakat dapat ikut serta menjadi bagian dari pelaku usaha di sekitar kawasan Situ Bagendit sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka. Secara sosial, masyarakat mendapatkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di kemudian hari. Secara lingkungan, Kawasan Situ Bagendit akan lebih tertata rapih, baik, bersih dan nyaman. Keinginan dan harapan masyarakat tersebut disampaikan pada proses dialog yang dilakukan baik secara formal maupun informal di lingkungan pemerintahan kecamatan.

Saat ini Kawasan Situ Bagendit terbagi menjadi duakawasan yaitu Situ Bagendit 1 dan Situ Bagendit 2. Situ Bagendit 1 merupakan asset Pemerintah Daerah sehingga pendapatan Situ Bagendit menjadi PAD bagi Pemda. Sedangkan Situ Bagendit adalah asset Desa Bagendit sehingga pendapatannya juga masuk ke dalam kas desa. Lahan parkir Situ Bagendit merupakan asset dua pihak

yaitu asset Pemda dan asset Desa Banyuresmi. Jika program ini berjalan maka semua kawasan Situ Bagendit akan menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Bentuk partisipasi masyarakat yang keempat adalah partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Sampai saat ini, bentuk partisipasi ini belum bisa dilaksanakan karena program revitalisasi baru akan berjalan. Hanya saja jika sejak awal masyarakat sudah diikutsertakan dalam proses perencanaan program revitalisasi kawasan Situ Bagendit, maka tentu saja masyarakat akan mudah mengevaluasi pelaksanaan program.

D. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Situ Bagendit dapat dilihat dari partisipasi 5 kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat setempat, kelompok masyarakat dan budaya, pekerja sektor swasta (tenaga kerja lokal), pemilik aset lokal dan kelompok usaha (tenant).

Wujud partisipasi masyarakat tersebut dilihat dari 4 (empat) bentuk partisipasi yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program revitalisasi kawasan Situ Bagendit belum sepenuhnya berjalan. Masyarakat tidak pernah mendapatkan undangan secara resmi dari pihak pemerintah untuk membahas program tersebut. Masyarakat mendapatkan informasi tentang program tersebut melalui sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah setempat hanya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan awal program revitalisasi tersebut. Hal ini menyebabkan putusya komunikasi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat, padahal masyarakat adalah objek pertama yang merasakan dampak dari program revitalisasi yang dijalankan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat sudah berjalan baik. Masyarakat di sekitar kawasan Situ Bagendit merespon positif program tersebut karena masyarakat berharap program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program belum bisa dilaksanakan karena program revitalisasi baru akan dimulai pada Tahun 2020. Kuncinya, jika masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan maka masyarakat akan mudah untuk melakukan evaluasi karena sudah mempunyai gambaran tentang rencana awal program.

b. Saran

Pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sejak awal, sehingga masyarakat mengetahui informasi program revitalisasi secara jelas dan detail. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan konkrit tentang kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar kawasan Situ Bagendit.

Keterlibatan masyarakat sejak awal diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Masyarakat ikut bersama-sama dengan pemerintah memikirkan apa yang terbaik untuk Situ Bagendit. Masyarakat juga akan merasa bertanggung jawab untuk ikut menjaga keberhasilan program tersebut. Pembangunan ini pada akhirnya akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton, et al. 2005. *Proverty Alleviation Through Tourism= Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta. Center for Tourism St
- Demartoto, Argyo. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta. Sebelas Maret University Press
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar
- Fandeli, Chafid. 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta. Liberty.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4134126/revitalisasi-situ-bagendit-proyek-ambisius-menuju-wisata-kelas-dunia-di-garut.15Des>
- Indicator Of Sustainable Development For Tourism Destinations. A Guidebook, 2004 World Tourism Organization Calle Capitán Hay
- Kalesaran, Ferdinand. 2015 *Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado*. Journal “Acta Diurna” Volume IV. No.5 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/index/index>
- Moleong, Lexy. .2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Rosdakarya.
- Pitana, I Gede. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Rachman, Arief faizal dan Bahri, Asep Syaiful. 2014. *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Di Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten*. Laporan Penelitian Sekolah Tinggi Pariwisata Trisaksi. <https://www.academia.edu/33362030/>
- R Munawaroh. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Suwating, Magelang*. Vol 6, No. 4 Tahun 2017. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/view/8198>
- ROY G, Ismail Lesi and RAHDRIAWAN, Mardwi. 2011. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Bukit Gundaling Kabupaten Karo*. Jurnal Planologi. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/41117/>
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta Rineka Cipta.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN TELUK BERDIRI SEBAGAI OBJEK EKOWISATA DI KABUPATEN KUBURAYA KALIMANTAN BARAT

Oleh :

Heriyanto

Jurusan Administrasi Bisnis, Prodi DIV Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat

e-mail: heriyanto.radien@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata Teluk Berdiri serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekowisata tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Instrumen yang digunakan adalah lembar survei dan pedoman wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik untuk pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda diluar data itu untuk keperluan pengecekan perbandingan data yang sama dari sumber lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminat wisatawan masih wisatawan lokal, hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti aksesibilitas yang masih kurang, kurangnya promosi, dan lain-lain. Peranan pemerintah saat ini berupaya memberikan dukungan salah satunya yakni memperbaiki akses jalan menuju wisata tersebut. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat untuk pembangunan sarana dan prasarana, perbaikan aksesibilitas serta mengangkat kearifan lokal serta tradisi untuk menarik minat pengunjung. Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata dapat menjadi pedoman dalam melakukan pemanfaatan sektor pariwisata dan dapat digunakan sebagai daya tarik suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

Kata Kunci : Pengembangan; Ekowisata; Teluk Berdiri.

A. PENDAHULUAN

Nusantara memiliki wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara dengan potensi kepariwisataan yang beraneka ragam di masing masing wilayahnya. Wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam serta kaya akan budaya. Semuanya itu merupakan sebuah peluang serta modal yang besar untuk bangsa dan negara, khususnya dalam pengembangan, pembangunan dan peningkatan kepariwisataan yang ada di Indonesia. Kekayaan serta keanekaragaman sumber daya alam di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri khususnya di bidang pariwisata. Pariwisata di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman mengalami perubahan dan perkembangan dengan sangat cepat dan signifikan. Potensi pariwisata yang ada merupakan peluang daerah untuk mampu mensejahterahkan masyarakatnya melalui sektor pariwisata. Tiap-tiap daerah akan terus mencoba untuk menggali potensi pariwisata yang ada dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakatnya .

Untuk mengatur bidang kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pasal 3 dan pasal 4 adapun fungsi dan tujuan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Menurut Pratomo, 2016 kriteria pengembangan destinasi pariwisata ditentukan oleh enam faktor utama yaitu:

1. Nilai daya tarik (atraksi) yang berkualitas.
2. Kesiapan amenities pariwisata (infrastruktur dan sarana prasarana pariwisata).
3. Aksesibilitas (jaringan modal transportasi dan konektivitas).
4. Kesiapan dan dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
5. Tata kelola destinasi pariwisata.
6. Potensi Pengembangan Pasar Mancanegara dan Nusantara.

Di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terdapat destinasi wisata, yaitu Ekowisata Teluk Berdiri. Jarak Ekowisata Teluk Berdiri dari pusat Kota Pontianak sekitar 27 kilometer ke arah barat. Ekowisata Teluk Berdiri ini merupakan salah satu program pemerintah untuk masyarakat pesisir yaitu melalui ekowisata mangrove. Ekowisata Teluk Berdiri memanjakan pengunjung untuk bersantai sambil menikmati sejuk dan indahnya pantai. Selain itu, Ekowisata Teluk Berdiri menyuguhkan spot-spot yang Instagramable bagi anak-anak milenial. Kawasan ini juga terdapat sebuah mercusuar, Menara Suar Tanjung Intan, yang menavigasi masuknya kapal dari laut ke sungai Kapuas. Sehingga kawasan ini cocok menjadi salah satu pilihan destinasi wisata bersantai dengan keluarga dan patut dikembangkan untuk menjadi salah satu tempat pariwisata di Kota Pontianak.

Hal ini menjadikan ekowisata Teluk Berdiri di Sungai Kupah memiliki potensi yang sangat bagus dan baik untuk kedepannya. Namun agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata, yang terdiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat.

Namun, potensi sumber daya ekowisata Teluk Berdiri belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya kegiatan wisata disebabkan oleh beberapa faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti aksesibilitas yang masih kurang, kurangnya promosi, dan lain-lain. Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal ketersediaan fasilitas yang mendukung perjalanan wisata membuat minat wisatawan untuk berkunjung mengalami penurunan di tiga bulan terakhir. Hal ini dapat ditunjukkan dari data jumlah kunjungan objek Ekowisata Teluk Berdiri Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap 2019 yakni pada bulan Oktober pengunjung mencapai 1.891

wisatawan lokal, bulan November mencapai 832 pengunjung dan di bulan Desember pengunjung hanya mencapai 712. Maka saat ini kebutuhan akan data dan informasi tentang kondisi dan keberadaan sumber daya serta dukungan untuk pengembangan ekowisata Teluk Berdiri nantinya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya dukung peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Teluk Berdiri sebagai objek ekowisata di desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata diperlukanya sebuah strategi yang akan dilakukan serta kerjasama antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Pratomo, 2016). "Pemerintah beserta lembaga terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk melakukan pembangunan kepariwisataan". Pengembangan kepariwisataan memerlukan pedoman atau arahan yang baik, karena tanpa adanya hal tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, yang pada akhirnya akan menghancurkan potensi dari kepariwisataan itu.

Menurut Mardiana (2014) ada beberapa dampak negatif dari pengembangan ekowisata adalah:

1. Kerusakan sumber hayati, yang mengakibatkan Indonesia kehilangan daya tariknya dalam jangka panjang.
2. Limbah sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan bau yang tidak sedap, serta dapat juga membuat tanaman disekitarnya mati.
3. Sering terjadinya perdagangan seni-budaya.
4. Terjadi perubahan kepribadian yang menjurus pada kerusakan generasi muda.

Meskipun pariwisata merupakan usaha yang sangat menguntungkan tetapi pariwisata juga dapat memberikan dampak negatif yang sangat merugikan karena sumber daya alam dan lingkungan akan menjadi tidak terjaga atau rusak akibat kunjungan wisatawan yang berlebihan. Dengan adanya pengembangan ekowisata ini, peran pemerintah dapat membuat hubungan kerjasama antara pihak swasta atau pengelola agar permasalahan negatif dari ekowisata dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan pembangunan sarana dan prasarana, perbaikan aksesibilitas serta mengangkat kearifan lokal serta tradisi untuk menarik minat pengunjung. Sehingga ekowisata Teluk Berdiri dapat berkembang sebagai salah satu tempat wisata di kota Pontianak dapat terealisasi dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan didalam penelitian ini dimana permasalahan yang diangkat tidak disajikan melalui data-data statistik tetapi data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata tertulis, lisan atau gambar daripada angka-angka tentang masalah yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2016) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. untuk memberikan gambaran secarajelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihatfenomena yang terjadi dengan rencana yang telah dibuatsebelumnya khususnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata. Lokasi penelitian ini di lakukan pada kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya dan beberapa objek ekowisata

Teluk Berdiri. Fokus penelitian yang di terapkan dalam penelitian ini mengenai peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata Teluk berdiri serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan ekowisata Teluk Berdiri

Adapun tahapan dalam penelitian ini yaitu; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap hasil penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder ialah data yang di dapatkan secara tidak langsung dan dapat mendukung dan membantu penulis dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat sekitar lokasi objek wisata. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar survei dan lembar pedoman wawancara yang digunakan dalam proses penelitian berlangsung berupa garis besar pertanyaan yang akan di ajukan kepada masyarakat atau pengunjung sebagai subjek penelitian.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahaan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber lain. Analisis data dalam penelitian ini kualitatif dilakukan dengan teknik pengelohan data dan analisa secara bersamaan pada proses penelitian. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

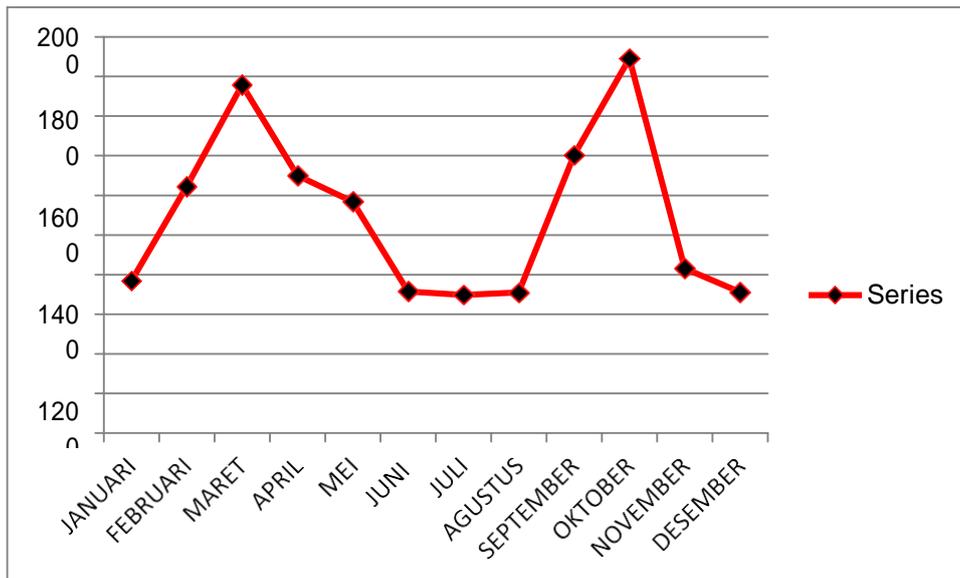
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data pengunjung Tahun 2019 berdasarkan data dari aparaturnya desa yang mengelola objek Ekowisata Teluk Berdiri sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Jumlah Pengunjung Objek Ekowisata Teluk Berdiri 2019

No	Bulan	Wisatawan	
		Lokal	M mancanegara
1	Januari	769	-
2	Februari	1.245	-
3	Maret	1.758	-
4	April	1.300	-
5	Mei	1.168	-
6	Juni	716	-
7	Juli	698	-
8	Agustus	710	-
9	September	1.403	-
10	Oktober	1.891	-
11	November	832	-
12	Desember	712	-
TOTAL		13.202	-

Gambar 1. Grafik Jumlah Pengunjung Objek Ekowisata Teluk Berdiri 2019



Berdasarkan data di atas, pengunjung Ekowisata Teluk Berdiri selama tahun 2019 adalah wisatawan lokal dengan sejumlah pengunjung di bulan-bulan tertentu mengalami kenaikan meliputi bulan Maret, September, dan Oktober. Jumlah pengunjung pada tiga bulan tersebut mengalami kenaikan yang sangat pesat. Berdasarkan informasi yang peneliti temukan, pada bulan Maret adalah bulan dimana diadakannya festival tahunan di kawasan Ekowisata Teluk Berdiri. Hal ini jelas mempengaruhi kenaikan jumlah pengunjung di bulan tersebut. Sama halnya pada bulan Oktober, berdasarkan informasi setempat pada Tanggal 09 Oktober 2019 Asisten Dupati daya Mineral dan Non Konfensional Amalyos bersama Staf Ahli Menteri Menko Bidang Antropologi bapak Tukul Rameyo mengadakan kunjungan kekawasan Ekowisata Teluk Berdiri. Sehingga pada bulan tersebut mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat drastis juga. Dugaan ini didukung dengan data setelah bulan Maret dan bulan Oktober, dimana bulan-bulan selanjutnya jumlah pengunjung mengalami penurunan. Jumlah pengunjung pada bulan April mencapai 1.300 pengunjung kemudian bulan Mei 1.168 pengunjung dan bulan juni 716 pengunjung saja. Sedangkan jumlah pengunjung setelah kunjungan Ahli Menteri Menko Bidang Antropologi bapak Tukul Rameyo yakni pada bulan November jumlah pengunjung hanya 832 wisatawan dan pada bulan Desember 712 wisatawan saja. Padahal pada bulan Desember adalah bulan dimana anak-anak libur sekolah atau bisa disebut libur panjang akhir tahun.

Dengan mengacu pada uraian di atas dikemukakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membangun dan mengembangkan Ekowisata Teluk Berdiri. Berdasarkan penuturan Ibu Iping staff kepegawaian Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1. Adanya dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat .

Dengan adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan ekowisata maka peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan. Terutama peran pemerintah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pengunjung agar wisatawan merasa nyaman dan aman di objek wisata tersebut. Akses jalan menuju tempat wisata merupakan hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah, hal ini menjadi salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke ekowisata Teluk Berdiri. Tidak hanya dukungan dari pemerintah saja kontribusi dari masyarakat juga sangat penting dalam mengembangkan ekowisata Teluk Berdiri. Menjaga kelestarian sumber daya alam disekitar kawasan

wisata menjadi tanggung jawab bersama seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak sumber daya alam di sekitar kawasan wisata. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat dalam pengembangan ekowisata Teluk Berdiri. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat ekowisata Teluk Berdiri dapat berkembang dan menjadi ekowisata unggulan.

2. Panorama Alam

Ekowisata mangrove menghadirkan wisata alam yang indah, selain pengunjung dapat bersantai sambil menikmati sejuknya pantai. Tempat ini menyajikan sebuah mercusuar, Menara Suar Tanjung Intan, yang menavigasi masuknya kapal dari laut ke sungai Kapuas. Hal ini menjadikan pengalaman berlibur di ekowisata Teluk Berdiri menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ekowisata Teluk Berdiri juga menyuguhkan tempat spot-spot foto untuk para pengunjung mengabadikan moment bersama rekan, sahabat, pasangan, dan keluarga yang Instagramable.

3. Udara yang Masih Segar

Udara yang masih segar merupakan aspek yang sangat penting dalam daerah objek wisata. Dimana udara yang masih segar dan alami akan mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Objek ekowisata Teluk Berdiri jauh dari pusat kota dan jauh dari aktivitas manusia. Ekowisata Teluk Berdiri juga dikelilingi oleh pohon-pohon mangrove yang rindang yang membuat objek wisata terasa sejuk dan segar sehingga membuat pengunjung merasa nyaman untuk berlama-lama berada di objek wisata.

Faktor Penghambat

1. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang melengkapi objek wisata dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan agar berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan kurang baik dapat menghambat proses untuk kemajuan suatu objek wisata. Di ekowisata Teluk Berdiri fasilitas infrastruktur masih kurang, sinyal Internet dikawasan ekowisata Teluk Berdiri belum dapat diakses dengan baik. Penginapan juga belum tersedia dikawasan wisata tersebut sehingga ketika ada masyarakat yang akan menginap harus ke kota Pontianak terlebih dahulu. Ketersediaan air bersih dan tempat ibadah masih perlu di perbaiki guna menunjang kenyamanan para pengunjung.

2. Aksesibilitas yang Masih Kurang

Aksesibilitas merupakan komponen yang sangat penting dalam pariwisata. Dimana aksesibilitas yang baik dapat memperlancar perpindahan orang dari tempat satu ke tempat yang lain. Akses jalan menuju wisata masih sulit dilewati kendaraan roda empat jalan ini masih jalan setapak sehingga ketika wisatawan menggunakan mobil harus melintasi jalan yang berbeda lagi. Selain itu belum terdapat kendaraan umum baik angkot ataupun angdes, sehingga menghambat para wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata. Untuk datang ke objek wisata alam Teluk Berdiri pada saat ini hanya bisa di tempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi saja. Kondisi jalan menuju ekowisata Teluk Berdiri juga masih banyak yang rusak dan berlubang. Pemerintah diharapkan dapat segera memperbaiki kondisi jalan agar pengunjung dapat dengan mudah mencapai lokasi ekowisata Teluk Berdiri.

3. Kurangnya Promosi

Promosi bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang adanya ekowisata Teluk Berdiri. Sehingga apabila promosi yang dilakukan baik dan benar orang-orang akan mengetahui keberadaan ekowisata teluk Berdiri. Sehingga banyak orang-orang yang datang berkunjung ke ekowisata Teluk Berdiri. Untuk saat ini promosi yang dilakukan pengelola ekowisata yakni berupaya mengadakan festival tahunan dikawasan tersebut. Terbukti dari data jumlah pengunjung 2019 dalam acara festival di tahunan di bulan Maret mengalami kenaikan jumlah

pengunjung, hanya saja hal ini berlangsung selama proses acara tersebut. Setelah acara pada bulan selanjutnya mengalami penurunan jumlah pengunjung. Sehingga pengelola kawasan ekowisata Teluk Berdiri masih perlu melakukan promosi kembali agar kawasan wisata ini menjadi pilihan destinasi wisata para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

4. Tidak Adanya Toko Cenderamata

Cenderamata merupakan sesuatu baik berupa barang ataupun makanan yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Cenderamata sangat penting sekali untuk wisatawan karena untuk mengenang bahwa wisatawan tersebut sudah pernah berkunjung ke objek ekowisata Teluk Berdiri, namun sayangnya di objek wisata alam ini belum terdapat toko cenderamata. Selain itu, bentuk cenderamata bisa menjadi sumber penghasilan setempat yang dapat meningkatkan perekonomian dan sebagai bentuk pelestarian kekayaan lokal. Dengan adanya cenderamata masyarakat setempat dapat mengenalkan makanan ataupun barang khas daerah untuk menjadi salah satu yang dapat memikat minat pengunjung untuk mengenal lebih dekat daerah atau kawasan wisata tersebut. Hal ini tentu perlu dipertimbangkan untuk mengadakan toko atau pendopo untuk menjual cenderamata khas daerah setempat.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Pariwisata Masih Rendah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci yang menentukan laju perkembangan pembangunan di suatu kawasan atau daerah (Pratomo, 2016). Sumber Daya manusia (SDM) memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan dan perkembangan ekowisata Teluk Berdiri. Selain itu, kualitas SDM dapat berpengaruh untuk memberikan ide dan gagasan mengenai kemajuan dan perkembangan ekowisata Teluk Berdiri sendiri. Dengan kata lain SDM di kawasan ekowisata Teluk Berdiri perlu diberikan bimbingan, arahan dan pelatihan agar SDM setempat mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar usaha pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seperti pendapat Pratomo, 2016 menyatakan bahwa “Pariwisata yang dikelola dengan baik juga akan menambah salah satu pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Peran Pemerintah

1. Melakukan Promosi

- a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar festival video blogger bertajuk Kubu Raya Traveler-Tourism Vlog Festival (KRTV Fest). KRTV Fest menjadi salah satu inovasi dan improvisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya guna lebih mengangkat potensi-potensi wisata di Kubu Raya melalui media kreatif. Perhelatan pertama di tahun 2020 mengangkat tema “Menggali dan Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Kubu Raya”. Festival ini juga sebagai media interaksi untuk menjembatani para vlogger pada khususnya dan pelaku ekonomi kreatif secara umum dengan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui cara yang inovatif.
- b. Pemerintah Desa Sungai Kupah yang berada di Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Equator Relief menggelar kegiatan bertajuk “Festival Telok Berdiri” di Desa Sungai Kupah yang rutin diadakan setiap bulan Maret. Kegiatan dalam festival tersebut meliputi lomba tundang, lomba pancing udang galah, lomba design Tugu Khatulistiwa dan lomba galah hadang. Dimana festival ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengajak masyarakat agar lebih tertarik untuk terlibat dalam upaya Konservasi Wisata Pesisir Lintas Kulminasi Matahari Desa Kupah.

1. Pembangunan sarana dan prasarana

Pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam peranya sebagai pemerintah dalam mengembangkan eko wisata Teluk Berdiri diantaranya adalah:

- a. Pembuatan Gazebo
- b. Pembangunan pusat jajanan
- c. Pembangunan Jembatan menuju ekowisata
- d. Pembuatan tempat parkir
- e. Pembuatan jalan dalam kawasan
- f. Pembuatan ruang ganti Toilet

2. Perbaiki Aksesibilitas

Jalan menuju Teluk berdiri pada saat ini masih belum baik sehingga pengunjung masih kesulitan ketika melewati jalan untuk mencapai ekowisata Teluk Berdiri. Pemerintah pada saat ini mulai melakukan perbaikan jalan secara bertahap untuk mempermudah dan memperlancar wisatawan mencapai ekowisata walaupun masih banyak jalan yang berlubang.

Berdasarkan hasil analisis pengembangan objek wisata harus disesuaikan dengan trend yang berkembang saat ini dan potensi objek wisata untuk dikembangkan menjadi satu daya tarik wisata yang mempunyai keunikan tersendiri (Wibowo, 2014). Dengan mempertimbangkan segala aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya yang cermat dan rasional suatu lokasi objek wisata Teluk Berdiri dapat dikembangkan dengan menampilkan potensi keunikan seperti atraksi kesenian daerah setempat sebagai daya tarik minat wisatawan.

Pengembangan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan menyusun desain terlebih dahulu melalui R&D (Reserach and Development) agar pengembangannya lebih terarah dan berkelanjutan. Semua itu, dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kondisi alami baik berupa hutan beserta isinya serta fungsi ekologinya. Sehingga diharapkan nantinya pengunjung yang sudah pernah berkunjung tidak akan pernah bosan karena akan ada suasana baru untuk dilihat dan dinikmati.

D. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata adalah sebagai fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Peran pemerintah selain sebagai penyedia sarana dan prasara yang ada, pemerintah jugu perlu melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan objek wisata. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Abe (2002) ini diperkuat oleh Sanof (2000), Randolph (2004), Adiyoso (2009). Selian pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat, pemerintah juga dapat menambah ide dan gagasan untuk melakukan inovasi-inovasi pembangunan. Dengan demikian pemerintah juga akan mendapat informasi dan data tentang kelemahan dan kekuatan objek wisata untuk di evaluasi bersama sehingga pembangunan objek wisata dapat berkembang sesuai dengan kemauan bersama.

Masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Sungai Kupah perlu diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Untuk menjamin hal itu diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi peranannya dalam pengembangan desa wisata dan memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selama ini masyarakat terbiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan tidak di biasakan berpartisipasi.

b. Saran

Dengan strategi pasar dan pengembangan produk (Wibowo, 2014), maka dengan ini disarankan, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan obyek wana wisata agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengunjung dengan tidak meninggalkan ciri khas yang dimiliki.
2. Menjalinkan kerjasama jalur distribusi dan advertensi guna penyebaran informasi objek wisata.
3. Melakukan analisis dan evaluasi secara terus menerus terhadap kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal masing-masing objek wisata dalam upaya untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan mengurangi kelemahan-kelemahan serta meraih peluang-peluang yang ada dan menekan ancaman.
4. Perlu adanya pengklasifikasian atau pengelompokan lokasi wisata sesuai dengan kondisi dan fasilitas agar memudahkan dalam pengembangan, penentuan tarif masuk dan lain-lain.
5. Diadakannya kantor pemasaran, agar memudahkan pengunjung dalam pemesanan serta pengkoordinasiannya seperti dalam pemesanan tempat menginap diwisma (jika ada), pembelian tiket masuk, juga pengendalian/pemeriksaan pendapatan. Selain itu memudahkan pengelola wisata dalam mempersiapkan kebutuhan pengunjung. Sehingga citra wisata akan bisa menjadi lebih baik atau ada nilai tersendiri bagi pengunjung.
6. Pengelolaan keuangan sebaiknya dilakukan secara transparan dan terkoodinir dengan baik sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam hal keuangan.
7. Pengembangan Desa Wisata perlu didukung dengan manajemen atau pengelolaan yang melibatkan tokoh Desa dan masyarakat setempat. Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata (Dewi, ddk. 2013). Dengan demikian masyarakat akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perkembangan pariwisata di desanya, sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Adiyoso, W. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: ITS Press.
- Dewi, Made Heny Urmila, dkk. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara*, Vol. 3, No. 2
<https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3976/3251>
- Pratomo, M. Bayu dan Abdul Sadad. 2016. Upaya Pengembangan Objek Wisata di Kota Padang. *JOM FISIP VOL.3 No.2*. <https://media.neliti.com/media/publications/206617-upaya-pengembangan-objek-wisata-di-kota.pdf>
- Randolph, J. 2004. *Environmental Land Use Planning and Management*. Washington. D.C.: Island Press.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Brisbane : John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Timothy, D. J. 1999. Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia dalam *Annals of Research*, Vol 26, No.2.
- Wibowo, Wahyu. 2014. Analisis Internal dan Eksternal (IE) Matrik dalam Strategi Pengembangan Wana Wisata Grajagan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Nomor 2*. <http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/8.-Wahyu.pdf>

**ANALISIS KINERJADINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Oleh :

Dewi Maharani¹, Asep Suhada²

dewimaharani212@gmail.com

Universitas Majalengka

ABSTRAK

Dewasa ini, pariwisata merupakan sektor penting bagi pengembangan suatu daerah. Tidak dapat diungkiri bahwa kehadiran pariwisata yang menarik akan meningkatkan perekonomian masyarakat daerah setempat. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata seyogianya juga memperhatikan kearifan local sehingga pengembangan pariwisata juga tidak meninggalkan sector budaya local sebagai ciri khas dan jati diri sebuah daerah atau bangsa. Seiring dengan Kabupaten Majalengka menuju aerocity dengan hadirnya bandara Internasional Kertajati Jawa Barat, tentu sector pariwisata menjadi daya tarik untuk dikembangkan. Namun perlu diperhatikan bahwa perkembangan pariwisata juga perlu dibarengi dengan menonjolkan budaya local daerah Majalengka. Dengan dianugerahi alam yang indah, Majalengka mampu menghadirkan wisata alam yang akan menjadi sector andalan bagi Kabupaten Majalengka untuk bersaing dengan daerah pariwisata lain di Indonesia bahkan di dunia. Penelitian ini menganalisis kinerja organisasi dan faktor-faktor pendukung kinerja. Penilaian dilakukan dengan meneliti indikator kinerja yang digunakan penulis yaitu indikator kinerja, Produktivitas, Kualitas Layanan, Daya Tanggap, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas. Sedangkan faktor pendukung pekerjaan dinilai dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan temuan di lapangan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masalah yang ada pada semua indikator kinerja dan faktor pendukung yang masih belum optimal, sehingga organisasi mencapai kinerja yang tidak optimal dan perlu perbaikan.

Kata Kunci : Kinerja, Pariwisata, Budaya Lokal

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sector penting bagi perkembangan suatu daerah. Dengan hadirnya tempat-tempat wisata yang menarik perhatian turis baik local maupun mancanegara, suatu daerah akan mampu dikenal luas dan yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata di Kabupaten Majalengka sangat besar untuk berkembang. Letak wilayah di kaki gunung Ciremai yang dianugerahi alam yang sangat indah, menjadikan Majalengka mampu menghadirkan potensi wisata alam yang dapat menarik perhatian para wisatawan baik local maupun mancanegara. Pengelolaan pariwisata akan menjadi lebih baik jika selalu dilestarikan dengan potensi budaya local sehingga kehadiran wisata daerah mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain.

Untuk mengembangkan potensi wisata alam di Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya baik dari segi pengelolaan maupun infrastruktur. Namun demikian, pengelolaan dan pengembangan yang dilaksanakan belum maksimal dan belum konsisten sehingga pemaksimalan potensi alam di Majalengka belum sesuai yang diharapkan. Perlu adanya peningkatan kinerja dari pengelola sector pariwisata baik dari dinas pariwisata maupun unsur-unsur pengelola lain sehingga pariwisata di Majalengka dapat berkembang dengan baik.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah yakni: Pertama, kurangnya pengelolaan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam pengembangan objek wisata. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung, selain itu ketersediaan fasilitas umum yang seharusnya ada pada lokasi wisata juga tidak ada, seperti adanya toilet umum, lokasi parkir, papan petunjuk informasi ataupun petugas lapangan yang ditunjuk langsung oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam memberikan pelayanan wisata pada objek wisata. Kedua, partisipasi masyarakat yang ada di lingkungan setempat kurang berkontribusi dalam melestarikan maupun mendukung pemerintah setempat dalam mengembangkan objek wisata tersebut, hal ini dapat dilihat dari kondisi yang ada didalam beberapa objek wisata yang kini sudah berubah dalam bentuk fisiknya.. Ketiga, Promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam memasarkan masih minim, sehingga pengetahuan masyarakat atas adanya potensi wisata alam di Majalengka masih kurang dikenal.

Pasolong (2008: 176) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika, sehingga dalam hal ini harus diupayakan penekankan kinerja yang berkaitan pada hasil.

Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi (Maharani: 2019). Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Berkaitan dengan konsep kinerja sebagaimana Moeherton (2009 : 61) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dwiyanto (Pasolong, 2008: 176) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit menurut Lenvine (Dwiyanto , 2006:51).

Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Terdapat berbagai faktor yang akan mempengaruhi dalam kinerja pegawai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mangkunegara (2005:13) mengemukakan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri atas kemampuan potensi intelegensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge dan skill*), artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata, yaitu 110-120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan trampil dalam mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

- b. Faktor Motivasi (*motivation*)

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

Untuk mengembangkan wisata alam seperti curug atau air terjun, dan wisata alam lainnya di Kabupaten Majalengka, selain masalah konservasi, keindahan alamnya, kearifan lokal yang bertebaran di wilayah tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk mengundang kedatangan wisatawan. Kearifan lokal di Kabupaten Majalengka. Menurut Witular merupakan “perilaku positif manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitar yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat setempat yang berkembang menjadi kebudayaan daerah tersebut” (Permana, 2010). Kearifan lokal di Kabupaten Majalengka mencerminkan identitas/kepribadian setempat yang menyebabkan para anggotanya dapat mengaktualisasikan potensi diri untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, “berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*)” (Permana, 2010).

Menjaga keseimbangan alam merupakan kearifan lokal karena sudah menjadi keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka (Alfian 2013).

Pengembangan pariwisata alam berbasis kearifan lokal ini merupakan kreativitas masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri, dan dapat menunjang pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal. Dewasa ini, ide-ide kreatif yang muncul pada dasarnya bersumber dari kearifan lokal daerah. Hal ini memberikan makna bahwa kearifan lokal sangat menentukan arah perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia” (Rakib, 2017).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Dalam Upaya Pengembangan Obyek Wisata Alam Majalengka yang. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan menggambarkan sasaran yang tepat, sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala dari kelompok tertentu. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan adalah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah aksesibilitas, dimana lokasi penelitian merupakan lokasi dimana Peneliti sering melaksanakan penelitian dan pengabdian bersama para mahasiswa, sehingga peneliti telah memiliki akses dalam melakukan penelitian. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka bertanggung jawab dalam mengelola pariwisata alam yang berada pada wilayah teritorial Kabupaten Majalengka.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Dalam Upaya Pengembangan Obyek Wisata Alam

1. Produktivitas

Menurut Hasibuan (2012) produktivitas adalah meningkatnya *output* (hasil) yang sejalan dengan *input* (masukan). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu, bahan, tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Hal tersebut merupakan hasil yang didapatkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Produktivitas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka adalah meningkatkan pariwisata alam Majalengka yang dalam hal ini tentu harus ada keseimbangan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam upaya peningkatan Obyek Wisata alam Majalengka, gagasan-gagasan baru yang digunakan untuk mengembangkan Obyek Wisata alam Majalengka serta ketercapaian target yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Namun, disini produktivitas yang mereka hasilkan kurang baik. Hal tersebut karena tidak adanya gagasan-gagasan baru yang dapat menunjang perkembangan Pariwisata alam Majalengka. karena seperti yang kita ketahui bersama, gagasan atau ide baru itu justru sebagai penunjang utama perkembangan sebuah kepariwisataan.

4.1 Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan produk, jasa, dan protes yang diberikan kepada masyarakat yang dalam hal ini untuk pengembangan Obyek Wisata Alam Majalengka. Bentuk pelayanan pariwisata yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka kepada masyarakat terkait perkembangan Obyek Wisata Alam Majalengka. Kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka masih belum optimal. Keberhasilan untuk menghadirkan sebuah proses pelayanan yang berkualitas memang bukan persoalan yang mudah. Hal ini dapat dipahami, karena pelayanan publik juga akan bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan, karakteristik manusia, dinamika, pergeseran dan percepatan kebutuhan manusia serta aspek lain yang sangat rumit dan kompleks. Itulah sebabnya, pola pelayanan publik yang akan diberikan harus didesain secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani (Maharani: 2019).

Pasolong (2008: 176) mengemukakan keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

Dalam pandangan ini, penyebaran informasi mengenai kepuasan masyarakat tersedia secara mudah dan murah tidak bisa juga dipandang sepenuhnya terpenuhi terutama pada segi kemudahan. Hal ini karena tidak semua masyarakat dapat memiliki akses untuk bisa mengetahui informasi mengenai pariwisata alam Majalengka.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka memang sudah memiliki satu *website* tentang kepariwisataan. Namun itu masih belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Suatu informasi mengenai kepariwisataan tidak bisa dianggap sepele karena hal tersebut menjadi awal mula berkembangnya suatu pariwisata. Jika informasi sebuah pariwisata kurang, bisa dikatakan tidak transparan.

4.2 Responsivitas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka untuk memaksimalkan responsivitas dapat dilihat melalui kerjasama antar pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dan kecepatan dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Untuk memajukan pariwisata suatu daerah, sangat dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dari masing-masing pegawai dalam suatu instansi yang bertugas menangani pariwisata suatu daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Berikut ini adalah merupakan hasil wawancara berkenaan dengan kerjasama yang terjalin antar pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam upaya peningkatan pariwisata Alam Majalengka. Untuk respon kebutuhan masyarakat memang belum maksimal. Namun secara perlahan Dinas Pariwisata memang sedang berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Seperti yang telah penulis paparkan diatas, ide atau gagasan memang sangat diperlukan disini untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

4.3 Responsibilitas

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka mengenai Pengembangan Pariwisata Alam Majalengka dilakukan sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang telah ditentukan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka berdasarkan dimensi responsibilitas belum baik karena masih banyak program yang tidak dilaksanakan. Bahkan penulis melihat secara langsung bahwa ada program yang tidak dilaksanakan namun tetapi dalam laporannya program tersebut terealisasi.

4.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja organisasi publik merupakan bentuk tanggungjawab dan kewajiban terhadap masyarakat. Hal ini diterapkan untuk mengetahui seberapa besar kebijakan dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka secara konsisten dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang memiliki dasar dari dimensi akuntabilitas belum baik karena selama ini bentuk kewajiban dan pertanggung jawaban melalui Lakip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang tidak semua orang bisa memiliki akses dan hal tersebut dapat dikatakan tidak transparan. Akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting karena pada akhirnya inilah yang akan menjadi tolok ukur masyarakat tentang keberhasilan sebuah organisasi publik. Bentuk kewajibandan pertanggung jawaban juga sangat perlu diperhatikan. Melalui Lakip saja misalnya itu sangat tidak optimal dan yang pasti tidak transparan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam pertanggung jawabannya hanya membuat Lakip untuk laporan pertanggung jawabannya. Bahkan Lakip tersebut juga tidak dapat diakses oleh semua orang.

2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Dalam Upaya Pengembangan Obyek Wisata Alam Majalengka

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan

hal yang sangat penting yang dapat menunjang kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Sumber daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sumber daya manusia akan tetapi juga perlu juga dilihat dari tingkat pendidikannya.

Berdasarkan pengalaman penulis, pada saat mendampingi mahasiswa ketika melaksanakan kerja praktek di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka mayoritas pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya. Bahkan untuk pengelola Pariwisata Alam Majalengka hanya mengambil dari warga setempat yang tingkat pendidikannya belum bisa belum sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja pada saat pelaksanaannya. Pendidikan pegawai juga akan mempengaruhi reflektivitas dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk tingkat pendidikan pegawai Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka kebanyakan memang lulusan perguruan tinggi. Namun, untuk bidang ilmu kepariwisataan masih minim dan kurang dari 10 %.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sarana penunjang bagi keberhasilan dari suatu proses yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan pariwisata di Majalengka. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam mengembangkan Pariwisata alam Majalengka. Namun untuk pengembangan Pariwisata Alam Majalengka, sarana dan prasarana yang disediakan masih sangat minim sehingga mengurangi ketertarikan masyarakat untuk datang.

D. KESIMPULAN

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka untuk memaksimalkan potensi alam Majalengka memang belum maksimal dilakukan. Sarana prasarana dan sumber daya alam yang bertanggung jawab mengelola pesona pariwisata alam Majalengka belum secara maksimal dan belum konsisten diupayakan. Selanjutnya, penyelarasan dan pengintegrasian pesona alam Majalengka dengan budaya local juga belum dilakukan secara maksimal. Hal ini berdampak terhadap jumlah pengunjung yang datang ke Majalengka belum banyak dari masyarakat diluar wilayah Majalengka dan wilayah III Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Magdalia. (2013). "Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa". Prosiding The 5 thn ICSSIS; "Ethnicity and Globalization", di Yogyakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013.
- Dwiyanto, Agus . 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan. Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu. (2012). "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Maharani, Dewi. (2019) Manajemen Publik: Sebuah Analisis Kritis Dan Praktis Dalam perspektif Ilmu Manajemen Kinerja & Pelayanan Publik. Serang: CV. A.A. Rizki Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005) Manajemen sumber daya manusia Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Moehiono. (2010). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Surabaya: Ghalia. Indonesia.
- Pasolong, Harbani. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta.
- Permana, C. E. R. (2010). Kearifan lokal masyarakat baduy dalam mitigasi bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Rakib, M. (2017). Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai penunjang daya tarik wisata. Jurnal Kepariwisata. 1(2), pp.54–69.

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Wawan Risnawan

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

ABSTRAK

Proses pengembangan kebijakan pariwisata dapat terindikasi dari keberadaan pengelolaan pariwisata budaya saat ini. Hal ini dapat dilihat apakah keberadaan objek wisata budaya yang ada saat ini dapat menghasilkan sumber pendapatan daerah atau hanya sebagai beban daerah dalam pengembangannya. Adanya potensi daerah ini secara mendasar tetap bertujuan untuk dapat menghasilkan PAD daerah itu sendiri sehingga dapat menciptakan stabilitas anggaran. Keberadaan ini perlu ada pengelolaan yang baik oleh pemerintah sebagai pemilik wilayah dari pariwisata budaya itu sendiri. Konsep good corporate governance merupakan konsep yang dikembangkan di beberapa negara dimana dalam penerapannya kepada pihak pengelola pariwisata budaya daerah harus memperhatikan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance antara lain : Fairness (kewajaran), Disclosure dan Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Resposibilitas), dan Sustainability. Penerapan ini diharapkan akan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar sehingga terbentuk Community Based Tourism dimana keikutsertaan anggota komunitas kedalam setiap kegiatan pariwisata akan terbentuk dengan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya sehingga tercipta peningkatan perekonomian dalam lingkungan sekitarnya. Produktifnya pengelolaan obyek wisata budaya maka secara otomatis menciptakan pendapatan daerah yang secara signifikan terus berkembang seiring dengan proses pengelolaan itu sendiri.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, PAD, Community Based Tourism*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terus dikembangkan terutama dalam penggalan potensi daerah, presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4% dibandingkan perkiraan realisasi di 2015, atau meningkat 37,8% dari realisasinya di 2015 yang sebesar Rp 623,1 triliun," kata Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan di gedung parlemen, Jumat (16/8/2019). Kondisi ini diharapkan akan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong pembangunan daerahnya tanpa mengurangi pendapatan daerah dari potensi daerah yang di gali pada wilayahnya.

Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu kabupaten di wilayah timur Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sangat memiliki banyak potensi di wilayahnya dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menopang pembangunan daerahnya. Potensi pariwisata merupakan potensi yang sangat besar yang ada di Kabupaten Ciamis terutama Agrowisata dan Wisata Cagar Budaya.

Seiring dengan pemisahan Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis maka secara signifikan akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan kawasan objek wisata Pangandaran merupakan salah satu penyumbang terbesar atas Retribusi Wisata, jika dibandingkan dengan beberapa objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.

Namun demikian dalam perkembangannya, Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan PAD-nya dengan memfokuskan kepada beberapa aspek pembangunan terutama pembangunan pariwisata budaya. Sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Ciamis 2019 - 2024, terdapat beberapa fokus pembangunan pariwisata budaya yang ditargetkan dapat mendorong peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, antara lain meliputi:

- a. Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;
- b. Cipanjalu Desa Bahara di Kecamatan Panjalu;
- c. Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu;
- d. Astana Gede di Kecamatan Kawali;
- e. Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;
- f. Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;
- g. Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari;
- h. Situs Tambaksari di Kecamatan Tambaksari;
- i. Situs Pangcalikan Gunung Padang di Kecamatan Cikoneng;
- j. Situs Jambansari di Kecamatan Ciamis;
- k. Situs Batu Panjang di Kecamatan Sukamantri;
- l. Situs Salawe Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
- m. Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Kecamatan Banjaranyar;
- n. Situs Kawasen di Kecamatan Banjarsari;
- o. Situs Gandoang di Kecamatan Sindangkasih;
- p. Situs Sanghiang Samida di Kecamatan Rajadesa;
- q. Situs Keramat Kuning di Kecamatan Lakbok; dan
- r. Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican.

Asset ini merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD sehingga memerlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah. Namun demikian dari fokus pengembangan wisata budaya di Kabupaten Ciamis ini, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam kondisi nyatanya dengan adanya implementasi anggaran sebelumnya mengenai pembangunan Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis masih belum dapat menciptakan PAD kepada Pemerintah daerah, hal ini disebabkan dari faktor pengelolaannya. Permasalahan inti dalam pengelolaan destinasi wisata budaya tersebut diketahui berdasarkan hasil observasi adalah :

1. Belum adanya regulasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait obyek wisata budaya tersebut, hal ini dapat terlihat dari masih adanya pengelolaan wisata budaya yang sepenuhnya dikelola oleh desa, sehingga peran pemerintah daerah belum secara langsung aktif mengelola pariwisata budaya tersebut. Seperti contohnya situs pariwisata budaya yang secara umum masih dikelola oleh desa sehingga menjadi sumber pendapatan asli desa.
2. Untuk wisata situs Kawasen, masih terkendala dengan belum adanya kesepakatan pembangunan antara pihak pemerintah desa dengan pihak perhutani sehingga dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana menuju akses wisata belum dapat dilakukan pembangunan secara maksimal. Hal ini tentunya memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi dan membuat suatu regulasi agar dapat dilaksanakan pembangunan kawasan wisata sebagaimana yang di harapkan.
3. Pengembangan situs Jambansari, yang merupakan asset sejarah yang menjadi icon pemerintahan Kabupaten Ciamis masih belum digali secara optimal karena secara de facto masih dikelola oleh Yayasan Jambansari, sehingga pemerintah secara nyata belum dapat memperoleh hasil agar dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.
4. Situs keramat kuning di kecamatan Lakbok, masih belum dapat dikembangkan dengan baik karena belum adanya kesepakatan dalam pengelolaan dengan desa di wilayah situs

tersebut, sehingga pemerintah daerah masih sebatas memberikan batuan dana kepada desa dalam pengembangan situs tersebut dimana pada akhirnya belum dapat dijadikan sumber pendapatan bagi Kabupaten Ciamis.

5. Beberapa pengelola situs terkadang meragukan kepada pemerintah daerah dalam hal pembagian hasil yang adil dan transparan, sehingga mereka terkadang menutup diri untuk diserahkan pengelolaannya secara langsung kepada pemerintah daerah.

Kondisi seperti ini merupakan suatu keadaan yang dihadapi pemerintah daerah dan perlu disikapi secara nyata agar mendapatkan sumber pemasukan untuk daerah yang tidak selalu harus mengeluarkan anggaran rutin untuk pengembangan destinasi tersebut pada setiap tahun anggaran. Dengan demikian dalam situasi ini pemerintah daerah perlu melakukan suatu upaya pendekatan melalui regulasi untuk pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata budaya tersebut agar menjadi sumber pendapatan daerah yang rutin.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai dengan judul : **“Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Sebagai fokus dalam kajian ini maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut : “Bagaimana Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis”.

C. METODE KAJIAN

Dalam kajian ini yang digunakan adalah metode kajian deskriptif. Adapun yang menjadi fokus kajian adalah siapa saja yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis dengan unit analisis yang digunakan pada kajian ini adalah lembaga dan individu dimana lembaga yang dijadikan unit analisis pada kajian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Juru Pelihara Situs Pariwisata Budaya serta Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat yang berada dalam lingkup pariwisata budaya tersebut,

Lokasi dalam kajian ini adalah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Kemudian data dianalisa dan diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait. Sedangkan untuk analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. KONSEP TEORITIS

a. Good Governance

Widodo mengemukakan bahwa Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Kemudian Ganie-Rochman juga mempersepsikan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu pengelolaan organisasi berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. (2001:3)

Dalam penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa disamping pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan negara, tetapi dalam konsep *governance* selain pemerintah juga terdapat sub sytem lain yang terlibat dalam pengelolaan negara yakni masyarakat dan Swasta. Dimana dalam integrasinya semua unsur dari good governance harus mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dengan membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat dan swasta.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara menyeluruh mengartikan bahwa *good governance* adalah sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk penyediaan *barang publik dan pelayanan publik*. Kemudian LAN menekankan bahwa dari segi *functional aspect, governance* dapat dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya. (Widodo; 23-24)

Gerald Meier mengemukakan bahwa *good governance*, yaitu "prinsip mengelola pemerintahan yang berdampak memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem hukum dan pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya akuntabel pada publik, dan dimana mekanisme pasar menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukan keputusan mengenai alokasi sumberdaya" (Abdullah, 2002;69)

Dengan demikian untuk dapat menciptakan *good governance* hendaknya semua unsur didalamnya saling berintegrasi. Adapun unsur-unsur dari *good governance* menurut Sedarmayanti (2004;38) antara lain :

- a. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
 - b. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
 - c. Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
- b. Good Corporate Governance

Isu Good Corporate Governance yang pada awalnya dikesampingkan, sekarang menjadi isu utama dalam penerapannya di pemerintahan. Tjager dkk. dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa perkembangan konsep Corporate Governance bersamaan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika (1840), oleh karena itu pembicaraan tentang Corporate Governance tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri, (Sedarmayanti, 2007;52).

Adapun Corporate Governance menurut Cadbury Report dalam Sedarmayanti (2007;53) adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka.

Kemudian Sutendi dalam bukunya Good Corporate Governance (2012;13) mengemukakan bahwa Corporate Governance adalah pengelolaan perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, pemberi pinjaman, remunerasi, deviden, berjalannya pasar modal, berjalannya pasar tenaga kerja manajerial dan market for corporate control, melainkan bertambah dengan : informasi, transparansi, accountability, keterbukaan dan kerahasiaan, code of conduct, jaminan hukum dan masih akan bertambah lagi dengan investor (individu dan institusi), hak-hak para pemegang saham, pemberi pinjaman, perangkat hukum dan jaminan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance merupakan suatu sistem, proses serta seperangkat peraturan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dalam suatu organisasi dalam menjaga serta mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan strategi korporasi dan memastikan kesalahan yang terjadi dapat secepatnya diperbaiki.

- c. Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam menumbuhkan suatu kesadaran mengenai pentingnya corporate governance maka dikembangkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dapat diterapkan secara signifikan berdasarkan situasi dan kondisi budaya dan tradisi dalam masing-masing wilayah atau negara.

Adapun prinsip-prinsip good corporate governance sebagaimana yang tertuang dalam Sedarmayanti dalam bukunya Good Governance dan Good Corporate Governance (2007;55) antara lain :

1. Fairness (kewajaran)
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan oleh orang dalam.
2. Disclosure dan Transparency (Transparansi)
Hak pemegang saham yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta pemegang saham.
3. Accountability (Akuntabilitas)
Tanggungjawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.
4. Responsibility (Resposibilitas)
Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Sutendi (2012;10) mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam corporate governance yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Transparansi
Pengediaan informasi dan pengungkapan yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan sehingga investor dapat melakukan pengambilan keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya.
2. Accountability (dapat dipertanggungjawabkan)
Pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggungjawab pada pengoprasian setiap harinya dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.
3. Fairness (kejujuran)
Dalam prinsip ini perusahaan lebih menekankan kejujuran terutama untuk pemegang saham minoritas, investor memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya,
4. Sustainability
Ketika perusahaan negara eksis dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, mereka harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil dan menjadi warga corporate yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.

d. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata pada prinsipnya berbicara tentang pemahaman dari sumberdaya pengelola pariwisata tersebut. Suatu destinasi wisata akan berkembang tergantung dari mindset pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya Pitana dan Diarta (2009) mengemukakan bahwa “Pengelolaan pariwisata dimulai dari pengelolaan sumberdaya pariwisata sebagai pengelola”.

Pengelolaan sumberdaya pada suatu pariwisata merupakan suatu upaya mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomis, dan stabilitas lingkungan maka para pengelola wajib melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya dengan efektif dan efisien. Penggunaan Manajemen sumberdaya merupakan upaya untuk menjamin perlindungan pada ekosistem dan degradasi kualitas suatu lingkungan pariwisata.

Dalam pengelolaan pariwisata, Community Based Tourism merupakan suatu paradigma baru dalam pengelolaan pariwisata. Suansri (2003:12) mengemukakan terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan Community Based Tourism. Prinsip tersebut adalah :

- a. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek
- c. Mengembangkan kebanggaan komunitas
- d. Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan
- f. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal
- g. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
- h. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas
- j. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan.

Prinsip-prinsip tersebut apabila disimpulkan dapat menjadi beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan Community Based Tourism, yaitu : *pertama*, prinsip keikutsertaan anggota komunitas kedalam setiap kegiatan pariwisata. *Kedua*, prinsip menjaga lingkungan hidup. *Ketiga* adalah prinsip kelestarian budaya, serta *Keempat* adalah prinsip pemerataan pendapatan.

e. Penghasilan Asli Daerah

Dalam lingkup kabupaten/kota, penbiayaan kegiatan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang utama dalam pengembangan daerah. Disamping dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah juga harus memiliki sumber pendapatan itu sendiri yakni berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi atas pos penerimaan daerah dari sektor pajak, dimana sektor pajak ini terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Halim (2007) PAD merupakan penerimaan daerah atas perolehan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut, pungutan tersebut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan dengan peraturan *perundang-undangan* yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keberadaan PAD ini pada prinsipnya adalah bertujuan untuk memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah itu sendiri serta sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah itu sendiri agar hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar perolehan dana PAD daerah maka akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

f. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah

Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah.

E. PEMBAHASAN

Sejak terjadinya pemisahan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis, maka secara signifikan Kabupaten Ciamis kehilangan Pendapatan Asli daerah atas pengelolaan objek wisata pantai pangandaran. Keadaan seperti ini merupakan suatu keadaan yang dapat mempengaruhi keberadaan stabilitas anggaran di Kabupaten Ciamis. Salah satu indikasi memisahkan diri beberapa kecamatan di Pangandaran karena adanya pengelolaan objek wisata yang kurang optimal sehingga pembangunan di wilayah pangandaran terbelang lamban padahal potensi PAD yang dikelola oleh Kabupaten Ciamis tergolong cukup besar.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran maka memacu Kabupaten Ciamis untuk memperbaiki stabilitas anggarannya secara bertahap dan mulai mengembangkan segenap potensi yang ada saat ini di Kabupaten Ciamis. Adapun salah satunya adalah pengembangan potensi Pariwisata Budaya. Potensi yang terkandung dalam pariwisata budaya ini merupakan potensi yang cukup dapat dikembangkan dan dapat dibanggakan apabila nantinya dikelola dengan baik sebagai upaya untuk peningkatan PAD di Kabupaten Ciamis.

Pemerintah daerah sebagai organisasi daerah yang memiliki wilayah pengelolaan daerah yang besar, untuk dapat menciptakan PAD yang besar maka perlu adanya unsur pengelolaan yang baik khususnya pengelolaan pariwisata budaya oleh Pemerintah daerah itu sendiri. Prinsip Good Corporate Governance merupakan salah satu konsep yang saat ini dikembangkan dalam pengelolaan Pariwisata daerah, dimana melalui prinsip-prinsipnya, pemerintah dapat bersama-sama dengan masyarakat dan pihak swasta mengembangkan potensi pariwisata budaya tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli daerah.

Untuk dapat mengembangkan potensi pariwisata budaya tersebut maka pemerintah harus mulai menerapkan Prinsip pengelolaan pariwisata budaya Kabupaten Ciamis berdasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance yang tertuang dalam kebijakan daerah tentang pengelolaan pariwisata budaya sehingga dapat memperhatikan kepentingan para stakeholder dan kemanfaatan pariwisata budaya tersebut secara nyata dapat dirasakan kemanfaatannya oleh pemerintah daerah sebagai sumber PAD, investor dan masyarakat, sehingga secara otomatis dapat menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip good governance yang dituangkan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Ciamis antara lain : Prinsip Kewajaran atau Fairness , Prinsip Disclosure dan Transparency (Transparansi), Prinsip Accountability (Akuntabilitas), Prinsip Responsibility (Resposibilitas), dan Prinsip Sustainability.

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa dalam prinsip pengelolaan pariwisata budaya Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah belum dilaksanakan secara maksimal seperti halnya dalam Prinsip Kewajaran atau Fairness dimana belum ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang keadilan dan kewajaran terhadap stakeholder yang berada dalam lingkup pariwisata budaya pada wilayah keberadaan objek wisata budaya tersebut terutama dalam bagi hasil dan pengelolaan pembangunan obyek wisata tersebut. Hal ini masih terdapat beberapa pengelolaan wisata budaya yang sepenuhnya dikelola oleh desa, hal ini mengakibatkan pengembangan objek wisata berjalan lamban. Terkadang keterbukaan informasi atas pengelolaan tersebut kurang berperan baik sehingga sulit bagi para investor untuk dapat ikut berperan serta mengembangkan obyek wisata budaya tersebut, sehingga dengan kondisi ini akan memacu perkembangan ekonomi masyarakat sekitar berjalan stagnan.

Untuk penerapan Prinsip Disclosure dan Transparency (Transparansi) dimana hak para pemegang asset yang harus diberi informasi benar dan tepat mengenai pengelolaan objek wisata

budaya tersebut tidak berjalan dan tidak terinformasikan secara baik sehingga keputusan terkadang berjalan sepihak hanya oleh pengelola saja baik oleh desa maupun organisasi kepemudaan saja seperti karang taruna sehingga pemda tidak dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar dan memperoleh bagian pendapatan atas pengelolaan tersebut. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi merupakan hal sulit di dilakukan sehingga sulit mengukur kinerja pengelola dan pemilik wilayah serta para investor.

Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas) artinya tanggungjawab pemerintah daerah hampir tidak ada sehingga pengawasan tidak berjalan efektif karena keterbatasan kekuasaan dalam dalam pengelolaan sehingga tidak terjadi keseimbangan kekuasaan antara pemerintah sebagai pemilik asset, Investor sebagai penanam modal dalam wilayah obyek wisata budaya tersebut, dan pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah, hal ini mengakibatkan merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan para pemilik investasi dalam wilayah ojek wisata budaya tersebut tidak berjalan dengan baik.

Prinsip *Responsibility* (Resposibilitas) yaitu peran pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan wilayah belum ditetapkan dalam sebuah kebijakan pengelolaan sehingga secara hukum sulit untuk melakukan pengembangan secara intensif sehingga mendorong terciptanya pengembangan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi kerakyatan sebatas hanya memberikan bantuan-bantuan sosial dan bantuan pembangunan saja tanpa memiliki peran memberikan kebijakan untuk pengembangann hal tersebut.

Mengenai penerapan Prinsip *Sustainability* yaitu pengelolaan objek wisata budaya tersebut eksis dan menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang belum bisa terwujud secara baik karena tidak adanya ketetapan retribusi wisata yang di tarik pada objek wisata budaya tersebut tapi masih kebanyakan dikelola oleh desa atau organisasi kepemudaan maka Pemerintah daerah belum dapat menarik PAD dan melakukan bagi hasil pendapatan secara maksimal serta memberikan kepuasan pegawai dalam pekerjaannya dan masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya hal ini akan berdampak pada sulit terwujudnya *Community Based Tourism* di lingkungan sekitar objek wisata budaya tersebut.

Dengan demikian maka setelah penulis melakukan pendalaman ternyata secara general pemerintah daerah belum menerapkan pengembangan kebijakan pariwisata di Kabupaten Ciamis karena belum adanya kebijakan yang secara utuh yang mengatur pengelolaan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan dari paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis dapat menciptakan sumber pendapatan daerah berupa PAD, belum terimplementasikan secara baik mengingat belum adanya kebijakan yang mengcover para stakeholders untuk pengelolaan pariwisata budaya tersebut sehingga sulit untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta munculnya para investor yang menanamkan modal usahanya di sekitar lokasi objek wisata tersebut.

Disamping kemanfaatan peningkatan perekonomian daerah, juga dengan pengelolaan yang tersebut belum dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga stabilitas anggaran masih perlu pengkajian dan dipenuhi dari sektor-sektor lain serta kelestarian lingkungan yang ada belum dapat dikelola dengan baik agar stabilitas ekosistem yang ada dalam lingkup objek wisata tersebut dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kasman. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Adrian, Sutendi. 2012, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andhi
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project.
- Widodo, joko. 2001. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Reff. Online :

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816144904-4-92552/daerah-dapat-jatah-anggaran-rp-8588-t-di-2020> (diunduh hari Sabtu, 11 Januari 2020)
2. <https://media.neliti.com/media/publications/86720-ID-pengelolaan-desa-wisata-dalam-perspektif.pdf> (diunggah, Sabtu, 11 Januari)

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**SINERGITAS PROGRAM DESA DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ASTANA GEDE
KAWALI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Alfi Sauqi Juhriati¹, Fuji Ulya Fadhilah²

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail :alfisauqi35@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, pariwisata merupakan sektor yang cukup berperan dalam hal peningkatan pendapatan negara. Pariwisata apabila dikembangkan secara baik dan terencana akan mempercepat proses pembangunan. Salah satu wilayah yang memiliki aneka ragam sumber daya baik alam maupun budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Kabupaten Ciamis, potensi yang dapat dimanfaatkan seperti halnya objek wisata alam, budaya, maupun sejarah yang tidak kalah indah dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dalam upaya pengembangan pariwisata harus melibatkan peran dari semua sektor baik itu pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Pada sektor pemerintah diperlukan sinergitas program antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas program belum dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana sinergitas program desa dan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Astana Gede Kawali Ciamis, apa saja hambatan serta apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana data didapatkan melalui teknik studi literatur, dan juga studi lapangan dengan melalui observasi serta wawancara. Sumber data dari penelitian ini berasal dari informan serta dokumen dan buku-buku lain yang mendukung. Informan berasal dari perangkat desa kawali, kepala UPTD Pariwisata Kawali, serta petugas pemelihara objek wisata Astana Gede. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam hal pengembangan objek Astana Gede Kawali belum dapat menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga sinergitas program belum dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci : *Pariwisata, Astana Gede Kawali, Sinergitas*

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini di Indonesia, pariwisata menjadi aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara berusaha untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang ada untuk menarik wisatawan berkunjung ke negaranya. Pariwisata di Indonesia sendiri merupakan sektor yang cepat berkembang dan dianggap sebagai salah satu sektor pendapatan yang dapat di perhitungkan demi kemajuan ekonomi negara. Pariwisata apabila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat mempercepat proses pembangunan. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Salah satu wilayah yang memiliki aneka ragam sumber daya baik alam maupun budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Kabupaten Ciamis, potensi yang dapat dimanfaatkan seperti halnya objek wisata alam, budaya, maupun sejarah yang tidak kalah indah dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dalam tujuan untuk

mengembangkan potensi pariwisata yang ada, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata yang diturunkan pada Dinas Pariwisata pada masing-masing kabupaten/kota tentunya perlu mengatur kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung untuk terwujudnya hal tersebut. Kebijakan pengembangan pariwisata oleh pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan kesesuaian (sinergitas) antar *stakeholder* yang berwenang dalam hal pengembangan pariwisata di suatu daerah.

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi mengacu pada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas yang baik dapat diukur dari 2 aspek, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai suatu kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan dan yang berorientasi pada kegiatan dimana seseorang menerima stimuli rangsangan. Adapun indikator dari komunikasi adalah komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa adanya alat bantu komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung artinya dalam proses komunikasi memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Komunikasi tidak langsung umumnya menggunakan media perantara sebagai penghantar pesan atau informasi agar sampai ke komunikan atau penerima pesan.

2. Koordinasi

Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas yang baik demi mendukung kelancaran komunikasi. Koordinasi yang baik dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide baru. Adapun indikator dari koordinasi menurut Handyaningrat (1989:80) adalah komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan.

Dalam upaya pengembangan pariwisata, selain dibutuhkan sinergitas program antara satu instansi dengan instansi pemerintah yang lainnya, pemerintah juga berperan untuk memegang mekanisme kontrol dalam kebijakan pariwisata. Caranya adalah dengan regulasi yang merupakan suatu usaha dari instansi (mis : pemerintah) yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, sinergitas program desa dan program pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Astana Gede Kawali belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kepemilikan asset Astana Gede bukan milik desa berdasarkan sertifikat tanah lingkungan Astana Gede melainkan milik Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Desa Kawali hanya sebatas kepemilikan wilayah dikarenakan Astana Gede berada di wilayah Desa Kawali. Hal ini membatasi ruang gerak Pemerintah Desa Kawali untuk ikut memajukan wisata Astana Gede, sehingga Pemerintah Desa Kawali menginginkan untuk dikembalikannya asset Astana Gede kepada Pemerintah Desa Kawali.
2. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yaitu mengenai pembagian pendapatan/retribusi, Pemerintah Desa Kawali mengharapkan ada kemajuan yang signifikan dari Objek Wisata Astana Gede. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum.
3. Dari tahun ke tahun dalam perkembangannya, kendala yang dihadapi utamanya adalah mengenai kurangnya pengunjung dari objek wisata Astana Gede. Hal tersebut dikarenakan

memudarnya ketertarikan masyarakat saat ini terhadap hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan sejarah. Selain itu, kurangnya pengunjung dikarenakan kurang tepatnya strategi promosi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Sinergitas Program Desa dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis. Pengertian penelitian deskriptif menurut Nazir (2014 : 54) yaitu:

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu Sinergitas Program Desa dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini hanya ada satu variabel, yakni mengenai Sinergitas.

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi mengacu pada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik. Sehingga sinergitas yang baik berkaitan dengan Program Desa dan Program Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata Astana Gede Kawali dapat terjadi dari 2 cara yaitu:

1. Komunikasi, dengan indikatornya :
 - a. Komunikasi Langsung
 - b. Komunikasi Tidak Langsung
2. Koordinasi, dengan indikatornya menurut Handyaningrat (1989 : 80)
 - a. Terjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Kawali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam program pengembangan Objek Wisata Kawali Ciamis.
 - b. Adanya kesadaran mengenai pentingnya koordinasi, baik dari pihak Pemerintah Desa Kawali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam program pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Ciamis.
 - c. Kompetensi partisipan, dalam hal ini diperlukan kompetensi yang baik dari pihak Pemerintah Desa Kawali dan juga dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam program pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Ciamis.
 - d. Adanya Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi antara pihak Pemerintah Desa Kawali dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam program pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Ciamis.
 - e. Kontinuitas perencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawali dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam program pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Ciamis.

Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan Kepala Desa Kawali dan Perangkatnya, dengan Juru Pelihara Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis, Kepala UPTD Pariwisata Wilayah Kawali Kabupaten Ciamis, serta para pengunjung Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis.

2. Data Sekunder

Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Sinergitas Program Desa dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali, foto-foto dokumentasi, data-data terkait informasi Situs Astana Gede Kawali, buku-buku literatur, serta bahan kepustakaan.

Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Informan

Peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Kawali
- b. Kepala UPTD Pariwisata Wilayah Kawali Kabupaten Ciamis
- c. Juru Pelihara Situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis
- d. Pengunjung Situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis

2. Dokumen

Adapun dokumen yang dipakai peneliti yaitu tulisan atau catatan transkrip, buku, artikel, majalah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan Sinergitas Program Desa dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis serta data-data yang terkait dengan fokus penelitian.

Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

- a. Studi Literatur, yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Studi Dokumentasi, yang dimana dokumen diperoleh dari Desa Kawali, UPTD Kawali, serta dokumen lainnya.

2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan, meneliti, dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Observasi
- b. Wawancara

Adapun proses dalam analisis data kualitatif yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Pendapat Sugiyono (2016 : 245) bahwa “Dalam penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dimana analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian”.

2. Analisis data di lapangan

Dalam analisis data di lapangan menggunakan Model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2016 : 246) yakni :

“Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel”.

Lokasi yang digunakan oleh Peneliti adalah di Kabupaten Ciamis, khususnya :

1. Kantor Kepala Desa Kawali
2. UPTD Pariwisata Astana Gede Kawali
3. Objek Wisata Astana Gede Kawali

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2019.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menghasilkan hubungan yang sinergi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, karena pada dasarnya, sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik (berdiri sendiri) tanpa adanya koordinasi. Komunikasi merupakan cara yang efektif untuk digunakan dalam pertukaran informasi.

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa kawali dengan pemerintah daerah kabupaten ciamis melalui UPTD Pariwisata Kawali dijalankan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung secara tatap muka dan tanpa perantara terjadi ketika akan diadakannya suatu acara ataupun saat tengah berlangsungnya acara di Objek Wisata Astana Gede Kawali Ciamis. Karena pada saat tersebut biasanya kedua belah pihak diundang untuk hadir. Selain itu, UPTD Pariwisata selalu menjalankan komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah desa kawali karena dirasa pemerintah desa kawali juga mempunyai hak untuk dilibatkan, dimana lokasi Astana Gede berada di wilayah desa kawali.

Komunikasi tidak langsung antara pemerintah desa kawali dengan pemerintah daerah juga terjalin dengan cukup baik. Misalnya ketika ada pohon tumbang di sekitar objek wisata Astana Gede, pemerintah desa dengan sigap langsung berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah dengan melalui telepon. Pemerintah desa kawali juga berfungsi sebagai narahubung masyarakat kepada pemerintah daerah untuk segera mengatasi pohon tumbang tersebut.

Koordinasi mengenai program sendiri, pemerintah daerah dinilai tidak dapat menepati janji saat kesepakatan pembagian retribusi. Dimana pemerintah daerah berkomitmen untuk memajukan Astana Gede menjadi lebih baik, namun hingga saat ini pemerintah desa tidak melihat hasil yang signifikan melainkan hanya dari aspek pengelolaan seperti kebersihan, penataan dan lain-lain. Sedangkan aspek lain yang berkaitan dengan pembangunan ataupun promosi dengan tujuan penambahan angka kunjungan wisatawan tidak terlaksana sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai suatu tujuan antara dua pihak atau lebih, tentu saja selalu ditemukan hambatan-hambatan, adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sinergitas program Desa dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Komitmen

Pada awalnya, pengelolaan Astana Gede sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Kawali namun karena pada saat itu desa kesulitan dari segi anggaran, maka diadakanlah kesepakatan dimana hasilnya adalah asset Astana Gede dipindah tangankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Kemudian diadakanlah musyawarah dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan Astana Gede lebih baik, selain itu juga didapat kesepakatan pembagian retribusi yaitu 80% untuk pemerintah daerah dan 20% untuk pemerintah desa Kawali. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah desa kawali menilai bahwa Astana Gede tidak mengalami kemajuan yang signifikan seperti yang diharapkan. Maka dinilai pihak pemerintah daerah kurang serius dalam komitmennya untuk mengembangkan Astana Gede. Namun di sisi lain, Pemerintah Desa juga dianggap kurang berkomitmen dalam mengembangkan objek wisata Astana Gede kawali hanya karena terbatasnya ruang gerak Desa, sehingga selalu menunggu instruksi dari Pemerintah Daerah dalam mengelola situs Astana Gede Kawali.

2. Kesulitan Menarik Pengunjung/Wisatawan

Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, pengunjung objek wisata Astana Gede Kawali dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya komitmen dari

pemerintah daerah dalam melakukan promosi. Menurut pemerintah desa kawali, objek wisata Astana Gede seharusnya memiliki ‘nilai jual’ yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Pemerintah desa juga tidak mempunyai inisiatif untuk memberi gagasan mengenai bagaimana agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Padahal, kewenangan wilayah dari pemerintah desa bisa saja menjadi ‘senjata’ yang cukup untuk mempromosikan Astana Gede. Misalnya Astana Gede sebagai situs warisan budaya diupayakan untuk menjadi pembelajaran sejarah bagi para siswa SD ataupun TK, dimana pemerintah desa bisa saja menjadi fasilitator akan hal tersebut disamping pemerintah daerah melakukan upaya promosi ke luar wilayah desa kawali.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam sinergitas Program Desa Kawali dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. *Membangun Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah*

Komunikasi serta koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan sinergitas, dengan adanya koordinasi dan komunikasi maka suatu tujuan akan lebih mudah tercapai secara efektif dan efisien, dalam hal ini tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Kawali dan Pemerintah Daerah adalah dalam hal pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis. Koordinasi dan komunikasi disini bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah saja, namun sebaliknya Pemerintah Daerah juga harus membangun komunikasi dan koordinasi pada Pemerintah Desa Kawali.

2. *Membangun Kios di Sekitar Objek Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis*

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawali dalam rangka pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis adalah dengan membangun kios-kios kecil, tepatnya lima kios kecil di sekitar objek wisata tersebut. Salah satu tujuannya adalah agar objek wisata tersebut bisa ramai oleh pengunjung dengan disedikannya kios makanan serta souvenir khas daerah Kawali, selain itu tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat daerah kawali sehingga menciptakan *multi player effect* bagi para pengusaha kerajinan tangan dan makanan di wilayah Desa Kawali.

D. KESIMPULAN& SARAN

a. Kesimpulan

1. Sinergitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kawali dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali dilakukan melalui 2 cara yaitu komunikasi serta koordinasi, namun keduanya masih belum dapat terlaksana dengan baik. Pihak Pemerintah dinilai belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan Astana Gede, tetapi di sisi lain, pemerintah desa juga tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan Astana Gede.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sinergitas program desa dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali diantaranya adalah kurangnya komitmen dalam pengembangan objek wisata Astana Gede Kawali terutama dari Pemerintah Daerah yang merupakan pemilik aset Astana Gede Kawali tersebut. Hambatan selanjutnya ialah kesulitan dalam menarik pengunjung sehingga berpengaruh terhadap PAD, dan adanya hambatan ini diakibatkan karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam sinergitas Program Desa Kawali dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Astana Gede Kawali, dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah dengan membangun komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, selain itu Pemerintah Desa Kawali juga

membangun kios-kios kecil untuk mendukung keberadaan Objek Wisata Astana Gede kawali Kabupaten Ciamis.

b. **Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa Kawali meningkatkan sinergitas dengan melaksanakan dua hal penting yakni koordinasi dan komunikasi, dengan begitu tujuan untuk mengembangkan Objek Wisata Astana Gede Kawali akan tercapai dengan baik.
2. Pemerintah Daerah seyogianya agar lebih konsisten dalam menepati hal-hal yang sudah disepakati dalam mengembangkan Objek Wisata Astana Gede Kawali, selain itu dalam segi promosi sebaiknya dioptimalkan melalui media online. Pemerintah Daerah juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan acara-acara yang lebih intens.
3. Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan promosi melalui media online yang sudah berkembang pada masyarakat secara luas dengan lebih kreatif. Selain itu, Pemerintah Desa juga diharapkan dapat mengadakan program dimana setiap hari Sabtu para siswa diajak untuk mengunjungi situs Astana Gede Kawali. Karena selain dapat digunakan sebagai media bermain sambil belajar di alam, juga dapat mengenalkan objek wisata Astana Gede sebagai warisan budaya kepada para siswa khususnya yang ada di Daerah Kawali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dinata dan Pitana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Handyaningrat. 1989. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT Gunung Agung
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, Triana. 2014. Sinergitas Stakeholder Dalam Inovasi daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, vol 2, no 4, 2014, pp. 641-647.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataa
<http://desakawali.blogspot.com/?m=1> (Diakses pada tanggal 1 Desember 2019)

**KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA
SITU LENGKONG DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU
KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Ranny Agustriani¹, Hikmah Fitri²

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: rannyagustriani08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan objek wisata Situ Lengkong Panjalu. Situ Lengkong Panjalu merupakan salah satu aset pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis yang terletak di Desa Panjalu. Apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik keberadaannya diprediksi akan menjadi obyek wisata lengkap yang terdiri dari wisata religi, wisata sejarah, wisata alam dan bahkan wisata rekreasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran koordinasi kelembagaan dalam Pengelolaan Situ Lengkong Panjalu, mengetahui hambatan-hambatan koordinasi yang terjadi dalam pengelolaan Situ Lengkong, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Situ Lengkong Panjalu. Penelitian ini menitikberatkan pada koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Desa Panjalu. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan Dimensi dan Indikator Koordinasi menurut George .R. Terry dalam Handyaningrat (1989:80). Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data didapatkan melalui teknik studi literatur, dan juga studi lapangan melalui observasi serta wawancara. Sumber data dari penelitian ini berasal dari informan serta dokumen dan buku-buku lain yang mendukung. Informan berasal dari Kepala Desa Panjalu, perangkat desa Panjalu, koordinator pengelola obyek wisata Situ Lengkong Panjalu, pedagang dan pengunjung Situ Lengkong Panjalu. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, terdapat kurangnya koordinasi antara pemerintah desa Panjalu dengan Pemerintah daerah kabupaten Ciamis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa seringkali ada kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan salah satu pihak saja terutama berkaitan dengan kebijakan bagi hasil penjualan tiket / retribusi yang dianggap merugikan bagi pemerintah Desa Panjalu. Hal ini yang menjadikan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan dan pembangunan di obyek wisata Situ Lengkong ini tidak maksimal.

Kata Kunci : *Koordinasi, Pengelolaan, Situ Lengkong Panjalu.*

A. PENDAHULUAN

Obyek wisata Situ Lengkong yang terletak di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu merupakan salah satu kekayaan daerah yang patut untuk dikembangkan dan diberdayakan. Selain mengandung unsur keindahan alam yang luar biasa terdapat juga nilai sejarah yaitu adanya makam dari salah satu tokoh penyebaran agama islam di Jawa. Obyek Wisata Situ Lengkong ini berpengaruh terhadap beberapa bidang seperti peningkatan ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat yang bisa menjadi keuntungan dan kebanggaan dari masyarakat Panjalu ini.

Situ Lengkong menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, pengelolaan harus didukung dengan berbagai kebijakan agar obyek wisata ini terus berkembang. Potensi obyek wisata ini tidak akan berkembang apabila tidak ada koordinasi dalam pengelolaan maupun pengembangan daerah wisata ini. Dalam hal ini pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong dititik beratkan kepada Pemerintah Desa Panjalu dan Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pariwisata.

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Secara singkat, koordinasi adalah suatu proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu hal.

Menurut G.R Terry dalam Handayani (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

1. Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi

Koordinasi penting melibatkan tiga unsur yaitu informasi, komunikasi dan teknologi. Komunikasi sangat penting dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Begitu pula teknologi yang berperan penting dalam komunikasi di era saat ini mempengaruhi komunikasi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara efisien.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Peran pemimpin sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut. Pengetahuan SDM juga diperlukan, SDM yang memiliki kemampuan baik dalam hal teknis di lapangan maupun dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain.

3. Kompetensi Partisipan

Koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Meliputi keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan terdiri dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Komitmen bukan hanya bersifat loyalitas pasif tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif. Pelaksanaan sistem insentif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan.

5. Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik (*Feedback*) terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya atau disebut *coordination by feedback*. *Feedback* dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari koordinasi yang sudah berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong Panjalu belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kebijakan pembagian hasil retribusi tiket obyek wisata Situ Lengkong dengan persentase 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Desa Panjalu yang dianggap tidak menguntungkan untuk Pemerintah Desa Panjalu. Dimana 10% yang didapat itu dibagi lagi yaitu 6% untuk pemerataan desa dan 4% untuk desa Panjalu. Dengan persentase seperti itu dianggap tidak sebanding dimana pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong yang dititikberatkan kepada pemerintah Desa Panjalu.
2. Pemerintah Desa Panjalu telah mengajukan keberatan agar pembagian hasil retribusi tiket obyek wisata Situ Lengkong dengan persentase 60% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan 40% untuk Pemerintah Desa Panjalu. Namun sampai saat ini belum ada feedback dan tanggapan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.
3. Kesadaran masing-masing instansi untuk melaksanakan tanggung jawab dalam hal pengelolaan masing kurang. Salah satu contohnya kebersihan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan belum berjalan maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul : “**Koordinasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis**”

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut **Erickson** dan **Susan (Sugiyono, 2013 : 16)** menyatakan “metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail”

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai koordinasi dengan dimensi dan indikator sebagai berikut :

1. Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi
 - a. ada tidaknya informasi
 - b. ada tidaknya alur informasi
 - c. tidaknya teknologi informasi.
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a. ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat.
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. ada tidaknya sanksi apabila tidak ada koordinasi, dan
 - e. ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. ada tidaknya *adjustment, improvement*, dan koreksi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan koordinasi.

Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan Kepala Desa Panjalu, Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan), Koordinator Pengelola Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu, Pedagang , dan Pengunjung Obyek Wisata Situ Lengkong.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Situ Lengkong Panjalu, foto-foto dokumentasi, data-data terkait informasi Situ Lengkong Panjalu, buku-buku literatur, serta bahan kepustakaan.

Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder adalah sebagai berikut:

3. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang pelaksanaan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong Panjalu

Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Panjalu.
 - b. Perangkat Desa Panjalu Kabupaten Ciamis (Sekretaris Desa & Kasi Pemerintahan).
 - c. Koordinator Pengelola Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis.
 - d. Pedagang di Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis.
 - e. Pengunjung Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis.
4. Dokumen

Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, adapun dokumen yang dipakai peneliti yaitu tulisan atau catatan transkrip, buku, artikel, majalah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

5. Studi Kepustakaan
- a. Studi Literatur, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Studi Dokumentasi, dokumen yang disajikan oleh peneliti berupa informasi-informasi terkait untuk memperkuat atau membuktikan deskripsi yang penulis sampaikan. Dokumen diperoleh dari Desa Panjalu, Koordinator Pengelola Obyek Wisata Situ Lengkong, serta dokumen lainnya.
6. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan, meneliti, dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara:
- a. Observasi
Observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan sumber informasi / informan.

Adapun proses dalam analisis data kualitatif yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Pendapat Sugiyono (2016 : 245) bahwa “Dalam penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dimana analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian”.

2. Analisis data di lapangan

Dalam analisis data di lapangan menggunakan Model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2016 : 246) yakni :

“Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel”.

Lokasi yang digunakan oleh Peneliti adalah di Kabupaten Ciamis, khususnya :

3. Kantor Kepala Desa Panjalu
4. Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019.

C. PEMBAHASAN

Koordinasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong

1. Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi

Dalam koordinasi komponen informasi, komunikasi dan teknologi sangat penting, dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi media komunikasi yang lebih memudahkan dalam berkomunikasi secara efisien.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, kami mendapati pengelolaan obyek wisata situ lengkong, pemerintah Desa Panjalu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Namun, koordinasi yang dilakukan masih kurang. Dalam pengelolaan obyek wisata, sistem pengelolaan dibagi menjadi 3:

- 1) Kebersihan dipegang oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebersihan, namun kurang berjalan maksimal. Dalam hal akses jalan transportasi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja namun masih ada keluhan misal kurangnya rambu-rambu, kurangnya penerangan jalan dan infrastruktur yang harus lebih diperbaiki lagi.
- 2) Keamanan dipegang oleh pihak pengelola setempat. Terdiri dari Karang Taruna sebagai sub unit yang juga dimanfaatkan dalam bentuk paguyuban, sebagai pengelola karcis masuk, tiket dan juga bekerja sama dengan pengelola motor boat serta pengelola dayung / perahu.
- 3) Pengawasan secara keseluruhan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa berfungsi untuk mengawasi jalannya pengelolaan secara keseluruhan dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan Situ Lengkong, seperti pembuatan kirmir (tembok pembatas antara situ dan jalan), peningkatan fasilitas obyek wisata (perahu yang memakai kanopi, pengembangan wisata religi dan rekreasi), serta berkontribusi dalam kegiatan adat nyangku yang cukup menarik para wisatawan.

Dengan keterlibatan beberapa pihak seringkali terjadi mis komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak pengelola. Pemerintah Desa Panjalu juga belum memiliki *website*, padahal adanya website justru akan mempermudah koordinasi juga sebagai media promosi obyek wisata Situ Lengkong sehingga berpotensi lebih dikenal di Indonesia.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kepala institusi berperan penting dalam melakukan koordinasi dalam hal iniperan Kepala Desa dan Bupati dalam melakukan koordinasi sangat penting. Pemerintah Desa Panjalu sangat antusias dan mendukung terhadap kegiatan-kegiatan / program di Situ Lengkong.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Desa Panjalu, berikut beberapa program yang berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong diantaranya :

- 1) Peningkatan obyek wisata, baik wisata religi maupun wisata rekreasi (Sarana prasarana kenyamanan, adanya jalan untuk ke nusa / makam, perahunya memakai kanopi).
- 2) Kirmir (Tembok pembatas antara jalan dan situ).
- 3) Kegiatan adat istiadat Nyangku yang diakui pemerintah. Dimana kegiatan ini didanai melalui bantuan desa, bantuan pemda, dan para donatur. Adanya kegiatan adat Nyangku ini berdampak terhadap jumlah wisatawan yang meningkat.

Selain itu, banyak masukan dari masyarakat yang menginginkan adanya rencana penambahan obyek seperti wisata air (kolam renang / pemandian), dibuka sarana edukasi, rencana adanya delman. Yang bertujuan untuk membentuk Situ Lengkong menjadi obyek wisata yang lengkap baik wisata religi, wisata alam, wisata sejarah juga wisata rekreasi.

3. *Kompetensi Partisipan*

Partisipan dalam proses koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dimana partisipan adalah seorang pejabat berwenang atau pimpinan institusi namun selama ini tidak ada waktu / kalender pemerintahan yang disepakati bersama untuk proses koordinasi rutin. Selain itu, sangat penting melibatkan orang yang berkompeten di bidang pariwisata sehingga dengan kompetensi yang memadai pengelolaan obyek wisata bisa berjalan dengan baik.

4. *Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Desa Panjalu, ada satu hal yang tidak disepakati oleh pemerintah Desa Panjalu yaitu Pemerintah Kabupaten Ciamis menerapkan Pembagian hasil retribusi tiket obyek wisata Situ Lengkong dengan persentase 90 % untuk Pemerintah Daerah dan 10 % untuk Pemerintah Desa. Hal ini dianggap merugikan untuk pemerintah desa karena 10 % yang didapat pun dibagi lagi yaitu 6 % untuk pemerataan desa dan 4 % untuk desa Panjalu.

Yang selanjutnya yaitu Komitmen, dalam melakukan koordinasi penting agar masing-masing instansi memiliki komitmen ingin melakukan pengelolaan untuk memajukan obyek wisata dan kepentingan umum. Tidak hanya semata-mata mengutamakan keuntungan instansi masing-masing.

Kemudian berkaitan dengan insentif koordinasi, Selama ini dalam pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum ditetapkan adanya insentif koordinasi.

5. *Kontinuitas Perencanaan*

Ketidaksepakatan pemerintah Desa Panjalu terhadap Persentase pembagian hasil retribusi tiket Obyek Wisata Situ Lengkong yang sampai saat ini belum menemukan titik terang penyelesaiannya dan belum ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Artinya *feedback* (umpan balik) dalam pelaksanaan koordinasi tidak berjalan dengan baik.

Hambatan-Hambatan Koordinasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong

1. Kurangnya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Terdapat pembagian tugas dalam pengelolaan Situ Lengkong, Pemerintah Desa Panjalu diberikan wewenang untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan obyek wisata misalnya pembangunan kirmir, kegiatan adat nyangku, dsb serta ada tim pengelola khusus yang melibatkan karang taruna berkaitan dengan keamanan, pengelolaan perahu dsb. Juga diberikan wewenang untuk mengawasi pengelolaan Situ Lengkong secara keseluruhan. Kemudian hal-hal yang ditanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi pengelolaan kebersihan oleh dinas kebersihan, akses jalan melalui dinas perhubungan tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal.

2. Tidak adanya kesepakatan dan kesamaan persepsi.

Selanjutnya bahwa salah satu yang menghambat koordinasi kelembagaan adalah adanya ketidaksepakatan. Misalnya mengenai penerapan pembagian hasil retribusi tiket dengan persentase 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Panjalu yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut menyebabkan dalam pelaksanaan pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong tidak dapat berjalan dengan maksimal.

3. Tidak adanya *Feedback (Umpan Balik)* dalam koordinasi yang dilakukan.

Feedback diperlukan untuk melihat respon dari semua pihak yang terlibat. Umpan balik dilakukan untuk memastikan bahwa koordinasi yang dilakukan dapat dipahami dengan benar dan diterima. Ketika ada hal tidak disepakati yaitu mengenai pembagian hasil retribusi tiket Pemerintah Desa Panjalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut. Namun, tidak ada *feedback* dan solusi yang diberikan.

4. Minimnya komunikasi antar lembaga

Minimnya komunikasi antar lembaga mengakibatkan terhambatnya program-program pengembangan obyek wisata. Selain itu, dinamika serta permasalahan yang dihadapi lembaga pemerintah saat ini sangat beragam, salah satunya adalah masih seringnya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya relasi antar lembaga negara.

Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Koordinasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong

1. Melakukan Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Kepala Desa Panjalu memberikan motivasi dan teguran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Situ Lengkong yang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata membutuhkan koordinasi yang intens dan semua pihak harus sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini, Kepala Desa berkoordinasi dengan berbagai pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun dari pihak masyarakat yang turut terlibat dalam pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu.

2. Menyampaikan Aspirasi / Masukan dari Masyarakat

Pemerintah Desa Panjalu berusaha untuk menyampaikan ide-ide dari masyarakatnya kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong. Misalnya ide ingin membuat wisata rekreasi dengan adanya kolam renang/pemandian serta gazebo untuk sarana edukasi. Sehingga nantinya Situ Lengkong ini akan menjadi salah satu obyek wisata yang lengkap yaitu wisata alam, wisata ziarah, wisata sejarah dan wisata rekreasi.

3. Menyampaikan Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kepada Pemerintah Daerah.

Penyampaian kekurangan atau hambatan penting dilakukan, hal ini untuk menjamin pelaksanaan di lapangan sesuai dengan yang diharapkan juga melihat berbagai celah kekurangan yang masih ada, sehingga bisa dilakukan monitoring dan evaluasi.

Yang menjadi hambatan dalam hal pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong ini Pemerintah Desa Panjalu kurang menyetujui terhadap penerapan Pembagian Hasil Retribusi Tiket dengan persentase 90% untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% untuk Pemerintah Desa Panjalu. Pemerintah Desa Panjalu menyampaikan keberatannya dengan mengajukan agar Pembagian Hasil Retribusi Tiket tersebut persentasenya dirubah menjadi 60% untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis dan 40% untuk Pemerintah Desa Panjalu. Namun, sampai saat ini belum ada *feedback* atau umpan balik yang diberikan baik berupa kepastian maupun solusinya.

4. Meningkatkan Komunikasi dengan Memanfaatkan Teknologi

Peranan teknologi sangat dibutuhkan di bidang pemerintahan sekalipun. Misalnya dengan membuat website, menggunakan e-mail / whatsapp untuk mengirim dan menyampaikan laporan, dsb. Dalam hal ini, Pemerintah Desa cukup baik dalam memanfaatkan teknologi bahkan dengan mudahnya dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong dapat dikirim melalui e-mail, whatsapp, dsb. Namun, Pemerintah Desa belum memiliki website, tetapi, pihak Pemerintah Desa mengusahakan tahun depan sudah ada website, karena memerlukan izin-izin yang saat ini masih diurus. Sehingga, nantinya masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun mengenai Desa Panjalu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Koordinasi kelembagaan yang terjadi dalam proses manajemen / pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong Panjalu sudah berjalan namun belum efektif dan optimal.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam koordinasi kelembagaan berkaitan dengan kurangnya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak adanya

kesepakatan dan kesamaan persepsi, tidak adanya *feedback* (umpan balik) dalam koordinasi yang dilakukan, serta minimnya komunikasi antar lembaga.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Panjalu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya Melakukan Koordinasi dengan Berbagai Pihak, Menyampaikan Aspirasi / Masukan dari Masyarakat, Menyampaikan Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu kepada Pemerintah Daerah, serta Meningkatkan Komunikasi dengan Memanfaatkan Teknologi.

b. Saran

1. Koordinasi kelembagaan sebaiknya dilakukan dengan lebih mengutamakan kepentingan pariwisata dengan tetap mengampu kompetensi pengelola di semua aspek yaitu aspek kelestarian, pengembangan pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya secara terintegrasi.
2. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan, perlu melibatkan pihak-pihak yang ahli di bidang pengelolaan pariwisata, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat berdasarkan kajian para ahli di bidangnya.
3. Pemerintah Desa Panjalu dan Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu mengevaluasi hal-hal yang dianggap menghambat, baik dalam koordinasi kelembagaan maupun dalam pengelolaan obyek wisata Situ Lengkong sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan S.P, Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan S.P, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/9218>
<https://media.neliti.com/media/publications/242937-koordinasi-antar-instansi-terkait-dalam-2914b104.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/95281-ID-faktor-faktor-dalam-koordinasi-lintas-se.pdf>
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pitana I Gede, I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- Siagian, Sondang P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siddiq, S. S., & Kusharyadi, J. (2015). Pengelolaan Objek Wisata Sejarah Kerajaan Siak di Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(2).
- Soewarno Handyaningrat. 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung
- Soewarno Handyaningrat. 1983. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Sugiyono Prof. Dr. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, F. (2016). Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau.
- Steers, R.M and Porter, R. W. 1983. *Motivation and Work Behavior*. New York: Mc Graw Hill
- Syafiie Kencana Inu, Welasari. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76-86.

Zahara, O. (2014). *Analisis Pengelolaan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau).

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SAYANG KAAK OLEH BUMDES HANJUANG DI DESA HANDAPHERANG KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Irfan Adhitiya R¹, Agung Gumilar²

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: irfanadhitiya18@gmail.com

ABSTRAK

Objek wisata sayang kaak merupakan objek wisata baru yang ada di Kabupaten Ciamis yang baru berdiri pada april 2017, yang memiliki keunggulan dari sisi pemandangan alam karna berada di tebing sungai citandui. Di era zaman yang sebrba mudah dan ditunjang dengan adanya media sosial membuat objek wisata ini sangat stretegis untuk dikembangkan dan diharapkan mampu mengenalkan daerah Kabupaten Ciamis. Dengan adanya objek wisata, suatu daerah akan lebih cepat dikenal karena memiliki keunggulan dibandingkan daerah yang tidak memiliki objek wisara. diharapkan dengan adanya objek wisata sayang kaak ini mampu mampu menaikan pamor wisata yang ada di kabupaten Ciamis. Adanya media promosi dan pengelolaan merupakan kunci sukses kemajuan objek wisata namun, permasalahan yang dihadapi dalam proses mempromosikan objek wisata sayang kaak ini masih belum mendapatkan strategi yang pas, karna masih banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan diantaranya dari aspek sosial dan norma-norma yang berlaku di sekitaran objek wisata sayang kaak. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui pengembangan objek wisata sayang kaak serta untuk mengetahui strategi yang cocok untuk diterapkan dalam proses pengembangan objek wisata sayang kaak ini agar lebih dikenal oleh banyak orang. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif analisis yang mana dalam fokus kajian penelitian tersebut yaitu mengenai strategi pengembangan objek wisata sayang kaak di Desa Handap Herang Kabupaten Ciamis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan sumber data primer yang secara langsung didapatkan dari lapangan dengan informan berjumlah 8 orang dan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen atau buku, bahan kepustakaan, data tabel dan bagan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari dan memperoleh dari berbagai literatur dan studi lapangan dengan memperoleh data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif yang mana dalam kegiatan penelitian kualitatif ini diperoleh data langsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. pengembangan wisata sayang kaak oleh BUMDes Hanjuang Desa Handapherang dalam tahap promosinya belum menggunakan sosial media atau website dikarenakan pengelola ingin wisatawan mengetahui objek wisata secara nyata tanpa berekspektasi melalui sosial media yang dituangkan karena di dalam sosial media terkadang tidak sesuai apa yang terlihat di objek wisata wisata yang sebenarnya. Hambatan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata sayang kaak adanya kepengurusan ganda yang diakibatkan karena objek wisata bertempat di tanah milik perseorangan dan pemilik tanah tersebut mendirikan objek wisata tanpa melalui adanya koordinasi dengan pengelola. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan memperluas akses kerjasama dengan investor untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Untuk pengembangan objek wisata ini agar lebih berkembang dengan demikian pengelola objek wisata mengadakan suatu program study banding dengan objek wisata yang sudah maju.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Pengelolaan, Wisata.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu daerah agar dapat dikenal oleh masyarakat luar daerah, selain itu pengembangan di sektor pariwisata juga dapat menaikkan pendapatan asli daerah tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis keadaan lokasi obyek wisata tersebut, dan juga untuk mengetahui strategi dalam mengembangkan obyek pariwisata tersebut guna mempromosikan obyek wisata dan daerah tersebut.

Untuk pengenalan objek wisata diperlukan strategi yang efektif dan efisien supaya mudah dikenal oleh masyarakat luas sehingga dengan adanya objek wisata ini dapat mengangkat nama daerah tersebut. Namun dalam proses pengenalannya ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pemasaran objek wisata ini diantaranya kurangnya sarana dan prasarana seperti akses jalan, ketersediaan toilet. Untuk itu diadakannya penelitian ini bermaksud untuk mencari strategi yang tepat untuk di terapkan pada proses pengembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan belum memunyai strategi khusus untuk mengembangkan wisata tersebut, pengelola hanya mengandalkan pemberian informasi dari pengunjung melalui mulut ke mulut saja. Se jauh ini pengelolaan wisata sayang kaak yang terletak di Desa Handap Herang Kecamatan Cijunjung belum memiliki media sosial untuk mempromosikan objek wisata sayang kaak ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut , peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan objek wisata sayang kaak di Desa Handap Herang oleh BUMDes Hanjuang Kecamatan Cijeungjing?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan yang timbul dalam pengembangan objek wisata Sayang Kaak di Desa Handap Herang oleh BUMDes Hanjuang Kecamatan Cijeungjing.
3. Apa saja upaya yang dilakukan pengelola wisata dalam upaya mengembangkan objek wisata Sayang Kaak di Desa Handap Herang oleh BUMDes Hanjuang Kecamatan Cijeungjing.

B. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai pengembangan wisata sayang kaak.

2. Fokus Kajian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu strategi pengembangan objek wisata sayang kaak di Desa Handap Herang Kabupaten Ciamis. Untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini, maka penulis akan memaparkan fokus penelitian, sedangkan aspek penelitiannya adalah analisis SWOT yang akan menggambarkan pengembangan objek wisata dengan kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang suatu organisasi serta meminimalkan kelemahan ancamanya. (Sedarmayanti,2018: 108-110) yaitu sebagai berikut :

1. Strengths (Kekuatan)
2. Weakness (Kelemahan)
3. Opportunities (Peluang)
4. Threats (Ancaman)

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian data dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika pariwisata terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menetapkan untuk sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari :

- a. Kepala desa handap herang
- b. 2 anggota BUMDES Hanjuang
- c. 2 Pengelola wisata sayang kaak
- d. 3 orang Pengunjung objek wisata sayang kaak

Sedangkan untuk sumber data skunder dalam penelitian ini berasal dari literatur, dokumen atau buku, bahan kepustakaan, data tabel dan bagan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilaksanakan dengan cara :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara berstruktur (berpedoman)
 - c. Dokumentasi

b. Teknik Pengolahan/ Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Idrus (2009:147), mengatakan bahwa "Pengelolaan data merupakan proses penelitian kualitatif akan melibatkan data verbal yang banyak, yang harus ditranskripkan, objek-objek, situasi, ataupun peristiwa dengan aktor yang sama atau bahkan sama sekali berbeda".

Analisis data menurut Miles dan Huberman (Idrus, 2013:148-151) model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu penelitian untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis SWOT yang akan menjelaskan bagaimana kekuatan apa yang dimiliki, kelemahan, ancaman serta peluang yang akan dihasilkan. Analisis SWOT ini juga dapat menghasilkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai macam kekurangan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan peluang begitupun dengan yang Melakukan analisis dengan pendekatan SWOT memang memiliki kelebihan dan kelemahannya. Namun setidaknya telah diperoleh gambaran yang membuat seseorang bisa menilai serta memutuskan

langkah-langkah apa yang bisa ia kerjakan di kemudian hari. Jadi dengan kata lain seseorang sudah memiliki kerangka (framework) antisipasi jika suatu saat mengalami masalah atau kendala.

Menurut serdamayanti SWOT analisis diarti sebagai berikut :

1. Streng (kekuatan)

Merupakan sumber daya/kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dalam hal ini saying kaak memiliki kelebihan dibandingkan objek wisata lain karenan sayang kaak ini menjadi objek wisata yang cukup menarik karena menjual sebuah pemandangan yang cocok untuk dijadikan sebagai spot foto yang baik dan instagramable, karna lokasi dari saying kaak ini berda diatas tebing sungai citanduy.

2. Kelemahan (weakness)

Kelemahan merupakan keterbatasan/kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/kapabilitas suatu perusahaan yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pelanggan secara efektif. Kelemahan objek wisata saying kaak ini kurangnya sumber dana dalam menunjang operasional objek wisata sayang kaak, kurangnya fasilitas dilokasi objek wisata sayang kaak

3. Peluang (Opportunity)

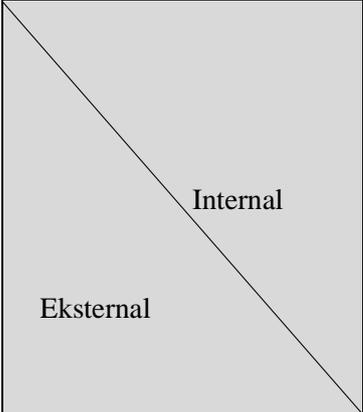
Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Dalam hal ini sayang kaak memiliki peluang Lokasi yang cukup stategis dan mudah dikases oleh kendaraan beroda empat, Sedang dibangunnya salah satu bendungan terbesar di jawa barat yaitu bendungan leuwi keris. Yang akan menambah daya tarik bagi wisatawan. Dan Akan menjadi road map wisata kota ciamis.

4. Ancaman (Threat)

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan, ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang di inginkan. Dalam hal ini sayang kaak memiliki ancaman Tidak adanya keratifitas yang baru akan menjadikan pengunjung bosan dengan keadaan yang itu-itu saja sehingga pengunjung akan beralih pada wisata yang yang lebih menarik, Banyaknya wisata yang baru di ciamis dan Tata letak masih kurang rapih mengakibatkan nilai estetika dari objek wisata sayang kaak berkurang.

Untuk lebih jelas digambarkan dalam tabel matriks analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 4.2
Matrik Analisis SWOT

	<p>Kekuatan (Strenght)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang mudah dijangkau. • Harga tiket masuk tergolong murah karena dikelola oleh pemerintahan daerah. • Adanya dukungan secara penuh dari pemerintahan desa • Adanya lapangan kerja baru bagi masarakat 	<p>Kelemahan (Weaknees)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki strategi pengembangan wisata yang cocok. • Fasilitas kurang terawat dengan baik • Belum memiliki sarana pemasaran objek wisata. • Adanaya kesenjangan antara pengelola lapangan dengan pengelola pendukung
---	---	--

	sekitar objek wisata <ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya pendapatan masyarakat sekitar dari adanya pengembangan wisata 	Keterbatasan dana
Peluang (Opportunity) <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang cukup strategis dan mudah diakses oleh kendaraan beroda empat. • Proses pembangunan bendungan sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Barat yaitu bendungan Leuwikrisakan menambah daya tarik bagi wisatawan. • Akan menjadi road map wisata Kota Ciamis. 	Strategi SO <ul style="list-style-type: none"> • Membuat media promosi yang resmi seperti blog untuk mempermudah wisatawan mengakses informasi yang terkait dengan wisata sayang kaak. • Membuat program strategi pengembangan wisata baik dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. 	Strategi WO <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaikan kegiatan pemasaran (Promosi) wisata baik secara internal ataupun eksternal. • Melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan fasilitas kebutuhan penunjang wisata dan kebutuhan pengunjung objek wisata
Ancaman (Threat) <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya keratifitas yang baru akan menjadikan pengunjung bosan dengan keadaan yang itu-itu saja sehingga pengunjung akan beralih pada wisata yang lebih menarik. • Banyaknya wisata yang baru di Ciamis. • Tata letak masih kurang rapih mengakibatkan nilai estetika dari objek wisata sayang kaak berkurang. 	Strategi ST <ul style="list-style-type: none"> • Pengoptimalan kebutuhan pengunjung dengan memanfaatkan kemampuan pegawai. • Mengoptimalkan kerjasama dengan beberapa instansi terkait sistem bagi hasil yang jelas untuk pengembangan objek wisata. 	Strategi WT <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan City tour untuk mengetahui bagaimana keadaan serta tata cara pengelolaan kota yang dikunjungi dengan membandingkan objek wisata dan kemudian diterapkan strategi yang cocok untuk mengembangkannya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

1. Belum adanya akun media sosial atau pun website resmi objek wisata sayang kaak ini sehingga proses promosi objek wisata ini sedikit lambat. Padahal di era yang sudah canggih seperti pertukaran informasi lebih cepat diakses seperti halnya lewat media sosial. Media sosial dapat dijadikan tempat yang cocok untuk mempromosikan objek wisata sayang kaak ini. Strategi kedepannya diharapkan mampu membuat akun media sosial yang khusus untuk mempromosikan wisata sayang kaak ini.
2. Adanya kepengurusan ganda dalam tubuh objek wisata sayang kaak. Karena wisata sayang kaak ini dibangun di atas tanah milik perseorangan menyebabkan adanya kepengurusan ganda di dalamnya hal ini dapat saja terjadi karena adanya pihak ketiga yang ingin membuat sebuah lokasi foto yang langsung meminta izin pada pemilik lahan tersebut tanpa melalui pengelola objek wisatanya terdahulu. Hal ini menimbulkan adanya permasalahan antara pihak pengelola dengan pihak yang mendirikan lokasi foto di dalam objek wisata sayang kaak ini.
3. Dapat menyerap tenaga kerja bagi warga Desa Handap herang. Dengan adanya objek wisata sayang kaak ini dapat menyerap tenaga kerja terkhusus untuk warga desa Handap herang itu

sendiri, ada yang ikut mengelola objek wisata sayang kaak dan ada juga warga yang ikut mendirikan kios kios dagang di dalam lokasi objek wisata sayang kaak ini.

E. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan objek wisata sayang kaak di Desa Handapherang oleh BUMDes Hanjuang Kecamatan Cijeungjing dalam tahap pengembangan masih cukup sulit dikarenakan objek wisata sayang kaak merupakan objek wisata milik pribadi yang kemudian dikelola oleh BUMDes Hanjuang melalui pembentukan kelompok pengelola wisata sayang kaak.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata sayang kaak adalah terkait kemampuan pengelola dalam menciptakan kreativitas baru dalam menarik minat pengunjung wisata, selain itu terdapat banyak nya daya saing dengan wisata baru yang ada di daerah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pengelola diantaranya melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dan objek wisata lainnya untuk memperkenalkan objek wisata sayang kaak kepada pihak luar.

b. Saran

1. Pengelola sayang kaak sebaiknya mengoptimalkan penggunaan sosial media dalam pengembangan objek wisata. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah para wisatawan dalam mendapatkan informasi tentang objek wisata sayang kaak.
2. Dalam hambatan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata sayang kaak, pengelola sebaiknya melakukan study banding dengan daerah lain yang wisatanya sudah maju dan berkembang supaya pengelola objek wisata sayang kaak mendapatkan ide-ide atau gagasan baru untuk diterapkan dalam pengembangan objek wisata tersebut.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan pengelola tentunya ingin objek wisata sayang kaak maju dan berkembang bersama dengan objek wisata lain, sebaiknya pemerintah Desa dan pengelola lebih terfokus pada perbaikan fasilitas terutama fasilitas jalan dan arah petunjuk jalan supaya wisatawan yang berkunjung tidak kebingungan mencari lokasi objek wisata sayang kaak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim Sumarno. 2012. *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: elearningunesa.
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2018. (Cetakan Ketiga) *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Addin Maulana. 2014. *Strategi Pengembangan Wisata Spiritual Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali*. Jakarta

JURNAL

- Maryam, S., & WARIDIN. (2011). Pendekatan SWOT dalam pengembangan objek wisata kampoeng djowo sekatul kabupaten kendal (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1), 33-44.

KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PROMOSI PARIWISATA CAGAR BUDAYA KARANGKAMULYAN KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Ilham Ahmad Gustiana¹, Ade Kusmayadi²

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: kakang11gustian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi tidak adanya pembinaan dalam hal promosi, kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah dengan swasta dan tidak ada kejelasan hukum dalam pebngelolaan wisata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data primer yang merupakan salah satu informan atau narasumber untuk penelitian ini sebanyak 3 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini yaitu: Reduksi data, Penyajian data, da Verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Kurangnya komunikasi antar dinas atau antar institusi yang mengelola situs karangkamulyan sehingga kolaborasi dan promosi tidak berjalan dengan baik. Hambatannya yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat tentang wisata karangkamulyan. Kurangnya upaya yang dilakukan oleh instansi yang terkait untuk mempromosikan dalam wisata karangkamulyan, adapun kolaborasi yang dilakukan tidak termasuk kedalam wisata karangkamulyan. Masih besarnya ego dari masing-masing intansi dalam mengelola situs wisata, belum terciptanya kordinasi yang intensif antar dinas terkait yang bersifat intensif, pembagian hasil dari pendapatan yang hanya 10% bagi desa, belum adanya pembinaan kelompok sadar wisata menjadi kendala utama dalam promosi situswisata peneliti menyarankan Pihak pemerintah menurunkan ego masing-masing alam hal pengelolaan situswisata, pengeloan dan pengembangan dengan meliibatkan pemerintah desa dan sektor swasta, merencanakan bagi hasil yang sesuai bagi desa agar desa dapat membantu mengembangkan dan mempromosikan situswisata, diadakannya pembinaan kelompok sadar wiasta oleh pemerintah bagi masyarakat agar dapat lebih efektif dalam mempromosikan situs wisata serta menambah penghasilan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Kolaborasi, Promosi, Pariwisata

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis memiliki salah satu potensi wisata untuk dikembangkan, yaitu wisata budaya Karangkamulyan Ciung Wanara. Namun keberadaan tempat wisata tersebut belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah. Wisata budaya Ciung Wanara merupakan situs purbakala budaya tanah Pasundan yang terkait dengan kerajaan Galuh. Objek wisata tersebut berada pada lokasi yang strategis, tepatnya di jalur mudik menuju Jawa Tengah sebagai area untuk beristirahat dengan keindahan alam serta dilengkapi fasilitas masjid, toilet dan tempat jajan.

Berdasarkan teori promosi menurut tjiptono (2008:219) pada akikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapakan kenaikannya angka penjualan.

Perkembangan wisata Karangkamulyan di Kabupaten Ciamis tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan eksternal berupa perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional yang mengharuskan pemerintah lebih bisa meningkatkan wisatawan agar menciptakan peluang besar bagi perekonomian daerah.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata merupakan langkah positif yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Sebagai bentuk implementasi upaya

memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor andalan agar memiliki nilai tambah komoditi sebagai unggulan dalam peningkatan iklim investasi di Daerah Kabupaten Ciamis.

Objek wisata Karangkamulyan sendiri terletak di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Dapat dikatakan bahwa objek wisata Karangkamulyan termasuk dalam kategori pengembangan ekowisata. Obyek tersebut masih menunjukkan kondisi yang alami dan adanya Legenda Ciung Wanara, adanya makam-makam bersejarah, adanya aliran sungai, terdapat batu-batuan dan saat ini telah dipasang sarana penerangan sehingga tidak menyulitkan pengunjung yang masuk ke dalamnya.

Objek Wisata Karangkamulyan merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Dinas tersebut merupakan pihak penyelenggaraan pembinaan dan pelaksana tugas kepariwisataan di Kabupaten Ciamis, yang salah satunya adalah sebagai penyelenggara objek wisata Karangkamulyan dan melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat dalam melaksanakan penyelenggaraan wisata Karangkamulyan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas tercrmin dari indikator – indikator masalah sebagai berikut :

- b. Kurangnya pengunjung objek wisata Karangkamulyan. Hanya pada hari kerja rata-rata 15 orang.
- c. Pada hari libur hanya berkisar rata-rata (50-60 orang)
- d. Tidak adanya kerjasama pemerintah dengan swasta.
- e. Tidak ada kejelasan hukum tentang pengelolaan wisata antara instansi terkait dan desa.
- f. Kurangnya promosi dalam mengenalkan keistimewaan wisata.

Saat ini wisata Karangkmulyan lebih dikenal hanya sebagai tempat peristirahatan (*rest area*) jalur utama Provinsi Jawa Barat, bukan dikenal sebagai tempat wisata sejarah dan budaya di Indonesia. Wisata Karangkamulyan dikunjungi hanya karena letaknya berada di jalur lintas Jawa barat dan Jawa Tengah dan bukan merupakan tujuan utama wisata di Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat memiliki tujuan utama untuk berwisata ke Pantai Pangandaran dan hanya sekedar berhenti serta beristirahat di Karangkamulyan.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana menurut Moleong (2014:11) Metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka.

Penelitian ini difokuskan pada analisis Kolaborasi dan Promosi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis, penelitian ini berfokus pada prinsip dan karakteristik kolaborasi. Untuk itu menurut (Subarsono, 2016:186) diperlukan perhatian terhadap beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiscal, moneter, anggapan dan anggapan sector riil,
2. Pemberdayaan (*empowering*)

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, pemerintah dapat berperan melalui:

- a. Pengurangan hambatan kendala partisipasi masyarakat.
- b. Penyusun program yang lebih memberi kesepakatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendaya gunakan sumberdaya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (*social learning process*)

Adapun aspek kajian untuk mengukur Kolaborasi menurut Linehard terdapat 8 (delapan) karakteristik dalam kolaborasi diantaranya yaitu:

- a) Kerjasama melibatkan setidaknya – setidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta.
- b) Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik compatible dan saling melengkapi.
- c) Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif.
- d) Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan *procurement* atau pelaksanaan tugas tertentu.
- e) Memiliki orientasi jangka panjang
- f) Penyatuan, pemanfaatan dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta.
- g) Berbagi resiko
- h) Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

Data dan sumberdata:

- 1) Data, Menurut Arikunto (2013:161) merumuskan “ data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan”. Adapun yang termasuk data dalam penelitian ini adalah meliputi: Hasil Wawancara, Pengambilan Foto ,dan Data dari dokumen di Desa Karangkamulyan
- 2) Sumber data, Menurut Arikunto (2013:172) “ Sumber penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Yaitu di kantor desa karangkamulyan, situswisata ciung wanara.

Teknik pengumpulan data yaitu data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik analisis data menggunakan teknik Simpulan dan Verifikasi yaitu Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, penulis berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, penulis mencoba mengambil kesimpulan dari data yang didapatnya itu. Pada awalnya simpulan terlihat kabur, tetapi semakin lama akan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kolaborasi Antar Institusi Dalam Promosi Pariwisata Cagar Budaya Karangkamulyan Kabupaten Ciamis.

a). Kondisi Kolaborasi

Dalam pengelolaan situs wisata ciungwanara sendiri terbagi bagi dalam beberapa instansi sebagai bagian yang mengelola tempat tersebut, dan instansi yang terlibat antara lain ; Dinas Pariwisata, Cagar Budaya, Dinas Perhubungan, walaupun situs wisata ciung wanara berada di desa karangkamulyan namun pihak pemerintahan desa tidak terlibat dalam pengelolaan situs wisata tersebut.

Kondisi Kolaborasi untuk situs ciungwanara pada saat ini adalah dimana kondisi yang selalu mengandalkan bagian bagian masing masing, dimana pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pembangunan tidak sejalur pada mestinya.

Desa karangkamulyan menginginkan program A tetapi pemerintah menginginkan program B dimana kesinambungan antara desa dan pemerintah tidak sejalan.

Dalam kondisi seperti diatas harus ada penengah atau media diskusi antara desa karangkamulyan dan pemerintah setempat terkait pengembangan yang ada.

Yang bisa membantu terjadinya kolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dimana Dinas pendukung seperti Dinas pariwisata, Dinas perhubungan, Dinas PUPRDP kurang peduli kepada desa, bahwa desa lah yang menunjang bagaimana masyarakat daerah bergerak untuk memajukan Situs Ciung Wanara.

b). Promosi

Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup publisitas, penjualan perorangan dan periklanan. (Menurut Zimmerer : 2002)

Belum ada kerja sama dengan pihak wisata luar manapun ,adapun promosi yang dilakukan seperti kegiatan tahunan pemukulan goong yang dilakukan 1 tahun sekali dan untuk kegiatan promosi dengan pihak lain sudah dilakukan diantaranya menyediakan lahan untuk kegiatan luar seperti

- a) Kegiatan kontes suara burung
- b) Kegiatan trail yang dilakukan bersama anggota Kodim 0613
- c) Memukul goong perdamaian 1 tahun sekali

Akan tetapi itu tidak mampu meningkatkan pengunjung dengan pesat,

Selain itu juga karna belum adanya inovasi baru dalam situs wisata karangkamulyan membuat tindakan promosi ini terkesan mandeg, dalam arti masyarakat sudah mengenal ciung wanara tapi enggan berkunjung kembali karna sudah mengetahui isi situs wisata, inovasi disini adalah dimana adanya pengembangan yang tidak merubah situs wisata itu sendiri, yaitu dengan adanya inovasi seperti penambahan spot foto atau hal lain yang lebih kearah hal yang di gandrungi remaja.

Dalam hal promosi setiap ada event, tidak bisa menerapkan system kolaborasi yang bersifat intens karna dari observasi yang kami lakukan setiap ada event yang bersifat sementara (trail, atau sebagainya) tidak memiliki dampak lansung terhadap penjualan tiket masuk wisata, dan lagi halaman atau tempat yang di pakai event adalah alun-alun sekitar parkir jadi setiap ada acara dinas perhubungan lah yang mengelola/ memberikan perizinan tersebut.

c). Kolaborasi antar institusi dalam promosi pariwisata cagar budaya karangkamulyan Kabupaten Ciamis

(a). Prinsip Collaborative

Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kesepakatan yang telah di rancang dan di sepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama. Untuk itu diperlukan perhatian terhadap beberapa prinsip, sebagai berikut:

- A. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiscal, moneter, anggapan dan anggapan sector riil.
 - (1) Belum adanya kejelasan hukum yang pasti terkait pengelolaan situs wisata karangkamulyan hal terutama desa dan intansi lainnya
 - (2) Minimnya pembagian hasil dari pendapatan yang hanya 10% hal ini tercantum dalam perbup.
 - (3) Terlebih lagi dalam hal promosi belum terjadinya kerjasama yang terstruktur membuat pengembangan obyek wisata sulit di lakukan, terlebih masing masing intansi memiliki peran memegang sector masing masing, sementara itu pihak desa karangkamulyan sendiri tidak bias mengelola area sekitaran situs karna belum adanya ketetapan hukum yang di buat.
- B. Pemberdayaan (empowering)

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, pemerintah dapat berperan melalui:

- (1) Pengurangan hambatan kendala partisipasi masyarakat. Di Desa karangkamulyan tersendiri terdapat beberapa pelaku usaha ekonomi kreatif yang perlu binaan atau arahan untuk dibentuk menjadi kelompok sadar wisata, karangkamulyan sendiri memiliki galeri rumah kreatif, kampung berseka, dan KTP (karangkamulyan T-shirt) Diharapkan dengan adanya

pembinaan pokdarwis dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitaran karangkamulyan.

(2) Penyusun program yang lebih memberi kesepakatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendaya gunakan sumberdaya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (social learning process). Selama ini program program yang sudah di laksanakan di area wisata ciung wanara beragam mulai dari upacara penabuhan goong, festival adat, trail , dan yang lainnya. Desa juga memiliki program untuk membuat / memperindah area situs ciungwanara namun program program tersebut terbentur oleh kejakan dan belum adanya ketetapan hukum sehingga desa belum bias menggas program tersebut

(b). Karakteristik Colaborativ

Menurut wiyanto (Subarsono, 2016:186) menjeelaskan karaktersitik colaborativ government Maka dari itu penulis memberikan pemaparan dalam dimensi sebagai berikut:

a. Kerjasama melibatkan setidak – tidaknya satu lembaga pemerintahan dan satu lembaga swasta

Pemerintah daerah dalam tingkat dinas berkolaborasi dengan beberapa dinas lainnya terkait dengan pengembangan, pembangunan maupun dalam promosi yang mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan tetapi dalam lingkup dinas belum bekerja sama dengan lembaga swasta dimana dinas pariwisata menginginkan lembaga swasta harus benar benar mengantongi ijin yang teruji, dalam tingkat dinas hanya melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah saja, adapun lembaga lain seperti lembaga keamanan yang mengadakan event – event lain, akan tetapi dalam tingkat pemerintah desa lebih aktif mencari dan melakukan promosi dengan cara branding, seperti halnya KTP (Karangakmulyan T-shirt Production).

b. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik compatible dan saling melengkapi

Dalam lingkup pemerintahan yang berjalan bersama atau berkolaborasi, untuk meningkatkan promosi dalam sektor wisata terdapat beberapa timbal balik yaitu, adanya timbal balik dalam sebuah brand, maupun timbal balik segi parkir dengan dinas perhubungan yang bisa membantu pendapatan asli daerah.

c. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif

Hanya dalam lingkup pemerintahan yang berjalan, tetapi belum adanya koordinasi antara pihak lembaga swasta maupun dengan agen travel yang membantu meningkatkan pengunjung dari dalam maupun dari luar daerah.

d. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan procurement atau pelaksanaan tugas tertentu

Dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup pengelolaan dan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan pendaptan asli daerah sudah dilaksanakan dengan baik, dimana di setiap porsi atau bidang sudah pada tempatnya.

e. Memiliki orientasi jangka panjang

Dalam aspek pengelolaan wisata yang dilakukan untuk jangaka panjang sangat baik, dari hal kecil sedikit pun, akan tetapi dalam aspek investasi tidak bisa leluasa, di karenakan ada peraturan bupati atau Undang – Undang No 13 tahun 2017 tentang pembagian retribusi pajak daerah.

f. Penyatuan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta

Dalam aspek penyatuan pemerintah daerah dengan desa maupun masyarakat tidak terlalu menyatu karena masyrakat masih mempunyai pikiran dimana masyarakat tidak diuntungkan dengan adanya wisata karangkamulyan, sebab dari segi pembangunan untuk homestay dan lain lain belum ada yang langsung berkenaan dengan masyarakat, dari segi pemanfaatan pun kurangnya berkolaborasi

dengan pihak swasta, maupun sumber daya alam yang ada di karangkamulyan terkunci tidak bisa di gunakan oleh masyarakat luas karena sudah masuk kedalam undang – undang kementerian pariwisata.

d). Kendala

Kendala terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. SDM (Sumberdaya Manusia)
2. Modal atau dana pembangunan
3. Komitmen pemerintah daerah
4. Kejelasan hukum dalam pembagian retribusi wisata

Dalam sumber daya manusia sangat penting dimana sumberdaya manusia adalah penggerak dan pelaksana kegiatan keseluruhan mulai dari awal sampai akhir kegiatan untuk meningkatkan Situs Ciung Wanara kurangnya SDM yang mumpuni membuat pengembangan dan promosi situs wisata mengalami kendala

Dan yang kedua adalah modal dimana, modal adalah pondasi kedua untuk meningkatkan pembangunan Situs, akan tetapi apabila berkaca dari kolaborasi pada saat ini, malah tidak sinkron dimana apabila turun dana bantuan seperti pohon yang berakar panjang sampai ke ujung, dana anggaran yang dipecah membuat banyak rencana anggaran, seharusnya rencana anggaran hanya satu dan itu di pertanggung jawabkan seluruh pengelola.

Komitmen pemerintah daerah yaitu setiap instansi yang berada di kawasan situs pengelolaan masih memiliki ego masing-masing dalam pengembangan maupun promosi situs wisata ciung wanara karangkamulyaan, karna itu pihak lain seperti desa segan untuk ikut mengembangkan daerah wisata tersebut.

Kejelasan hukum juga di perlukan dalam hal pengelolaan agar setiap bagian memiliki peranserta untuk turut membangun kesadaran masyarakat dalam pariwisata terutama dalam konteks desa karna situs tersebut berada dalam lingkup daerah desa jadi alangkah baiknya desa juga terlibat dalam pengembangan situs wisata ciung wanara.

e). Upaya pengembangan promosi

Melihat dari kendala yang ada, upaya pengembangan promosi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. SDM (Sumber Daya Manusia)

1. Sudah adanya kelompok sadar wisata (pokdarwis) dari desa , seperti adanya rumah produksi yang bisa bekerjasama agar bisa menarik pendapatan masyarakat sekitar dan pemerintah.
2. Diadakannya Kuliah Kerja Nyata Tematik dalam pengembangan situs wisata Karangkamulyan.

B. Modal atau Dana Pembangunan

1. Bekerjasama dengan swasta (sponsor) dalam mengadakan event atau acara lainnya.
2. Merencanakan penambahan anggaran untuk mengembangkan dan mempromosikan situs wisata Karangkamulyan.

C. Komitmen Kepala Daerah

1. Menynergikan program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan wisata
2. Adanya komunikasi atau kordinasi yang di lakukan antar instansi ketika ada event atau acara pagelaran di area situs wisata karangkamulyan.

D. Kejelasan Hukum DAN Pembagian Retribusi Wisata

E. Belum ada upaya secara khusus untuk menangani permasalahan terkait kejelasan pembagian retribusi pariwisata antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Desa hanya menerima dan memanfaatkan anggaran berapapun jumlahnya yang dikembalikan

oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Desa meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kebijakan terkait pembagian retribusi wisata.

D. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kondisi kolaborasi dalam segi promosi antar instansi yang terjadi dalam lingkungan situs wisata Ciungwanara Karangkamulyan Kabupaten Ciamis saat ini belum berjalan secara optimal, berdasarkan dari, masih besarnya ego dari masing-masing instansi dalam mengelola situs wisata, belum terciptanya koordinasi yang intensif antar dinas terkait yang bersifat intensif, pembagian hasil dari pendapatan yang hanya 10% bagi desa, belum adanya pembinaan kelompok sadar wisata yang dapat meningkatkan pengembangan serta promosi situs wisata.
2. Kendala yang di hadapi dalam kolaborasi promosi situs wisata Karangkamulyan antara lain Pemberdayaan SDM dan modal masih menjadi kendala utama dan lalu komitmen dari pemerintah daerah dan kurangnya ketetapan hukum khususnya terkait pembagian retribusi wisata turut membuat pengembangan promosi menjadi terhambat.
3. Sudah adanya kelompok sadar wisata (pokdarwis) dari desa, Bekerjasama dengan swasta (sponsor) dalam mengadakan event atau acara lainnya, Adanya komunikasi atau koordinasi yang di lakukan antar instansi ketika ada event atau acara pagelaran di area situs wisata Karangkamulyan. Dan Pemerintah Desa berupaya untuk mengoptimalkan jumlah anggaran yang dikembalikan Pemerintah daerah, serta meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kebijakan tentang pembagian retribusi wisata.

Kendala yang di hadapi dalam kolaborasi promosi situs wisata Karangkamulyan antara lain:

1. Pemberdayaan SDM
2. Modal masih menjadi kendala utama
3. Komitmen dari pemerintah daerah dan kurangnya ketetapan hukum turut membuat pengembangan promosi menjadi terhambat.

Upaya-upaya dalam menghadapi hambatan yang sudah di lakukan diantaranya:

1. Sudah adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dari desa, bekerjasama dengan swasta (sponsor) dalam mengadakan event atau acara lainnya.
2. Adanya komunikasi atau koordinasi yang di lakukan antar instansi ketika ada event atau acara pagelaran di area situs wisata Karangkamulyan.
3. Setiap instansi yang terkait sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan.

b. Saran

Dari Hasil penelitian yang sudah di lakukan maka penyusun memiliki beberapa saran terkait kolaborasi promosi antar instansi di kawasan situs wisata Karangkamulyan yaitu :

1. Pihak pemerintah sebaiknya meminimalisir ego masing-masing dan serius untuk fokus dalam mengelola dan mengembangkan situs Karangkamulyan
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan jalinan bekerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata.
3. Perlu adanya evaluasi kebijakan tentang pembagian retribusi wisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. (2019). Strategi Promosi Pariwisata Di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Promosi Pariwisata Pasca Gempa Bumi di Pulau Lombok Tahun 2018). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 7(1), 25-33.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution dalam Buku. Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia* (1988).
- Dwiyanto Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik :Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif (Edisi ke-33, cetakan ke-1)." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset* (2014).
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Subarsono Agustinus. 2016. *Kebijakan publik dan pemerintahan Kolaboratif Isu – isu Kontemporer*. Yogyakarta : GAVA MEDIA
- Suryadana, Liga, and Vanny Octavia. "Pengantar pemasaran pariwisata." *Bandung: Alfabeta* (2015).
- Tjiptono, Fandy, Gregorius Chandra, and Dadi Adriana. "Pemasaran strategik." *Yogyakarta: Andi* (2008).
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. "Edisi ke 3." *Bandung: Alfabeta* (2017). [Online] <http://karangkamulyan.com/index.php/first> Diakses pada tanggal 25 November 2019 [Online] <https://dispar.ciamiskab.go.id/> Diakses pada tanggal 26 November 2019.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Shela Novianti Gumilang¹, Dinda Ardiawatie², Dhea Nadilla³

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: ¹shelagumilang@gmail.com, ²dinda.ardiawati@gmail.com

³dheanadilla@yahoo.com

ABSTRAK

Pengembangan kepariwisataan daerah perlu dibenahi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat, swasta dan pemerintah, sekaligus mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan. Di Kabupaten Ciamis sendiri ada beberapa permasalahan dalam pengembangan kepariwisataan, diantaranya: 1) Kurangnya sumber daya manusia; 2) Kurangnya minat dan promosi masyarakat; 3) Kurangnya kerjasama sektor publik. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan fokus kajian yang digunakan dalam penelitian ini digunakan teori dari Grindle (dalam Agustino, 2016) yang terdiri dari dua dimensi yakni; Content of Policy dan Context of Policy. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dan observasi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Selanjutnya analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik non statistik dimana data atau hasil penelitian di deskripsikan atau digambarkan berdasarkan pendapat atau opini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum optimal karena masih ditemukan hambatan-hambatan seperti; kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta, kurangnya sumberdaya yang mempunyai, kurangnya daya tarik wisata, kurangnya sosialisasi dan promosi wisata, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjadi masyarakat yang sadar wisata.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan di Indonesia, khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan oleh pemerintah sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami kritis (Kusuma wardhani, 2016).

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh stakeholders, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara menerus. Cronin (dalam Kristiana, 2016) menyebutkan bahwa konsep pembangunan pariwisata terkonsep pada dua hal, yakni: sebagai aktifitas ekonomi di satusisi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis seyogyanya adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan setiap unsur dan sektor yang ada dalam tatanan daerah. Setiap unsur dan sektor bahu membahu secara sinergis untuk dapat

mengupayakan model pembangunan kepariwisataan yang sesuai dan tepat dengan kultur dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 paragraf 3 pasal 7 dijelaskan mengenai pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis pada intinya bahwa pengembangan wisata harus dilakukan melalui mekanisme penataan Kawasan dan jalur pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, serta penataan kelestarian dan mutu lingkungan hidup (Pratama, 2017).

Dalam perkembangannya, pariwisata Kabupaten Ciamis juga dihadapkan pada permintaan terhadap produk wisata yang bermutu sebagai akibat dari meningkatnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan, serta persaingan dengan destinasi pariwisata lain. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Menyadari akan keseluruhan makna isu-isu tersebut, diantaranya:

- 1) Kurangnya sumberdaya manusia dalam membantu mengembangkan pariwisata Kabupaten Ciamis.
- 2) Kurangnya minat masyarakat serta promosi dalam pengembangan pariwisata sehingga menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis.
- 3) Kurangnya kerjasama sektor publik, antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan daerah perlu dibenahi sehingga dapat memberikan manfaatekonomi yang maksimal bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah (Pendapatan Asli Daerah), sekaligus juga mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, menjamin kelestarian lingkungan alam, kelestarian sosial budaya dan adat istiadat masyarakat.

Adapun hal-hal yang ingin diketahui dari penelitian ini ialah terkait berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis?
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis?
- 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis?

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1) Desain Penelitian

Jenis metode yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono (2017:8) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian analisis deskriptif, karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Melalui metode ini penelitian tersebut penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Parawisata Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Parawisata oleh Dinas Parawisata Kabupaten Ciamis.

2) Fokus Kajian

Keberhasilan suatu impelentasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy* (Grindle dalam Agustino, 2016).

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :
 - a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
 - b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
 - c. *Extem of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 - d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
 - e. *Program Implementor* (pelaksanaan program)
 - f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah :
 - a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-
 - b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim
 - c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

3) Sumber Data

Bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumberprimer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat informan atau lewat dokumen.

Sumber data dalam penelitian di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

- 1) Data Primer
Menurut Sugiyono (2017) data primer ialah sumber data yang langsung diberikan kepada peneliti dalam rangka untuk pengumpulan data. Adapun data primer dalam penelitian ini ialah Kepala Bidang Destinasi.
- 2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia baik itu yang berasal dari literatur atau dokumen, bahan kepustakaan, data table dan bagan (Suwarno:2006). Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis.

4) Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untu itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Merekduksi dara berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- 2) Penyajian data
Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- 3) Verifikasi atau penyimpulan data
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis Berdasarkan Dimensi *Content of Policy*

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis setidaknya terdapat 4 hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni;

- 1) Kebijakan yang berkaitan dengan destinasi pariwisata Kabupaten Ciamis.
- 2) Kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran pariwisata di Kabupaten Ciamis.
- 3) Kebijakan yang berkaitan dengan industruke pariwisata, serta
- 4) Kebijakan yang berkaitan dengan lembaga kepariwisataan di Kabupaten Ciamis.

Adapun indikator dari isi kebijakan menurut Teori Implementasi Grindle adalah sebagai berikut;

1) *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Dalam sebuah kebijakan ataupun Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis sasaran utamanya adalah publik. Di mana diharapkan adanya kerjasama ataupun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Apabila kolaborasi diantara ketiga unsur tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya bisa dipastikan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis pun dapat berjalan dengan baik.

Secara umum kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis ini adalah masyarakat. Hal tersebut tentu saja berkenaan dengan tujuan utama adanya pengembangan pariwisata di mana apabila pariwisata di Kabupaten Ciamis dapat berkembang bukan tidak mungkin akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis yang mana manfaatnya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

2) *Type of Benefit* (TipeManfaat)

Tipe manfaat dari adanya progam pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis adalah bertujuan untuk;

- 1) Melakukan pembaharuan terhadap beberapa potensi seperti daya tarik wisata, amenitas, aksesibilitas, SDM pemasaran, dan investasi.
- 2) MenyusunVisi dan Misi pembangunan pariwisata.
- 3) Melakukan analisis pembangunan produk dan pasar.
- 4) Menyusun strategi pengembangan produk dan pasar wisata.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, beberapa tujuan di atas sudah dijalankan oleh Dispar Kabupaten Ciamis. Adapun manfaat-manfaat diatas diharapkan dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Sehingga kedepannya pariwisata Kabupaten Ciamis dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Ciamis sendiri melainkan masyarakat luas di luar masyarakat Ciamis. Karena pada kenyatannya masih banyak potensi-potensi wisata di Kabupaten Ciamis yang belum diketahui masyarakat luas.

3) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Dalam suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya target yang hendak atau ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis ini untuk para penyelenggaraan atau pelaksana program ialah dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi wisatawan yang berkunjung keberbagai tempat pariwisata di Kabupaten Ciamis. Dengan adanya daya tarik terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata di Kabupaten Ciamis dapat membantu adanya perubahan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis menjadi lebih diminati oleh masyarakat luas. Munculnya daya tarik dari para wisatawan adalah modal utama pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini, di mana ketika ada wisatawan yang berkunjung bisa dengan mudah

membagikan pengalamannya berkunjung ke tempat wisata Kabupaten Ciamis di laman internet dengan komentar yang positif, hal tersebut bisa dengan mudah mempengaruhi wisatawan lain yang membaca pengalaman tersebut untuk ikut serta mengunjungi tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.

4) *Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)*

Dalam implementasi kebijakan pengembangan program pariwisata Kabupaten Ciamis letak pengambilan keputusan sangat terpusat pada pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis disamping adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta *stakeholders* (swasta). Di mana pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata serta teknologi pariwisata yang berkelanjutan. Penetapan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan pariwisata.

5) *Program Implementor (Pelaksana Program)*

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ciamis, yakni tepatnya Dispar Kabupaten Ciamis bekerjasama juga dengan pemerintahan di tingkat desa yang mana di desa tersebut terdapat tempat wisata yang dikelola oleh Dispar Kabupaten Ciamis. Misalnya, Pemerintahan Desa Panjalu dengan tempat wisatanya Situ Lengkong Panjalu, Pemerintahan Desa Kawali dengan tempat wisata Situs Astana Gede Kawali serta Pemerintahan Desa Karangkamulyan yang memiliki tempat wisata Situs Karangkamulyan.

Melihat hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksana program pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis ialah kerjasama Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pemerintah tingkat desa yang juga memiliki potensi wisata di Kabupaten Ciamis.

6) *Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan)*

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumberdaya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk menyelesaikan pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tertentu, dalam hal ini ialah program pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis. Sumberdaya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efisien dan efektif.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjelaskan kebijakan tersebut.

2) *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis Berdasarkan Dimensi Content of Policy*

Berikut ini merupakan indikator dari konteks kebijakan menurut Grindle yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis.

1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)*

Dalam hal ini Dispar Kabupaten Ciamis sudah menciptakan strategi terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Hal ini antara lain;

- a) Pengendalian dan perlindungan sumberdaya wisata.
- b) Penetapan Kawasan strategis pengembangan pariwisata.
- c) Perancangan kegiatan pengembangan produk pariwisata melalui pengembangan wisata, *calendar of event* dan *festival*.

2) *Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)*

Untuk pengelolaan pariwisata dari Kabupaten Ciamis sendiri Dispar kab Ciamis tentunya banyak bekerjasama dengan beberapa stakeholders maupun pemerintahan tingkat desa di mana di desa tersebut terdapat tempat wisata yang dikelola oleh Dispar kab Ciamis.

Di Kabupaten Ciamis sendiri pariwisata sebenarnya merupakan industri yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor lainnya, seperti pendidikan, kebudayaan, teknologi, perdagangan dan perindustrian, perbankan, dan keamanan. Keterkaitan tersebut dapat berbentuk penyediaan produk-produk dan jasa layanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata (*tourism products*) atau bisa disebut keterkaitan langsung, maupun dalam bentuk keterkaitan tak langsung seperti, pembinaan pengrajin yang dilakukan oleh instansi di luar pariwisata, atau perluasan dan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan bentuk lainnya.

3) Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal ini juga merupakan bagian penting dari proses implementasi kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian Program Pengembangan Pariwisata agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdayaguna. Untuk pelaksanaan program pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis tentunya terkoordinasi dengan baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta tingkat unit masyarakat atau tingkat desa. Semua elemen atau para pelaksana tersebut tentunya memiliki tupoksi masing-masing dalam melaksanakan perannya demi terwujudnya pariwisata Kabupaten Ciamis yang menarik banyak minat wisatawan.

3) Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis

- 1) Berkaitan dengan isi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis sangat berkaitan dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam hal ini menciptakan kolaborasi antara ketiga unsur tersebut dirasa masih sulit dibangun oleh karena beberapa hal. Mengingat bahwa instansi pemerintahan ini bukanlah lembaga yang mencari profit sehingga mereka tidak memiliki saingan usaha yang menyebabkan dalam melaksanakan tugas pun cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sektor swasta yang lebih gesit dalam bekerja karena terbiasa mengejar target, pun dengan adanya beberapa perbedaan persepsi lainnya. Begitu pula di dalam masyarakat yang terkadang masih banyak masyarakat yang justru kontra terhadap pemerintah sehingga sulit menciptakan kolaborasi atau kerjasama antara ketiganya.
- 2) Hal lain yang menjadi hambatan dalam implementasi pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis ialah kurangnya sumber daya manusia yang cukup mempunyai. Di Kabupaten Ciamis sendiri sudah ada banyak daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang bagus, namun masih kurang dalam pengelolaannya sehingga kurang menarik minat wisatawan atau masyarakat. Kurangnya pengelolaan terhadap daerah potensi wisata ini disebabkan karena kekurangan sumber daya manusia sebagai pengelolanya.
- 3) Selain itu, di beberapa tempat wisata di Kabupaten Ciamis masih belum tersedianya daya tarik dan atraksi wisata pendukung pariwisata yang bisa menarik minat berkunjung para wisatawan ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis.
- 4) Kurangnya sosialisasi atau pun promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ciamis terutama kepada sekolah-sekolah dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.
- 5) Dari masyarakatnya sendiri pun masih kurangnya pemahaman mengenai peran mereka dalam salah satu pilar pengembangan industri kepariwisataan.

4) Upaya-Upaya Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis

- 1) Melakukan pembahasan dan koordinasi antara pihak pemerintah/Dinas Pariwisata dengan masyarakat atau pun swasta/*stakeholders* untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Serta menggiatkan kembali koordinasi secara intens.
- 2) Mengadakan pelatihan bagi masyarakat sehingga menjadi SDM yang unggul dalam rangka pengelolaan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.
- 3) Membuat suatu rencana strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis yang jelas dan mempunyai skala prioritas terhadap beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang perlu dikedepankan dan didahulukan, terutama terkait dengan atraksi wisata.
- 4) Dengan menggiatkan kembali kegiatan promosi wisata yang dilakukan baik melalui media sosial maupun dengan membuat beberapa kegiatan yang dilakukan di objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.
- 5) Memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa peran mereka sangat penting juga dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Misalnya dengan membuat suatu kelompok penggiat wisata yang berperan untuk memberikan sosialisasi dan juga pemberdayaan bagi masyarakat sekitar yang berafiliasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis selaku penanggung jawabnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain, 1) kurangnya koordinasi / kolaborasi diantara pihak pemerintah Kabupaten Ciamis, masyarakat, serta *stakeholders*; 2) kurangnya SDM yang mempunyai dalam pengelolaan objek pariwisata; 3) tidak adanya daya tarik wisata atau atraksi pendukung dalam rangka menarik minat wisatawan; 4) kurang adanya sosialisasi atau pun promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis; 5) kurang adanya pemahaman dari diri masyarakat akan peran penting mereka dalam industri kepariwisataan.
3. Ada pula upaya yang dilakukan dalam meminimalisir hambatan yang terjadi seperti misalnya; 1) menggiatkan kembali koordinasi antara pemerintah, masyarakat serta *stakeholders* secara lebih intens; 2) memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga menjadi SDM yang unggul yang mampu mengelola objek wisata di wilayah Kabupaten Ciamis; 3) Membuat suatu rencana strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis yang jelas dan mempunyai skala prioritas; 4) menggiatkan kembali kegiatan promosi wisata yang dilakukan baik melalui media sosial maupun promosi secara langsung; 5) membuat suatu kelompok penggiat wisata yang berperan untuk memberikan sosialisasi dan juga pemberdayaan bagi masyarakat sekitar yang berafiliasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis selaku penanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- KADIR, A. (1996). *Analisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Maharani, Rachmawati Dwi. (2014) *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Fauzi, P., Bakhri, S., & Ahmad, A. A. (2019). Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 77-94.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135-143.
- Ferdinan, Y. (2015). Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2123-2127.
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1), 33-44.
- Kurniawan, F. (2013). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 47-55.
- Kusumawardhani, D., Rostyaningsih, D., & Rengga, A. (2016). Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Wisata (Pantai Widuri) Kabupaten Pematang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 491-501.
- Pratama, S. A. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 489-497.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135-143.
- Purnaya, I. G. K., & Semara, I. M. T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 8(2), 1-10.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23-35.
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2014). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *Epigram*, 11(1).

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

SumberLainnya:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (perubahan ke II)*. Ciamis.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019*. Ciamis.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis. (2014). *Kabupaten Ciamis Dalam Angka 2014*. Ciamis.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. (2014). *Jawa Barat Dalam Angka 2013*. Jawa Barat.
- Chandra, Aditiawan. Promosi Wisata Daerah (2007). <http://www.kalisari.org/potensi/promosi-wisata-daerah>.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis. *Database daya tarik wisata, Situs Bersejarah & Benda Cagar Budaya Kabupaten Ciamis*.
- Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis. (2011). *Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011– 2031*. Ciamis
dispar.ciamiskab.go.id

PENGELOLAAN POTENSI WISATA CADAS NGAMPAR OLEH PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Heru Rahmat Hidayat¹, Tika Ermayanti², Siti Sopiah³

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail: herurahmathidayat@gmail.com

ABSTRAK

*Cadas Ngampar merupakan salah satu potensi wisata yang ada dikabupaten ciamis terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan potensi wisata cadas ngampar oleh Pemerintah Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa indikator permasalahan, diantaranya kurangnya minat pengunjung yang datang ke Objek Wisata Cadas Ngampar, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan Objek Wisata Cadas ngampar kurangnya pengelolaan dan pengembangan potensi cadas ngampar oleh Pemerintah Desa Gunungsari. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip Manajemen menurut George R. Terry yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dan studi lapangan melalui observasi serta wawancara. Sumber data dari penelitian ini berasal dari informan serta dokumendan buku-buku lain yang mendukung. Informan berasal dari Kepala Desa Gungsari, Ketua Karang Taruna Gunungsari, pengunjung sebanyak 5 orang dan masyarakat setempat sebanyak 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan potensiwisata Cadas Ngampar belum berjalan dengan optimal, di mana masih ada beberapa kendala seperti : struktur organisasi yang belum jelas, masih minimnya pengunjung yang datang, wahana hiburan yang masih belum lengkap. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa diantaranya mengadakan musyawarah antar pihak terkait untuk menemukan orang yang konsisten dalam pengelolaan objek wisata cadas ngampar, mempromosikan objek wisata cadas ngampar melalui sosial media, merencanakan perbaikan akses jalan dan menambah spot-spot menarik lainnya.*

Kata Kunci : *Pengelolaan Potensi Wisata Cadas Ngampar; BUMDes Bestari*

A. PENDAHULUAN

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian. Seperti halnya kekayaan yang dimiliki oleh desa Gunugsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis berupa objek Cadas Ngampar. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat sekitarnya. Dari pusat kota Ciamis, cadas ngampar berjarak sekitar 8 km atau sekitar 45 menit dengan roda dua atau roda empat. Informasi dari warga sekitar, Cadas Ngampar merupakan hamparan batu disekitaran sungai cileueur, tepatnya berada di kaki gunung sawal. Air sungai diarea tersebut sangat jernih dan segar di pandang mata. Selain itu kawasan tersebut menawarkan pemandangan alam,

hijaunya alam dan pesawahan yang sangat indah. Sayangnya, objek wisata cadas ngampar itu masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah desa setempat.

Pemerintah Desa Gunungsari hanya bertindak sebagai pengawas, terkait pengelolaan wisata tersebut diserahkan kepada pihak BUMDES. Berdasarkan informasi dari Ketua BUMDES Bestari, pihak BUMDES sedang mengupayakan untuk mengajukan objek wisata cadas ngampar kepada Dinas Pariwisata. Tetapi sampai saat ini, belum ada tindak lanjutnya terkait hal tersebut.

Secara rinci indikator-indikator permasalahan dalam Pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya minat pengunjung karena fasilitas disana masih kurang, contohnya seperti belum adanya spot-spot foto dan wahana hiburan lainnya masih belum lengkap. Sehingga pengunjung kurang tertarik untuk berkunjung.
2. Kurangnya SDM terkait pengelolaan, sehingga menghambat dalam pengelolaan objek wisata Cadas Ngampar.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan objek wisata Cadas Ngampar, sehingga berakibat pada perkembangan dan kemajuan objek wisata Cadas Ngampar yang tertinggal dari objek wisata lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu pada pendekatan deskriptif.

Denzim dan Lincoln (Moleong, 2017:05) tentang penelitian kualitatif mengemukakan bahwa "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, penulis masih mempersoalkan latar belakang ilmiah dengan maksud hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara pengamatan dan pemanfaatan dokumen".

Menurut David Williams (Moleong, 2017:05) menulis bahwa: "penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah".

Nazir (2011:54) tentang metode deskriptif mengemukakan bahwa "Metode deskriptif adalah untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana didalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasi bias dan memaksimalkan rehabilitasi. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen".

Sedang Fokus kajian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi :

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Actuating (Penggerakan)
4. Controlling (Pengawasan)

a. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa ungkapan, kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini meliputi para pegawai Desa Gunungsari, anggota BUMDes, masyarakat sekitar dan wisatawan melalui observasi dan wawancara.

Data sekunder adalah dokumen berupa Peraturan DesaGunungsari, buku, artikel yang membahas tentang Pengelolaan Potensi Wisata.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya.

1. Teknik Observasi

Teknik ini memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang narasumber, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati. Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory-in-use*) dan sudut pandang narasumber yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau survei.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012:186). Adapun Narasumber dalam melakukan wawancara adalah Ketua Karang Taruna selaku Pengelola yang terlibat langsung, Staf Desa. Masyarakat Sekitar dan Wisatawan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada narasumber atau tempat, dimana narasumber bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Sukardi, 2010:81).

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam studi pustaka penelitian ini, peneliti menggunakan sumber buku-buku mengenai metodologi penelitian, kepariwisataan, sata sekunder dari Instansi dan jurnal.

b. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapihkan data yang telah terkumpul, melalui kegiatan-kegiatan editing, koding dan tabulasi.

- a. Editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengisian data.
- b. Koding, yaitu proses identifikasi dan klarifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti.
- c. Tabulasi, adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul dalam tabel induk penelitian.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jadi

bentuk analisis ini merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau angka-angka lainnya.

Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai strategi pengembangan serta pengelolaan Potensi Wisata Cadas Ngampar Oleh Pemerintah Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian semisal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alaminya dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cadas Ngampar terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Objek Wisata Cadas Ngampar dikelola oleh BUMDes Bestari Desa Gunungsari dan Karang Taruna, serta Desa sebagai pengawas. Pendapatan yang dihasilkan dari masuknya pengunjung ke Objek Wisata Cadas Ngampar dikelola oleh BUMDes Bestari, kemudian bagi hasil dengan Pemerintah Desa Gunungsari sebagai pengawas. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Desa di Desa Gunungsari yang merupakan sumber anggaran keuangan Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Akses jalan menuju ke Objek Wisata Cadas Ngampar dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Sehingga memudahkan para pengunjung untuk berwisata dan menikmati keindahan alam yang masih asri. Disana juga disediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung, diantaranya terdapat warung-warung yang menyediakan berbagai makanan, disediakan lahan parkir. Pengelolaan tersebut dapat dikaji menggunakan prinsip-prinsip manajemen yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling).

Aspek perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Bestari selaku pengelola Objek Wisata Cadas Ngampar yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari sektor pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis untuk pengembangan Objek Wisata Cadas Ngampar yang lebih jauh lagi. Sebagai perencanaan lain pihak BUMDes merencanakan perbaikan di sektor wahana yang menunjang kebutuhan pengunjung sebagai hiburan yang tersedia di Objek Wisata Cadas Ngampar. Pengorganisasian dalam pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar belum maksimal dikarenakan belum adanya struktur organisasi yang mengikat dan jelas serta belum terstruktur. Struktur organisasi yang belum dibuat bagan serta adanya rangkap jabatan pengelola BUMDes dengan pengelola Karang Taruna. Penggerakan yang dilakukan oleh BUMDes Bestari yaitu melakukan komunikasi dan bersinergi dengan pihak Desa selaku pengawas terkait pemberdayaan anggota BUMDes dan Karang Taruna untuk mengelola Objek Wisata Cadas Ngampar. Pengawasan pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Disamping mengawasi, Pemerintah Desa juga memberikan anggaran untuk pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar. Anggaran yang dikeluarkan oleh pihak Desa untuk Pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar sebesar 88 Juta. Pengawasan yang dilakukan oleh Desa terhadap Objek Wisata Cadas Ngampar yaitu melakukan pengawasan setiap satu minggu sekali.

Adapun dalam pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar terdapat hambatan-hambatan antara lain sebagai berikut : 1.) Struktur organisasi BUMDes Bestari yang masih belum jelas dan masih belum terdapat bagan struktur organisasi. 2.) Masih minimnya pengunjung yang datang ke Objek Wisata Cadas Ngampar karena masih kurangnya informasi terkait objek wisata tersebut. 3.) Wahana hiburan yang masih belum lengkap, sehingga para pengunjung yang berwisata ke Cadas Ngampar merasa kurang puas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut diantaranya : 1.) Mengadakan musyawarah untuk mencari orang yang sekiranya bisa konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diduduki dalam kepengurusan BUMDes. 2.)

Mempromosikan objek wisata Cadas Ngampar di media sosial seperti facebook, untuk menarik antusiasme pengunjung³.) Merencanakan perbaikan akses jalan dan menambah spot-spot foto, flying fox, untuk lebih menarik pengunjung.

D. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : Objek Wisata Cadas Ngampar dikelola oleh BUMDes Bestari, Karang Taruna, dan Pemerintah Desa sebagai Pengawas. Dengan awal perencanaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari sektor pemerintah Daerah. Kepengurusannya dilakukan secara kondisional oleh BUMDes dan Karang Taruna dengan harapan terjalannya sinergitas antara BUMDes dan Karang taruna untuk pembangunan selanjutnya yang lebih baik. Dalam Pengelolaan wisata cadas ngampar juga dilakukan pengawasan oleh pihak Desa yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk laporan yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran objek wisata tersebut.

Dalam pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar ini terdapat hambatan-hambatan dalam pengorganisasiannya yang belum maksimal dikarenakan belum adanya struktur organisasi berupa bagan dan pembagian kerja yang jelas, sehingga mengakibatkan adanya rangkap jabatan pengelola BUMDes dengan pengurus Karang Taruna. Selain itu, pengunjung yang datang ke objek wisata cadas ngampar ini dapat dikatakan masih minim dikarenakan kurangnya informasi mengenai objek wisata tersebut dan juga wahana hiburan yang masih terbatas sehingga pengunjung merasa kurang puas. Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Bestari dalam pengembangan objek wisata Cadas Ngampar yaitu menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

b. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: Pengelola objek wisata (BUMDes dan Karang Taruna) seyogyanya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Desa selaku pengawas untuk mensinergikan program-program yang berkaitan dengan Pengelolaan Objek Wisata Cadas Ngampar. Sebaiknya dibuat bagan struktur organisasi BUMDes secara jelas, kemudian pengelola hendaknya lebih mengembangkan wahana wisata agar menarik minat pengunjung, serta mempromosikannya ke berbagai akun sosial media. Sebaiknya pihak pengelola lebih pro aktif atau meninjau kembali terkait pengajuan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis supaya ada tindak lanjut dan kejelasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku-buku:

- Hasibuan, Malayu. P. 2011. *Manajemen :Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi cetakan ke-9.* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi ke-3.* Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Manullang. 1976. *Dasar-Dasar Manajemen.* Medan : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pitana, I Gede., I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Suwantoro, Gamal. 2009. *Dasar-Dasar Pariwisata.* Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Sumber dari jurnal :

- Fransiska Roslila Eva Purnama Pardede, Ida Bagus Suryawan. (2016). Strategi Pengelolaan Kabupaten Samosir Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 4 No. 1.
- Gede, Mahsun, Gadu. (2015). Pengelolaan Manajemen Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lombok Barat, Jurnal Vol. 9 No. 1, Akademi Pariwisata Mataram.
- Yudaswara. (2015). Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, JUMPA Vol. 2 No.1.

**PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMANFAATAN POTENSI WISATA
GUNUNG SUSURU DESA KERTABUMI KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Siti Nurjanah¹, Oki Reza Kurnia²

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

e-mail : sn74536@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk memajukan modal sosial oleh Desa Kertabumi dan Masyarakat Kertabumi dalam pemanfaatn potensi wisata.Tujuan dari penelitian ini untuk sejauh mana pemanfaatan modal sosial dan pemanfaatan potensi wisata desa tersebut dan untuk mendapatkan merekomendasikan kepada masyarakat atau pihak-pihak pemangku kebijakan desa yang bersangkutan. Namun dalam penguatan modal sosial dan pemfaatan potensi wisata gunung susuru terdapat hambatan-hambatan yang terjadi yaitu, kurang adanya sosialisasi dari dari Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Kertabumi ketika akan melakukan Upacara Adat Merlawu, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang acara tersebut, kurangnya peran serta anak muda dari pihak Karang Taruna di Desa Kertabumi dalam mengikuti Upacara Adat Merlawu yang dilakukan di Wisata Gunung Susuru di Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, serta kerang adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa lain tentang adanya Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru di Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupen Ciamis yaitu, Kepala Desa dan Perangkat Desa memberikan informasi kepada RT, RW dan Kepala Dusun mengenai Upacara Adat Merlawu 10 hari sebelum diadakannya Upacara Adat Merlawu tersebut supaya masyarakat Desa baik anak muda maupun orang tua bisa mengikuti kegiatan Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah menggerakkan Karang Taruna yang di Desa Kertabumi untuk ikut serta dalam Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis dan Kepala Desa Kertabumi melakukan koordinasi dengan Kepala Desa lain tentang akan diadakannya Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis supaya masyarakat dari Desa lain pun bisa hadir.

Kata Kunci : *Penguatan Modal Sosial dan Pemanfaatan Potensi Wisata Gunung Susuru*

A. PENDAHULUAN

Desa Kertabumi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang terbagi dalam 4 Dusun, yaitu, Dusun Sukamulya disebelah utara, Dusun Nagrog disebelah Barat, Dusun Desa disebelah selatan, dan Dusun Bunder di sebelah Tenggara. Batas wilayah administratif Desa Kertabumi dengan Desa lainnya di Kecamatan Cijengjing yaitu Desa Karangkamulyan disebelah Timur, Desa Karanganyar disebelah Barat, Desa Danasari disebelah Utara, Desa Bojong dan Desa Cijengjing dibelah Selatan. Sedangkan batas Kecmatan Cijengjing yaitu Kecamatan Sukadana di Utara, Kecamatan Cimaragas di Selatan, Kecamatan Cisaga di Timur dan Kecamatan Ciamis di Barat.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Sarwono (2006:79) menyatakan desain deskriptif adalah sebagai berikut:

Desain Deskriptif yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Desain penelitian merupakan rancangan bagaimana suatu penelitian dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut maka desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif hal ini dikarenakan penulis akan menggambarkan atau menjelaskan tentang Penguatan Modal Sosial Dalam Pemanfaatan Potensi Wisata Situs Gunung Susuru Di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Fokus kajian penelitian ini adalah Penguatan Modal Sosial Dalam Pemanfaatan Potensi Wisata Situs Gunung Susuru Di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Secara ringkas modal sosial mengandung pokok-pokok pengertian tentang (Harpham dalam Suryanto, 2010):

- 1) Jejaring sosial, jejaring pribadi yang bersifat sukarela.
- 2) Keterlibatan dan partisipasi kewargaan dan penggunaan jejaring sipil.
- 3) Identitas kewargaan lokal, rasa memiliki, solidaritas dan kesetaraan dengan anggota kelompok masyarakat.
- 4) Prinsip timbal balik dan nilai kooperasi, rasa berkewajiban untuk menolong orang lain dan percaya diri kala mendampingi.
- 5) Dan kepercayaan dalam komunitas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan, kata-kata, dan kalimat. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Supranto (2007:120) bahwa: “Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti”. Selanjutnya Supranto (2007:120) menyatakan bahwa: “Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian”.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Kertabumi dan petugas penjaga situs Gunung Susuru melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Menurut Moleong (2009:145) sumber data adalah “Segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masalah penelitian”. Lebih lanjut Moleong (2009:147) menjelaskan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dari sumber itu memperoleh keterangan yang berguna untuk mendukung proses deskripsi dan analisa masalah penelitian.

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

- a. Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2009:132).

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data:

- 1) Kepala Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- 2) Sekretaris Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- 3) Penjaga situs Gunung Susuru sebanyak 2 orang.
- 4) Pengunjung situs Gunung Susuru sebanyak 5 orang.

Dengan demikian penulis mengambil informan sebanyak 9 orang.

- b. Dokumen

Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari masalah tertentu, adapun dokumen yang dipakai peneliti

yaitu berupa buku, artikel, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

Sumber data dan jenis data terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (Moleong, 2009:68). Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (Interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:72). Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, tujuan dilakukannya wawancara untuk mengetahui tujuan secara mendalam mengenai Penguatan Modal Sosial Dalam Pemanfaatan Potensi Wisata Situs Gunung Susuru Di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

2) Observasi.

Basrowi dan Suwandi, (2008:68), menyatakan bahwa observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Menurut Mulyana (2013:82), observasi atau pengamatan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta menekankan pada logika penemuan, yaitu proses yang bertujuan menyarankan konsep-konsep atau membangun teori berdasarkan realitas nyata manusia. Sedangkan pengamatan tidak berperan serta difokuskan pada proses pengamatan yang hanya melibatkan satu pihak, yaitu si pengamat itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu sebagai pengamat, tanpa turut melibatkan interaksi dari narasumber. Observasi dilakukan untuk melengkapi analisis penelitian.

3) Dokumentasi.

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel (dapat dipercaya) kalau di dukung oleh dokumen yang telah ada (Sugiono, 2009:71).

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Basrowi dan Suwandi, 2008:84). Letak urgensi dan kekuatan dari dokumentasi adalah sebagai alat validasi dan penguat data, khususnya yang tidak bisa di tampilkan dengan deskriptif atau uraian kata-kata. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan disajikan berupa pengambilan gambar (foto) dari narasumber.

Dalam metode kualitatif, analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (intangible). Menurut Istijanto, (2008:76), analisis data kualitatif bersifat hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seuruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dibuat sambil melakukan coding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansive dengan mengunakan metode tertentu (Moleong, 2009:69).

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi suatu kategori tertentu. Dalam proses ini, data diklasifikasikan menjadi tema-tema inti.

c. Keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan (terus prustworthiness) data di perlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini, keabsahan selalu di lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu (moleong,2009:70). Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya. Seperti ang dikutip oleh moleong dari dan zim, membedakan 4 macam triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temunya data yang menghubungkan diantara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan data skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan Penguatan Modal Sosial Dalam Pemanfaatan Potensi Wisata Situs Gunung Susuru Di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Tempat penelitian dilakukan di Situs Gunung Susuru yang bertempat di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih satubulan, terhitung mulai dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 29 Desember 2019.

C. PEMBAHASAN

Penguatan Modal Sosial dan Pemanfaatan Potensi Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kertabumi adalah sebagai berikut:

1) Upacara Adat Merlawu di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Di Kabupaten Ciamis, mempunyai berbagai tradisi yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat untuk memelihara warisan budayanya dari masing-masing tempat. Tidak hanya di Desa Kertabumi

tetapi diberbagai tempat diantaranya Astana Gede Kawali, Panjalu, Karangkamulyan dan Bojong Lopang yang masih memelihara tradisinya. Tradisi tersebut berlangsung turun temurun sebagai refleksi penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dunia atau petilasannya, diantaranya yaitu :

1. Di Karangkamulyan terdapat situs Pangcalikan
2. Di Astana Gede Kawali, peninggalan Raja Wastu Kencana dan juga Bupati Kawali
3. Di panjalu Makam Borosngora
4. Di Bojong Lopang Cisaga, Apun Pager Gunung (Dalem Singaperbangsa III) Bupati Galuh Kertabumi yang ke V

Kegiatan Upacara Adat Merlawu merupakan suatu tradisi warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing. Tidak hanya masyarakat Kertabumi saja yang mengikuti kegiatan tradisi ini, tapi sering kali masyarakat dari luar Desa Kertabumi juga ikut menghadiri pelaksanaan tradisi yang diadakan di Situs Gunung Susuru Desa Kertabumi. Kegiatan tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luar yang ingin mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi merlawu dari awal sampai akhir acara

Upacara Adat Merlawu merupakan kegiatan masyarakat untuk mengingat jasa para leluhur Desa Kertabumi dengan cara berziarah ke makam leluhur tersebut. Selain itu, upacara adat merlawu juga dapat diartikan membersihkan diri karena pada hari itu masyarakat yang hadir saling meminta maaf sebelum datangnya bulan suci Ramadhan atau biasanya disebut dengan acara mungghahan. Bagi masyarakat Islam Sunda acara mungghahan merupakan bentuk rasa hornat mereka dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan

Seiring dengan perkembangan zaman Mungghahan hanya diartikan sebagai makanmakan atau kumpul-kumpul bersama keluarga dan yang lainnya, tapi pada tradisi merlawu yang dikaitkan dengan mungghahan tersebut dijadikan sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi serta sebagai waktu untuk saling memaafkan diantara kaum Muslim terutama dengan kerabat, dengan maksud untuk membersihkan jiwa dari segala dosa manusia. Dari hal tersebut yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya tradisi Merlawu yaitu medoakan leluhur yang telah meninggal dunia dan saling meminta maaf diantara sesama manusia khususnya masyarakat Desa Kertabumi. Diharapkan untuk menyucikan jiwa dari dosa dengan sesama manusia, yang intinya untuk mempersiapkan diri memasuki Bulan Ramadhan. Masyarakat yang berziarah, umpamanya selain untuk mendoakan juga bermaksud menyucikan diri dan mengingatkan diri pada kematian.

Upacara Adat Merlawu, berasal dari kata Merlawu yaitu Lalawuh yang diartikan sebagai makanan hasil pertanian berupa umbi- umbian, kacang- kacangan dan labu. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian nama kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kertabumi pada Zaman Dulu. Tradisi tersebut dinamakan Merlawu pada saat seseorang yang memimpin jalannya kegiatan di Desa Kertabumi dalam pidatonya menyebutkan kata “Lalawuh”. Saat itu jamuan makan yang digunakan pada kegiatan tersebut merupakan makanan hasil pertanian, oleh sebab itu maka kegiatan tersebut dinamakan Merlawu. Masyarakat membawa makanan dari hasil pertaniannya sendiri kemudian pada saat kegiatan merlawu dikumpulkan untuk nantinya dimakan bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya. Tradisi merlawu merupakan bentuk kegiatan yang digelar sejak zaman Galuh Kertabumi. Mulai dari Pangeran Ranga Permana yang kemudian bergelar Prabu Dimuntur (1585-1602 M) yang makamnya ada di Dusun Sukamulya yang berbatasan dengan Dusun Bunder Desa Kertabumi. Setelah wafatnya Prabu Dimuntur, masyarakat kertabumi setiap tahunnya selalu berziarah ke makamnya untuk mendoakaan dan mengenang jasa-jasanya. Hal ini menjadi kebiasaan dan lahir sebuah tradisi Merlawu yang masih dilakukan setiap tahunnya sampai saat ini.

Tradisi Merlawu adalah ritual yang dilaksanakan pada bulan Ruwah, 7 (tujuh) hari sebelum Ramadhan, pada hari senin atau hari kamis di bulan itu yang dilaksanakan didua tempat yaitu di Situs Makam Prabu Dimuntur dan di Situs Gunung Susuru. Upacara Merlawu yang dilaksanakan oleh

masyarakat Desa Kertabumi diselenggarakan pada bulan Ruwah dimaksudkan bulan tersebut merupakan bulan sebelum bulan suci Ramadhan. Diharapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadhan khususnya bagi masyarakat Desa Kertabumi dapat saling membersihkan diri dengan meminta maaf diantara yang satu dengan yang lainnya, menjadikan tradisi upacara adat merlawu tersebut merupakan kegiatan yang tepat sebagai suatu wadah berkumpulnya masyarakat Desa Kertabumi dalam satu tempat dan bersma-sama mengikuti kegiatan budaya.

2) Prosesi Pelaksanaan Upacara Adat Merlawu yang dilakukan Masyarakat Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Upacara adat Merlawu yang dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Desa Kertabumi bersifat sosial religius sehingga memerlukan perhitungan waktu yang tepat untuk melaksanakan prosesi kegiatan merlawu. Kegiatan tersebut sangat tepat apabila bertepatan dengan hari-hari sebelum datangnya bulan Suci Ramadhan karena kebiasaan pada masyarakat Islam Sunda pada umumnya hari-hari sebelum datangnya bulan Ramadhan atau yang biasanya disebut dengan munggahan merupakan waktu yang sering dipakai untuk berkumpul dengan keluarga, kerabat dan teman.

Kesepakatan pemilihan waktu pelaksanaan upacara adat Merlawu dirundingkan bersama dalam sebuah forum melalui pengawasan Pemerintahan Desa Kertabumi yang tergabung dalam sebuah lembaga yaitu Paguyuban Prabudimuntur yang mempunyai peran penting dalam programnya untuk melestarikan Cagar Budaya serta peninggalan sejarah yang ada di Desa Kertabumi termasuk yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Upacara Adat Merlawu.

Prosesi Upacara Adat Merlawu yang sekarang terbagi kedalam 3 (tiga) kegiatan inti yaitu :

1. Ziarah ke Makam Prabu Dimuntur Prosesi ini dimulai dari waktu matahari mulai muncul sekitar pukul 6.30 WIB, masyarakat mulai mendatangi makam Prabu Dimuntur untuk berziarah. Ditempat tersebut yang menjadi ketua atau pupuhu setempat (biasanya oleh juru pelihara situs) membuka acara dan memimpin acara do'a bersama atau yang biasa disebut tawassul. Tawassul secara etimologi berarti mengambil perantara (wasilah) atau mendekat.
 2. Beber Sejarah, Acara Beber Sejarah dipimpin oleh juru pelihara Gunung Susuru. Beber sejarah tersebut bisa diartikan membeberkan, membuka atau menceritakan kembali sejarah khususnya sejarah di Desa Kertabumi pada masa Kerajaan Galuh Kertabumi. Hal ini bertujuan untuk mengingat kembali tentang sejarah Desa Kertabumi dan menambah pengetahuan kepada warga yang hadir pada acara Merlawu tersebut tentang bagaimana sejarah Desa Kertabumi khususnya pada masa Kerajaan Galuh Kertabumi.
 3. Balaecrakan, merupakan kata dari bahasa sunda yang bisa diartikan berkumpul untuk makan bersama. Acara balaecrakan dilaksanakan di kawasan situs Gunung Susuru, dengan hidangan yang disajikan berupa makanan dari hasil pertanian yang dipersiapkan warga dan dimakan bersama pada saat kegiatan merlawu. Sekarang memang bukan hanya hidangan dari hasil pertanian saja atau lalawuh saja yang disajikan, masyarakat pun menambahkan makan lainnya yang dimakan saat acara yaitu seperti makanan dalam hidangan perasmanan saat hajatan berupa nasi dan lauk pauknya, makanan cepat saji yang manis manis dan yang lainnya.
- 3) Makna Upacara Adat Merlawu Bagi Masyarakat Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Upacara adat Merlawu ini merupakan bentuk perwujudan dari rasa sosial yang tinggi dikalangan masyarakat Kertabumi. Rasa menghormati kepada para Leluhur dan senantiasa menjalin kerukunan dalam hidup bermasyarakat menciptakan keselarasan, keakraban dan eratnya solidaritas antar warga.

Selain itu, upacara adat merlawu ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan nikmat dan Rijkinya, diberikan hasil panen yang melimpah, diberikan keamanan, kenyamanan hidup dalam lingkungannya.

Dalam prosesi upacara adat merlawu ini terdapat makna yang terkandung dan begitu besar manfaatnya bagi masyarakat, yaitu:

1. Bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya Riji dan kedamaian dalam hidup di lingkungan Desa Kertabumi.
2. Merupakan perwujudan dari rasa sosial yang tinggi dikalangan masyarakat. Terencana dari sikap kerukunan diantara warga yang terjalin dengan baik, sehingga menjalin tali persaudaraan yang baik.
3. Sarana berbuat kebaikan dan meningkatkan keimanan dengan melakukan ziarah kubur dan tawasil kepada leluhur yang telah meninggal dan dimakamkan di Desa Kertabumi.
4. Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan atau yang biasa disebut dengan munggahan. Sebagai ajang menyucikan diri dari dosa, dengan cara saling memaafkan satu sama lain sebelum menjalankan ibadah di Bulan Ramadhan.
5. Menjaga dan melestarikan tradisi turun temurun yang telah diwariskan oleh para leluhur.
6. Mengenalkan kawasan Situs Gunung Susuru pada masyarakat umum sebagai tempat bersejarah peninggalan Kerajaan Galuh Kertabumi. Serta menambah wawasan mengenai sejarah Galuh Kertabumi, agar kita senantiasa dapat melestarikan peninggalan-peninggalan yang merupakan warisan budaya dan merupakan harta yang tidak ternilai harganya.

Upacara Adat Merlawu mengandung nilai-nilai positif dalam kebudayaannya. Nilai yang terkandung didalamnya berupa nilai religius, kesatuan, gotong royong dan pelestarian budaya.

Hambatan-Hambatan Dalam Penguatan Modal Sosial Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.

1. Kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Kertabumi ketika akan melakukan Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang acara tersebut.
2. Kurangnya peran serta anak muda dan juga karang taruna di Desa Kertabumi dalam mengikuti Upacara Adat Merlawu yang dilakukan di wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.
3. Kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa lain tentang adanya Upacara Adat Merlawu yang dilakukan di Wisata Gunung Susuru Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis. Karena Upacara Adat Merlawu bebas didatangi oleh siapapun.

Upaya-Upaya yang sudah Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Penguatan Modal Sosial dan Pemanfaatan Potensi Wisata Gunung Susuru.

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memberikan informasi kepada RT, RW dan Kepala Dusun mengenai Upacara Adat Merlawu 10 hari sebelum diadakannya Upacara Adat Merlawu tersebut supaya masyarakat Desa baik anak muda maupun orang tua bisa mengikuti kegiatan Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis tersebut.
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah menggerakkan Karang Taruna yang di Desa Kertabumi untuk ikut serta dalam Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.
3. Kepala Desa Kertabumi melakukan koordinasi dengan Kepala Desa lain tentang akan diadakannya Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis supaya masyarakat dari Desa lain pun bisa hadir.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Upacara adat Merlawu ini merupakan bentuk perwujudan dan dari rasa sosial yang tinggi dikalangan masyarakat Kertabumi. Rasa menghormati kepada para Leluhur dan senantiasa menjalin kerukunan dalam hidup bermasyarakat menciptakan keselarasan, keakraban dan eratnya solidaritas antar warga.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan modal social dalam acara Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis diantaranya yaitu kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Kertabumi ketika akan melakukan Upacara Adat Merlawu, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang acara tersebut, kurangnya peran serta anak muda dari pihak Karang Taruna di Desa Kertabumi dalam mengikuti Upacara Adat Merlawu yang dilakukan di Wisata Gunung Susuru di Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, serta kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa lain tentang adanya Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru di Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan modal social Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru diantaranya mengadakan Upacara Adat Merlawu setiap setahun sekali yaitu, Kepala Desa dan Perangkat Desa memberikan informasi kepada RT, RW dan Kepala Dusun mengenai Upacara Adat Merlawu 10 hari sebelum diadakannya Upacara Adat Merlawu tersebut supaya masyarakat Desa baik anak muda maupun orang tua bisa mengikuti kegiatan Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah menggerakkan Karang Taruna yang di Desa Kertabumi untuk ikut serta dalam Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis dan Kepala Desa Kertabumi melakukan koordinasi dengan Kepala Desa lain tentang akan diadakannya Upacara Adat Merlawu di Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis supaya masyarakat dari Desa lain pun bisa hadir.

b. Saran

Dengan adanya Penguatan Modal Sosial dan Pemanfaatan Potensi Wisata Gunung Susuru Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis. Pemerintah desa selaku pengelola utama harus mempertahankan eksistensi dari Obyek Wisata Gunung Susuru dan membangun Obyek Wisata tersebut menjadi lebih modern dan maju kedepannya agar para pengunjung menjadi lebih tertarik untuk berwisata ke Gunung Susuru maka pemerintah desa harus bisa :

1. Kami menyarankan agar Pemerintah Desa Kertabumi bisa lebih transparan kepada masyarakat ketika akan mengadakan Upacara Adat Merlawu.
2. Kami menyarankan agar anak muda dan Karang Taruna Desa Kertabumi lebih ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Upacara Adat Merlawu.
3. Kami menyarankan Pemerintah Desa Kertabumi lebih jelas memberikan informasi kepada Desa lain/ Desa tetangga tentang akan diadakannya Upacara Adat Merlawu serta disekitaran gunung susuru didirikan tempat istirahat atau warung, agar masyarakat yang datang berkunjung bisa membeli makanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Ridwan. 2014. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung : Alfabeta.

Sedarmayanti. 2014. *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.
Aprilia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

B. Dokumen :

Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Jurnal Prasetyo Dandy E, Zulfikar Firman, dkk. *Penguatan Modal Sosial Sebagai upaya pengembangan ekonomi dan kapasitas rumah tangga nelayan berkelanjutan di Desa Pangandaran*. 2016. Omni akuatika research article : surya university.

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.6 (2018) : 1647-1666. *Peran Modal Sosial. Potensi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat pada Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Lebih*.

Jurnal Sylva Lestari Vol. 4 No. 2. April 2016 (89-100). *Modal Sosial Pada Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Magrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung*.

ISBN 978-623-90353-2-7



9 786239 035327